

**Seri Publikasi Ilmiah
Islam Melayu Nusantara**

**CORAK MELAYU
DALAM PEREKONOMIAN
KESULTANAN PALEMBANG
ABAD XVII–XIX**

Dr. Hoirul Amri, M.E.Sy.



**Dilarang memperbanyak, mencetak, menerbitkan
sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit**

**Ketentuan Pidana
Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Seri Publikasi Ilmiah Islam Melayu Nusantara

**CORAK MELAYU DALAM PEREKONOMIAN KESULTANAN
PALEMBANG ABAD XVII-XIX**

Penulis : Dr. Hoirul Amri, M.E.Sy.
Editor : Dr. Muhammad Noupal, M.Ag.
Layout : Nyimas Amrina Rosyada
Desain Cover : Ismoko

Hak Penerbit pada **Noer Fikri Offset bekerja sama dengan UIN
Raden Fatah Palembang**
Anggota IKAPI (No. 012/SMS/13)

Dicetak oleh:
CV. Amanah
Jl. Mayor Mahidin No. 142
Telp: (0711) 366 625
Palembang – Indonesia 30126
E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan I : Agustus 2022
16,25 x 25 cm
viii, 301 hlm

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis
All right reserved

ISBN : 978-602-447-957-2

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan buku ini. Sesuai dengan judul, buku ini membahas tentang corak Melayu dalam perekonomian Kesultanan Palembang Abad 17-19 M. Buku ini awalnya adalah disertasi penulis pada Program Doktor Peradaban Islam di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Penulis menyadari bahwa penulisan buku ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penghargaan yang tinggi disertai doa, penulis menyampaikan ucapan rasa hormat serta terima kasih disampaikan kepada Prof. Dr. Nyayu Khodijah, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; Prof. Dr. Duski Ibrahim, M. Ag., Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sekaligus sebagai Promotor; dan Dr. Muhammad Adil, M.A selaku co-promotor yang telah memberikan bimbingan, koreksi, arahan dan masukan-masukan yang sangat penting bagi penulis dalam menyelesaikan buku ini.

Juga disampaikan ucapak terima kasih kepada Dr. Muhammad Noupal, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; semua dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah banyak memberikan ilmunya kepada peneliti selama menimba ilmu dan pengalaman di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tercinta ini, sehingga dapat membuka cakrawala serta wawasan keilmuan. Teruntuk semua tenaga kependidikan, terutama Staf Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang telah menyediakan buku-buku, literatur sehingga membantu kelancaran penyelesaian buku ini.

Ucapan khusus penulis sampaikan kepada Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan serta para dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang atas bantuan dan support yang mereka berikan

kepada penulis selama menjadi mahasiswa di program S3 ini. Juga kepada teman-teman mahasiswa Program S3 angkatan 2017/2018 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah memberikan kritik, saran serta masukan-masukan baik selama masa perkuliahan maupun penyempurnaan proses hasil penelitian dalam rangka penyelesaian buku ini, juga masih banyak pihak lain yang tentunya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan kontribusi masa penelitian sampai penyelesaian buku.

Dalam penyusunan dan penyelesaian buku ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dukungan dan semangat dari istri dan anak-anak tercinta telah memberikan kekuatan luar biasa kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala dan memberikan rahmat kepada mereka. Doa yang sama penulis ucapkan untuk Bapak dan Ibu yang telah mendidik sejak kecil dengan doa dan pengajaran yang tidak pernah terlupakan. Studi lanjut terkait dengan bidang Agama Islam, merupakan bagian dari amal bakti, disertai doa semoga Allah SWT memberikan pengampunan dan melimpahkan Rahmat-Nya kepada beliau.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penelitian dan penulisan buku ini masih jauh dari sempurna banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran bagi penyempurnaan dan pengembangan hasil penelitian ini dengan senang hati penulis mohonkan.

Palembang, Juli 2022

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Fokus Kajian	10
B. Teori Ekonomi Islam	17
C. Teori Ekonomi Melayu	18
D. Teori Asimilasi (Islam-Melayu).....	20
BAB II. Perekonomian dalam Masyarakat Melayu	23
A. Tradisi Melayu dalam Lintasan Sejarah	23
B. Sistem Perekonomian Bangsa Melayu.....	29
1. Nilai-Nilai Filosofis	34
2. Pola Hubungan Kerjasama Produksi dan Distribusi	38
3. Peran Lembaga Adat dalam Sistem Ekonomi Melayu	48
C. Perekonomian Bangsa Melayu dalam Sistem Ekonomi Islam	54
D. Nilai-Nilai Ekonomi Bangsa Melayu dalam Ekspresi Seni	63
BAB III. Perekonomian Kesultanan Palembang Abad XVII-XIX	73
A. Sejarah Kesultanan Palembang	73
1. Keadaan Wilayah Kesultanan Palembang.....	82
2. Keadaan Penduduk Kesultanan Palembang	88
B. Sistem Ekonomi Kesultanan Palembang	93
C. Kelembagaan Perekonomian.....	112
D. Sektor-Sektor Ekonomi Produktif	119
E. Inovasi dan Kreativitas Masyarakat dalam Kerajinan Alternatif, Ekonomi Produktif.....	151

BAB IV. Ekonomi Politik Kesultanan Palembang Abad XVII dan XIX.....	165
A. Struktur Politik Ekonomi	165
B. Kebijakan Internal Masyarakat.....	175
C. Kebijakan di Luar Kesultanan	191
D. Kebijakan Masyarakat	197
E. Dampak Kebijakan Kesultanan	206
1. Aspek Pendapatan	211
2. Aspek Kesejahteraan dan Gaya Hidup	221
BAB V. Corak Melayu dalam Perekonomian Kesultanan Palembang	233
A. Proses dalam Teori Asimilasi Budaya.....	233
B. Faktor Pendorong dalam Teori Kepemimpinan	242
C. Dampak dari Teori Asimilasi dan Kepemimpinan	246
BAB VI. Penutup.....	265
A. Kesimpulan	265
Daftar Pustaka	275
Curriculum Vitae.....	299

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Penduduk berdasarkan etnik di Palembang.....	89
Tabel 3.2. Pertumbuhan Penduduk Palembang 1825-1864	90
Tabel 3.3. Realisasi Penjualan Timah Kesultanan Palembang kepada VOC tahun 1750-1790 M ...	133
Tabel 3.4. Impor Timah	134

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Bagan 4.1. Struktur Wilayah Pemerintahan Kesultanan Palembang	170
Bagan 4.2. Struktur dan Pranata Perekonomian Kesultanan Palembang	172



BAB I

PENDAHULUAN

Tulisan ini berusaha untuk mengungkap, menganalisis dan sekaligus menguatkan pandangan yang menyatakan bahwa Kesultanan Palembang Darussalam menerapkan sistem monopoli perdagangan yang terpusat di tangan pihak sultan sebagai sumber pendapatan negara terutama terkait perekonomian. Teori tersebut dikembangkan dan dikemukakan oleh beberapa pemikir ekonomi lainnya diantaranya Van Sevenhoven, De Roo de la faille,¹ J.W.J Wellan serta Masyhuri berusaha membuktikan keberhasilan monopoli perdagangan lada yang dilakukan Sultan Palembang dalam hubungan dengan pengaruh timbal balik antara perdagangan lada dan perubahan sosial-ekonomi.² Sistem monopoli perdagangan terutama komoditas lada dan timah yang dilakukan Sultan didukung oleh lembaga pemerintah sebagian besar pegawai istana, penguasa-penguasa dari pemerintah daerah terlibat langsung dalam monopoli perdagangan. Lembaga-lembaga tersebut seperti syahbandar, *raban* dan *jenang*, *pesirah*, *proatin*, beserta pembantunya memiliki peran ganda di samping pelaksana pemerintahan juga sekaligus sebagai pedagang.

Teori monopoli perdagangan ini dikembangkan juga oleh Supriyanto, menurutnya Sultan Palembang menerapkan sistem monopoli perdagangan sebagai sumber Perekonomian, rakyat diharuskan menanam-tanaman tertentu seperti lada untuk dijual kepada Sultan dengan harga yang telah ditentukan sebagai ganti pajak. Disamping itu Kesultanan Palembang melakukan monopoli terhadap barang-barang import seperti garam, pakaian, kain yang dibutuhkan oleh rakyat untuk

¹ P De Roo De La faille. *Dari Zaman Kesultanan Palembang*. Penerbit Bhratara Jakarta 1971 hlm. 48

² Masyhuri. *Perdagangan Lada dan Perubahan Sosial Ekonomi di Palembang 1790-1825*. Tesis S2 Tidak Diterbitkan Pada Universitas Indonesia. Jakarta th 1983 hlm 75

wilayah Kesultanan Palembang, apabila rakyat membutuhkan barang-barang import maka harus menukarkan produksi lada atau lainnya kepada Sultan.³ Menurut Van Sevenhoven, Sultan menerapkan sistem monopoli perdagangan dibantu oleh *raban* dan *jenang*. *Raban* dan *jenang* merupakan orang yang diberi oleh sultan beberapa marga atau dusun agar mereka dapat hidup dari padanya. Kondisi ini dapat terjadi baik di keluarga dekat sultan maupun sebagai menteri ataupun atas kemurahan Sultan secara khusus. *Raban* dan *jenang* bukan hanya sebagai pengumpul dan pemakai dari hasil marga atau dusun akan tetapi sebagai penguasa semua urusan.⁴

Dengan sistem *raban* dan *jenang* ini menurut Djohan Hanafiah merupakan sistem langsung antara pusat dan daerah yang menyebabkan ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat, dan kemudian kekuasaan pusat sangat tertanam kuat di daerah. Sultan mendapatkan kesempatan menguasai seluruh kekuatan politik dan ekonomi yang ada di ibukota. Sebagai konsekuensinya sentralisasi kekuasaan ini merupakan modal bagi Sultan untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan politiknya dalam hal ini adalah monopoli sistem ekonomi dan perdagangan.⁵

Teori ini dikembangkan juga oleh Nowiyanto menyatakan pola dan corak menonjol dalam sistem ekonomi perdagangan pada masa Kesultanan Palembang Darussalam adalah adanya monopoli yang terpusat pada Kesultanan dalam kaitan dengan wilayah pedalaman, misalnya hubungan ekonomi perdagangan Istana Kesultanan dengan kepala-kepala daerah atau rakyat di pedalaman diwujudkan dalam pola kewajiban *Tiban* dan *Tukon*.⁶ Teori ini juga dikuatkan oleh Farida R. Wargadalem dimana dalam teorinya sebagai pemegang monopoli perdagangan dengan rakyat, Sultan dalam menjalankan sistem ekonomi perdagangan

³ Supriyanto. *Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864*. Penerbit Ombak Yogyakarta 2013 hlm 58.

⁴ Van Sevenhoven. *Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang*. Penerbit Bharatara Jakarta 1997 hlm 30

⁵ Djohan Hanafiah. *Melayu Jawa Citra Budaya dan Sejarah Palembang*. Diterbitkan atas Kerjasama dengan Pemerintah daerah tingkat dua kota madya Palembang. Penerbit PT Grafindo Persada Jakarta 1995 hlm 200.

⁶ Nowiyanto. *Kesultanan Palembang Darussalam Sejarah dan Warisan Budayanya*. Penerbit University Press Tarutama Nusantara. Jember 2016 hlm 79

dikenal dengan istilah *Tiban* dan *Tukon*.⁷ Sementara menurut Bambang Purwanto sistem *Tukon* merupakan komoditas dibeli dengan uang namun biasanya uang yang dibayarkan *Jenang* dan *Pasirah* di bawah harga pasar baik *Jenang* atau *Pasirah* pada dasarnya peran yang diperoleh oleh Priyayi. Selain dari pembelian hasil pertanian, sumber penghasilan priyayi juga berasal dari tugasnya sebagai pelaksana kekuasaan sultan dalam memonopoli perdagangan timah di Bangka dan Bea atas perdagangan antara pulau.⁸ Teori lain yang mengembangkan sistem monopoli perdagangan dikemukakan oleh Ryllian Chandra mengatakan sebelum dihapuskan Kesultanan Palembang pada 1824 M, iklim sosial politik dan ekonomi di Kesultanan Palembang dikuasai oleh Sultan dan lingkungan keraton sebagai pusat kerajaan. Kesultanan di masa berkuasanya mengontrol Produksi dan distribusi, karena sultan sebagai penguasa tunggal.

Monopoli Kesultanan atas perekonomian dan perdagangan di wilayah kesultanan salah satunya diaplikasikan dalam sistem *Tiban* dan *Tukon* dikenakan kepada petani yang masuk dalam wilayah “*Sikap*” dan “*Kepungutan*.”⁹ Dalam sistem *Tiban* dan *Tukon* ini penduduk di wilayah *kepungutan* dan *sikap* sebagai abdi sultan diharuskan menanam-tanaman yang sudah ditentukan oleh pihak Kesultanan menjualnya melalui *Jenang* dan *Pasirah* untuk dibawa ke ibukota kesultanan kemudian dijual ke pasar internasional. Kedua teori ini memberikan suatu konstruksi dan pertanyaan mendasar apakah budaya dan corak Melayu itu memang tidak bisa masuk ke dalam sistem birokrasi dan struktur Kesultanan Palembang Darussalam ataukah budaya dan corak Melayu Palembang itu sudah masuk akan tetapi tidak nampak atau karena asimilasi yang menjadi pendorong untuk melihat dan menyatakan bahwa budaya Melayu tidak terlihat sehingga muncul corak monopoli,

⁷ Farida R. Wargadalam. *Perekonomian Kesultanan Palembang Abad XVII - XIX*. Dosen Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan Universitas Sriwijaya. 2012.

⁸ Bambang Purwanto. *From Dusun To Market Native Rubber Cultivation In Southern Sumatera 1890-1940 Phd Tesis In School Of Oriental An African Studies University Of London*. 1992 hlm 29

⁹ *Kepungutan* Perkataan Melayu yang baik untuk penarikan pajak dan lain-lain. P de roo de la faille. *Dari Zaman Kesultanan Palembang*, Penerbit Bhratara 1971 hlm 40

pernyataan-pernyataan seperti ini penting dijawab untuk menjelaskan bagaimana status corak Melayu terhadap Kesultanan Palembang Darussalam pada tataran wilayah dan masyarakat Melayu, termasuk dalam perekonomian.

Secara umum perekonomian Kesultanan Palembang berdasarkan pada pertanian, perkebunan, perikanan, mengumpulkan hasil hutan dan pertambangan.¹⁰ Pada ahir abad XVIII hingga awal abad XIX M hasil pertanian, perkebunan, pertambangan, hasil hutan dan perikanan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri (*subsistem*) dan sebagian dijual. Komoditi yang diunggulkan Kesultanan Palembang adalah lada.¹¹ Sedangkan hasil alam Kesultanan Palembang adalah timah.¹² Van Sevenhoven mengemukakan pertanian berkembang di berbagai wilayah Kesultanan Palembang berkat kondisi tanah yang subur sehingga banyak menghasilkan buah, sayur-sayuran, dengan kualitas sangat baik dan pertumbuhannya lebih sempurna dibandingkan dengan tanaman serupa yang tumbuh di tanah Jawa. Bahkan buah dan sayuran dihasilkan Kesultanan Palembang, menurut Van Sevenhoven.¹³ Lebih empuk mengandung banyak air, lebih manis, lebih enak. Hal ini menjadi, salah satu alasan yang paling

¹⁰ Farida R.Wargadalam. *Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik 1804-1825*. Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia Gedung Kompas Jakarta. 2017. hlm 26-27

¹¹ Kewajiban menjual lada dengan VOC (*Verenigde Oost Indisch Compagnie*) sesuai dengan kontrak, menyebabkan Raja-raja Palembang mewajibkan rakyatnya menanam lada di daerah Uluu Bangka dan Belitung, terbesar daerah Rawas lihat laporan Muntinghe dalam Bundel Palembang (No 15. 7). Akibatnya Kesultanan Palembang, merupakan salah satu penghasil lada terpenting di Nusantara. Konsekuensinya Kesultanan Palembang semakin menarik perhatian Bangsa Eropa khususnya Belanda. hal ini mendorong para Penguasa Palembang melakukan perdagangan ilegal dengan pihak asing, seperti Inggris Amerika, Perancis, Tiongkok, dan pedagang pribumi lainnya. Di sisi lain pihak Belanda berusaha melakukan berbagai macam cara agar lada dari Palembang, tetap dimonopoli oleh Belanda (ANDRI Bundel Palembang No 62.2 Van leur 1967/125)

¹² Belanda yang sejak 1642 M secara resmi menjalin hubungan dengan Palembang berusaha keras untuk menguasai penambangan timah, untuk mewujudkan maksud tersebut. Belanda memperbaharui kontrak pada tahun 1722 M, dengan dilaksanakannya pembaharuan kontrak tersebut Belanda menjadi pemegang monopoli lada dan timah. Penambangan timah dipulau Bangka mengalami perkembangan pesat sehingga Bangka menjadi salah satu penghasil timah terbesar di dunia. Menjelang pertengahan Abad XVIII M produksinya mencapai lebih dari 30.000 pikul. (Stempel 1940. 97)

¹³ J.L. Van Sevenhoven. *Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang*. 1971. Tg. Suganda-Suganda. Purba kawatja. 1971. hlm 54

menyenangkan orang Eropa untuk tinggal dan menetap di Hindia Belanda. Di samping itu masih banyak produk pertanian dan perkebunan lainnya yang dihasilkan oleh Kesultanan Palembang.

Transfortasi sungai merupakan alat yang digunakan kesultanan untuk menjangkau ke daerah pedalaman yang kaya dengan hasil bumi. Dalam laporan M. H. Court daerah aliran sungai Musi menghasilkan komoditi beras, kapas, lilin, gambir, emas, dan lada. Sungai Ogan menghasilkan beras, lada dan rotan. Sungai Komering dan Banyuasin menghasilkan lada dan beras.¹⁴ Kebanyakan komoditas tersebut diperoleh penduduk kesultanan secara tradisional dengan menggunakan sistem ladang berpindah.¹⁵ Model demikian itu dalam konsep masyarakat Barat disebut *Swidden Agriculture* atau *Slash and Burn Agriculture*, dalam prakteknya secara umum terdapat diwilayah dengan tingkat kepadatan penduduk masih relatif rendah.¹⁶

Sementara pada masa Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo masyarakat diharuskan menanam-tanaman tertentu, terutama lada untuk dijual kepada sultan dengan harga yang telah ditentukan sebagai gantinya pajak.¹⁷ Perlu diketahui bahwa di Kesultanan Palembang menganggap tanah milik sultan, sedangkan rakyat hanyalah penunggu dan mengambil manfaat dari tanah milik sultan tersebut, konsekuensinya rakyat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk membayar pajak terhadap sultan sebagai pemilik tanah yang sah.¹⁸ Melalui mekanisme ini penguasa Kesultanan dapat mengumpulkan hasil produksi lada yang sangat diminati pasar dan banyak mendapatkan keuntungan. Selain sebagai bentuk

¹⁴ M.H. Court, *An Exposition of Relation of The British Gower Nement with the sultan and State Of Palembang and the Design of the Netherlands Gowerments Upon the Country London*. Darbury and Allen 1821 Husni Rahim : *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam Studi tentang Pejabat Agama masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang* Penerbit Logos wacana ilmu Ciputat. 1998. hlm 58

¹⁵ Supriyanto. *Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864*. Penerbit Ombak. Jogjakarta 2013 hlm 31

¹⁶ Peters W.J dan L.F Neuenschwander. *Forest Indoko Slash and Burn. Farming in the Third World*. University of Indoko Press. 1988.

¹⁷ Supriyanto. *Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864*. Ombak. Jogjakarta 2013 hlm 58

¹⁸ P. De Roo De La Failee. *Dari Zaman ke Sultan Palembang*. Penerbit Bhratara Jakarta 1971, hlm 43

pembayaran pajak, sebagian hasil produksi lada dilepas oleh petani kepada Sultan melalui pembantunya, untuk ditukar dengan barang impor penting yang diperlukan seperti garam, bahan pakaian dan candu yang pendistribusiannya dimonopoli oleh sultan.¹⁹

Sementara daerah Uluan merupakan tanah produktif dengan hasil kebun dapat dipasarkan untuk kebutuhan daerah luar, diantaranya lada, damar atau darah naga, gambir, tembakau, benang pualam, arsemikun, dan kemenyan, hasil kebun ini dibeli oleh kaki tangan sultan dengan harga murah. Sebaliknya orang Iliran kembali menjual berbagai hasil produksi mereka untuk keperluan pedalaman seperti candu, garam, dan bahan pakaian kepada masyarakat Uluan.²⁰ Dengan demikian para penggarap tanah diwajibkan membantu perekonomian Sultan baik di waktu perang dengan prajurit perahu dipersenjatai maupun di waktu damai dengan barang yang dibutuhkan kesultanan. Sebagian masyarakat kesultanan Palembang berprofesi di sektor perikanan, berkembangnya sektor perikanan ini tidak terpisah dari fakta lingkungan yang banyak dialiri Sungai besar biasa disebut Batanghari Sembilan dengan Sungai Musi sebagai induknya. Sungai-sungai ini dengan rawa-rawa maupun kawasan lautnya mempunyai kandungan kekayaan ikan yang melimpah dan mampu memberikan penghidupan bagi penduduk Palembang. Beberapa jenis ikan yang ditangkap di sungai-sungai Palembang di antaranya gurami, bager, tembakang, belida, gabus, udang, dan beberapa jenis ikan lainnya.²¹

Dengan demikian tidak berlebihan, jika penangkapan ikan telah menjadi sumber mata pencaharian utama bagi penduduk Palembang. Bahkan produksi ikan dari Kesultanan Palembang tidak hanya digunakan untuk konsumsi sendiri melainkan sebagai bahan perdagangan penting. Berbagai

¹⁹ William Marsden. *Sejarah Sumatera*. Mencakup Peran Pemerintah, Hukum, Adat-Istiadat dan tatacara Kehidupan Penduduk Lokal Penerbit Komunitas Bambu Jakarta. 2008.

²⁰ Dedi Irwanto M. Santun. Murni. Supriyanto, *Iliran dan Uluan Dikotomi dan dinamika, dalam Sejarah Kultural Palembang*. Penerbit Eja Publisher. Yogyakarta. 2010. hlm 43-44

²¹ J.L. Van Sevenhoven: *Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang*: Penerbit Bhratara. Jakarta 1971. hlm 63-64

produksi Ikan dan udang dalam bentuk kering dan terasi dikirim sebagai barang perdagangan ke Jawa dan pulau-pulau lain.

Selain kegiatan pertanian dan perikanan, sektor industri kerajinan merupakan kegiatan ekonomi penting bagi penduduk di Kesultanan. Kesultanan Palembang dikenal maju dalam industri pertukangan, Ukir gading, pengolahan besi, kuas, perak, dan tembaga.²² Para pengrajin terkenal dan mahir dalam membuat barang industri kerajinan dari emas dan campuran logam lainnya. Produksi mereka menghasilkan rangka dan batang keris, serta beragam barang perhiasan. Dalam memproduksi perlengkapan rumah-tangga pengrajin mencampur emas dan tembaga seperti kotak sirih, kotak rokok, sarung keris, dan sebagainya.

Pencampuran beberapa macam logam, para pengrajin menghasilkan produk yang berkualitas tinggi indah dan bahkan mampu memproduksi perlengkapan senjata seperti senapan, meriam, dan amunisinya.²³ Tidak hanya laki-laki yang terlibat dalam proses produksi industri kerajinan tangan, akan tetapi kaum perempuan terlibat dalam menghasilkan kain sutera, kain katun bersulam benang emas dengan ragam dan bentuk hiasan bunga-bunga. Produk industri kerajinan dikirim sebagai barang dagangan ke berbagai tempat.²⁴ Penghasilan kesultanan berasal dari berbagai sumber, sebahagian diperoleh dari bantuan *fexo* yakni pedagang kaya yang mendapat kedudukan wakil sultan. Kedudukan ini diperoleh berkat kecakapan yang dimiliki seseorang sehingga dipercaya oleh sultan untuk ikut terlibat dalam memerintah disebagian wilayah kesultanan.²⁵

Dengan pemahaman konsep monopoli ekonomi dan perdagangan yang dibangun dari berbagai asumsi menyatakan bahwa secara umum Sultan menerapkan sistem perdagangan bebas, perdagangan gelap, monopoli perdagangan dengan melibatkan syahbandar, *tiban* dan *tukon*, *raban* dan *jenang* dan

²² P. De Roo de la Faille, dalam Nawiyanto dan Endrayadi, *Kesultanan Palembang Darussalam Sejarah dan Warisan Budayanya*. Penerbit Tarutama Nusantara Jember. 2016. hlm 75

²³ Farida Wargadalem. Warga dalam. *Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik. (1804 -1825.)* Penerbit Gramedia. Jakarta. 2009. hlm 15

²⁴ P. De Roo de la Faille dalam Nowiyanto dan Endriyadi. *Kesultanan Palembang Darussalam Sejarah dan Warisan Budaya*. Penerbit Tarutama Nusantara 2016. hlm 77

²⁵ P. De Roo de la Faille. *Dari Zaman Kesultanan Palembang*. Penerbit Bhratara. Jogyakarta. 1971. hlm 36

kepungutan semua ini berangkat dari pemikiran Van Sevenhoven²⁶ dan J.W.J Wellan.²⁷ P. De Roo de la faille bahkan ada pula tanggapan dari penulis Barat mengatakan bahwa Sultan-Sultan Melayu cenderung melakukan monopoli perdagangan sebagaimana diamati oleh Anderson pada pertengahan Abad XIX M ia mengatakan bahwa sultan di Sumatera Timur cenderung memonopoli perdagangan. Keadaan ini Mengindikasikan bahwa monopoli adalah suatu kebijakan ekonomi politik yang sudah biasa diterapkan di kesultanan-kesultanan Melayu.²⁸

Dalam konteks politik dan ekonomi perdagangan ini baik VOC maupun para sultan Melayu ini nampaknya perlu didiskusikan kembali, sebab dalam kasus monopoli perdagangan timah di Bangka ada semacam proses negosiasi dan pertimbangan kedua belah pihak untuk mengharmonisasikan kontrak monopoli yang ditandatangani. Kenyataan teori-teori ini tidak cocok dengan konsep kharismatik sultan serta sosialitas kelompok orang Melayu yang suka bergotong-royong, kebersamaan, bijaksana kekeluargaan dengan penuh perhitungan.²⁹ Orang Melayu selalu menghargai para sahabat, kerabat, hal ini dapat dilihat dari diadakannya musyawarah antar mereka baik dengan para pembesar, ulama, serta pemuka masyarakat apabila sultan dihadapkan pada persoalan sulit dan memerlukan keputusan tentang penyelesaiannya.³⁰ Para Sultan mengetahui akan harkat dan martabat serta kedudukannya sebagai seorang sultan yang agung, berwibawa dan kharismatik tidak mungkin menerapkan sistem monopoli perdagangan.

Hal ini dapat disimpulkan dari catatan harian Gubernur Jendral Baron Van der Capellen tatkala ia singgah melihat

²⁶ J.L. Van Sovenhoven. *Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang*. Penerbit Bhratara Jakarta. 1971 hlm 30

²⁷ J.W.J. Wellan. *Zuid Sumatera Economisch Overziecth h.Veenman j Zonen Holland* 1932 hlm 163 dalam DJohan Hanafiah 1995.

²⁸ Anthony Crothers Milner. *The Malay Raja a Study Of Malay Political Cultural In East Sumatera And The Malay. Peninsula In The Early Nineteenth Century (Cornell Phd)* Thesis Cornell University 1977 hlm 58.

²⁹ M.O Woelders. *Het Sultanadt Palembang 1811-1825* Terj HA Bastari Proefschrift Rijks University Leiden 28 Mei 1975.

³⁰ H.A. Dahlan dan kawan kawan. *Risalah Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II* Team Pengurus hasil-hasil diskusi Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. 1980 hlm 10

tawanan di Ternate tahun 1824 M. Dengan demikian menurut Baron Vander Corlen dapat dipahami bahwa Sultan merupakan orang di dalam sikap, ucapan dan perbuatannya yang anti Imperialisme dan Kolonialisme serta konsekwen. Integritas ini terlihat dari fakta sejarah bahwa sultan tidak pernah menyerah begitu saja terhadap musuh-musuhnya.³¹ Sultan pemegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan keputusan-keputusan selalu didasarkan pada al-Qur'an, undang-undang dan piagam-piagam.³² Teori Mustika Zed menyatakan bahwa perekonomian khas kelompok masyarakat Melayu ditegakkan atas dasar semangat Kebersamaan, Kerjasama ekonomi karena kesamaan kultur dalam arti luas, ekonomi Melayu menurut Mustika Zed dekat dengan sistem ekonomi berbasis kerakyatan yang sudah di rasionalkan dengan pengertian sistem ekonomi Melayu lebih berpihak kepada kelompok ekonomi lemah.³³

Teori ekonomi kerakyatan ini didukung oleh Heri Junaidi menurutnya ekonomi Kerakyatan merupakan ekonomi berasaskan kekeluargaan yang demokratis dan bermoral dengan keberpihakan kepada sektor ekonomi rakyat, keberpihakan dan perlindungan pada ekonomi rakyat merupakan strategi memungkinkan dan memberdayakan pelaku-pelaku ekonomi rakyat sejak jaman Kesultanan.³⁴ Dengan demikian adanya perbedaan teori-teori tersebut dapat dipahami bahwa arah perekonomian Melayu Kesultanan Palembang dari sisi ekonomi bertumpu pada nilai-nilai Budaya Melayu yang terjadi sejak dahulu, secara umum nilai-nilai Melayu dalam perekonomian di Kesultanan Palembang itu bercorak kebersamaan, musyawarah, gotong-royong dalam membangun keberuntungan bersama, berekonomi berbasis kerakyatan.

³¹ H.A. Dahlan dan kawan-kawan. *Risalah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II Team Pengurus Hasil-hasil Diskusi Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II*. Palembang 1980 hlm 11

³² J.L.Van Sevenhoven *Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang* Penerbit Bhratara Jakarta 1971

³³ Mustika Zet. *Mengagas Zona Ekonomi Dunia Melayu Beberapa Catatan Berdasarkan Telaah Sejarah Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi*. Publikasi oleh Universitas Negeri Padang.

³⁴ Heri Junaidi. *Ekonomi Masyarakat Melayu dan Pengembangan Usaha Mikro Proceeding International Seminar Malay Islamic Civilization Tradition and Contribution to The Development of Islam at South Asia*. Penerbit UIN Raden Fatah Palembang 2015 hlm 173

A. Fokus Kajian

Penelitian ini berangkat dari keinginan untuk mengetahui corak Melayu hadir dalam aktivitas perekonomian Kesultanan Palembang Darussalam yang selama ini diidentikkan bahwa Kesultanan Palembang Darussalam selalu melakukan aktivitas perekonomian dengan menerapkan sistem monopoli perdagangan. Kesultanan Melayu seakan-akan memaksa masyarakat untuk mendapatkan sumber pendapatan dan perekonomian Kesultanan melalui monopoli perdagangan. Berawal dari keinginan itulah peneliti ingin melihat di mana asumsi ini dibangun, pada saat membeli komoditas dari rakyat ditentukan dengan harga jauh lebih murah kemudian pada saat menjual pihak Kesultanan Palembang menjual dengan harga lebih mahal dari harga pasar. Oleh karena itu, maka penelitian ini akan diarahkan pada tiga permasalahan yaitu bagaimana perekonomian Kesultanan Palembang pada Abad ke 17-19 M; bagaimana ekonomi politik Kesultanan Palembang pada Abad ke 17-19 M; dan bagaimana corak Melayu dalam perekonomian Kesultanan Palembang ke 17-19 M.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan corak Melayu dalam perekonomian Kesultanan Palembang memang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Seperti tulisan dari Farida R Wargadalem³⁵ dalam disertasinya berjudul *“Perebutan Kekuasaan di Kesultanan Palembang (1804-1825)”*. Farida menyimpulkan bahwa pergantian kekuasaan di Kesultanan Palembang menjadi awal perebutan kekuasaan terbuka antara dua bersaudara terus berlangsung hingga keduanya wafat. Sejak saat itu Kesultanan Palembang kehilangan pulau Bangka dan Belitung, yang silih berganti diperebutkan dan diduduki oleh Inggris dan Belanda. Bangka Menjadi faktor penting dalam internal di tubuh Kesultanan Palembang sebagai pemacu konflik antara Palembang dan Belanda-Inggris serta Inggris-Belanda.

Selain itu penelitian Hudaidah³⁶ dalam *Perkembangan Tradisi Intelektual Kesultanan Palembang Darussalam (Studi*

³⁵ Farida R Wargadalem, *Perebutan Kekuasaan di Kesultanan Palembang 1804-1825*. Disertasi Universitas Indonesia. Penertbit Kepustakaan Populer Gramedia Jakarta 2017.

³⁶ Hudaidah. *Perkembangan Tradisi Intelektual; Kesultanan Palembang Darussalam (Studi Historis tentang Warisan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*

Historis tentang Warisan Pengetahuan dan Teknologi Melayu Abad XVIII-XIX Masehi dan Pelestariannya). Hasil temuan menunjukkan bahwa dinamisasi tradisi intelektual Palembang dalam bentuk penulisan, penyalinan dan penerjemahan berlangsung secara masif di Kesultanan Palembang seiring dengan meningkatnya penganut Islam. Selain itu kreatifitas para intelektual Palembang dalam mengembangkan, menciptakan ide dan cara baru yang berbeda dari sebelumnya. Karya-karya para pemikir dan ulama-ulama bukan sekedar produk pikiran Islam yang berkembang di Timur Tengah saja, namun telah menjadi penggerak, bukan sekedar penyalin, dan secara kreatif melakukan perbaharuan sehingga menjadi lebih bermakna bagi lingkungan masyarakat muslim Palembang. Bahkan interaktif terdapatnya kesepahaman antara intelektual Palembang dengan Intelektual Melayu Nusantara karena kesamaan pandangan dan prinsip. Sehingga menjadi berinisiatif untuk menyatu dalam satu pemikiran tentang pembaharuan Islam Nusantara

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anthony³⁷ yang berjudul *Upah dan Etos Kerja Pada Kasus Usaha, Songket Palembang dalam Perspektif Islam Melayu*; disimpulkan bahwa kerajinan songket ini sudah ada sejak masa Kerajaan Sriwijaya, Kesultanan Palembang Darusalam sampai sekarang. Pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan kerajinan songket bernilai kebanggaan, akan tetapi belum menjadi komoditas bernilai ekonomi, baru setelah kemerdekaan sampai sekarang, songket telah berorientasi pada kebutuhan hidup. *Kedua*, pendapatan para pengusaha songket tergolong tinggi, sementara pendapatan para pekerja relatif rendah. Terjadi disparitas pendapatan pengusaha dan pekerja, karena pekerja memandang kerajinan songket merupakan otoritas budaya Melayu sebagai kebanggaan, dan pengusaha menanamkan rasa bangga kepada pekerja agar dapat melestarikan Budaya Melayu, disisi lain usaha ini menjadi peluang bisnis. *Ketiga*, sistem pengupahan pada kasus usaha songket Palembang belum sesuai dengan sistem upah dalam Islam dan Melayu. Peneliti menawarkan

Melayu Abad XVIII-XIX Masehi dan Pelestariannya, Disertasi Pasca Sarjana UIN Raden Fatah Palembang 2017.

³⁷ Anthony. *Upah dan Etos Kerja Pada Kasus Usaha Songket Palembang dalam Perspektif Islam dan Melayu*. Disertasi Pasca Sarjan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2017.

sistem pengupahan yaitu upah harmoni yang merupakan penggabungan sistem upah Islam dan Melayu sebagai solusi mengatasi (disparitas pedapatan antara pengusaha dan pekerja songket Palembang). *Keempat*, Etos kerja para pekerja songket Palembang adalah rajin, ulet dan tekun bukan pemalas, mereka tetap bersemangat menenun songket

Selain itu Heri Junaidi³⁸ dalam penelitian disertasinya dengan judul “*Efisiensi Berkeadilan Pada Kasus Songket Palembang*”³⁹ Hasil temuan dalam disertasinya antara lain. *Pertama*, pengrajin songket hanya mendapatkan keuntungan minimm, sementara pengrajin dan pengusaha songket mendapatkan keuntungan maksimal, sehingga para pengrajin / pengusaha menjadi kaya dan memiliki jaringan yang luas. Sedangkan para pengrajin songket tetap miskin dan mengganggu pemesanan *Kedua*, dalam ramalan dan kewajiban untuk menyelesaikan semua temuan maksimal dan mendapatkan upah yang tidak berstandar Upah Minimum Regional yang berlaku. Pengrajin tidak mendapatkan tunjangan hari raya, kesehatan dan hak sosial lainnya, melainkan hanya sekedar kebaikan para pengusaha sebagai mitra kerja. *Ketiga*, penjualan songket berorientasi pada untung rugi semata, sehingga para pengumpul melakukan spekulasi untuk mendapatkan keuntungan maksimal tanpa memikirkan keadaan penjual.

Muhammad Idris⁴⁰ dalam penelitian disertasinya berjudul “*Pengaruh Komitmen Organisasi, Evaluasi Kerja dan Kompensasi Finansial terhadap Kepuasan Kerja serta Dampaknya terhadap Kinerja*” (*Studi pada Pengrajin Songket di propinsi Sumatera Selatan*), menyimpulkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dan kepuasan pengrajin songket di Propinsi Sumatera Selatan.

Bambang Purwanto⁴¹ dalam *Merajut Jaringan di Tengah Perubahan Komonitas Ekonomi Muslim di Indonesia Pada Masa*

³⁸ Heri Junaidi. *Efisiensi Berkeadilan pada Kasus Songket Palembang*. Disertasi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Jakarta 2013.

⁴⁰ Bambang Purwanto. *Merajut Jaringan di Tengah Perubahan Komonitas Ekonomi Muslim di Indonesia Pada Masa Kolonial*. Terdapat dalam Buku Tentang Islam di Asia Tenggara Ikhtiar Baru Van Hoeve.

⁴¹ Bambang Purwanto: *Merajut Kebhinekaan dan Kearifan Budaya Kemajuan Dan Kesejahteraan Indonesia*. Pidato Ilmiah Disampaikan pada

Kolonial. Menjelaskan, Sejarah adalah sejarah masyarakat, berbagai aspek sosial dari aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan Islam berhasil di ungkap. Keberadaan Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan begitu saja dengan aktivitas ekonomi masyarakat, Keterkaitan antara Islam dengan aktivitas ekonomi tidak hanya terbatas pada awal persebaran Islam di kepulauan Indonesia, melainkan telah menjadi bagian yang integral dengan struktur sosial masyarakat pada masa-masa berikutnya. Keberadaan kekuasaan politik, kekuatan ekonomi, dan nilai-nilai sosial-kultural Barat yang kemudian di representasi secara dominan oleh kolonialisme ternyata tidak menggeser begitu saja relasi antara Islam dan kegiatan ekonomi. Dalam komonitasnya, Islam dan ekonomi membentuk pola interaksi yang beragam mengikuti perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Satu hal yang menarik, kehancuran Islam sebagai institusi politik bersamaan dengan perluasan pengaruh kekuatan politik dan ekonomi barat, ternyata membuka kesempatannya kelompok interpreneur Muslim bebas.

Jeroen Peeters⁴² dalam kajiannya yang berjudul *Kaum Tuo dan Kaum Mudo. Sociaal Religieuze verandering in Palembang Perubahan Religi di Palembang 1821-1942*. Hasil Penelitiannya menjelaskan pergerakan reformasi Islam di Indonesia, perbedaan antara pedesaan dan perkotaan yang memainkan peran sangat penting. Ilmuwan pertama yang menggunakan dikotomi ini adalah H.J Benda, dalam kajian kelasiknya *The Crescent and The Risingsun*, Menaruh perhatian atas perkembangan reformasi di Indonesia. Benda memandang reformasi Islam sebagai bagian dari *Renaissance* (bangunan kembali) Islam yang berpangkal di kota pada dasawarsa pertama abad ke dua puluh, ilham untuk gerakan ini datang dari seberang laut, ketika TimuTengah terjadi pembaharuan yang dipelopori oleh Muhammad Abduh, Rashid Ridha mulai merumuskan kembali doktrin Islam dipandang dari sudut pemikiran Barat yang modern. Berkat gerakan pembaharuan ini untuk pertama kali sejak abad ke tujuh belas Islam perkotaan di Jawa menerima umpals dinamis dari luar. Berlawanan dengan

Rapat Universitas Gajah Mada dalam Rangka Peringatan Dies Natalis ke-63. Jogjakarta 1012.

⁴² Jeroen Peeters. *Kaum Tuo Kaum Mudo Perubahan Regilius di Palembang 1821-1924* Penerbit INIS. Jakarta 1997

Islam di pedesaan yang bersipat terisolir dan tidak sekuler, reformasi mempunyai semangat pola hidup kota yang dinamis, rasionalitas, dan individualis digabung dengan penerimaan kehidupan modern dan bentuk organisatoris Barat, jadi reformasi menumbuhkan sepenuhnya unsur baru kedalam Islam Indonesia umumnya dan Kesultnan Palembang pada khususnya.

Husni Rahim.⁴³ Dengan judul disertasinya. *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam di Palembang. Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*. Telah diterbitkan menjadi buku dengan judul yang sama oleh penerbit logos tahun 1998. Kajian utama dari Disertasi tersebut adalah menggali corak dan dinamika hubungan antara komonitas Islam, Pemegang otoritas Keagamaan dan pemegang kekuasaan politik, dengan melihat peranan penghulu dalam masyarakat Palembang dimasa ke sultan dan kolonial. Dengan demikian penulis melihat perubahan peranan pejabat agama dari “Penguasa Islam” masa Kesultanan ke “Penguasa Kafir” masa kolonial. Peralihan tersebut telah memperlihatkan corak dan dinamika hubungan antara pemegang kekuasaan politik dan komonitas Muslim.

Supriyanto⁴⁴ dalam penelitiannya berjudul *Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864 M*. Yang telah dicetak menjadi buku oleh penerbit Ombak mejelaskan Pelabuhan termasuk dalam wilayah Keresidenan Palembang terletak di Sungai Musi yaitu pertemuan Sungai Musi dengan selat sunda atau laut Jawa. Pelabuhan itu mempunyai peran penting bagi perkembangan ekonomi masyarakat terutama dalam kaitannya dengan aktivitas pelayaran dan perdagangan pada masa sebelum dan sesudah kolonialisme Belanda. Disamping itu keberadaan pelabuhan memiliki hubungan yang erat dengan aktivitas ekspor dan impor yang dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Pada awal Abad XIX M, Pelabuhan Palembang mengalami perkembangan yang cukup berarti terutama di bidang pelayaran dan perdagangan banyak

⁴³ Husni Rahim. *Sistem Otoritas Administrasi Islam Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*. Penerbit PT Logos Wcana Ilmu Jakarta. 1998

⁴⁴ Supriyanto: *Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864*. Penerbit Ombak Jogjakarta 2013.

pedagang-pedagang asing singgah di pelabuhan dengan menukar barang dagangan. Peran pelabuhan Palembang menjadi lebih penting ketika mampu memasukkan barang dagangan dari luar dan memasarkan barang dari hasil produksi daerah Palembang sebagai kebutuhan penduduk.

Dalam studi ini peneliti fokuskan jenis penelitian dengan menggunakan pendekatan sejarah (*historis*.) Metode historis adalah menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan pada masa lampau. Suharismi Arikunto mengemukakan metode historis merupakan seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif menilainya dengan kritis dan mengajukan sintesis dalam bentuk tulisan.⁴⁵ Pendekatan historis yang dimaksud dalam kajian ini untuk mengenali bagaimana Kesultanan Palembang Darussalam itu sesungguhnya mampu membangun perekonomian bercorak Melayu. Disamping itu metode historis bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan efektif dengan cara mengumpulkan mengevaluasi dan mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta-fakta serta memperoleh kesimpulan yang kuat.⁴⁶ Oleh karenanya pintu masuk untuk membangun narasi dan penjelasan historiografis merupakan sumber-sumber sejarah yang ditinggalkan dari masa lalu mengenai Kesultanan Palembang.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Louis Gottchal, metode sejarah pada dasarnya meliputi empat tahapan kerja; pertama, *heuristik* atau pengumpulan data pada tahapan ini penulis melakukan pengumpulan data berupa buku buku, dokumen, arsip dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah penulis teliti. *Kedua*, kritik sumber pada tahapan ini peneliti melakukan kritik terhadap seluruh sumber data yang telah terkumpul untuk memperoleh keabsahan sumber atau yang bisa disebut kritik eksternal serta perlakuan secara kritis terhadap informasi sejarah untuk menentukan kredibilitasnya sehingga diperoleh informasi kredibel dapat dipercaya sebagai fakta-fakta sejarah (kritik internal). *Ketiga*, Interpretasi penulis melakukan interpretasi yang bertumpu pada

⁴⁵ Suharismi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan. Praktis* Penerbit Renika Cipta Jakarta 1993 hlm 43

⁴⁶ M. Arifin. *Kavita Selektia Pendidikan*. Penerbit Bumi Aksara Jakarta. 1998 hlm 12

fakta atau kenyataan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mencari kebenaran yang otentik. Kuntowijoyo mengemukakan interpretasi atau penafsiran sejarah sering disebut juga dengan analisis sejarah.⁴⁷ *Keempat*, Historiografi langkah terakhir yang penulisan hasil interpretasi tersebut menjadi tulisan sejarah.

Penelitian ini berlokasi di wilayah Kesultanan Palembang Darussalam. Lokasi penelitian ini dikelompokkan di wilayah yang masih ada keturunan Kesultanan Palembang. Wilayah kota Palembang yang secara administratif meliputi kawasan yang dahulunya Kesultanan Palembang. Kota Palembang telah tumbuh dan berkembang sejak masa Sriwijaya pada Abad 7 M dan secara berkesinambungan berlangsung sampai hari ini. Bukit Siguntang tempat yang secara legenda diakui sebagai kawasan yang menjadi asal-muasal masyarakat Melayu yang berada di wilayah Palembang. Peranan kota Palembang sebagai pusat kegiatan pelayaran, perdagangan, dan industri. Oleh karenanya dari kota inilah kegiatan daerah sekitarnya diarahkan, diatur, dan diawasi secara seksama. Kemakmuran penduduk Palembang terlihat jelas dari kehadiran berbagai kelompok etnis yang ikut membantu masyarakat Palembang. Terdapat kurang lebih 20 etnis,⁴⁸ yang dijumpai di wilayah Palembang yang bermukim di pusat kota, pinggiran kota Palembang maupun Kepulauan Bangka dan Belitung.⁴⁹

Di antara etnis yang bermukim di kota Palembang yang berasal dari daerah lain di nusantara serta berasal dari mancanegara seperti Arab, India, Tionghoa, dan Eropa secara berangsur-angsur telah ada di kawasan Palembang sejak ratusan tahun yang lampau. Dari aspek Perekonomian Bercorak Melayu Palembang dikenal sebagai pusat kegiatan Pelayaran, Perdagangan, dan Industri. Mengkonstruksi bangunan Perekonomiannya bercorak Melayu yang masuk kepada perekonomian Kesultanan Palembang Darussalam.

⁴⁷ Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Penerbit Pustaka Pelajar Jogjakarta. 1999 hlm 100

⁴⁸ Superiyanto. *Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864*. Penerbit Ombak Jogjakarta 2013 hlm 33.

⁴⁹ Makmun Abdullah. *Kota Palembang Sebagai Kota Dagang dan Industri* Departemen Pendidikan dan kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional 1984/1985 Jakarta 1984 hlm 33

B. Teori Ekonomi Islam

Grand theory dalam disertasi ini adalah teori tujuan ekonomi Islam dan teori ekonomi Melayu yang akan dijabarkan berikut ini.⁵⁰ Teori ini dikemukakan oleh Ibnu Khaldun (w. 1406) yang memberikan definisi ilmu ekonomi yang lebih luas ruang lingkupnya dari pada Tusi (w. 1201). Definisi Tusi mengenai ilmu ekonomi menggarisbawahi pentingnya nilai pertukaran, pembagian kerja dan kesejahteraan rakyat. Demikian Tusi (597 H / 1201 M) dalam karyanya berbahasa Persia *Akhlaq i-Nasir* yang termasyur menulis bila setiap orang menghasilkan makanan, pakaian, rumah, dan alat-alatnya sendiri, tentu dia tidak akan bertahan hidup, karena dia tidak akan punya makanan dalam waktu yang lama. Untuk itu diperlukan menyediakan barang-barang tersebut akan tetapi karena bekerjasama dengan orang lain dalam melakukan proporsinya dengan menghasilkan konsumsi lebih dari cukup maka hukum keadilan mengawasi hal-hal mengenai pertukaran produksi kelebihan seseorang dengan yang lain maka sarana ekonomi barang-barang menjadi tersedia bagi semua orang.

Allah SWT dalam kebijaksanaan yang membedakan aktivitas cita rasa seseorang sehingga mereka melakukan pekerjaan yang berbeda. Pembagian kerja inilah menimbulkan adanya struktur internasional dan sistem ekonomi umat manusia. Oleh karena dengan adanya manusia tidak akan terdapat suatu bentuk tanpa adanya kerjasama, timbal balik, hal ini tidak akan terjadi tanpa kontak sosial, maka kodrat manusia adalah tergantung dengan masyarakat.⁵¹

Sementara Ibnu Khaldun (1332-1406 M) mengatakan banyak ahli ekonomi yang kemudian telah melihat dengan jelas hubungan erat antara Ilmu ekonomi dan kesejahteraan manusia. Referensinya tentang “Ketentuan Akal dan Etika” memperlihatkan bahwa ia menganggap ilmu ekonomi sebagai ilmu pengetahuan positif maupun normatif. Kemudian digunakan kata “Massa” menunjukkan kenyataan bahwa maksud mempelajari ilmu ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan massa bukan kesejahteraan individu. Hal ini

⁵⁰ Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Penerbit Kencana Pranada Media Group 2012 hlm 212.

⁵¹ M.A. Manan. *Ekonomi Islam Teori dan Praktek Islamic Economic Theory And Practice* Penerbit Intermedia Jakarta 1992 hlm 24.

karena hukum ekonomi dan sosial berlaku pada massa dan tidak banyak dipengaruhi oleh individu yang terkecil. Ibnu Khaldun (1332-1406 M) telah melihat adanya hubungan timbal balik antara faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, etika dan pendidikan. Walaupun karyanya yang terkenal "*al-Muqqaddimah*" membahas faktor-faktor ini secara terpisah namun dia menganggap semua ini sebagai "aspek peradaban" yang mempengaruhi manusia dalam organisasi sosial mereka yang saling berkaitan. Ibnu Khaldun memperkenalkan sejumlah gagasan ekonomi yang mendasar seperti pentingnya pembagian kerja, pengakuan terhadap sumbangan kerja dalam teori nilai, teori mengenai pertumbuhan penduduk, teori pembentukan modal, teori lintas perdagangan, teori sistem harga dan sebagainya.

C. Teori Ekonomi Melayu

Pada tatanan ekonomi Melayu, teori dalam penelitian ini menggunakan teori-teori ekonomi Melayu. Menurut Mustika Zet menyatakan bahwa teori ekonomi Melayu merupakan sebuah konstruksi kerjasama ekonomi khas masyarakat Melayu yang ditegakkan atas dasar semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kerja sama ekonomi karena kesamaan- kesamaan kultural dalam arti luas. Sistem ekonomi Melayu yang dibangun bukan bersifat kapitalistik akan tetapi lebih dekat kepada sistem ekonomi berbasis kerakyatan atau ekonomi kerakyatan yang sudah dirasionalkan. Dengan pengertian bahwa sistem ekonomi Melayu lebih berpihak kepada komunitas mayoritas ekonomi lemah dan menengah ke bawah. Namun tidak menutup kemungkinan pada saat yang sama terus terbuka untuk membangun jaringan ekonomi yang dimiliki kelompok kekuatan ekonomi dunia Melayu.⁵²

Teori ekonomi Melayu yang dikembangkan oleh Mustika Zed ini lebih dekat dengan pemikiran ekonomi Hattanomics atau pemikiran ekonomi Muhammad Hatta dengan memperluas cakupan operasi awalnya yang menjangkau trans nasional dunia

⁵² Mustika Zet. *Menggaga Zona Ekonomi Melayu Dunia Melayu Beberapa Catatan Berdasarkan Teladan Sejarah*. Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi Universitas Negeri Padang. 2002 <https://www.Academia.edu/zona> diakses 2019.

Melayu.⁵³ Sementara Mohd. Kasturi Nur bin Abdul Aziz menyatakan aktivitas ekonomi orang Melayu pada Abad 19 M bentuk dan coraknya bersifat subsistem dan keadaannya tertutup. Secara tradisional kurang berdaya saing dan hasil produksinya bersekala kecil dan berada pada produktivitas yang rendah.⁵⁴ Pandangan ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan J.M Gullick seorang sarjana Barat berpendapat bahwa sistem ekonomi Melayu bersifat subsistem yang hanya mampu menghasilkan sumber pengeluaran untuk diri dan keluarganya, manakala ada kelebihan (sisa) dijual untuk mendapat kebutuhan lain yang tidak dihasilkan oleh mereka sendiri.⁵⁵ Sebelum kedatangan kolonialis di semenanjung tanah Melayu diperintah bebas oleh Sultan, ekonomi mulai bersifat feodal, yaitu ekonomi berasaskan kepada aktivitas pertanian dan kerajinan,⁵⁶ dan rakyat patuh terhadap pemerintahan serta aktivitas cukai berlaku dan diterapkan untuk eksport dan import.

Disamping itu kehadiran sistem ekonomi antara bangsa yang agak terbuka dan telah berlaku sebelum datangnya kolonialisme karena sudah ada *Native Trader* di alam Melayu. Hal ini terbukti pada zaman laksamana Abdul Jalil (1670-1690 M), daerah Riau telah berkembang menjadi pusat perdagangan yang pesat dan rakyat warga kerajaan-kerajaan warisan Kesultanan Melayu Malaka telah menjalankan kegiatan perdagangan di luar wilayah daerah mereka. Sumber-sumber China dan Eropa mencatat berbagai teknik warisan Kesultanan Melayu. Malaka telah menjalankan perdagangan dari Pattani, Kamboja hingga ke Sulawesi, Jawa dan laut Maluku.⁵⁷ Dengan

⁵³ Tentang Hattanomics telah dikemukakan dalam tulisan Mustika Zet *Cara Baik Bung Hatta in Print Bung Hatta*. University Press 2002.

⁵⁴ Mohd. Kasturi Nor Bin Abd Aziz. *Warisan Kesultanan Melayu Surat Menyurat Sultan Abdul Hamid dan Ekonomi Kedah dalam Seri Internasional Journal Of The Malay Word And Civilizational* 29 (2) 2011 hlm 46

⁵⁵ J.M Gullick. *Malay Society In The Late Ninteeth Century Singapore*. Oxford University Press Singapore 1989 hlm 124

⁵⁶ Uqbah Iqbal. *Sejarah Perkembangan Ekonomi Semenanjung Melayu dari Sifat Ekonomi Masyarakat Melayu Pra Kolonial*. Pusat Rangkaian Sejarah Politik Strategi Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Universitas Kebangsaan Malaysia 4360 Bangi Selangor diakses Bulan Januari 2020.

⁵⁷ D Hendropuspito. *Sosiologi Simantik* Penerbit Konisius Jogjakarta 1989 hlm 233

⁵⁷ D. Hendropuspito. *Sosiologi Simantik*. Penerbit Kanisius Jogjakarta 1989 hlm 233

demikian dari tahun 1850 an suatu sistem ekonomi antara bangsa telah hadir di Asia Tenggara, penggabungan rangkaian perdagangan dunia Melayu menjadi kenyataan.

D. Teori Asimilasi (Islam-Melayu)

Pada tataran *middle theory*, penelitian ini menggunakan teori asimilasi. Asimilasi berasal dari kata Latin “*asimil*” *assimilore* yang berarti “menjadi sama.”⁵⁸ Kata ini dalam bahasa Inggris “*assimilation*” sedangkan dalam bahasa Indonesia menjadi asimilasi; sinonim kata asimilasi adalah Pembauran. Asimilasi merupakan proses sosial yang terjadi pada tingkat lanjut.⁵⁹ Kajian mengenai landasan teori ini perlu dikemukakan untuk dijadikan dasar pijakan penelitian untuk menganalisis corak Melayu dalam perekonomian Kesultanan Palembang. Bagian ini juga mengemukakan sejumlah kepustakaan tentang corak Melayu dalam perekonomian Palembang. Secara umum asimilasi dipandang sebagai proses sosial menurut Robert E. Park seorang ahli sosiologi menyatakan hubungan antara kelompok secara teratur dapat terjadi melalui beberapa tahapan yang dinamakan “lingkaran hubungan ras” lingkaran ini mempunyai bentuk kontak (*contact*) kompetisi (*competition*), akomodasi (*accomodation*) dan asimilasi (*assimilation*) tahapan ini dikenal juga dengan bentuk-bentuk interaksi social.⁶⁰

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa asimilasi merupakan suatu proses sosial yang timbul apabila; *Pertama*, ada kelompok-kelompok manusia berbeda kebudayaannya; *kedua*, individu-individu sebagai anggota kelompok saling bergaul secara langsung dan intensif dalam waktu relatif lama; *ketiga*, kebudayaan-kebudayaan dari kelompok manusia tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri. Asimilasi tidak dapat terjadi begitu saja melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar proses asimilasi berjalan

⁵⁸ Paul. B. Harton Cherter L. Hunt *Sosiologi* terj. Aminudin Ran edisi keempat Penerbit Erlangga Jakarta 1990 hlm 625

⁵⁹ J.R Feagim dan C.B Feagin *Racid and Ethnics Relation*. New Jersey Prentice Hall. Englewood Cliffs 1993 hlm 27-28.

⁶⁰ Interaksi sosial merupakan hubungan sosial dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-perorangan , perorang antar kelompok manusia lainnya. Bentuk-bentuk interaksi sosial tersebut dapat berupa Kerjasama (*Cooperation*), Persaingan (*Competition*), Pertentangan (*Conflicts*), Akomodasi (*Accomodation*), dan Asimilasi (*Asimilation*) lihat D. Hendro Puspito Sosologi Sistematis. Penerbit Kanisius Jogjakarta 1989 hlm 233.

dengan baik. Beberapa cara dapat terjadinya proses asimilasi diantaranya ada perbedaan kebudayaan antara kelompok satu dan kelompok lainnya. Sementara dalam sosiologi dengan berpijak kepada berbagai sumber bacaan diketahui beragam faktor mempengaruhi terjadinya proses asimilasi sosial budaya dalam masyarakat diantaranya: *Pertama*, faktor toleransi kelakuan saling menerima dan memberi dalam struktur himpunan masyarakat. *Kedua*, faktor kemanfaatan timbal balik, memberi manfaat kepada dua belah pihak. *Ketiga*, faktor simpati pemahaman saling menghargai dan memperlakukan pihak lain secara baik. *Keempat*, faktor perkawinan.

Menurut Soerjono Soekanto faktor yang menjadi penghambat asimilasi. *Pertama*, kurangnya pengetahuan terhadap unsur kebudayaan yang dihadapi bersumber dari pendatang atau penduduk asli. *Kedua*, sifat takut kepada kebudayaan yang dihadapi. *Ketiga*, perasaan ego dan superioritas yang ada pada individu-individu suatu kebudayaan terhadap kelompok lain. Dengan demikian dalam unsur asimilasi kebudayaan berupa sistem perekonomian yang akan ditelusuri sebagai bentuk adanya proses pembauran budaya Melayu yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Melayu telah terjadi sejak dahulu aktivitas ekonomi tersebut masih berwujud dalam kehidupan masyarakat Melayu dalam beberapa aktivitas ekonominya.

Upaya untuk mengkaji tentang corak Melayu dalam Perekonomian Kesultanan Palembang tentu ada pilihan terhadap suatu teori yang akan digunakan untuk meneliti suatu subjek penelitian tentu tidak dengan sendirinya dapat digunakan bagi penelitian yang lain. Oleh karenanya peneliti perlu memeriksa bahan-bahan secara seksama agar memperoleh kejelasan untuk menentukan teori yang akan digunakan. Sehubungan dengan subjek penelitian yang berhubungan dengan corak Melayu dalam Perekonomian Kesultanan Palembang maka teori yang tepat dengan menggunakan teori asimilasi sosial dan teori kepemimpinan. Dari kedua teori ini akan terbangun corak Melayu dari aspek ekonomi dalam Perekonomian Kesultanan Palembang. Dengan demikian maka perlu Pemahaman terhadap apa yang dimaksud dengan Asimilasi sosial dan kepemimpinan.

Istilah asimilasi sosial berasal dari kata Latin “*Assimilore*” yang berarti “Menjadi sama”⁶¹ Kata tersebut dalam bahasa Inggris adalah “*Assimilation*” sementara dalam bahasa Indonesia menjadi asimilasi. Dalam bahasa Indonesia Sinonim kata Asimilasi adalah pembauran. Asimilasi merupakan proses sosial yang terjadi pada tingkat lanjut.⁶² Proses tersebut ditandai dengan adanya upaya-upaya untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara perorangan atau kelompok manusia. Menurut Koentjoroningrat dalam bukunya Pengantar Ilmu Antropologi 1980 menjelaskan asimilasi merupakan suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan yang terdapat di antara orang perorang dan kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama.⁶³

⁶¹ D. Hendropuspito. *Sosiologi Simantik* Penerbit Kanisus Jogjakarta 1989 hlm 233

⁶² Paul. B. Horlon Chester L. Hunt. *Sosiologi Terjemahan*. Aminuddin Ran Edisi keempat Penerbit Erlangga Jakarta 1990 hlm 625

⁶³ Koentjoroningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Penerbit Pranata Cipta Jakarta 1990.



BAB II

PEREKONOMIAN DALAM MASYARAKAT MELAYU

A. Tradisi Melayu dalam Lintasan Sejarah

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tradisi merupakan adat kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat.⁶⁴ Menurut Poerwadaminto, tradisi adalah keseluruhan sesuatu yang melekat dalam kehidupan masyarakat yang dijalankan secara terus-menerus seperti adat, budaya, kebiasaan dan kepercayaan.⁶⁵ Sementara Soerjono Soekanto mengemukakan tradisi merupakan suatu kegiatan yang dijalankan oleh sekelompok masyarakat dengan cara berulang-ulang. Dengan demikian tradisi memang tidak bisa dipisahkan dari kelompok masyarakat sebab tradisi terus diajarkan secara turun-temurun kepada generasi yang membuat tradisi itu tidak akan hilang dan akan terus dijaga, dipelihara untuk tetap mempertahankan kemurnian serta keasliannya.⁶⁶

Dalam konteks tradisi Melayu konsep adat memancarkan hubungan mendalam dan penuh makna diantara sesama manusia dan manusia dengan alam lingkungan sekitarnya, termasuk juga bumi beserta isinya, alam budayanya dan alam Ghaib setiap hubungan itu disebut dengan adat diberi bentuk tegas dan khas yang mengekspresikan melalui sikap, aktivitas dan seremonial-seremonial. Makna adat ditunjukkan kepada seluruh kompleks hubungan itu, baik dalam arti inti dari eksistensi sesuatu, dasar ukuran baik dan buruk, peraturan hidup seluruh masyarakat maupun tata cara perbuatan serta

⁶⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan diterbitkan oleh Balai Pustaka cetakan Pertama Jakarta <https://Wikipedia> diakses Bulan Maret 2020

⁶⁵ WJS Poerwadaminto *Pengertian Tradisi Menurut pada ahli* <http://Seputar Pengetahuan.co.id> diakses Bulan Januari 2020

⁶⁶ Soerjono Sekanto *Penegertian Tradisi Menurut para ahli* <http://www.kompasiana.com> diakses Bulan Januari 2020

perjalanan setiap kelompok institusi. Tradisi muncul sebagai struktur dasar dari seluruh kehidupan dan menegaskan ciri kepribadian suatu masyarakat. Oleh karenanya tradisi biasanya memiliki cerita suci, watak-watak, asal-usul yang gagah dan unggul serta memberikan dasar makna terhadap setiap peristiwa dalam siklus kehidupan manusia serta eksistensi institusi dalam masyarakatnya.

Oleh karenanya dalam masyarakat tradisi, adat memiliki kedudukan suci hingga mencapai martabatnya dipancarkan oleh kelakuan yang benar dan halus, sebuah ciri kehidupan yang menyerap sistem kepercayaan, hukuman, dan denda. Setiap individu yang melanggar, menyelewengi, melebihi, mengurangi, atau menafikannya akan menerima balasan dan hukuman, baik melalui Pemegang kekuasaan adat maupun Tuhan dalam keyakinan. Namun sebaliknya apabila setiap orang berhasil melaksanakan tradisi serta adat tersebut, ia akan berkuasa, berwibawa, memegang menjalankan, dan patuh kepada adat. Dengan demikian tradisi memberikan makna konfigurasi mendalam serta makna ke struktur dalam sebuah masyarakat dan kebudayaannya. Adat merupakan identitas berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh kelompok kecil masyarakat tersebut, setiap kelompok akan dikenal oleh kelompok lain dengan perbedaan adatnya.

Dalam konteks ini adat menjadi identitas subkultur seperti masyarakat Melayu membedakan adat orang Kelantan, Malaka, Riau, Perak, Deli, Johar, Palembang, Bangka, Belitung, Bengkulu, Pontianak, Kutai dan lain lain. Demikian pula konsep yang sama dipergunakan untuk membedakan, mengenali orang asing di luar konteks Masyarakat Melayu.⁶⁷ Istilah alam Melayu merupakan suatu wilayah yang kaya dan luas dikenal juga sebagai rumpun Melayu Palenesia, ia melingkupi Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina Selatan Thailand Selatan, Burma, Indochina khususnya Vietnam dan Kamboja, Malagasi, Sri Lanka dan Taiwan. Kalau dilihat dari sudut pandang Anthropologi dunia Melayu meliputi sebuah wilayah yang dikenal dengan kawasan "*Malay Archipelago*" merupakan

⁶⁷ Muhammad Takari Bin Jilin Syahril. *Adat dalam Islam Peradaban Melayu*. Program Studi Etnosikologi Fakultas Ilmu Bisnis Universitas Sumatera Utara dan Majelis Adat Budaya Indonesia <https://www.reseearchqarte.net> 2823 diakses Bulan Pebruari 2020

kawasan yang didiami oleh sekelompok masyarakat mengklasifikasi sebagai Melayu. ⁶⁸

Kawasan dunia Melayu yang meliputi bagian terbesar kawasan Asia Tenggara sekarang---merupakan sebuah laboratorium budaya yang kaya bagi penelitian dari berbagai disiplin keilmuan. Sejalan dengan konsep historis unit historis Toynbee, Harry J Benda 1968, telah mencoba menyoroti elemen-elemen sosial, budaya termasuk keagamaan dan politik kawasan itu sebagai suatu kesatuan dalam hal ini dilihat secara dekat hubungan Struktural antara berbagai elemen budaya yang dominan dan kekuasaan Asia Tenggara di masa lalu di mana infrastruktur yang terdapat di dalam laboratorium sosial Asia Tenggara itu menurutnya mengalami perubahan berangsur-angsur dari zaman ke zaman sampai kepada modern. Pada periode klasik Melayu terbagi dalam tiga lingkungan pengaruh budaya -budaya dominan berikut :

Pertama, kawasan yang mendapat pengaruh Hindu (Indie Benda, Hinduized, Coedes dan Indianized, Harrison) meliputi hampir seluruh Asia Tenggara. *Kedua*, kawasan yang mendapat pengaruh China (*Sinized*) meliputi semenanjung Indo-China sejak Abad 1 M. *Ketiga*, Filipina hanya tersentuh diatas permukaan saja oleh pengaruh India dan China untuk sementara masih melaporkan laboratorium tersendiri.⁶⁹ Dalam konteks pengaruh Hindu merupakan agama awal yang menjadi anutan masyarakat Melayu di alam Melayu yang dicampur aduk dengan kepercayaan animisme yang telah berakar. Namun begitu dalam kajian yang mendalam oleh sarjana Barat mendapati bahwa agama tersebut hanya merupakan suatu amalan lapisan tipis struktur masyarakat,⁷⁰ yang terdiri dari kalangan raja dan pembesar yang di pertahankan oleh golongan tersebut. Oleh karenanya masyarakat Melayu sebenarnya

⁶⁸ Buerah Tunggal dan Husen Saloman. *Mengembalikan Kegemilangan Tamadun Melayu-Islam Menerusi Penumpukan Budaya Niaga Berteraskan Akhlak*. Internasional Journal of The Malay World And Civilization. 29-2012-123-147

⁶⁹ Harry.J.Banda. *The Structure of South East Asian History Same Preliminary Observations* .JSEAH. Vol 2 1968 dalam Sirozi. Bunga Rampai Peradaban Melayu Islam diterbitkan oleh Badan Kajian Penerbitan ICMI Sum-Sel. Palembang 2012

⁷⁰ Syed Muhammad Naquib al-Attas *Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu*. Universiti Kebangsaan Malaysia. Kuala Lumpur 1972.

bukanlah masyarakat Hindu dan agama Hindu juga tidak dapat merubah pandangan hidup masyarakat di alam Melayu.

Menurut Banda ada empat tipe dasar hubungan budaya dalam politik dalam kebudayaan Melayu klasik Asia Tenggara. *Pertama*, Prototipe budaya Maritim yang berpusat pada masyarakat pedagang daerah aliran sungai, seperti Sriwijaya Abad VII-X M di Pantai Timur Sumatera di Semenanjung Melayu. Prototipe utama Budha Maritim ditemukan pada kerajaan Sriwijaya dan sering disebut kerajaan Maritim terbesar di Asia Tenggara pada masanya Abad VII-VIII M. Di sinilah pusat Peradaban Melayu berkembang. *Kedua*, prototipe tradisi feodal agraris yang berada di bawah pengaruh Hindu Budha di Angkor dan Mataram lama dan Majapahit di mana berkembang masyarakat *Hidriolic*.⁷¹ Masyarakat sawah dengan mengutamakan irigasi untuk pertanian di bawah kontrak kekuasaan raja. *Ketiga*, wilaya pengaruh tradisi China terutama di daerah Annam dan Tonkin serta Indochina umumnya di daerah tersebut terdapat golongan tuan tanah (*Landed Gentry*) dengan sistem politik birokrasi konfusione. *Kempat*, prototipe eksklusif dari budaya Melayu di Filipina yang memiliki unit sosial disebut *Baran Gay*.⁷² Diketahui oleh Datu' mengembangkan Stratifikasi sosial dan sistem kekuasaan yang rumit dan kompleks yang pernah ditemui di Asia Tenggara umumnya.⁷³

Dengan demikian dapat dipahami bahwa walaupun ada perbedaan dan kerumitan ke dalam, diantara tradisi etnik Melayu yang tersebar di Asia Tenggara, umumnya yang paling menonjol semua tradisi Melayu klasik di kawasan itu masih dapat diidentifikasi. Salah satunya adalah kultur politiknya berupa hubungan kekuasaan yang spesifik antara rakyat dan

⁷¹ Masyarakat *Hidrolic*, menurut sejarawan Donald Worster sebagai "Tatanan sosial berdasarkan manipulasi air dan produk-produknya yang intensif dalam keadaan yang gersang" merupakan ciri-ciri irigasi masyarakat Barat modern, yang menyebabkan produktivitas pertanian yang tinggi dan pergeseran demografis secara besar-besaran kearah Barat. [https:// books google co.id books](https://books.google.co.id/books) diakses Bulan Januari 2020

⁷² *Baran gay* dulu disebut *Barrio* di bahasa Kasletia merupakan sebuah pembagian daerah adminstratif paling kecil yang ada di Filipina dimana tingkat daerahnya berada dibawah Munisipalitas dan kota mandiri setingkat kelautan di Indonesia. [https// id.m. Wikipedia org wiki](https://id.m.wikipedia.org/wiki) diakses Bulan Januari 2020

⁷³ Muhammad Sirozi. *Bunga Rampai Peradaban Melayu Islam*. Badan Kajian dan Penerbitan ICMi Orwil Sum-Sel. Palembang 2012 hlm 19

raja. Keberadaan rakyat dan identitas mereka ditentukan oleh raja. Identitas individu dan kelompok merupakan hamba yang mengabdikan kepada kerajaan di alam Melayu. Namun sebaliknya raja dan kerajaan sebagai tokoh yang “Berdaulat” manakala kesetiaan rakyat terpelihara. Akan tetapi manakala kedurhakaan rakyat merupakan malapetaka bagi kerajaan begitu juga sebaliknya apabila terjadi dengan raja.⁷⁴

Pada lintasan kedua dari silang budaya Melayu modern diantara peradaban besar terjadi pergeseran pusat peradaban Melayu dari Sriwijaya di Sumatera ke Malaka di semenanjung Melayu. Islam telah mengubah coraknya secara perlahan lahan, kemudian budaya Melayu mengalami metamorfosa ke dalam format yang sekarang Islam telah ditakdirkan untuk menjadi agama dunia yang terbentang dari ujung *Globe* yang satu ke lainnya. Islam telah melahirkan corak peradaban Islam yang didasarkan pada kesatuan aqidah, ia dihadirkan untuk semua umat manusia, melampaui batas-batas Ras dan apapun latar belakangnya. Oleh karenanya ia menentang semua bentuk diskriminasi Ras dan Etnik lebih dari itu Islam tidak menghalangi seseorang untuk belajar dari pada bangsa lain, dan bahkan menganjurkan untuk mengadopsi ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya lain ke dalam cara hidup Islam sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip aqidah Islam.⁷⁵

Islam telah menciptakan Peradaban global di dunia Melayu dan merupakan basis budaya Melayu modern di Nusantara, paling tidak tesis yang dikemukakan M C Recklefs dalam sebuah karyanya ‘*A History Modern Indonesia*,’⁷⁶ seorang sejarawan Australia ini tidak menyuguhkan fakta-fakta baru tentang sejarah negeri ini, ia hanya mendaur ulang bahan dan pengetahuan sejarah yang sudah ada berdasarkan literatur yang tersedia. Lebih lanjut bahkan menjelaskan Peradaban Islam mulai berkembang Abad XIII M itu mencapai puncak kejayaannya pada zaman Malaka Abad XV-XVII M. Menurut

⁷⁴ Muhammad Sirozi. *Bunga Rampai Peradaban Melayu Islam*. Badan Kajian dan Penerbitan ICMI Orwil Sum-Sel 2012 hlm 19

⁷⁵ Mustika Zet. *Budaya Lokal Melayu dan Perubahan Peradaban Universal*. Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi PKSBE Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. 2002 hlm 10

⁷⁶ Mustika Zet. *Budaya Lokal Melayu dan Perubahan Peradaban Universal* Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi PKSBE Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Unives Negeri Padang 2002 hlm 11

Recklefs, Agama dan budaya Islam merupakan unit sejarah yang serasi dan berperan penting dalam membangun fondasi Indonesia modern termasuk Kesultanan Palembang karena berbagai alasan. *Pertama*, Islamisasi Indonesia sejak Abad XIII M telah mendorong dan terjadinya kesatuan kultural dan agama. *Kedua*, tema-tema atau isu yang saling mempengaruhi antara Islam dan ekspansi barat sejak Abad XVI M kemudian kedatangan Barat ke Indonesia masih berlangsung sampai sekarang. *Ketiga*, rekonstruksi sejarah (*Historiografi*) Indonesia sejak Abad XIII M Sudah lebih maju dari abad sebelumnya karena bersandarkan pada dokumen yang lebih kaya dengan menggunakan tulisan atau bahasa lokal.

Dengan demikian, ketiga argumen di atas agaknya memerlukan penjelasan untuk melihat lebih jauh kontinuitas dan diskontinuitas,⁷⁷ sejarah yang dibahas Recklefs. *Pertama*, sejarah Indonesia sebelum Abad XIII M adalah sejarah lokal karena watak agama Hindu yang cenderung *Inward Looking*,⁷⁸ agraris dan terbalas pada Imperium lokal yang diakuasai dengan beberapa kekecualian dan sesudah itu hilang dari sejarah, akan tetapi sebaliknya Islam memberikan pandangan *Outward Looking*, Inversalisme, urban dan jaringan-jaringan perdagangan membentuk “Persaudaraan” seiman dan itu melampaui batas-batas Imperium. Sebaliknya Islamisasi justru menyatukan Nusantara dalam satu lukas ke Melayuan (*Malaynesse*) dalam arti etnik dan identitas budaya Melayu Nusantara dengan sejumlah ciri barunya. Contoh kuatnya peran pedagang keliling (*Pedlars*) yang dikuasai Islam lokal yang mengembangkan antara satu kota dengan kota lain antara satu komunitas dan komunitas yang lain secara berantai dari pulau ke pulau.⁷⁹

Kejatuhan Malaka tahun 1511 M tidak berarti hilangnya budaya Melayu dan pedagang Melayu akan tetapi tetap

⁷⁷ *Kontinuitas* merupakan perkembangan berlangsung secara bertahap dan terus menerus, *diskontinuitas* merupakan proses perkembangan yang melibatkan proses berbeda secara kualitatif. <http://brainly.co.id tugas diakses Bulan Pebruari 2020>.

⁷⁸ *Inward looking* Suatu bentuk strategi Pembangunan yang berorientasi pada pengembangan kawasan perbatasan yang sepenuhnya ke dalam. Artinya kepusat-pusat pertumbuhan yang ada <https://texas-id 123 dok com izgdmn diakses Bulan Pebruari 2020>

⁷⁹ Mustika Zet. *Budaya Lokal Melayu dan Perubahan Peradaban Universal*. Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi (PKSBE) Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. 2002

meramaikan bandar-bandar dagang di kepulauan nusantara.⁸⁰ Ini meninggalkan akan *Essay Geerts* tentang peran ulama sebagai “*Cultural Broker*” makelar budaya,⁸¹ dan yang paling nyata tampak dalam kegiatan aktivitas nasionalis awal Abad XX M.⁸² *Kedua*, sejarah Indonesia sebelum Abad XIII M merupakan sejarah interaksi budaya sipatnya sangat lokal dan bukan hanya terbatas kepada kerajaan tertentu. *Ketiga*, sebelum Abad XIII M rekonstruksi sejarah Indonesia hanya mengandalkan sumber terbatas khususnya data arkeologi (*Inskripsi*) dan sumber-sumber tertulis dari luar India, China, Arab dan juga Barat. Semua menonjolkan interpretasi linguistik dan geo-morfologis. Namun dengan terjadinya proses Islamisasi sejarah sejak Abad XIII M sumber sejarah dari naskah lama yang diproduksi sejak Islamisasi awal tetap membuat sandaran tulisan sejarah semakin luas dan kuat dan kepastian sejarahnya cukup berat.

B. Sistem Perekonomian Bangsa Melayu

Sistem berasal dari bahasa Latin “*System*” dan bahasa Yunani “*Sustema*”. Merupakan satu kesatuan terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan untuk memudahkan aliran, informasi, materi atau energi dalam mencapai suatu tujuan.⁸³ Sistem menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan seperangkat unsur secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.⁸⁴ Sementara sistem perekonomian merupakan sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di dalam negara

⁸⁰ Ahmad Jalani Hakim. *Perdagangan dan Perkapalan Melayu di Selat Malaka Abad XV Hingga XVIII*. Kuala Lumpur Dewan Bahasa 2006 dalam Mustika Zet.

⁸¹ Clifford Geertz. *The Javanese Kijaji The Changing Role of a Cultural Broker. Comparative Studies In Society And History Vol II* (1959-1960) PP 228-249. dalam Mustika Zet “*Telaah Kritis tentang Kondisi objektif Kebudayaan Melayu Hari ini dan Esok.*” Padang Bulan Januari 2002

⁸² Mustika Zet. *Kajian Tentang Palembang. Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950*. Penerbit LP3ES Jakarta 2004 hlm

⁸³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan diterbitkan oleh Balai Pustaka cetakan pertama Jakarta 1988 <http://wikipedias diakses Bulan Januari 2020>

⁸⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan diterbitkan oleh Balai Pustaka cetakan pertama Jakarta 1988 <http://wikipedia diakses Bulan Januari 2020>

tersebut sementara terdapat perbedaan mendasar antara sistem ekonomi yang satu dengan sistem ekonomi yang lainnya.⁸⁵ Menurut Dumairi sistem perekonomian merupakan suatu bentuk sistem yang berfungsi untuk mengatur serta menjalin hubungan kerja sama dalam bidang ekonomi melalui hubungan antara manusia dengan seperangkat kelembagaan <https://www.artib.ac.id/wdp/> diakses Bulan Maret 2018. Dengan demikian dalam konteks sistem perekonomian bangsa Melayu dapat dipahami bahwa sistem tersebut yang digambarkan oleh bangsa Melayu untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki baik kepada individu maupun organisasi di bangsa Melayu tersebut.

Seiring dengan masuk dan berkembangnya Islam melalui jalur perdagangan, Melayu dan budayanya secara historis baru dikenal semenjak kerajaan-kerajaan Islam di kepulauan, Semenanjung Sumatera dan Selat Malaka mulai berdiri Abad XIII - XVI M. Di mana sistem mulai berubah dengan sistem yang bercorak Islam sebagai otoritas spiritual, politik, pengetahuan, kebudayaan dan yang paling utama dalam sistem Perekonomian dan perdagangan. Ajaran Islam diterima secara menyeluruh oleh masyarakat Melayu dikarenakan Islam tidak mengenal sistem kasta dan sangat menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan sesama manusia. Sehingga meningkatkan keterlibatan seluruh masyarakat di semua lini kehidupan disamping itu Islam sebagai dasar Filosofis dan Rasional yang kokoh telah mempengaruhi seluruh kehidupan orang Melayu termasuk dalam sistem Perekonomian bangsa Melayu. Dalam konteks kehidupan sehari-hari Islam menjadi sumber ajaran utama, dan menjadi identitas orang Melayu. Pembauran Islam dengan Ras Melayu secara geografis, politis dan ekonomis merupakan hal yang tidak dapat terelakkan sehingga jaringan keislaman di semenanjung Sumatera dan Jawa memang tergantung dengan Melayu.⁸⁶ Disamping itu kekuatan Islam Melayu di semenanjung juga tidak terlepas dari faktor Perekonomian masyarakat Melayu yang cukup baik

⁸⁵ <http://id.m.wikipedia.org> wikis diakses Bulan Januari 2020

⁸⁶ Mustofa Abubakar. *Peradaban Melayu. Pungutan Ekonomi Masyarakat Melayu Dalam Pengaturan Ekonomi Global*. Posted Bulan Januari 2013 in uncategorized.

sehingga memudahkan Islam berkembang lebih luas di dunia Melayu.⁸⁷

Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat rumpun Melayu pernah mengalami masa keemasan, terbukti dengan aktivitas perdagangan yang dijalankan oleh masyarakat Melayu yang telah merambah ke berbagai belahan dunia pada masanya. Akan tetapi masa kegemilangan masyarakat Melayu yang terjadi di masa lampau tidak nampak terlihat pada masa sekarang di mana kalau kita perhatikan Perekonomian masyarakat Melayu tertinggal dibandingkan dengan Perekonomian Barat dan China. Kesadaran berekonomi masyarakat Melayu sebagai saudara serumpun semakin berkurang puak-puak Melayu menjadi tercerai-berai akibat politik pecah belah yang dilancarkan pemerintah kolonial, dan masyarakat Melayu termarginalisasi akibat perkembangan ekonomi kapitalis dan sistem globalisasi. Keunggulan sistem perekonomian yang di bangun dengan semangat kemelayuan dan berdasarkan nilai-nilai moral Islam menjadi Pendorong dan faktor penggeraknya yang memberi corak ekonomi baru dan mempercepat terwujudnya sistem Islam terutama keterkaitan dengan Perekonomian dan Melayu menjadi unggul sehingga jejak Melayu memberikan corak di mana-mana termasuk corak ekonomi Melayu di Kesultanan Palembang.⁸⁸

Dengan demikian kedatangan Islam ke dunia Melayu merupakan moment terpenting untuk merubah secara keseluruhan pemikiran Peradaban dan bahkan keterkaitan dengan Sistem Perekonomian Melayu walaupun secara evolusi dari aspek penyebarannya. Akan tetapi dalam hal kerohanian atau spiritual agama, Islam telah merevolusi orang Melayu.⁸⁹ Artinya ajaran Islam yang mengajarkan kebutuhan dan telah mengubah pandangan dunia Melayu yang tadinya mempercayai dewa-dewa dan yang mengagung-agungkan raja telah di manusiakan menjadi seorang sultan yang bertugas sebagai Khalifah yang memimpin dan melindungi masyarakat Melayu dan berperan dalam menegakkan pemerintahan Islam di dunia

⁸⁷ Dida Nuraida. *Kemajuan Ekonomi dan Politik Kerajaan Melayu Pattani Pada Masa Pemerintahan Raja Maju*. th 1624-1635

⁸⁸ Mustofa Abu Bakar *Peradaban Melayu Penguatan Ekonomi Masyarakat Melayu dalam percaturan masyarakat glaobal* <https://teukuzerwolpress.com/2013/01/18> diakses Pebruari 2020

⁸⁹ Ismail Hamid. *Masyarakat dan Budaya Melayu*. Kuala Lumpur dewan bahasa dan pustaka 1987 hlm 59

Melayu. Masuknya Islam ke dunia Melayu melahirkan beberapa kerajaan Melayu Islam yang kuat seperti kerajaan Samudra Pasai, Aceh, Pattani, Demak dan Malaka bahkan kerajaan-kerajaan ini menjadi pusat pengembangan keilmuan.⁹⁰

Di alam Melayu ada beberapa undang-undang sebagai panduan masyarakat Melayu dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sistem undang-undang Melayu yang pernah menjadi pusat ketamadunan Melayu adalah undang-undang Melaka dan Majapahit. Di Malaka ada dua teks undang-undang hukuman Malaka yaitu undang-undang Laut Malaka dan undang-undang Pebian Malaka. Sementara undang-undang Majapahit dikenal dengan Kunta Manawa. Masuknya Islam mempengaruhi undang-undang Malaka dan undang-undang Laut Malaka dengan menerapkan hukum Islam (*hudud*) undang-undang Islam berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah telah diaplikasikan oleh Kesultanan Melayu,⁹¹ dalam arti kedatangan Islam telah memberikan pengaruh besar baik dalam bidang Aqidah, Undang-undang, Pemerintahan maupun Perekonomian bangsa Melayu.

Dari aspek Perekonomian Melayu, pencapaian tertinggi masyarakat Melayu dapat dilihat dari catatan yang diperoleh dari China, India, Arab, Persia, Yunani, Eropa, tentang terwujudnya tradisi kemaritiman yang begitu hebat di dunia Melayu. Tradisi kemaritiman dimaksud merupakan aktivitas utama kerajaan Melayu dalam bidang perekonomian, perdagangan dan perniagaan yang bertumpu di kawasan bandar atau bandar pelabuhan.⁹² Perdagangan, Perniagaan, serta Kemaritiman merupakan aktivitas utama masyarakat Melayu tradisional. Majunya Perekonomian dan perdagangan di alam Melayu dapat dilihat dari banyaknya pelabuhan sebagian besar berjaya kemudian berkembang menjadi kerajaan pelabuhan

⁹⁰ Muhammad Koharuddin, Muhammad al-Balwi. *Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu*. Universitas Teknologi Malaysia (UTM) Malaysia. 2005 hlm 102.

⁹¹ Muhammad Koharuddin Muhammad al-Balwi *Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu Malaysia* Universitas Kebangsaan Malaysia. 2005 hlm 56-57

⁹² Muhammad Koharuddin dan Muhammad al-Balwi. *Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu*. Universitas Teknologi Malaysia(UTM) Malaysia. 2005 hlm 59

dapat membentuk negara baru berupa “Negara Kota” pelabuhan dan sampai dapat membentuk negara maritim yang besar dan memperluas kekuasaan dengan menguasai pelabuhan lain. Hadirnya pedagang Melayu sendiri yang aktivitasnya melakukan perdagangan sampai ke China dan India, dengan masuknya Islam ke dunia Melayu, cara berdagang dan sistem Perekonomian Melayu lebih menerapkan Syari’at Islam,⁹³ dan nilai-nilai keislaman menjadi dasar dan panduan dalam berekonomi di dunia Melayu termasuk di Kesultanan Palembang Darussalam.

Aktivitas Perekonomian orang Melayu sekitar Abad XIX M menjelaskan bentuk Perekonomiannya masih bersifat subsistem (sendiri dan keadaannya) tertutup secara tradisional, kurang berdaya saing dan hasil produksinya berskala kecil dan berada pada produktivitas yang rendah.⁹⁴ Pandangan ini tidak jauh berbeda dengan pandangan J. M Gullick, Seorang sarjana barat yang berpendapat bahwa sistem ekonomi bangsa Melayu bersifat sendiri-sendiri (*Subsistem*), di mana mereka hanya mampu menghasilkan sumber produksi untuk keperluan diri dan keluarga. Manakala ada kebutuhan lain komoditas itu dijual untuk mendapatkan uang serta barang keperluan yang tidak dapat dihasilkan oleh mereka sendiri,⁹⁵ jika ada interaksi dengan dunia luar maka mereka mau melakukan secara kecil-kecilan dalam bentuk pertukaran untuk mendapatkan barang keperluan seperti Garam, Peralatan besi, dan tekstil.

Seorang sejarawan yang telah mengkaji tentang golongan petani dan ekonomi pertanian sependapat tentang interpretasi bahwa ekonomi pertanian Melayu berbentuk perorangan sendiri-sendiri (*Subsistem*). Sebaliknya ada penelitian yang menggunakan istilah dan konsep Marxish yang menerangkan bahwa bentuk Perekonomian orang Melayu menjelang Abad XX

⁹³ Herlina. *Islam dan Pengaruhnya dalam Peradaban Melayu*. Lecturer of library of faculty of Adab and Islamic Culture Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.2018

⁹⁴ Mohammad. Kasturi Norbin Abdul Aziz. *Warisan Kesultanan Melayu. Surut Masyarakat Sultan Abdul Hamid dan Ekonomi Kedudukan Seri International Journal of The Malay World* 29(2) 2011 hlm 46

⁹⁵ *Subsistem* merupakan kemampuan yang koheren dan agak independen dari sistem yang lebih besar. subsistem merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem. subsistem ini bisa fisik atau abstrak subst itu when ini sebenarnya hanyalah sistem di dalam suatu istilah ini berarti berada pada lebih dari satu tingkat. <http://brainly.co.id> diakses Bulan Pebruari 2020

M. Penelitian tersebut berbeda dari sudut konsep dan ide yang diambil dari sudut pandang Anthropologi dan sosiologi khususnya, ⁹⁶ misalnya menurut Shaharil Thalib mengemukakan pendapatnya tentang cikal bakal Perekonomian orang Melayu khususnya di Kelantan Abad XIX M. Akan tetapi bukan berarti tidak ada pendekatan lain tentang corak Perekonomian orang Melayu, khususnya berdasarkan pada pertanian pada Abad XIX M. Contohnya berpendapat bahwa pada tahun 1880-an. Perekonomian subsistem (*Saradiri*) orang Melayu terutama di Pahang tidak lagi berfungsi dengan sepenuhnya disebabkan ketertarikan pedagang yang berpuncak pada permintaan Singapura terhadap beberapa hasil produksi orang Melayu terutama di Pahang.

1. Nilai-Nilai Filosofis

Istilah nilai dalam bahasa Inggris berarti “*Value*” menurut bahasa lain asal katanya “*Velere*” dalam kamus besar bahasa Indonesia,⁹⁷ nilai bermakna “*Harga*” sedangkan secara Filosofis merupakan hakikat diri dari semua kehendak Tuhan yang secara kehendaknya telah tercurahkan kepada jiwa manusia.⁹⁸ Nilai merupakan harga diri dan keberlangsungan duniawi. Rahman Mulyana memaknai nilai secara denotatif dengan “*Harga*” dan ketika makna itu dihubungkan dengan konsep lain maka maknanya akan menimbulkan interpretasi yang beragam. Dalam konteks sistem Perekonomian Melayu dapat dimaknai satu keyakinan bahwa ekonomi Melayu merupakan suatu unit perekonomian antara kawasan berbasis nilai-nilai filosofis kebersamaan dan kesamaan kondisi-kondisi sosial kultural ekonomi masyarakat Melayu. Pemain utamanya merupakan masyarakat Melayu itu sendiri dalam berbagai tingkat dan bentuk aktivitas ekonomi yang secara bersama-sama

⁹⁶ Abdullah Azmi Khalid. *Ekonomi Melayu Kurun Ke-19: Saradiri Komersial dalam Badriah Haji Salleh dan Tan Ijok Ee (Penyut) Alam Pensejarahan dari Berbagai Prospek*. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur 1996 hlm 225.

⁹⁷ Badan dan pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan diterbitkan oleh Balai Pustaka cetakan Pertama Jakarta 1988 <http://wikipedia diakses Bulan Januari 2020>

⁹⁸ Beni Ahmad Sabani. *Filsafat ilmu*. Diterbitkan CV Pustaka Setia Bandung. 2009 hlm 190

membangun sebuah gerakan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi bangsa Melayu.⁹⁹

Kalau disimak perjalanan Rasulullah SAW dalam membangun Perekonomian Madinah maka paling tidak ada tiga hal yang mendasar menjadi perhatian jika ingin menerapkan dalam konteks dunia Melayu dalam membangun sistem Perekonomiannya. Ketiga landasan tersebut atau *Pertama*, nilai-nilai filosofis *Kedua*, prinsip operasional dan *Ketiga*, tujuan yang ingin dicapai, dalam sebuah bangunan sistem ekonomi termasuk sistem Perekonomian bangsa Melayu.¹⁰⁰ Secara Filosofis sistem Perekonomian Melayu merupakan sebuah sistem Perekonomian yang dibangun di atas nilai-nilai ke Melayuan dan nilai-nilai ke Melayuan itu identik dengan Islam di mana prinsip tauhid yang mengedepankan nilai-nilai Islamiyah (Ketuhanan),¹⁰¹ yang menjadi inti dari sistem Perekonomian ini. Perekonomian bukanlah entitas berdiri sendiri akan tetapi sebuah bagian kecil dari bingkai ibadah kepada Allah SWT QS. az-Zariyat 56.¹⁰²

Adam Smith dianggap sebagai bapak ekonomi kapitalis mengatakan bahwa contoh terbaik masyarakat yang berperadaban tinggi yang kuat secara ekonomi dan politik adalah masyarakat Arab Madinah dibawa pimpinan Muhammad SAW oleh karenanya menurut Adam Smith, mengadopsi nilai-nilai moral orang Islam dalam sistem perekonomian merupakan syarat mutlak untuk membangun sistem

⁹⁹ Mustika Zet *Menggagas Zona Ekonomi Melayu Beberapa Catatan Berdasarkan Telaah Sejarah Pusat kajian Sosial Budaya dan Ekonomi Universitas Negeri Padang diselenggarakan masyarakat peduli Kebudayaan Padang 2002* hlm 8 http://www.academi.edu/zona_e diakses Bulan Januari 2020

¹⁰⁰ Vaithzal Rivai. *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tapi Solusi*. Penerbit Bumi Aksara Jakarta. 2009 hlm 212.

¹⁰¹ Adi Warman Karim. 2001. Mengemukakan ada empat landasan Sistem Ekonomi Islam yang menjadi Pembeda utama dengan ekonomi konvensional. *Pertama*, Nilai-nilai Tauhid. *Kedua*, Keadilan dan keseimbangan. *Ketiga*, Kebebasan, maksudnya manusia bebas untuk melakukan aktivitas ekonomi sejauh tidak ada larangan dari Allah SWT. Dengan demikian pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi Islam diberi kekuasaan untuk berkreativitas dan berinovasi dalam mengembangkan kegiatan ekonomi. *Kempat*, pertanggung jawaban. Adi Warman Karim. *Ekonomi mikro Islam edisi ketiga* divisi buku perguruan tinggi. Penerbit PT. Grafindo Persada Jakarta 2008 hlm 34-41

¹⁰² Vaithzal Rivai. *Islamic Economic Ekonomi Ekonomi Syari'ah Bukan Opsi tapi Solusi*. Diterbitkan Bumi Aksara Jakarta 2009 hlm 212

perekonomian yang kuat dan berkah,¹⁰³ termasuk sistem perekonomian bangsa Melayu. Kalau dilihat dari nilai-nilai filosofisnya sistem perekonomian bangsa Melayu bercorak Islam. Menurut Abdurrahman Embung dalam konteks budaya yang meliputi nilai, simbol, adat resam serta institusi dalam masyarakat memberikan kesan terhadap hasil dan keputusan ekonomi. Bahkan aktivitas- aktivitas ekonomi merupakan bagian dari Peradaban dan budaya. Sistem nilai suatu budaya memberikan arah dan tujuan kepada sistem ekonominya, oleh karenanya semua aktivitas sistem Perekonomian dapat berlaku adil bergantung kepada sistem nilai-nilai budaya yang mengikutinya.¹⁰⁴

Konsep serta nilai-nilai Filosofis Perekonomian bangsa Melayu adalah sebuah nilai dasar dalam mengkonstruksi kerjasama ekonomi khas kelompok masyarakat Melayu yang di konstruksi atas dasar semangat Kekeluargaan, Kebersamaan dan Kerjasama ekonomi jaringan karena kesamaan kultural dalam arti luas. Sistem ekonomi jaringan yang hendak dibangun dalam ruang lingkup ini bukan bersifat kapitalistik dan pentolannya akan tetapi rancang bangun nilai-nilai filosofi ekonomi Melayu tersebar lebih dekat kepada sistem Perekonomian yang berbasis kerakyatan,¹⁰⁵ atau ekonomi kerakyatan yang sudah dirasionalkan dengan pengertian bahwa sistem Perekonomian Melayu tersebut lebih berpihak pada kelompok masyarakat yang mayoritas ekonomi lemah dan menengah ke bawah.¹⁰⁶ Basis teoritis dan konsep nilai-nilai

¹⁰³ Vaithzal Rivai. *Islamic Economic Ekonomi Syari'ah Bukan Opsi tapi Solusi*. Diterbitkan Bumi Aksara Jakarta 2009 hlm 212

¹⁰⁴ Abdul Rahman Embong. *Pembangunan dan Kesejahteraan agenda Kemanusiaan Abad ke-21 Syarahan Perdana jawalan Profesor 26 September*. Bangi penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

¹⁰⁵ Revrison Baswir. Menyatakan ekonomi kerekayatan sebuah Sistem Perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Tiga prinsip dasar ekonomi kerekayatan: *Pertama*, Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. *Kedua*, Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. *Ketiga*, Bumi dan air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hastangka. *Filsafat konomi Pancasila Mubyarto Jurnal filsafat vol 22 Nomor 1, April 2012 hlm 42 diakses Bulan Januari 2020*

¹⁰⁶ Mustika Zed. *Mengqaqas Zona Ekonomi Melayu*. Beberapa Catatan Berdasarkan Telaah Sejarah Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi

filosofis Perekonomian Melayu lebih dekat dengan pemikiran Hattanomics atau pemikiran ekonomi Muhammad Hatta dengan memperluas jangkauan operasionalnya yang mencakup trans-nasional yaitu dunia Melayu.¹⁰⁷ Masyarakat “Dunia Melayu” subjek utamanya dari aktivitas Perekonomian, mereka kelompok-kelompok masyarakat pendukung kebudayaan (*Tamaddun*) Melayu yang meliputi seluruh puak-puak Melayu yang tersebar di sebagian besar negara-negara Asia Tenggara, seperti sebagian di Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina Selatan, Thailand Selatan dan sebagian besar kondisi Perekonomian mereka sangat menyedihkan. Masyarakat Melayu masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup secukupnya terutama dalam sektor agraris, nelayan, pekerja kasar dan hanya sebagian kecil masuk menjadi pelaku dunia usaha pada modal.¹⁰⁸

Penguasaan perekonomian oleh masyarakat Melayu jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat bukan Melayu, seperti Barat dan China. Menurut Selo Sumardjan, masyarakat Melayu terbiasa dengan pekerjaan yang lebih berorientasi pada kehidupan bermasyarakat (*Socially oriented*) daripada bersifat material (*Material oriented*) hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Melayu lebih menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan, Kebersamaan dan gotong-royong daripada sikap individualisme yang dalam satu dekade belakangan semakin besar seiring dengan perkembangan kapitalisme mendunia.¹⁰⁹ Tingkat kemiskinan yang tinggi dan rendahnya pendidikan dialami masyarakat dunia Melayu, disamping sikap kesederhanaan dan sosialisme yang tinggi berakar pada budaya masyarakat Melayu tidak diiringi dengan semangat untuk maju dan beradaptasi dengan perubahan dinamika yang terjadi di

Universitas Negeri Padang.2002.hlm 8 https://www.academia.edu/zona_E diakses Bulan Januari 2020

¹⁰⁷ Tang Hattanomics. Telah dikemukakan dalam tulisan Mustik Zet *Cara baik Bung Hatta* (In Print Bung Hatta) Universiti Press Padang 2002. https://www.academia.edu/zona_ekonomi diakses Bulan Januari 2020

¹⁰⁸ Padat modal merupakan Industri yang dibangun dengan modal besar dari dukung dengan teknologi tinggi. Industri padat modal merupakan industri dalam proses produksinya cenderung menetapkan dan tergantung pada penggunaan mesin mesin dibandingkan dengan penggunaan tenaga manusia. <https://idm.wikipedia.org.wikip> diakses Bulan Januari 2020

¹⁰⁹ Mustafa Abu Bakar. *Peradaban Melayu Penquatan Ekonomi Masyarakat Melayu dalam Percaturan Ekonomi Global*. <https://www.teukuzer.woldpress.com/> 2013/3/01/ Posted Bulan Januari 2020.

dunia. Pengkiblatan menejemen perekonomian dunia Barat diambil mentah-mentah begitu saja berikut sistem berdagangnya. Sistem perekonomian Melayu tidak akan berhasil jika tidak didasarkan atas kebudayaan dan tata nilai-nilai luhur yang dianut oleh bangsa Melayu itu sendiri.¹¹⁰

2. Pola Hubungan Kerjasama Produksi dan Distribusi

Pola hubungan kerjasama produksi, distribusi dan konsumsi merupakan suatu rangkaian aktivitas perekonomian yang tidak bisa dipisahkan. Ketiganya saling mempengaruhi akan tetapi harus diakui bahwa produksi merupakan titik awal dari aktivitas tersebut. Tidak akan ada distribusi tanpa adanya produksi.¹¹¹ Produksi membutuhkan adanya aktivitas distribusi dan konsumsi dalam arti aktivitas produksi tanpa adanya aktivitas distribusi dan konsumsi tidak akan berjalan dengan baik. Dengan kata lain dapat dipahami bahwa produksi harta kekayaan sangatlah penting dan perlu akan tetapi yang lebih penting dari semua itu keterkaitan dengan distribusi kekayaan, Jika para produsen rajin bekerja keras akan meningkatkan kekayaan negara akan tetapi jika pendistribusian kekayaan tidak adil maka sebagian besar kekayaan tersebut akan masuk kekantong-kantong sebagian kecil pemilik modal.

Sementara sebagian besar masyarakat tetap miskin sebab bertumpunya kekayaan nasional tidak bermanfaat buat mereka karena dapat dikatakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tergantung bukan pada produksi saja akan tetapi pada pendistribusiannya. Kekayaan akan diproduksi dalam jumlah besar jika pendistribusiannya tidak didasarkan atas prinsip-prinsip yang benar dan adil maka negara tersebut tidak dapat mencapai kemakmuran termasuk di Kesultanan Palembang.¹¹² Dalam teori ekonomi makro menjelaskan kemajuan ekonomi pada tingkat individu maupun bangsa dapat diukur dengan tingkat produktivitasnya daripada kemewahan

¹¹⁰ Mustafa Abu Bakar. *Peradaban Melayu Penuatan Ekonomi Masyarakat Melayu dalam Percaturan Ekonomi Global* <https://www.teukuzerwoldpress.com/2013/3/01/18> Posted Bulan Januari 2020

¹¹¹ Sudono Sukirno. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Penerbit Bina Grafika Jakarta 1981

¹¹² Afzalurrahman Muhammad *Seorang Pedagang Muhammas As A Trade*. Penerbit Yayasan Swarna Bhumi cetakan ke empat Jakarta 2000 hlm 285.

konsumtif, atau dengan kata lain mengutamakan kemampuan eksportnya daripada agregat import.¹¹³

Sejak dulu hingga sekarang masih berlangsung kontrapersepsi luas dan sengit tentang pokok persoalan distribusi pendapatan nasional antara berbagai golongan rakyat di setiap negara demokrasi di dunia, termasuk juga pada masa Kesultanan dunia Melayu. Hal ini disebabkan kesejahteraan ekonomi rakyat sangat tergantung pada cara distribusi seluruh pendapatan. Menurut al-Manan teori distribusi hendaknya dapat mengatasi masalah distribusi pendapatan nasional diantara berbagai kelas rakyat. Terutama ia harus mampu menjelaskan fenomena bahwa sebagian kecil orang kaya-raya dan sebagian besarnya orang miskin. Celaknya di kalangan ahli ekonomi modern menganggap masalah distribusi itu bukan masalah distribusi perseorangan melainkan sebagai masalah distribusi fungsional.¹¹⁴

M.A. Manan mengemukakan bahwa teori ekonomi modern mengenai distribusi merupakan suatu teori menetapkan harga jasa produksi. M.A Manan berusaha menemukan nilai jasa dari berbagai faktor produksi, dalam hal ini teori itu hanya merupakan perpanjangan teori umum penetapan harga.¹¹⁵ Dalam ekonomi Islam tujuan utama produksi untuk kemaslahatan umat baik secara individu maupun masyarakat secara berimbang, Islam menerima motif ekonomi berproduksi sebagaimana motif dalam sistem ekonomi konvensional hanya saja lebih jauh Islam menambahkan nilai-nilai moral disamping identitas ekonomi.¹¹⁶ Islam mendorong umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan. Islam memberkati pekerjaan dunia ini dan

¹¹³ Sudono Sukirno. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Penerbit Bina Grafika Jakarta 1981

¹¹⁴ M.A. Manan. *Ekonomi Islam Teori dan Praktek. Islamic Economics Theory And Practice. Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Penerbit PT Intermedia Jakarta. 1992.hlm 113.

¹¹⁵ M.A .Abdul Manan *Ekonomi Islam Teori dan Praktek Islamic Economic Theory and Practice*. Penerbit Intermedia Jakarta 1992 hlm 113

¹¹⁶ IDRI Prof *Hadist Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi*. Penerbit Kharisma Putra ulama. Kencana Jakarta 2015 hlm 63

menjadikannya bagian dari ibadah dan jihad.¹¹⁷ Disamping itu, Islam memprediksi sesuatu bukanlah sekadar untuk dikonsumsi sendiri atau dijual akan tetapi lebih jauh dari itu menekankan bahwa setiap kegiatan produksi dituntut untuk mewujudkan fungsi sosial¹¹⁸ QS. 57 al-Hadid ayat 7.

Dalam menjalankan aktivitas produksi harus memperhatikan aspek kehalalan, dalam ekonomi Islam tidak semua aktivitas yang menghasilkan barang sangat terkait erat dengan halal dan haramnya suatu barang atau jasa dan cara memperolehnya dengan kata lain aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa yang halal saja dapat disebut sebagai aktivitas produksi.¹¹⁹ Oleh karena itu menurut M.M Metwally dalam sebuah perusahaan misalnya asumsi-asumsi produksi harus dilakukan untuk barang halal dengan proses produksi dan pasca produksi yang tidak menimbulkan kemudharatan. Semua orang diberikan kebebasan untuk melakukan usaha produksi asalkan halal dan tidak menimbulkan kemudharatan.¹²⁰

Moralitas ahli ekonomi memfokuskan perhatiannya pada produksi dengan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan produksi serta memperbaiki kualitas dan kuantitasnya akan tetapi bertambahnya hasil produksi tidak cukup untuk menciptakan manusia yang hidup aman dan sejahtera. Sebab sangat mungkin produksi ini baik sebagian atau bahkan seluruhnya digambarkan untuk urusan yang tidak bermanfaat bagi tubuh manusia, merusak jiwa dan akal, serta tidak membahagiakan keluarga dan masyarakat.¹²¹ Disamping itu ada satu hal yang perlu diperhatikan bahwa kita menemukan ada segelintir manusia memproduksi sesuatu yang halal akan tetapi tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat,

¹¹⁷ Yusuf Qadardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam. Daurul Qitam Wal Akhlag Fil Iqshodil Islam Maktabah Wahbah*. Kairo Mesir. 1995. Penerbit Gema Insani Press. Jakarta 2016 hlm 91.

¹¹⁸ Mustofa Edwin Nasution. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Freenada Media Group Jakarta 2010 hlm 106

¹¹⁹ Adi Warman Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Penerbit Raja Grafindo Persada Jakarta 2006 hlm 257.

¹²⁰ Metwally. "A Behavioural Model of An Islamic Firm" dalam *Readings In Micro Economic An Islamic Perspective (Malaysia Longman)*. Malaysia 1992 hlm 131-132 dalam Idri Hadist Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi. Penerbit Prenada Media Group Jakarta 2015 hlm 71.

¹²¹ Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam Darul Qalam Wal Akhlag Fil Iqtishadil Islami Maktabah Wahbah* Kairo Mesir 1995 Penerbit Gema Insani Press Jakarta 2015 hlm 121

sementara mereka memproduksi berbagai kenikmatan Allah SWT hanya untuk mengajar eksport dengan menawarkan harga yang tinggi, dalam hal seperti ini perlu dicegah QS. al-A'raf 32. Pertumbuhan ekonomi terjadi dengan bertambahnya produksi dan semakin dewasanya konsumen inilah target yang dikejar oleh Islam lewat konsep ekonominya di bidang konsumsi dan distribusi.¹²²

Dalam konteks distribusi menurut M.A Manan sebagaimana telah dikemukakan di awal, sejak dulu hingga sekarang masih berlangsung kontroversi luas dan sengit tentang pokok persoalan distribusi pendapatan nasional antara golongan rakyat di setiap negara. Hal ini disebabkan oleh kesejahteraan ekonomi rakyat sangat tergantung pada cara distribusi suruh pendapatan nasional.¹²³ Pembahasan tentang distribusi pendapatan tidak bisa lepas dari konsep moral ekonomi yang dianut, disamping itu juga tidak bisa lepas dari model instrumen yang diterapkan individu ataupun negara dalam menentukan sumber-sumber maupun cara-cara pendistribusian pendapatannya. Konsep moral ekonomi tersebut berkaitan dengan kebendaan (*Materi*), kepemilikan dan kekayaan (*Property and Wealth Concept*) harus dipahami untuk tujuan menjaga persamaan ataupun mengikis kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Idealisme prinsip-prinsip ekonomi harus disepakati dalam koridor pencapaian standar hidup secara umum dan pencegahan eksploitasi kelompok kaya terhadap kelompok miskin, untuk meminimalkan kesenjangan dan ketidakseimbangan distribusi. Pajak diterapkan atas kekayaan seseorang untuk membantu yang miskin dan bentuk dari sistem perpajakan ini berkaitan dengan salah satu prinsip pokok dalam Islam berupa zakat. Dengan demikian tidak ada ruang bagi miskin untuk melakukan tindak kekerasan dalam upaya melancarkan proses distribusi pendapatan.¹²⁴ Oleh karena nya di antara bidang terpenting dalam Perekonomian adalah bidang distribusi. Dalam sistem ekonomi kapitalis perdagangan

¹²² Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam darul Qalam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami Maktabah Wahbah*. Kairo Mesir 1995 Penerbit Gema Insani Press Jakarta 2015 hlm 122

¹²³ M.A. Manan. *Ekonomi Islam Teori dan Praktek Islamic Economic Theory and Practice*. Penerbit Intermedia Jakarta 1992 hlm 113

¹²⁴ Mustafa Edwin Nasution. *Pengetahuan Eksklusif Ekonomi Islam* Penerbit Kencana Prenada Media Group Jakarta 2010 hlm 219

terpusat pada distribusi paska produksi, setelah mereka menghasilkan barang untuk suatu proyek pandangan mereka terfokus pada uang dan harta.¹²⁵

Menurut Yusuf al-Qardhowi dalam kaitan dengan distribusi hasil produksi paling tidak ditemukan ada empat bagian. *Pertama*, upah dan gaji untuk para pekerja yang biasa terjadi pada upah yang seimbang. *Kedua*, keuntungan sebagai imbalan modal yang dipinjam oleh pengelola proyek. *Ketiga*, sewa tanah yang digunakan untuk melaksanakan proyek itu. *Keempat*, laba bagi manajer yang mengelola dan mengurus pelaksanaan proyek dan sebagai pertanggungjawabnya. Sistem ekonomi kapitalis memberikan kebebasan kepemilikan (*Private property*) dan memperbolehkan pemindahan kekayaan dengan cara pewarisan atau hibah, akan tetapi tidak membuat aturan-aturan terkait dengan penentuan tersebut. Kapitalis didasari oleh sistem nilai (*Value based*) berupa sekularisme dan materialisme. Sekularisme berusaha untuk memisahkan ilmu pengetahuan dari agama dan bahkan mengabaikan dimensi normatif atau moral yang berdampak pada hilangnya kesakralan kolektif (yang diperbolehkan oleh agama) yang dapat digunakan untuk menjamin penerimaan keputusan ekonomi sosial. Paham materialisme cenderung mendorong orang untuk memiliki pemahaman yang parsial tentang kehidupan dengan mengangap materi adalah segalanya.¹²⁶

Sementara sistem ekonomi sosialis mengabaikan kepemilikan pribadi bagi unsur-unsur produksi. Oleh karena itu sistem distribusinya berdasarkan pada prinsip tiap individu sesuai dengan tingkat kemampuannya, dan tiap individu sesuai tingkat kebutuhannya serta berdasarkan pada parealisasi keadilan pembagian pemasukan bagi tingkatan pekerja yang berdasarkan pada pilar-pilar sosial. Berbeda dengan itu dalam Perekonomian Islam distribusi lebih ditekankan pada penyaluran harta kekayaan yang diberikan kepada beberapa pihak baik individu, masyarakat, maupun negara. Menurut Afzahur Rahman yang dimaksud dengan distribusi adalah suatu

¹²⁵ Yusuf al-Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam Darul Qalam Wal Akhalaq Fil Iqtishad Islam Makhtabah Wahbah Kairo Mesir*. Penerbit Gema Insani Press Jakarta 2016 hlm 185

¹²⁶ M.B. Hendri Onto. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Penerbit Ekonesia Universitas Islam Indonesia Jogjakarta 2003 hlm 34

cara di mana kekayaan disalurkan atau dibagikan kepada beberapa faktor produksinya yang kemudian memberikan kontribusi kepada individu-individu masyarakat maupun negara.¹²⁷ Islam tidak memperbolehkan distribusi barang atau jasa yang dilarang seperti bunga modal dan bunga pinjaman karena termasuk riba.¹²⁸

Ekonomi Islam menghendaki agar suatu barang didistribusikan kepada yang berhak menerimanya.¹²⁹ Jika distribusi kekayaan di dalam masyarakat tidak adil atau tidak merata maka kedamaian sosial selalu menjadi taruhannya dan konflik antara si kaya dan si miskin dapat berlanjut ke revolusi berdarah. Kantong-kantong kemakmuran tidak dapat hidup di dalam lautan kemiskinan dan oleh karenanya distribusi kekayaan yang adil dan merata merupakan hal yang amat penting bagi masyarakat demi mewujudkan kedamaian, kebahagiaan dan kemakmuran. Tujuan dasar Islam adalah mewujudkan kebahagiaan (*Falah*) di dunia dan di akhirat serta untuk mewujudkan persaudaraan antara anggota masyarakat Muslim (*Ummah*). Tujuan ini tidak dapat dicapai jika distribusi kekayaan diantara para anggota masyarakat Muslim berlangsung tidak adil, jurang antara si kaya dan si miskin amat lebar serta konflik antara kelas terjadi di masyarakat.¹³⁰

Oleh karenanya, sistem ekonomi Islam mencoba untuk menegakkan aturan distribusi kekayaan yang merata diantar anggota masyarakat muslim dengan mengambil tindakan yang amat efektif QS. al-Hasyir 59:7 QS. al-Taubah 9:34. Teori distribusi kekayaan yang dibawa oleh Islam didasarkan pada filosofi yang jelas Allah SWT pemilik segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi dia pemelihara dan penjaga semua makhluk. Allah SWT adalah “*produsen*” kekayaan yang sebenarnya. Tidak diragukan lagi bahwa manusia memiliki semangat untuk berusaha dan usahanya pun berbuah tetapi semua itu tidak

¹²⁷ Afzalur Rahman. *Muhammad Seorang Pedagang*. Penerbit Yayasan Swarna Bhumi Jakarta 1997 hlm 54

¹²⁸ Yusuf al-Qaradhawi. *Fawaidh al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Muharroman*. Mesir Dar-al-wafa terjemah Zainal Arifin Penerbit Gema Insani Press Jakarta 1999 hlm 80.

¹²⁹ Idri. *Hadits Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi*. Penerbit Kharisma Putra Utama Kencana. Jakarta 2015 hlm 130

¹³⁰ Muhammad Sharif Chaudhry. *Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam (Fundamental of Islam Economic System)*. Penerbit Prenada Media Group Jakarta 2016 hlm 78

akan menghasilkan, rencana akan gagal jika Allah SWT menahan pertolongan-Nya, al-Quran sering mengingatkan. QS al-Waaqiah 56: 63-65, QS al-Waaqi'ah 56: 68-72. Untuk mewujudkan distribusi kekayaan yang adil jujur dan merata Islam menetapkan tindakan tindakan yang positif dan *Prohibitif*.¹³¹ Tindakan positif mencakup zakat, hukum pewarisan dan kontribusi lainnya baik yang bersifat wajib maupun sukarela. Tindakan *Prohibitif* mencakup dilarangnya bunga, menimbun, minuman keras, dan judi.

Di atas semua itu dilarangnya semua upaya untuk mendapatkan harta secara tak bermoral, tidak jujur, tidak adil, dan haram yang ternyata merupakan sebab utama terjadinya konsentrasi kekayaan berada di tangan sedikit orang. Dalam konteks kerjasama hubungan produksi dan distribusi di dunia Melayu dapat dilihat pada masa Abad XIX M di mana dunia Melayu khususnya daerah Malaysia terutama Kelantan, sebuah daerah makmur dan ramah penduduknya. Jumlah penduduknya diperkirakan antara 30.000 sampai 50.000 orang China. Hasil produksi utama dapat dikeluarkan berupa emas, biji timah, lada hitam, pinang beras gutta percha, rotan, bambu, kayu, garam, dan kain songket. Perkembangan Perekonomian dunia Melayu terutama di Malaysia sebelum kedatangan Inggris dikuasai oleh golongan pembesar kerajaan atau Kesultanan.¹³² Rakyat biasa hanya bertugas menjalankan kegiatan ekonomi.¹³³ Kenyataan ini dapat dilihat dari corak ekonomi yang diusahakan golongan rakyat hanya bisa menjalankan aktivitas ekonomi pertanian serta berprofesi sebagai petani seumur hidup.

Dilihat dari aspek perkembangan Perekonomian dan perdagangan yang terlibat dalam aktivitas tersebut didominasi golongan pembesar Kesultanan dan mereka memainkan peran utama.¹³⁴ Kedudukan Kota Bharu sebagai pusat kegiatan ekspor import karena kondisinya strategis yang terletak di

¹³¹ Prohibitif = bersifat melarang, bunga bank, menimbun komoditas barang, minuman keras dan perjudian

¹³² Muhammad Sulaiman bin Mohammadd. Saud Klantan 1900-1940. *Satu Analisis Tentang Pentadbiran Britis, Reaksi dan Implikasi Terhadap Masyarakat Melayu*. Thesis Sarjana Muda. Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) Malaysia 1983 hlm 20

¹³³ Muhammad Sulaiman bin Mohammad Saud *Sistem Ekonomi Berbentuk Feudalistik*. Malaysia 1983 hlm 19

¹³⁴ Jang Aisyah Mattalib. *Pemberontakan Pahang 1891-1895 Kota Baru*. Pustaka Aman Press Malaysia. 1972 hlm 126-127

tebing Sungai Kelantan.¹³⁵ Kota Bharu mempunyai hubungan perdagangan dengan Siam dan Singapura serta beberapa bandar pesisir yang daerahnya berdekatan, contohnya Pattani dan Singapura. Berdasarkan beberapa sumber, Robert membuat penelitian bahwa hasil produksi utama yang diekspor Melayu Kelantan adalah kelapa, elapa kering, kerbau, bumbu dan ternak lainnya, Beras, Belulang, Pinang, Ikan kering, Getah dan Damar.¹³⁶

Catatan-catatan dari awal Abad XIX M. Menyatakan bahwa bahan tambang seperti biji timah dan emas sebagai bagian dari eksport Kelantan. Akan tetapi menurut Skinner eksport utama Kelantan adalah Kelapa kering, Beras, Damar, Getah perca dan sebagainya. Barang-barang tersebut telah diekspor ada yang ke Singapura dan ada yang ke Siam.¹³⁷ Aktivitas eksport import ini dilakukan tidak hanya sistematis karena hanya dilakukan oleh pembesar dan administrasi jajahan, akan tetapi mereka mengendalikan urusan ini dengan menggunakan perahu pukut,¹³⁸ transaksi di Kelantan pada masa itu sudah menggunakan mata uang.¹³⁹

Aktivitas perekonomian orang Melayu pada sekitar Abad XIX M menjelaskan bahwa bentuk dan corak perekonomiannya bersifat subsistem dan keadaannya tertutup secara tradisional kurang lebih hasil produksi masih berskala kecil yang berada pada produktivitas rendah.¹⁴⁰ Pandangan ini tidak jauh berbeda

¹³⁵ Muhd Sulaiman bin Mohammad. Saud Klantan 1900-1940. *Satu Analisis Tentang Pentadbiran Britis, Reaksi dan Implikasi Terhadap Masyarakat Melayu*. Thesis Sarjana Muda. Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) Malaysia 1983 hlm 15

¹³⁶ Mohammad Fauzi haji Yaacob. *Pemesatan dan Motivasi Tradisi Perdagangan dan Perusahaan Melayu Kelantan Dalam Niksafiah Karun dan Wan Abdul Kadir Yusuf (Pnyt) Kelantan Dalam Perspektif Sosio Budaya*. Suatu Kumpulan Essay Kuala Lumpur Jabatan Pengajian Melayu. Universitas Melayu 1985 hlm 176.

¹³⁷ Muhammad Sulaiman bin Mohammad. Saud Klantan 1900-1940. *Satu Analisis Tentang Pentadbiran Britis, Reaksi dan Implikasi Terhadap Masyarakat Melayu*. Thesis sarjana muda sarjana. Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) Malaysia 1983

¹³⁸ Muhammad Sulaiman bin Muhammad al Saud; juga A.M Skinner *A Geography of The Malay Peninsula And Surrounding Countries Part I*, Malaysia 1884 hlm 27.

¹³⁹ W.A Graham *Kelantan A State of The Malay Peninsula a Hard Book of The Information Glasgow*. James Maclehose & Sons Malaysia 1908 hlm 61-62 dalam ugah iqbal.

¹⁴⁰ Mohammad. Kasutri Nor bin Abdul Aziz. *Warisan KeSultanan Melayu Surat Menyurat Sultan Abdul Hamid dan Ekonomi Kedah Dalam Seri*

dengan pandangan J. M Gullick, seorang sarjana barat berpendapat bahwa sistem Perekonomian mulai bersifat subsistem di mana mereka hanya mampu menghasilkan sumber produksi untuk keperluan pribadi dan keluarga dimana kalau tersisa dijual untuk mendapatkan uang serta barang keperluan lainnya yang tidak dapat diproduksi sendiri.¹⁴¹ Dalam konteks hubungan Perekonomian antara bangsa yang agak terbuka setelah berlaku sistem adanya kedatangan bangsa Barat hal ini karena sudah ada terdapat *native traders* di Perairan alam Melayu, bahkan buktinya pada zaman Laksamana Abdul Jalil 1670-1690-an kepulauan Riau sudah berkembang menjadi pusat perdagangan yang cukup pesat.

Disamping itu rakyat biasa barisan Kesultanan Melayu Malaka telah menjalankan aktivitas perdagangan secara merata di luar wilayah mereka. Sumber-sumber China dan Eropa mencatat berbagai kumpulan etnis yang berada dan mewarisi Kesultanan Melayu Malaka telah menjalankan perdagangan dari Pattani, Kamboja ke Sulawesi, Jawa dan laut Maluku.¹⁴² Kemudian pada tahun 1850-an Suatu sistem ekonomi antar bangsa telah muncul di Asia Tenggara hubungan persahabatan dalam perdagangan dunia Melayu sudah mulai nampak. Integrasi asimilasi (pembauran) ekonomi antar bangsa telah membuka hubungan antara semenanjung tanah Melayu dengan wilayah yang lain. Kemudian perdagangan ini meningkat dengan perlahan-lahan dan berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Mulanya di daerah Kelantan pada Abad XIX M Aktivitas dan hubungan perdagangan telah berkembangnya dan telah menjangkau hingga ke wilayah pedalaman.

Dengan demikian tatkala perdagangan meluas di Asia Tenggara kurang tepat apabila dikatakan bahwa akibat pengaruh perdagangan itu tidak meningkatkan Perekonomian yang bisa dikatakan bersifat subsistem. Soalnya sejauhmana efek perdagangan telah beralih kepada sikap orang Melayu ketika itu untuk mengelola pertanian yang berorientasi pada

Internasional Journal of The Malay World And Civilization 29 (2) Malaysia 2011 hlm 46

¹⁴¹ Sultan Abdul Hamid hlm 47. juga J.M Gullick *Malay Society In The Late Nineteeth Century* Singapore Oxford University Press. Malaysia 1980 hlm 124.

¹⁴² Muhd Anwar omar din. *Asal Usul Orang Melayu. Menulis Semula Sejarahnya dan Jurnal Melayu* (7) Malaysia, 2011 hlm 49-50

penanaman padi. Hal ini perlu diperhatikan tentang hubungan antara perdagangan yang ada di pelabuhan dan pusat perniagaan dan perdagangan ada di pedalaman. Komoditas perdagangan yang keluar dan masuk dalam Perekonomian Melayu sering dikawal oleh pasukan di raja dan aristokrat, terutama melalui sistem cukai yang ada pada saat itu.¹⁴³ Corak perdagangan daerah ini sebenarnya menghubungkan dengan dunia luar dan Perekonomian orang Melayu kurun Abad XIX M khususnya, tidaklah mengherankan jika pada masa itu corak ekonomi orang Melayu berdasarkan pertanian jauh sekali dari mencukupi. Contohnya beras di import karena ada kekurangan, disamping itu Garam, Ikan kering, Candu, Minyak kelapa serta bahan-bahan tekstil merupakan barang-barang utama yang diperdagangkan.¹⁴⁴

Disamping itu industri Pertambangan biji timah sedang berkembang dengan pesatnya di kawasan dunia Melayu dan menunjukkan ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis terutama dipandang dari sudut Permodalan dan buruh. Walaupun orang Melayu tidak bekerja di pertambangan ataupun terlibat secara langsung sebagai pekerja pertambangan-pertambangan milik orang China, akan tetapi peranan orang Melayu jelas kelihatan dari sudut penyediaan barang keperluan yang dibeli oleh pemilik pertambangan.¹⁴⁵

Perlu dikemukakan bahwa peran orang Melayu dalam memproduksi hasil industri pertambangan pada Abad XIX M perlu untuk dioptimalkan, walaupun diakui bahwa imigran China dibawa oleh Inggris pada Abad XIX M secara beramai-ramai untuk membuka produksi industri pertambangan timah di Perlak, Selangor, dan Negeri sembilan. Keterlibatan imigran China di daerah tersebut untuk

¹⁴³ Abdullah Azmi Khalid. *Ekonomi Melayu Kurun Ke-19 Saradiri Atau Komersial* dan Badriyah haji soleh & Tan Liok Ee (pent) *Alam Pensejarahan Dari Berbagai Perspektif Kuala Lumpur*, Dewan Bahasa dan Pustaka 1996 hlm 230. lihat juga J.M Gullick *Sistem Politik Bumi Putera Tanah Melayu Barat* Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia 1972 hlm 203-204

¹⁴⁴ Abdullah Azmi Khalid. *Ekonomi Melayu Kurun Ke-19 Saradiri Atau Komersial dan Badriyah Haji Soleh & Tan Liok Ee* (pent)Malaysia 1972 hlm 203-204

¹⁴⁵ Abdullah Azmi Khalid. *Ekonomi Melayu Kurun Ke-19 Saradiri Atau Komersial dan Badriyah Haji Soleh & Tan Liok Ee (Pent) Alam Pensejarahan dari Berbagai Perspektif Kuala Lumpur*, Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia 1996 hlm 231

memproduksi timah hanya sampai tahun 1840 an, namun Winstedt mengemukakan bahwa orang Melayu sudah lama memproduksi dan menghasilkan biji timah seperti di Malaka, Pahang, Klang, Johor, Perak, dan Sungai Ujong sejak Abad XV M.¹⁴⁶ Maka timbul pertanyaan mengapa keterlibatan orang Melayu dalam sektor industri pertambangan biji timah dianggap sangat kecil dan tidak maksimal dan terkesan sistem pertambangan tidak baik dan tidak ekonomis. Padahal industri pertambangan Melayu telah menghasilkan biji timah untuk produsen dunia selama beratus-ratus tahun.

3. Peran Lembaga Adat dalam Sistem Ekonomi Melayu

Peran menurut Soerjono Sukanto lebih banyak Menunjukkan kepada fungsi penyesuaian diri sebagai suatu proses, jadi tepatnya bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan peranannya.¹⁴⁷ Sementara Poerwadarminta menyatakan bahwa peran itu pemain sandiwara kemudian sesuatu yang menjadi bagian atau pimpinan yang terutama. Peran merupakan aspek dinamis dari status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah menjalankan peranan.¹⁴⁸ Sedangkan lembaga merupakan kata yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kamus besar bahasa Indonesia lembaga bisa digunakan untuk merujuk pada organisasi tertentu yang ada di masyarakat termasuk juga masyarakat yang ada di dunia Melayu.

Akan tetapi di dalam ekonomika, penggunaan kata lembaga lebih dominan untuk merujuk pada sekumpulan aturan, norma dan harapan yang memadu perilaku kita.¹⁴⁹ Douglas C. North (1991) mendefinisikan lembaga sebagai *Institution are the Humanly Devised Constraint of Both Informal Constraint and Social Interaction; They Consist of Both Informal*

¹⁴⁶ Winstedt. *The Malays a Cultural History*. Kelly And Walsh Singapore 1947 hlm 130.

¹⁴⁷ <http://www.artikelsiana.com> pengertian diakses Bulan Februari 2020

¹⁴⁸ <http://www.pendidikan.co.id> pengertian diakses Bualan Februari 2020

¹⁴⁹ La Croix Summer J. Akihiko Kawara. *Institutional Change In Japan Theory Evidence And Reflection East West Centre Working Papers* No. 28 dalam Azansyah 2005

Constraint and Formal Rules. Bank dunia 2002 mendefinisikan lembaga sebagai aturan, mekanisme penegakan dan organisasi.¹⁵⁰ Pembangunan lembaga dapat terdiri dari Pemerintah, pelaku usaha dan anggota komunitas. Hukum dan undang-undang agensi penagakannya lembaga publik yang dibangun pemerintah, lembaga keuangan norma warisan tanah hubungan antar anggota komunitas adalah lembaga swasta yang dibangun pelaku usaha dan anggota komunitas.

Peran penting kelembagaan dalam perekonomian adalah sebagai sarana untuk menurunkan ketidakpastian atau mengubah menjadi resiko. Turunnya ketidakpastian membuat biaya transaksi menjadi rendah sehingga transaksi pasar atau perdagangan akan meningkat. Perdagangan memberikan keuntungan bagi pelakunya karena menguntungkan mereka untuk meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya akan meningkatkan kemakmuran masyarakat dan aktivitas ekonomi. Peran lembaga terhadap Perekonomian terkait dengan kondisi pasar yang ada dan sudah terbuka terintegrasi maka peran kelembagaan dalam mendorong Perekonomian menjadi besar.¹⁵¹ Termasuk Sistem Ekonomi Melayu. Dalam konteks peran lembaga, lembaga adat merupakan lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat.

Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat merupakan aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan, kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi satu sistem.¹⁵² Menurut Soerjono Soekanto hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan tetapi kebiasaan mempunyai akibat hukum. Sedangkan pengertian lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga

¹⁵⁰ The world bank. *World Development Report 2002 Building Institutions For Markets Chapter 1 The World Bank Washington DC* dalam Azansyah.2002

¹⁵¹ Azansyah. *Peran Kelembagaan dalam Perkawinan Kondisi Pembangunan Kelembagaan di Indonesia dan Membangun Lembaga yang Efektif*. Jurnal Ekonomi Bisnis EKBIS vol VII No. 2 Juni 2013 hlm 26-279

¹⁵² <http://idm.wikipedia.org/wiki/diakses> Bulan Februari 2020

Kemasyarakatan, lembaga adat merupakan lembaga kemasyarakatan baik bentuk maupun secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau suatu masyarakat hukum adat tertentu.

Dengan nilai hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan hidup yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Dengan demikian lembaga adat merupakan organisasi kemasyarakatan karena kesejarahan atau asal-usulnya memulihkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian dan pengembangan. Dalam kaitan dengan masyarakat hukum adat terdiri dari dua faktor, geneologis dan faktor teritorial.¹⁵³ Faktor geneologis berdampak mendominasi wilayah garis keturunan dan serta kedudukan keluarga dalam masyarakat. Sedangkan faktor teritorial berdampak pada fungsi kekuasaan dan kewenangan pengurusan untuk mengelola dan menikmati hasil sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat termasuk juga masyarakat Melayu.

Dalam konteks marga Menurut Albar Subari SH MH. kita kenal sekarang juga merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat yang berasaskan turunan darah (*Geneoloische reehtgemeen schap*) dalam masyarakat hukum adat dengan Asas seperti ini kekuasaan dengan sendirinya dipegang oleh jurai tua yang kedudukannya sebagai pemimpin (*Premus interpres*). Oleh karena itu pemimpin mereka disebut sebagai pengandang, yang berarti pemeliharaan atau penjaga batas batas wilayah dan menjadi batas batas antara yang boleh dan yang dilarang. Pelanggaran adat berlaku sama dengan lingkungan masyarakat lainnya. Pada tahap kesatuan masyarakat hukum adat berasaskan genologis (keturunan sedarah) sistem pemerintahan dari ketiga rumpun suku bangsa di uluan Sumatera Selatan berbeda beda. nama, bentuk, dan sistem pemerintahan dari rumpun suku di uluan awalnya merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang berazas geneologis selanjutnya menjadi asas teritorial dampak dari masuknya pengaruh luar.

¹⁵³ Surojo Wignyodipuro. 1979 hlm 86-87

Menurut hemat penulis makna kata asli di dalam peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku maupun yang sudah menjadi hukum positif adalah merujuk kesatuan masyarakat hukum adat yang berada di uluan masyarakat hukum adat yang berasas geneologis.¹⁵⁴

Dalam kaitan dengan teritorial masyarakat hukum adat yang berasaskan geneologis maka akan menganalisis secara singkat hubungan dengan Kesultanan Palembang. Wilayah basis daerah Kesultanan Palembang berada di sekitar kota Palembang ditambah dengan daerah langsung di bawah pemerintahan Sultan yaitu daerah Belida dan Pegagan. Sistem Perdikan yang merupakan daerah bebas pajak di Jawa dibawa dan diterapkan di Palembang dengan nama daerah "*Sikap*".

Usaha untuk meruntuhkan daerah uluan oleh penguasa Palembang telah dinamai semenjak Adipati karang widara yang berkuasa tahun 1485 M dengan menyusuri ke pedalaman melalui empat muara sungai Musi berhasil merundukkan kurang lebih 100 dusun dan sekaligus memberikan gelar-gelar kehormatan yaitu pangeran. Gelar itu tampaknya sebagai upaya jalan angkanaan saudara karena pangeran adalah gelar keluarga Kesultanan.¹⁵⁵ Oleh karenanya campur tangan Sultan (raja) sistem pemerintahan marga di Kesultanan, masyarakat hukum adat terbatas baik tenaga biaya dan lain lain. Maka *premis interperes* saat ini menjadi raja kecil sistem otonom penuh, guna memperbesar khas pemerintah pusat dengan cara yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain. Pertama daerah "*sikap*" semula memang menjadi basis wilayah raja Palembang daerah (Belida, Pegagan, Banyuasin , Sungsang).

Daerah ini tidak mempunyai pemerintah sendiri, seperti daerah Uluan lainnya tetapi diperintah langsung oleh pegawai yang ditunjuk oleh Sultan Palembang. Dengan beberapa kepala dusun dilakukan perundingan antara lain terjadi kesepakatan di mana daerah-daerah tersebut bebas memperdagangkan hasil bumi ke Palembang dengan imbalan wajib membayar pajak, dan sewaktu-waktu mereka diperlakukan-diperlukan diminta pula untuk menjadikan tenaga kerja daerah ini dinamakan daerah

¹⁵⁴ Wawancara Dengan Ketua Pembina Adat Sumatera Selatan Bapak Albar Subari SH. MH Tanggal 28 Februari 2020

¹⁵⁵ Hasil wawancara dengan Ketua Pembina Adat Sumatera Selatan Albar S. Subari SH. MH tgl 28 Februari 2020

Kepungutan yang meliputi daerah Musi ilir, Lematang Ilir, Ogan Ulu, Komaring Ilir dan Komering Ulu. Para kepala marga yang bergelar depati Memberikan bantuan akan diakui (*Diangkan*) bersaudara oleh raja sehingga ia diberi gelar pangeran. Praktik seperti ini dimulai kira kira tahun 1485 M dan dianggap berhasil. Kini daerah uluan (*Kepungutan*) dahulu mengenai pemerintahan lokal, karena persahabatan lambat laun mengalami perubahan sifat yang tidak dapat dielakkan.¹⁵⁶

Peran lembaga adat dalam meningkatkan sistem ekonomi Melayu khususnya Sistem Ekonomi Melayu dalam lingkungan hukum adat ditempuh melalui berapa langkah. *Pertama*, pengkajian terhadap kondisi wilayah. *Kedua*, Pengkajian terhadap pengalokasian lahan bagi berbagai kegiatan pembangunan khususnya bidang pertanian dan perkebunan. *Ketiga*, analisis program penanganan sengketa adat dan penyelesaiannya. *Keempat*, penyusunan saran tindak pengelolaannya dengan memperhatikan manfaat ekonomi masyarakat adat. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan hasil bahwa masyarakat dalam lingkungan hukum adat masih terkait dengan lingkungan hidupnya. Sumber daya alam melalui adat istiadat. Disamping itu peran sebagai lembaga dalam masyarakat hukum adat yang melaksanakan adat istiadat juga mempunyai peran membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pembangunan terutama di bidang kemasyarakatan dan sumber daya alam untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹⁵⁷

Akan tetapi dalam kenyataannya, lembaga adat belum dapat menjalankan peranan sebagaimana mestinya dikarenakan masih banyak kendala-kendala yang ditemui. Adapun kendala-kendala yang ditemui lembaga adat dan masyarakat Melayu dalam menjalankan peranannya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat hukum adat Melayu, *Pertama* masih kurangnya sumber daya manusia dan terbatasnya kemampuan dalam mengelola sumber daya alam dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang telah musnah oleh para pelaku usaha perkayuan. Hal ini disebabkan adanya

¹⁵⁶ Hasil wawancara dengan Ketua Pembina Adat Sumatera Selatan. Albar Sobari SH. MH Sabtu 28 Februari 2020

¹⁵⁷ Pengaruh-hukum-adat-terhadap-perkembangan-ekonomi masyarakat. <https://etd.repository.ugm.ac.id/home> diakses Pebruari 2020.

pengusaha telah menguasai lingkungan di mana tempat masyarakat hukum adat mencari dan menentukan hidup melalui hasil hutan yang selama ini dilestarikan dan dipelihara secara turun-temurun. *Kedua*, kurangnya pengetahuan mengenai adat dan hukum adat dari ketua dan pengurus lembaga adat, minimnya fasilitas yang tersedia baik mengenai sarana maupun prasarana untuk lembaga adat dan kurangnya bimbingan dan pengawasan.¹⁵⁸

Lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Melayu sejak zaman dahulu hingga sekarang mempunyai fungsi dan berperan untuk dapat membina nilai-nilai budaya, nilai norma adat, aturan untuk mewujudkan keamanan, keharmonisan, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Melayu sebagaimana manifestasi untuk mewujudkan tujuan-tujuan bersama sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat Melayu. Dalam konteks adat istiadat, lembaga adat berperan untuk melakukan pembinaan pemberdayaan yang berkesinambungan dengan melihat dinamika dan perkembangan masyarakat Melayu.¹⁵⁹

Lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Melayu sejak dahulu sampai sekarang mempunyai peranan penting dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Melayu yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mengacu kepada pandangan Prof. Djuned seorang pakar hukum adat fakultas hukum Unsyi'ah mengatakan bahwa dalam masyarakat adat Aceh dikenal keberadaan lembaga adat yang bersifat pemerintahan umum nya dan berkembang juga beberapa lembaga adat yang memiliki fungsi pelayanan dan kedinasan lembaga adat yang bersifat pelayanan atau kedinasan mengatur kegiatan di bidang usaha persawahan, mengatur adat istiadat di bidang pesisir dan kelautan, mengatur pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan, pengelolaan kawasan

¹⁵⁸ http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/26464

¹⁵⁹

perkebunan untuk mengawasi wilayah adat pelabuhan dibentuk lembaga adat *Syahbandar*.¹⁶⁰

Dalam kehidupan masyarakat Melayu, lembaga adat memiliki peran dan kedudukan yang penting dalam tiap-tiap wilayah memiliki kepemimpinan adat seperti apa yang dikemukakan Snouck Hurgonje berperan sebagai “*Kungen Ma*” yaitu sebagai bapak dan ibu biologis yang mengayomi warga masyarakatnya sebagai anaknya sendiri. Sementara itu menurut Prof. Djuned peran lembaga adat keterkaitan dengan pelayanan atau kedinasan memiliki tiga peran penting yakni *Pertama*, menciptakan lapangan pekerjaan bagi warganya, setiap orang diterima untuk bekerja di wilayah lembaga adat. *Kedua*, memberi kesempatan kepada setiap orang untuk berusaha dalam bidang ekonomi produktif seperti Bertani, Berkebun, menetapkan dan mengambil hasil hutan untuk dijual. *Ketiga*, mendidik keahlian bagi anggotanya seperti teknik bertani, berkebun, melawat, menangkap ikan serta solidaritas antara sesama anggota.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa peran lembaga adat khususnya terkait dalam Perekonomian memiliki kedudukan dan peran yang sangat strategis di tengah tengah masyarakat. Oleh karenanya diperlukan upaya yang serius dan terus-menerus untuk memperkuat keberadaan kedudukan, peran dan tugas lembaga adat agar mampu memberikan Andil yang kuat dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara.

C. Perekonomian Bangsa Melayu dalam Sistem Ekonomi Islam

Berbicara tentang Melayu cukup beragam, beberapa pendapat mengemukakan bahwa Melayu itu dicirikan dengan tutur kata dalam bahasa Melayu beragama Islam, dan menjalani tradisional dan istiadat Melayu, menurut orang Belanda dan Inggris yang pernah menjajah Indonesia dan Malaysia, hampir seluruh penduduk Nusantara dan Semenanjung Malaya merupakan Ras Melayu yang dicirikan dengan warna kulit, profil tubuh dan bahasa yang digunakan. Sementara menurut Mahyudin al-Mudra selaku pendiri Melayu *Online Course*

¹⁶⁰ [Balemukim.blogspot.com/2018/12.Kedudukan-Fungsi-dan-Peran-Adat-htm28](http://Balemukim.blogspot.com/2018/12/Kedudukan-Fungsi-dan-Peran-Adat-htm28) diakses Februari 2020

mengatakan suku bangsa Melayu di definisikan sebagai bangsa di manapun mereka berada yang pernah dan masih mempraktekkan budaya Melayu tanpa dibatasi sekat-sekat Agama, Ras, Bahasa, Geografis dan Afiliasi Politik.¹⁶¹

Dalam konteks Perekonomian Melayu dalam Sistem Ekonomi Islam eksistensi Melayu dalam panggung sejarah ternyata berimplikasi pada pembentukan jati diri sebagai bangsa. Kontribusi yang diberikan Melayu berupa nilai-nilai normatif sampai pada nilai-nilai ekspresif dan transformatif, nilai-nilai normatif sangat jelas dapat kita temukan dalam budaya yang dimiliki bangsa ini, budaya Melayu yang memiliki nilai-nilai bercorak Islam menjadi anggota masyarakat secara luas dan tersebar di seluruh Nusantara.¹⁶² Oleh karenanya dalam perkembangan ajaran Islam di Nusantara tidak terlepas dari budaya Arab, termasuk juga dalam Sistem Perekonomian Melayu. Dalam konteks Perekonomian Melayu, aktivitas Perekonomian orang Melayu pada sekitar Abad XIX M menjelaskan bentuk dan corak Perekonomian yang bersifat subsistem dan keadaan tertutup secara tradisional dan kurang berdaya saing serta hasil produksinya berskala kecil yang berada pada tahap produktivitas yang rendah.¹⁶³

Pandangan ini tidak jauh berbeda dengan pandangan J. M Gullick, seorang sarjana Barat yang berpendapat bahwa Sistem Ekonomi Melayu bersifat subsistem, mereka hanya mampu menghasilkan sumber dan memproduksi untuk keperluan diri dan keluarga. Manakala tidak berimbang mereka menjual untuk mendapatkan uang serta barang keperluan lainnya tidak dapat dimasukkan oleh mereka sendiri.¹⁶⁴ Ketika muncul sistem ekonomi antara bangsa yang agak terbuka dan telah dimulai pada zaman sebelum kedatangan orang Barat, ini karena sudah

¹⁶¹ Mustofa Abu Bakar. *Peradaban Melayu Penguatan Ekonomi Masyarakat Melayu Dalam Pencatatan Ekonomi Global*. <http://teukuuzer.wordpress.com> 2013 Januari in uncategorized.

¹⁶² Sunandar. *Melayu dalam Tantangan Globalisasi Refleksi Sejarah dan Berubahnya Sistem Referensi Budaya Dalam Jurnal Khatulistiwa Journal of Islamic Studies* Vol 5 No 1 Maret Sambas 2015.

¹⁶³ Muhd. Kasturi Nor bin Abd Aziz. *Warisan Ke Sultanatan Melayu. Surat Menyurat Sultan Abdul Hamid dan Ekonomi Kedah dalam Seri Internasional Journal of The Malay World And Civilization* 29 (2) Malaysia 2011 hlm 46.

¹⁶⁴ Muhd. Kasturi Nor bin Abd Aziz. 2011 hlm 46 lihat J.M Gullick *Malay Society In The Late Nineteenth Century*. Oxford University Press Singapore 1989 hlm 24.

terdapat *Native Traders* di perairan alam Melayu. Ini buktinya pada zaman Laksamana Abdul Jalil 1670-1690-an kepulauan Riau sudah berkembang menjadi pusat perdagangan yang cukup pesat. Disamping itu raja Kesultanan Melayu Malaka telah menjadikan aktivitas perdagangan lebih merata di luar wilayah kehidupan mereka. Sumber-sumber China dan Eropa mencatat berbagai kepulauan etnik yang berada di bawah Kesultanan Melayu. Malaka telah menjalankan perdagangan dengan Pattani, Kamboja hingga ke Sulawesi, Jawa dan laut Maluku.¹⁶⁵ Dari tahun 1850-an. Suatu bentuk Sistem Perekonomian antara bangsa muncul di Asia Tenggara yang bergabung dengan organisasi perdagangan satu bentuk Perekonomian antara bangsa kemudian muncul di Asia Tenggara bergabung dengan organisasi perdagangan Dunia.

Dalam konteks Perekonomian Melayu, aktivitas Perekonomian dalam budaya Melayu yang dapat dijadikan sebagai produk ekonomi dan keuangan Islam dan bahkan oleh institusi perbangkan Islam. Paling tidak ada beberapa aktivitas perekonomian Melayu yang telah menjadi budaya dan sistem ekonomi Islam. Hal ini dapat dilihat seperti Jual Janji (*Bay al-Wafa*) uang pangkal (*Bay al-Arbun*) Jual beli Angsuran, (*Bay Bithaman Ajil*). Sistem perdua (*dibagi dua*).

Pertama, Jual Janji (*Bay al-Wafa*) Jual Janji (*Conditional sale*) Merupakan Perbuatan Perekonomian dalam budaya Melayu terutama di lingkungan masyarakat yang berada di daerah Kesultanan Palembang. Aktivitas ini telah Terlaksana semenjak pemerintahan kerajaan berlangsung. Kegiatan budaya Melayu (Jual Janji) ini telah terjadi dan menjadi tradisi bagi masyarakat masa lalu, sampai kini aktivitas tersebut masih berlaku. Dalam konsep fqih jual janji ini lebih dikenal dengan istilah *Bay al-Wafa* dari aspek bahasa *al-Bay* berarti jual beli dan *al-Wafa* berarti Pelunasan atau penyelesaian hutang. Ulama Fiqh mengartikan sebagai salah satu jual beli yang dilakukan oleh dua pihak dengan mensyaratkan barang yang di adakan dapat dibeli kembali oleh penjual apabila masa temponya berakhir dengan persetujuan kedua belah pihak yang

¹⁶⁵ Mohd Anwar Omdardin. *Asal Usul Orang Melayu Menulis Semula Sejarah*nya dalam *Jurnal Melayu* (7) 2011 hlm 49-50

berakad.¹⁶⁶ Bentuk aqad ini dilakukan untuk mendapatkan Permodalan usaha pembuatan kebun serta bermacam-macam tanaman perkebunan tanpa perlu bertemu dengan lembaga yang memeras sehingga tidak terjebak kepada riba.¹⁶⁷

Pelaksanaan *Akad Bay al-Wafa* (Jual Janji) ini banyak dilakukan penduduk di Asia tengah (Bucharah) Abad V H untuk mengklaim dari pinjaman yang melibatkan unsur-unsur riba dan hal ini dilakukan juga oleh masyarakat timur tengah pada masa kemudiannya.¹⁶⁸ *Aqad Bay al-Wafa* ini menjadi budaya Melayu dan merupakan perbuatan ekonomi dengan tujuan untuk mendapatkan kemudahan kredit tanpa terlibat dengan perbuatan riba. Aqad ini oleh masyarakat Melayu biasa dilakukan dalam bentuk penjualan tambah atau harta tetap milik penjual kepada pembeli dengan janji untuk membeli sejumlah tanah tersebut dalam tempo tertentu. Dalam masa tempo itu pembeli boleh menggunakan dan menduduki tanah tersebut. Jadi masa tempo yang dijanjikan itu penjual gagal membeli semula hartanya, maka harta tersebut akan berpindah kepada si pembeli dan harta tersebut menjadi miliknya.¹⁶⁹ Dengan demikian Akad jual beli seperti ini merupakan Perekonomian bangsa Melayu dalam sistem ekonomi Islam yang terjadi pada masa lalu dan telah mendapat perhatian khusus dalam perundang-undangan oleh hakim-hakim di Inggris.¹⁷⁰ Perekonomian Melayu seperti ini perlu dikembangkan dan dapat ditawarkan kepada institusi keuangan untuk dijadikan salah satu produk perbankan dalam bentuk permodalan.

Kedua, *Bay al-Arbun* (uang pangkal). Menurut bahasa Arab *Bay al-Arbun* berarti pembeli membayar uang pangkal. Dari

¹⁶⁶ Al-Zarqa Sharb al-Qonun al-suri: *al-Uqud al-Musammah Damsyq Dar Al Kitab*. 1968 hlm 23 al-Mansuah al-Fiqhiyah. Kwait 1987 hlm 48-49

¹⁶⁷ W.E Maxell. *The Law And The Customs of The Malays With Reference of The Tenure of Land*. Journal of The Straits Branch of The Royal Asiatic Society No Xiii Juli 1884 Hlm 123 Cf M.B Hooker Reading In Malay Adats Laws Singapore tp 1970 hlm 354-361. J.M Gulliek. *Malay Society In The Late Nineteenth Century*. Singapore. 1970 hlm 354-361.

¹⁶⁸ Abad al-Rahman al-Sabuni *al-Madkhal Lidirasah al Tasyri al-Islami J.I Damsyig Matbaah al Riyad* 1990 hlm 64

¹⁶⁹ Soleh Buang "Kearah Pengislaman Kaum Negara Dalam Fakulti Undang-Undang Universitas Malaya. Makalah Undang-Undang Menghormati Ahmad Ibrahim Kuala Lumpur DBP Malaysia 1988 hlm 175-176.

¹⁷⁰ Lihat Norhasimah Mohd Yasin. *Islamization Malaynization a Study of The Role of Islamic Law In The Economic Development of Malaysia 1969-1993*. Kuala Lumpur 1996 hlm 264.

segi istilah kata *Bay al-Arbun* dapat diartikan sebagai *Aqad* jual beli yang dilakukan dengan pembayaran pendahuluan terhadap harga barang di mana pembayaran uang pangkal tersebut merupakan bagian dari jumlah yang harus dibayar secara keseluruhan oleh pembeli sekiranya jual beli diteruskan. Namun sebaliknya, apabila pembeli membatalkan *aqad*, uang pendahuluan menjadi milik penjual dan tidak akan dikembalikan lagi kepada pembeli meskipun si pembeli meminta kembali uang pendahuluannya.¹⁷¹ *Aqad* jual beli seperti ini merupakan beberapa *Aqad* ekonomi yang telah terjadi dan menjadi kebiasaan masyarakat Melayu dan berlaku sampai sekarang.

Para ahli fikih menjelaskan jual beli seperti ini merupakan pembelian yang dilakukan tanpa membayar semua harganya. Akan tetapi pembeli hanya membayar sejumlah uang sebagai uang muka sedangkan sisanya akan dibayar kemudian apabila pembeli mau meneruskan *Aqad* tersebut.¹⁷² Apabila terjadi pembatalan *Aqad* jual beli maka uang dianggap hangus dan menjadi milik penjual. Pendapat seperti ini dibenarkan oleh ahli fikih berdasarkan Hadis Rasulullah SAW dan amalan Para sahabat. Sebagaimana Hadist diriwayatkan oleh Zayd bin Aslam yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang *Bay al-Arbun* Rasulullah SAW meneruskan.¹⁷³ Sebuah hadits shaheh yang terdapat di dalam shaheh al-Bukhari yang artinya;

*"Diriwayatkan dari Ibn Aun dari Ibn Sirin katanya seorang Penyewa berkata kepada tuan yang punya binatang tunggangan yang berkaki yang bakal disewanya siapakah binatang tunggangan kamu, sekiranya saya tidak jadi menyewa binatang itu pada hari tertentu maka Bagimu bayaran ganti rugi 100 Dirham dan ternyata kemudiannya penyewa tadi tidak jadi bertolak, maka menurut Shurayh. Barangsiapa membuat syarat ke atas dirinya secara suka rela tanpa paksaan maka syarat tersebut terpakai"*¹⁷⁴

¹⁷¹ Ibn Rusyd. *Bidayatul al-Mujtauhid wa Nihayah al-mugtasid* J2 Bairut dar al al-fikri tt hlm 122; Ibn Qudamah Al Mugni Bairut Tt 1984 hlm 313 Muhammad Nurdin Hj Ngadimon: Jual Beli Berdeposit Satu Penilaian Fiqh Jurnal Syariah J 2 Juli 1994 hlm 72.

¹⁷² Ibn Rusyd. *Bidayatul al-Mujtauhid Wa Nihayah al-Mugtasid* Bairut dar al-fikri 1984 hlm 122

¹⁷³ Ibn hajar al-Asgolami *Tarikh al-Hibr J.3 Madinah tp 1964 hlm 17 Wahbah az-Zuhaili. Fiqh al Islam Wa Adillatuha J.4* Bairut al fikr 1989 hlm 72.

¹⁷⁴ Al Buhari Shaheh al-Bukhari Juzuk.tiga Bairut Darul al-fikr 1991 hlm 234

Berdasarkan dalil di atas dapat dikemukakan bahwa praktek jual beli uang pangkal/berdeposit adalah sah dalam perdagangan Islam.

Ketiga, *al-Bay Bithaman Ajil* (jual beli angsuran). *al-Bay Bithaman Ajil* merupakan jual beli yang dilakukan secara angsuran atau lebih dikenal dengan istilah jual beli kredit dalam kalangan masyarakat modern. Pelaksanaan di dalam jual beli angsuran ini sama halnya dengan jual beli kredit, di mana penjual menjual barang dagangannya kepada pembeli dengan pembayaran yang dilakukan secara berangsur-angsur. Dalam Islam jual beli yang dilakukan secara kredit angsuran dalam jangka yang lama, dikenal dengan istilah *al-Bay Bithaman Ajil*. *al-Bay Bithaman Ajil* merupakan *Aqad* pembelian barang dengan pembayaran secara cicilan.¹⁷⁵ Perhatian utama perlu dilakukan dalam aktivitas ekonomi dilakukan masyarakat Melayu yang telah menjadi budaya tersebut merupakan jual beli yang dilakukan tanpa penetapan jumlah angsuran yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual. Pembayaran dilakukan oleh pembeli sesuai dengan kesanggupan untuk membayar yang istilah Melayu lebih dikenal dengan kata "*Berape Ade Saje*" tidak menjadi jumlah yang telah ditetapkan pada saat pembayaran. Inilah yang menjadi perbedaan mendasar jika dibandingkan dengan pelaksanaan jual beli yang dilakukan secara kredit. Kalau pembelian dilakukan secara kredit jumlah pembayaran ditetapkan secara berkala setiap kali pembayaran.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pola jual beli angsuran dipraktekkan masyarakat Melayu ini merupakan pelajaran menarik karena ada unsur saling tolong-menolong, bantu-membantu, tolong-menolong dalam bentuk ekonomi kekeluargaan sangat jelas dipraktekkan oleh masyarakat Melayu dalam aktivitas ekonomi yang telah menjadi budaya dari dulu sampai sekarang yang dalam ruang lingkup ekonomi perdagangan terhadap masyarakat menengah kebawah (miskin). Pemberian pinjaman dilakukan oleh institusi keuangan dan pemerintah sangat mungkin untuk dikembangkan kepada mereka yang membutuhkan dengan menerapkan konsep-konsep yang digali dari budaya Melayu dan diselaraskan

¹⁷⁵ Muhammad Syafei Antonio dan Karnaen Perwata Atmaja. *Apa dan Bagaimana Bentuk Islam*. Penerbit dana bakti wakaf Jogjakarta 1992 hlm 26.

dengan Syari'ah sebagai dasar aktivitas Perekonomian Melayu. Usahawan yang menerapkan budaya Melayu dalam aktivitas tersebut tidak akan pernah mengalami kerugian dari angsuran yang diterima tanpa menetapkan jumlah pembayaran, dan mereka lebih merasakan keikhlasan, keridhoan dari masing masing pihak dalam melakukan transaksi.

Keempat, Sistem "*Perdua*". Dalam kamus besar bahasa Indonesia,¹⁷⁶ istilah "*perdua*" Diartikan dengan membagi dua dari hasil yang diperoleh baik berupa perkebunan, binatang ternak yang telah ditentukan di antara pengusaha dengan pemilik. Istilah *perdua* ini digunakan masyarakat Melayu termasuk Melayu Palembang. Aktivitas ekonomi melayu bertujuan membantu anggota masyarakat yang tidak mampu untuk mengembangkan usahanya, baik yang berhubungan dengan binatang ternak, perkebunan, sawah, ladang serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pelaksanaan sistem ini terjadi antara pihak pemodal dengan usahawan. Setelah masa tempo berakhir sistem *perdua* baru dilaksanakan. Di Malaysia sistem *perdua* dikenal dengan istilah *Pawah*.¹⁷⁷ Pelaksanaan sistem *Pawah* di Malaysia ini diberikan kepada perkebunan, tanah dan hewan ternak, hal ini berlaku juga di daerah Melayu Riau dan Melayu Palembang. Di Malaysia sistem "*Pawah*" hewan telah dikomersilkan menjadi jabatan hewan katerina di Malaysia sistem *Pawah* hewan telah dikomersilkan menjadi Jabatan hewan (*veterinary department*) dan ditujukan untuk Skun pinjaman hewan betina.¹⁷⁸ "*pawah*" dan "*perdua*" dalam pengertian umum dan luas lebih dikenal dengan istilah pinjaman "*Loan*".¹⁷⁹

Dalam konteks ekonomi Islam *aqad* seperti ini dikenal dengan istilah *Aqad Mudharabah* yaitu pemilik binatang asal

¹⁷⁶ Badan dan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan diterbitkan oleh Balai Pustaka Jakarta cetakan pertama 1988 <https://wikipedia diakses Bulan Pebruari 2020>

¹⁷⁷ Kamus Dewan Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia 1989 hlm 922.

¹⁷⁸ Contoh Sapi, Kerbau, Kambing diberikan oleh Jabatan hewan kepada peternak dan kemudian peternak akan mengembalikan hewan yang sama betina dan umurnya kepada jabatan hewan tersebut. Skun ini berlaku apabila hewan betina yang di *Pawah* itu melahirkan anak, dan anak inilah yang akan dipulangkan kepada jabatan hewan sebagai ganti dari pada baka yang asal. Lihat Joni Tamkin Bordan. Filsafat ekonomi. hlm 7

¹⁷⁹ Kamus Bahasa Inggris dalam bahasa Belanda istilah ini lebih dikenal dengan "*Lenen*"

sebagai *Shohibulmal (Sleeping partner)* dan penerima "*Perdua*" adalah pengusaha *Mudharib/entrepreneur* bersepakat untuk melakukan kerjasama dengan kesepakatan apabila binatang akan menjadi pengusaha apabila anak yang dilahirkan oleh binatang tersebut telah mencapai umur tertentu dan di kembalikan kepada pemilik modal. Begitu pula bidang pertanian, perkebunan sistem "*Perdua*" Dilakukan oleh petani yang telah memiliki lahan pertanian. Aktivitas ekonomi tradisi Melayu ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari para petani yang tidak memiliki modal agar tidak terjebak kepada pinjaman yang cenderung kepada *Riba*. Berbeda dengan sistem dilakukan oleh petani yang telah memiliki lahan pertanian. Aktivitas ekonomi tradisi Melayu ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari para petani yang tidak memiliki modal agar tidak terjebak kepada pinjaman yang cenderung kepada *riba*. Berbeda dengan sistem "*Perdua*" ini di mana petani hanya perlu membayar sesuai dengan hasil yang diperoleh baik hasil panen yang melimpah ataupun sedikit. Dalam sistem "*Perdua*" yang perlu dibayar atau di perdulkan antara kedua belah pihak adalah Rasio daripada hasil pertanian dan perkebunan yang diperoleh dan bukan suatu jumlah yang tetap.

Kelima, *Arisan (Permainan Jejula) Jejula* atau permainan *Jejula* di kawasan masyarakat Melayu terdapat di daerah Riau terutama di kawasan kepulauan dan istilah ini dikenal dengan *Julo-julo*. Di dalam masyarakat Melayu modern istilah ini lebih dikenal dengan sebutan *Arisan*.¹⁸⁰ Di Malaysia aktivitas seperti ini dikenal dengan nama *Kutu*.¹⁸¹ *Jejula* apapun istilahnya di definisikan sebagai Perkumpulan dan mengumpulkan uang pada waktu tertentu, dan menentukan giliran untuk mendapat

¹⁸⁰ Arisan merupakan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh sekelompok orang kemudian di undi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperoleh giliran pertama. Aktivitas ini dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota mendapat giliran. Lihat departemen pendidikan dan kebudayaan kamus besar bahasa indonesia. Jakarta Balai Pustaka 1990 hlm 130. ensiklopedi indonesia devisi khusus ikhtiar baru VanHoeve Jakarta hlm 531.

¹⁸¹ Joni Tamkin Borhan. *Pengaruh Budya Dalam Menentukan Hukum Muamalat Seminar Hukum Islam Semasa III* Peringkat Kebangsaan Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam Universitas Malaysia 70. 8 November 2000.

penerimaan uang dengan cara mengundi.¹⁸² Walaupun tidak ada pernyataan yang jelas terhadap aqad yang digunakan, akan tetapi dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan aktivitas tersebut berupa aqad *Wadi'ah* walaupun tidak ada pernyataan yang jelas terhadap aqad yang digunakan, akan tetapi dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan aktivitas tersebut berupa aqad *Wadi'ah* (titipan) sudah terwujud dan digunakan oleh anggota yang ikut dalam kegiatan pada waktu menyerahkan uang *Jejula* kepada ketua kumpulan yang dibentuk.

Kegiatan *Jejula* seperti ini sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat Melayu dan dikenal dengan ekonomi Melayu. Aktivitas ini bertujuan untuk melakukan kegiatan tolong-menolong dan kerjasama ekonomi keuangan diantara sesama anggota masyarakat tanpa perlu pergi ke tempat lain. Dari sudut pandangan lain, aktivitas seperti ini untuk mengelakkan orang-orang Islam dari praktek riba agar mendapatkan pinjaman modal. Permainan *Jejula* ini kalau ingin dikembangkan dapat berbentuk produk keuangan yang digunakan untuk membiayai pembiayaan modal dengan menggunakan formula baru merubah sistem dalam bentuk pelaksanaannya menolong masyarakat miskin. Pembiayaan modal tersebut dilakukan dalam bentuk *Qord Hasan*,¹⁸³ dengan memadukan aktivitas ekonomi Melayu yang telah terjadi (*Jejula*) sehingga *Qord Hasan* semula dalam bentuk pembiayaan konsumtif berubah menjadi produktif.

Dalam sistem pembiayaan produktif *Qard Hasan* ini dengan memadukan *Jejula* sebagai aktivitas ekonomi Melayu sangat tepat digunakan dalam membantu masyarakat miskin perkotaan, pedesaan dan daerah-daerah tertinggal sangat memerlukan modal dalam bentuk usaha. Kombinasi diantara kedua sistem tersebut dengan mengubah bentuk pelaksanaannya dimana anggota masyarakat terlibat di dalamnya dijadikan dalam bentuk modal usaha. Sehingga

¹⁸² Joni Tamkin Burhan. *Pengaruh Budaya dalam menentukan Hukum Muamalat*. Malaysia 2000 hlm 70

¹⁸³ *Qord Hasan* (Pinjaman kebajikan) dalam istilah perbankan di sebut dengan Benevolent Loan. Merupakan pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial, tolong-menolong semata dimana si peminjam tidak dituntut apapun selain dari pengembalian modal pinjaman. Lihat juga Muhammad Hasim Kamal. *Freedom And Justice In Islam Slangor*. Ilmiah Publisher Malaysia 1999 hlm 191.

seluruh jumlah bagian masing-masing modal yang diperlukan dapat dikeluarkan sekaligus secara keseluruhan sebanyak jumlah anggota masyarakat dan masa yang digunakan dalam tempo yang ditentukan untuk dijadikan satu modal usaha bersama.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa aktivitas ekonomi Melayu dengan Menggabungkan konsep-konsep Syari'ah dapat dijalankan dengan baik dan sempurna oleh lembaga keuangan maka akan dapat mengangkat ekonomi masyarakat miskin untuk merubah Perekonomian mereka menjadi masyarakat makmur dan maju dan berhasil dalam pembangunan Perekonomian.

D. Nilai-Nilai Ekonomi Bangsa Melayu dalam Ekspresi Seni

Nilai merupakan suatu penafsiran yang digunakan untuk memberikan penghargaan terhadap barang atau benda, manusia menganggap sesuatu bernilai karena ia merasa memerlukannya atau menghargainya. Nilai adalah patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihan ya diantara cara cara tindakan alternatif manusia menjadikan nilai sebagai acuan dalam mengambil suatu tindakan atau pilihan.¹⁸⁴ Nilai di definisikan sebagai ide yang relatif konstan tentang sesuatu perilaku, hal ini menunjukkan kepada kriteria untuk menentukan tingkat kebaikan, harga diri atau keindahan adalah sistem kepercayaan yang memimpin orang untuk bertindak atau menghindari sesuatu tindakan atau mengenai sesuatu yang pantas atau tidak pantas dikerjakan, dimiliki atau di percayai.

Nilai membimbing manusia dalam melakukan sesuatu tindakan atau untuk menghindari atau mengenai diri dari sesuatu.¹⁸⁵ Nilai merupakan kumpulan sikap perasaan atau penangkapan terhadap sesuatu hal mengenai baik, buruk, benar, salah, patut, tidak patut, mulia, hina, penting, tidak penting, atau nilai merupakan patokan atau prinsip prinsip yang merupakan kriteria untuk menimbang atau memulai suatu hal

¹⁸⁴ Risan Rusli. *Islam Agama Peradaban dan Tantangan Global*. Makalah Disampaikan dalam Internasional Seminar On Islam Studies Proceeding Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 20 Desember 2017 hlm 188

¹⁸⁵ Yatimin Abdullah. *Studi Islam Kontemporer*. Penerbit Amzah Jakarta 2004 hlm 13.

apabila baik atau buruk berguna atau sia-sia, dihargai atau tercela atau antara keduanya. Sehingga manusia dalam melakukan sesuatu dibatasi oleh nilai-nilai yang ada; nilai sebagai sikap yang menghasilkan perbuatan atau pilihan yang disengaja. Dalam konteks nilai ekonomi Melayu terindikasi bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia menciptakan Peradaban dan budaya. Unsur unsur budaya itu mencakup agama, bahasa, organisasi, teknologi, pendidikan dan seni. Dari keseluruhan konsep-konsep tersebut muncul gagasan kegiatan maupun artefak, seni budaya muncul di dalam kebudayaan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia akan aspek keindahan.

Dalam ajaran Islam Allah itu Indah dan Allah menyukai keindahan, termasuk juga sebagai makhluk ciptaan Allah pasti Allah membutuhkan keindahan di dalam kehidupan, demikian juga dalam budaya Melayu. Masyarakat Melayu memiliki kesenian yang terdiri dari berbagai cabang seni diantaranya seni musik, tari, teater, rupa, arsitektur dan lain lain. Setiap cabang seni terdiri dari berbagai genrenya masing-masing.¹⁸⁶ Seni Melayu merupakan ekspresi dari budaya Melayu. Masyarakat Melayu di dalamnya terkandung sistem nilai Melayu yang dijadikan pedoman dan suri tauladan, amanah, nasihat yang membawa manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT dalam berkebudayaan. Seni Melayu menjadi bagian yang integral dari institusi adat. Seni Melayu juga mengeluarkan filsafat hidup dan konsep-konsep tentang semua hal dalam budaya. Seperti contoh ke Tuhanan, Kosmologi, globalisasi, akulturasi, inovasi, enkulturasi dan lain-lain.

Disamping itu dalam rangka mengisi zaman kesenian Melayu pastilah mengalami kesinambungan dan disertai dengan perubahan. Masyarakat Melayu memiliki kebudayaan yang relatif sama bahkan dalam realitas politik mereka berada dalam berbagai negara bangsa yang memiliki sistem pemerintahan dan ideologi nasional yang agak berbeda termasuk juga dalam bidang

¹⁸⁶ Muhammad Takari. *Kesenian Melayu Kesinambungan Perubahan dan Strategi Budaya*. Departemen Etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara dan Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia. 2013 hlm 1

kesenian.¹⁸⁷ Unsur-unsur seni Islami terdapat dalam kebudayaan Melayu Palembang antara lain zikir, berzanji, marhaban, rodat, ratib, hadroh, nasyid, irama padang pasir dan lainnya. Dalam kebudayaan musik dapat dilihat dengan mempergunakan alat-alat musik khas budaya Islam seperti kebab, biola, gendang nabat, serunai gambus, dan lain-lain. Konsep musik bernuansa Islam turut diserap oleh suku Melayu di kawasan Kesultanan Apalagi konsep-konsep “Adat Bersediakan Syarak, Syarak Bersendikan Kitabullah” turut mengabsahkan proses ini. Seni membaca al-Qur’an sendiri mengandung unsur-unsur musikal, walaupun pada prinsipnya kegiatan membaca al-Qur’an (*termasuk adzan dan iqomat*) tidak dapat disamakan dengan musik, dalam Pemahaman Islam ia “lebih” dari Pemahaman musik konvensional.

Dari hasil penelitian dapat dilihat dari beberapa macam yang diserap sebagai dasar pengembangan melodi musik-musik Islam seperti *Rasyd, Bayati, Rusaini, Hijaz Yaman, Hijaz sikahira, Ushag sama’ani, Nilwan, Nahawan*, dan lain-lain. Maqam-maqam inilah yang menjadi dasar pengembangan melodi musik Islam, *Nasyid, Hadroh, Markaban, Barzanji, Qasidah* dan sejenisnya. Teks-teks lagu umumnya berdasar kepada kitab *al-Barzanji* dan karya-karya seniman Melayu. Dalam konteks seni tari, Islam telah memberikan kontribusi dalam berbagai jenis tari *Genre hadroh* yang menggunakan gerak-gerak selepak, senandung, ayun, sembah, dan lain-lain. Berbagai unsur tari Sufisme muncul dalam budaya Melayu. gepak simbolik seperti *Alif, Mim, Ba* merupakan bagian dari tradisi Sufisme kawasan ini akan budaya seni mulai merupakan benda yang diwarisi sebelum datangnya pengaruh luar dan terus diasimilasikan saat datangnya pengaruh luar. Akar budaya seni pertunjukan menjadi bagian dalam memperkuat Jatidiri musik Melayu dan masyarakat Melayu termasuk Melayu Kesultanan Palembang.

Secara budaya masyarakat Melayu selalu merespon dan mengadopsi pengaruh kesenian luar sebagai bagian dari kebudayaan dunia secara umum. Akulturasi ini terjadi dalam

¹⁸⁷ Muhammad Takari. *Kesenian Melayu Kesenambungan Perubahan dan Strategi Budaya Departemen Etnomusikologi* Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara dan Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia. 2013 hlm 2

Semua wujud dan isi budaya, akan tetapi Islam menjadi asas utama dalam proses Akulturasi ini. Adat Melayu bercorak dan berasaskan kepada ajaran Islam yang dikerjakan sebagai Adat bersendikan syarak dan syarak bersendikan Kitabullah, artinya adat Melayu merujuk lebih jauh dalam Wahyu Allah SWT sebagai panduan manusia dalam mengatasi kebudayaan. Dalam melakukan strategi budaya orang lain memutuskan untuk menerapkan empat bidang adat menurut Lah Husni adat pada etnik Melayu tercakup dalam empat ragam *Pertama* Adat sebenarnya adat *Kedua* Adat yang diadatkan, *Ketiga* Adat yang teradat, *Keempat* Adat istiadat.¹⁸⁸

Dalam konteks seni budaya Melayu terhadap pembangunan sangatlah penting karena pembangunan bangsa Melayu pada dasarnya berintikan kebudayaan dalam konteks daerah maupun nasional, budaya Melayu sangat berperan hal ini dapat dilihat *Pertama* budaya mulai mengembangkan nilai-nilai integrasi sosio kulturalnya. Masyarakat Melayu merupakan masyarakat yang mengintegrasikan berbagai kelompok etnik yang menyatukan diri dalam suatu Peradaban atau tamadun Melayu. *Kedua*, Seni dan budaya mulai memiliki fungsi memperkuat Jatidiri dan karakter budaya baik di lingkungan daerah maupun nasional. Di dalam kebudayaan mulai sesuai dengan ajaran tamadun Islam harus mempunyai kemampuan untuk meniasati kebudayaan seluruh dunia dalam rangka tauhid kepada Sang *Causa Prima* yaitu Allah SWT. Pembangunan apapun termasuk dalam bidang ekonomi Melayu harus mengembangkan antara kebutuhan material dan spriritual.¹⁸⁹

Ketiga, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di alam Melayu artinya semula Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di seluruh alam Melayu. *Kempat*, Kearifan dalam budaya Melayu dapat Menjadi daya Pendorong bagi pembangunan termasuk juga pembangunan ekonomi. Kearifan juga terdapat dalam Gurindam, Sya'ir, Pantun, Seloka, Nazam, gerakan-gerakan tarian bersama, Kuliner, Sistem religi, Puisi,

¹⁸⁸ Muhammad Takari. *Kesenian Melayu Kesenambungan Perubahan dan Strategi Budaya Departemen Etnomusikologi* Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara dan Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia. 2013

¹⁸⁹ Muhammad Takari. *Kesenian Melayu Kesenambungan Perubahan dan Strategi Budaya*. Departemen Etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara 2013 hlm 3

Prosa, Cerita rakyat, Perahu, upacara yang terangkum dalam tamadun Melayu. *Kelima*, Seni dan budaya Melayu dapat menjadi salah satu dari industri pariwisata dan ekonomi kreatif bangsa Melayu. Seni budaya Melayu dapat dipisahkan kelima, seni dan budaya Melayu dapat menjadi salah satu dari industri pariwisata dan ekonomi kreatif bangsa Melayu. Seni budaya Melayu dapat difungsikan dalam dunia pariwisata dalam konteks membangun Perekonomian bangsa Melayu. Masyarakat Melayu dikenal dengan masyarakat terbuka, inklusif, mengutamakan ramah-tamah sangat tepat untuk menjadi garda terdepan masyarakat para wisata dengan modal dasar Sapta pesona nya.¹⁹⁰

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa Peradaban Melayu merupakan sebuah tamadun yang menjadikan anutan dalam mempalarisasikan budaya alam Melayu yang menjadi pengikat kebersamaan dan menangani segala perbedaan yang ada disamping memberikan dasar-dasar dan akar budaya yang sama dalam kebudayaan Melayu yang dipentingkan adalah harmoni sosial dan keberlanjutan tamadun. Dalam konteks kesenian *Musical journey in Sumatra*, Kartom dapat keterangan dari keturunan Kesultanan Palembang R.H.M Nato Dirajo berpendapat mengenai minimnya kesenian Kesultanan Palembang akibat dari pengaruh Islam yang mengarah kesenian, terutama dalam bentuk tarian untuk dipraktekkan di lingkungan keraton, sehingga kesenian hidup hanyalah gamelan Jawa dan wayang kulit Purwa. Alasannya dalam pertunjukan terdapat bagian sang dalang melantunkan syair pujian dalam bahasa Arab menceritakan tokoh-tokoh Islam termasuk Walisongo walaupun cerita yang di pertunjukan wayang di keraton Kesultanan Palembang.¹⁹¹

Penjelasan cukup sederhana ini memunculkan pertanyaan Apakah Islam yang dianut di lingkungan keraton Palembang yang Kartomi tulis sebagai Ultra-Muslim Menjadi faktor utama terbatasnya kesenian karena adanya larangan segala bentuk kesenian atau ada faktor lain yang menyebabkan

¹⁹⁰ Muhammad Takari. *Kesenian Melayu Kesenambungan Perubahan dan Strategi Budaya Departemen Etnomusicologi* Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia. 2013 hlm 3

¹⁹¹ Margaret J. Kartomi. *Musical Journey in Sumatera*. University of Illionis Chicago 2012 hlm 177

miskinnya kesenian asli Palembang apalagi kalau melihat bekas Kesultanan Islam masih mempunyai kesenian asli. Oleh karena itu dibutuhkan hipotesa dan pembuktian lain untuk memberikan penjelasan tentang bentuk budaya kesenian yang berelasi dengan eksistensi Kesultanan Palembang. Menurut legenda gamelan dan wayang kulit dapat menyebar ke Palembang terkait erat hubungannya antara Kesultanan Palembang dengan Kesultanan Demak, diantara kedua kesultanan terjalin hubungan politik dan ekonomi dengan baik. Dari hubungan bilateral tersebut penguasa kerajaan Demak menghadiahkan Sultan Palembang dengan gamelan, *Slendro-pellog*, dan satu set wayang kulit Purwa (kemudian dikenal dengan wayang Palembang) untuk hadiahkan Sultan Palembang tidak hanya menghadiahkan para seniman dari Demak juga dikirim ke Palembang menggunakan abdi istana memainkan Gamelan untuk mengirim pertunjukan wayang.¹⁹²

Akan tetapi nampaknya sedikit dilupakan bahwa Gamelan dan wayang dari Demak dipertunjukkan bukan sekadar kesenian semata, melampaui seni, Gamelan dan wayang dapat menyebar sebagai bagian dari Islamisasi yang awalnya berpusat di pesisir Jawa. Nilai keislaman pada wayang kulit yang diiringi oleh Gamelan bukan cuma terletak pada bagian di mana cerita Nabi dan wali dipertontonkan disertai lantunan Islami berbahasa Arab dari Sang dalang seperti yang ada di Kesultanan Palembang. Penjelasan Margaret J. Kartomi agaknyanya terlalu sederhana untuk mengurai Spiritualitas dan sakralitas mistik Islam pada pertunjukan wayang kulit.¹⁹³

Menurut C.F.E Praetorius (1799-1846) Presiden Palembang yang datang beberapa tahun setelah dihapuskannya otoritas Kesultanan menerangkan bahwa di masa Kesultanan berkuasa terdapat dua puluh lima musisi yang hidup sebagai seniman keraton bertugas melakukan pertunjukan gamelan khusus untuk kalangan istana. Para seniman ini tinggal di keraton sekitar keraton ditunjuk oleh Sultan untuk merawat, memainkan dan mengajarkan permainan gamelan sebagai

¹⁹² Margaret J. Kartomi. *Musical Journey in Sumatera*. University of Illinois Chicago 2012 hlm 48-49

¹⁹³ Sumarsam. *Past And Present Issues of Islam Within The Cultural Javanese And Wayang Kulit* dalam David D.Harnish dan Anne K Rasmussen. *Divine Inspirational Music And Islam In Indonesia*. Oxford University Press New York 2011 hlm 48-49.

imbalan mendapatkan keistimewaan dapat tinggal di sekitar keraton. Mereka biasa juga bekerjasama dengan pandai besi untuk menempa instrumen musik pengganti untuk pertunjukan gamelan dan memeriksa akurasi nada pada gamelan. Disamping itu kaum wanita di sekitar istana bekerja menenun pakaian yang digunakan oleh perempuan bangsawan untuk dikenakan pada upacara pernikahan dan tarian.¹⁹⁴

Keberadaan instrumen musik di Kesultanan Palembang menunjukkan adanya perbedaan lapisan materi teknologi yang merefleksikan lapisan pengaruh budaya. Sumber daya teknologi khusus yang mahal dibutuhkan untuk mengolah Perunggu mencerminkan nilai sosial yang lebih besar dan menggambarkan tidak hanya pengaruh budaya akan tetapi kelas sosial, sumber daya dan teknik kemampuan tenun keberadaan instrumen musik di Kesultanan Palembang menunjukkan adanya perbedaan lapisan materi teknologi yang merefleksikan lapisan pengaruh budaya. Sumber daya teknologi khusus yang mahal dibutuhkan untuk mengolah Perunggu mencerminkan nilai sosial yang lebih besar dan menggambarkan tidak hanya pengaruh budaya akan tetapi kelas sosial, sumber daya dan teknik kemampuan tentu diperlukan untuk dapat mengolah Perunggu dan kepemilikannyapun hanya dipunyai masyarakat kelas atas.¹⁹⁵ Instrumen instrumen musik Perunggu melengkapi ritual megah yang menampilkan alat musik dan kostum yang rumit seperti upacara pemakaman ritual kesuburan atau perayaan kemenangan perang. Dimainkannya wayang kulit dan Gamelan di keraton Kesultanan Palembang tersebut tidak menjadikan kesenian rakyat.¹⁹⁶

Kesenian yang di mainkan di keraton Kesultanan sifatnya eksklusif hanya di mainkan di hadapan pembesar kalangan Istana pada waktu-waktu tertentu karena nilai-nilai kesakralan pada tarian musik yang di mainkan di Istana tersebut tidak boleh di mainkan oleh masyarakat biasa. Disamping itu, eksklusifitas kesenian keraton terkait usaha dan kepentingan para keturunan keluarga Sultan. Walaupun demikian di

¹⁹⁴ Margaret. J. Kartomi. *Musical Journey In Sumatera*. University of Illinois Chicago 2012 hlm 179.

¹⁹⁵ Henri Spiller. *Gamelan The Traditional Sounds of Indonesia*. California ABC CLIO 2004 hlm 7

¹⁹⁶ Margaret. J. Kartomi. *Musical Journey In Sumatera*. Chicago University of Illinois 2012 hlm 182.

kalangan Priyayi agar dapat mempertahankan kesenian Istana sebagai penunjuk status sosial dan nilai-nilai keluhuran keraton, kesenian menjadi penanda kekuasaan dan status yang diperoleh melalui gaya hidup dan kekayaan. Gaya hidup dan kesenian yang ditampilkan menjadi salah satu penanda yang paling signifikan dari kelompok bangsawan dimana dan gaya hidup kemudian mampu terpancar dengan jelas menjadi Penanda kelas sosial menghasilkan kekayaan melalui ritual dan pagelaran kesenian adalah cara untuk membedakan kelas tersebut dari kelas masyarakat lainnya. Kesenian di lingkungan Kesultanan Palembang keraton menjadi sebuah modal ekonomi dan Penopang kekuasaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Bordieu bahwa budaya dapat berwujud namun seringkali tidak dapat dipindahtangankan sebagaimana kemampuan memainkan alat musik sekaligus terintruksi kesannya sebagai penunjukan latar belakang dan eksistensi satu pihak yang berpengaruh pada pihak lain.¹⁹⁷

Keberadaan kesenian Melayu tidak hanya dimaknai sebagai kesenian semata, akan tetapi kesenian menjadi bagian dari Representasi identitas, simbol kekuasaan, nilai-nilai spriritual dan menggambarkan lapisan sosial pada basis materialnya. Menurut Distinction, budaya dan kehidupan jadi sebuah faktor pembela dan modal kapital akan terbentuknya stratifikasi sosial ditentukan oleh kepemilikan mereka akan budaya bersamaan dengan kepemilikan kapital sosial dan kapital ekonomi. Selain kapital ekonomi dan sosial budaya juga menjadi model sekaligus alat tukar diantara masyarakat yang ada dan dipandang sebagai salah satu penentu yang cukup penting. Kapital budaya berpengaruh besar dalam kehidupan dan seni pun perlahan menjadi bagian dari kapitalis budaya yang dipamerkan untuk sebuah perbedaan.¹⁹⁸

Peran seni dan budaya Melayu dalam pembangunan sangatlah penting karena pembangunan bangsa Melayu pada dasarnya berintikan kebudayaan. Hal ini dapat dilihat *Pertama*, budaya Melayu mengembangkan nilai-nilai integrasi

¹⁹⁷ Ryllian Chandra. *Islam dan Warisan Kesenian Kesultanan Palembang Darussalam*. Dosen Prodi Politik Islam. Fakultas Arab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Jurnal diakses Bulan Desember 2019

¹⁹⁸ Pierre Bourdieu. *Distinction* by Richard Nile Cambridge Harvard University Press 184

sosiokultural. Masyarakat Melayu adalah masyarakat yang terintegrasi dari berbagai kelompok etnik yang menyatukan diri dalam satu Peradaban atau tamadun Melayu. *Kedua*, seni dan budaya Melayu memiliki fungsi memperkuat jati diri dan karakter budaya. *Ketiga*, Bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar dan perantara antara berbagai suku yang ada di alam Melayu. *Keempat*, Kearifan dalam budaya Melayu akan dapat menjadi daya dorong bagi pembangunan. Karifan lokal Melayu seperti Takwa, Toleransi, Integrasi, mencintai alam, pekerja keras, keseimbangan hidup, bersikap kritis, menjaga harmoni kearifan lokal.¹⁹⁹

Karifan lokal Melayu ini dapat dibaca dari semua unsur budaya Melayu misalnya di dalam gurindam, sya'ir-sya'ir, pantun-pantun, seloka, nazam, gerak-gerak tarian, busana, kuliner, sistem religi, puisi, prosa, gerak-gerak tarian, cerita rakyat, perahu, upacara yang terangkum dalam tamadun Melayu. *Kelima*, seni dan budaya Melayu dapat menjadi salah satu bagian dari industri kreatif dan ekonomi kreatif bangsa Melayu dalam konteks membangun perekonomian bangsa Melayu. Masyarakat Melayu dikenal masyarakat terbuka, inklusif, mengutamakan ramah-tamah sangat tepat untuk menjadi garda terdepan termasuk juga Istana-istana Kesultanan Melayu menjadi bagian dari perekonomian kreatif negeri-negeri rumpun Melayu lainnya.²⁰⁰

¹⁹⁹ Muhammad Takari. *Kesenian Melayu Kesenambungan, Perubahan dan Strategi Budaya*. Departemen Thnomosikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara dan Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia. 2013 hlm 14

²⁰⁰ Muhammad Takari. *Kesenian Melayu Kesenambungan Perubahan dan Strategi Budaya Departemen Etnomosikologi FIB universitas Sumatera Utara dan Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia*. 2013 hlm 14



BAB III

PEREKONOMIAN KESULTANAN PALEMBANG ABAD XVII-XIX

A. Sejarah Kesultanan Palembang

Dalam catatan sejarah tulisan tangan dengan huruf Arab yang dibuat oleh seorang Priyai di Palembang dapat dikemukakan sebagai berikut:

“Telah diriwayatkan bahwa adalah berpindah beberapa anak raja-raja dari tanah Jawa ke Negeri Palembang dengan sebab huru-hara. Sultan Pajang menyerang Demak dan adalah yang bermula menjadi raja di Palembang dari pada mereka itu Kiayi Gending Suro Tuo anak Kiyai Gedih “Siding” Lautan dan manakala wafat Kiayi Gending Suro Tuo itu maka diganti oleh Kiayi Suro Mudo anak Kiyai Gending Ilir dan adalah pada ketika itu semuanya anak raja-raja yang berpindah dari tanah Jawa ke negeri Palembang. Di negeri Palembang empat likur bilangan orang adanya.”²⁰¹

Dengan demikian dapat dipahami bahwa terdapat beberapa orang keturunan pangeran Trenggano hijrah ke Palembang dibawah pimpinan Ki Gede Ing Suro Tuo yang menetap di perkampungan Kuto Gawang suatu daerah di sekitar kampung Palembang Lamo.²⁰² Sebagaimana kita ketahui, pangeran Trenggano adalah putra Raden Fatah bin Prabu Kertabumi Brawijaya V dari Majapahit dengan istrinya seorang putri dari China lahir dan dibesarkan di Palembang di Istana saudaranya lain Ibn Ario Dillah.²⁰³ Sejak awal dari pemerintahan Kiyai Gede Sedo Ing lautan hingga pada masa

²⁰¹ Catatan *Sejarah Alm R.H.M Akib bin R. Idris bin R. Rodiuddin bin Sultan Ahmad Najamuddin Adi Kusumo*. 1323 H hal 2. .

²⁰² Bandingkan dengan *Tambo Kerajaan Sriwijaya*, Boedenani Djavid, Terate. Bandung 1961, hlm 56. R.H.M Akib *Sejarah Palembang Pidato Diesnatalis*.

²⁰³ Dr. Hamka “*Sejarah Umat Islam*” IV-IV Penerbit Nusantara Bukit Tinggi. Jakarta 1961 hlm 99

pangeran Sedo Ing Rejek, Palembang belum berstatus Kesultanan akan tetapi berturut-turut masuk wilayah kekuasaan Mataram. Baru di masa Pangeran Ario Kusumo Palembang memutuskan hubungan dengan Mataram dan beliau ini pulalah yang mendirikan Kesultanan Palembang Darussalam.²⁰⁴ Pangeran Ario Kusumo adalah Sultan Palembang pertama dengan Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam memerintah dari tahun 1659-1706.²⁰⁵

Berdirinya Kerajaan-kerajaan Islam biasa disebut Kesultanan, merupakan suatu periode penting proses Islamisasi di Nusantara. Dalam tahapan Islamisasi, pembentukan Kerajaan menandai awal terintegrasinya nilai-nilai Islam secara lebih intensif ke dalam Sistem Sosial, Politik, dan Ekonomi, selanjutnya Kerajaan menjadi basis dilakukannya upaya penerapan ajaran-ajaran Islam di kalangan masyarakat.²⁰⁶ Sebagaimana yang telah dikemukakan di awal, bahwa berdirinya Kesultanan Palembang tidak terlepas dari pertikaian yang terjadi di Kerajaan Demak.²⁰⁷ Para Priyai dan pendekar dari Demak yang tidak berhasil merebut suksesi kekuasaan di Kesultanan Islam Demak, menyingkir ke Palembang pada Abad XV M bersama-sama dengan orang Melayu setempat dan bersepakat untuk mendirikan Kesultanan yang dinamakan Kesultanan Palembang.²⁰⁸ Tukar-menukar kebudayaan terjadi, Asimilasi budaya membuat wilayah ini berbudaya Melayu-Jawa.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sejarah timbulnya Kesultanan Palembang tidak terlepas dari pasang surutnya Kerajaan Demak sebagai Kerajaan Islam pertama. Palembang merupakan negeri asal Raden Fattah dengan sendirinya mengakui kekuasaan Demak dengan segala Konsekuensinya.²⁰⁹ Dalam sejarah tutur Palembang di

²⁰⁴ P. de Roo de La Faille. *Dari Zaman Kesultanan Palembang*. Penerbit Bhratara Jakarta 1971 hlm 24

²⁰⁵ R.H.M Akib bin R. Idris *Sejarah R.H.M Akib Bin Rodiuddin bin Sultan Ahmad Najamuddin Adi Kusumo 1323 H* hlm 3

²⁰⁶ Jajad Burhanuddin. *Islam dalam Arus Sejarah Indonesia*. Penerbit Kencana. Jakarta 2017 hlm 11

²⁰⁷ Baharudin. *Sejarah Kota Palembang*. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang 2004 hlm 22

²⁰⁸ Djohan Hanafiah. *Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan. Suatu Tinjauan Sejarah*. Perpustakaan Daerah Wilayah Sum-Sel. 2009

²⁰⁹ Alfian Ibrahim. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisasi dan Kolonialisme di daerah Sumatera Selatan*. Departemen Pemerintahan dan

kemukakan bahwa pada saat Kerajaan Sriwijaya mengalami kelemahan dan dikalahkan Majapahit, daerah Palembang berada dibawah kekuasaan Majapahit dan Adipati Majapahit yang berkuasa di Palembang pada saat itu adalah Ario Damar dan dikenal oleh masyarakat Palembang dengan nama Ariodillah. Ariodillah merupakan Raja Majapahit Prabu Brawijaya Sri Kertawijaya.²¹⁰ Nama Ario Damar dari Palembang dalam cerita Jawa-Bali mempunyai peranan penting dan bersama patih Gajah Mada telah menaklukkan Bali. Dalam tutur Jawa Ario Damar merupakan putra Raja Majapahit ini menunjukkan ada kerja sama antara cerita tutur Palembang dan Jawa tentang asal usul Ario Damar.²¹¹

Menurut cerita tutur Jawa, Sultan Terenggano raja Demak anak Raden Fatah, menikah dengan anak perempuan tokoh legendaris Ario Damar dari Palembang, oleh karenanya Sultan Terenggano bergelar Mas Palembang.²¹² Dari cerita ini memberikan petunjuk bahwa ada hubungan yang erat antara Palembang dan Demak. Dengan adanya hubungan ini menyebabkan penguasa Islam Palembang awal Abad XVI M merasa dirinya berhubungan keluarga dengan Raja Demak dan merasa sebagai keturunan Ario Damar. Ario Damar menurut cerita tutur atau Adat Jawa dikenal sebagai tokoh yang dipercaya oleh Prabu Brawijaya, Raja Majapahit untuk membesarkan anak Brawijaya dari seorang putri China. Anak yang dikenal sebagai Raden Fatah ini lahir dan besar serta dididik di Palembang bersama Raden Kusen, Raden Fatahlah yang telah mendirikan Kerajaan Demak, sebuah Kerajaan Islam di pulau Jawa.²¹³

Pada saat Raden Fatah genap berusia 20 tahun, Ario Damar mengirimnya ke pulau Jawa bersama Raden Kusen

Kebudayaan Direktorat Sejarah dan nilai Tradisional Sejarah nasional. Jakarta 1983 hlm 6

²¹⁰ Geschiedenis Van De Vorsten Von. *Palembang. Naskah Tulis Tangan Pada Unversteit Bibliotheet, Le Idea Cod or 1914 (6)* dalam Husni Rahim.

²¹¹ H.J. De Graaf dan HT. G.M Pigeand. *Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa*. Penerbit Grafiti Press 1985 hlm 247

²¹² H.J. De Graaf dan HT. G.M dalam Husni Rahim. *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam. Studi Tentang Pejabat Agama masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang* diterbitkan oleh PT Logos Wacana Ilmu Ciputat Jakarta 1998 hlm 42

²¹³ Hamka. *Sejarah Umat Islam Pra Kenabian Hingga Islam di Nusantara*. Penerbit Gema Insani Press Jakarta. 2016 hlm 560

saudara sepersusuaannya untuk memperdalam pengetahuan agama kepada Sunan Ampel.²¹⁴ Menurut sumber Babat Purwaka Caruban Nagari, Uka Tjandrasasmita mengemukakan bahwa di Pulau Jawa, Raden Fatah yang dalam Babat Tanah Jawi disebutkan gelar Sinopati Jumbun ini memperoleh dari Raja Majapahit, sebuah tanah perdikan bernama Glagah Wangi. Dimulai dari tanah inilah, Raden Fatah kelak, atas bantuan Walisongo mendirikan Kerajaan Demak. Kerajaan Demak sendiri telah berdiri ketika Raja Majapahit Kertabumi meninggal dunia pada tahun 1478 M.²¹⁵ Kerajaan Demak merupakan Kerajaan Islam pertama dan terbesar di pantai Utara Jawa. Kesultanan Demak sebelumnya merupakan kedepaten dari Kerajaan Majapahit, kemudian muncul sebagai kekuatan baru mewarisi legitimasi dari kebesaran Majapahit.²¹⁶ Kesultanan Demak muncul bermula ketika terjadinya kemunduran Majapahit menjelang kurun waktu akhir Abad XV M karena dengan kondisi demikian maka secara praktis ada beberapa wilayah kekuasaannya mulai memisahkan diri bahkan wilayah-wilayah yang tersebar atas kedipaten-kadipaten saling serang, saling mengklaim sebagai tahta Majapahit. Dapat dikemukakan bahwa munculnya kerajaan Demak merupakan suatu proses Islamisasi hingga mencapai corak atau bentuk kekuasaan politik apalagi munculnya kerajaan Demak juga dipercepat dengan melemahnya pusat Kerajaan Majapahit sendiri akibat pemberontakan serta perang perebutan kekuasaan dikalangan keluaraja-raja.

Sebagai Kerajaan Islam pertama di pulau Jawa, Kerajaan Demak sangat berperan besar dalam proses Islamisasi pada masa itu. Kerajaan Demak berkembang sebagai pusat perdagangan dan sebagai pusat penyebaran Islam. Semetara wilayah kekuasaan Kerajaan Demak meliputi Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, dan beberapa daerah Kalimantan. Di samping itu kerajaan Demak memiliki beberapa pelabuhan

²¹⁴ Hamka. *Sejarah Umat Islam Pra Kenabian hingga Islam di Nusantara*. Penerbit Gema Insani Press Jakarta 2016 hlm 560

²¹⁵ Uka Tjandra Sasmita dan Hasan Muarif Ambary. "*Sejarah Masuknya Islam ke Sumatera Selatan*" dalam KHO Gajahnata. *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. Universitas Indonesia (UI) Press Jakarta 1996. hlm 20

²¹⁶ M.C. Ricklefs. *A History of Modern Indonesia Since 1200*. Stanford University Press. Universitas Gajahmada Press Jogjakarta 2007 hlm 21

penting seperti Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jaratan, dan Gersik dan berkembang menjadi pelabuhan transito. Kerajaan Demak mencapai keberhasilan dalam berbagai bidang pada masa Pemerintahan Raden Fatah. Keberhasilan yang dicapai itu berupa Perluasan dan Pertahanan Kerajaan, Pengembangan Islam dan Penangulangannya, serta penerapan Musyawarah dan Kerjasama antara Ulama dan Umaro.²¹⁷

Pengembangan dalam bidang dakwah Islam Raden Fatah mencoba untuk menerapkan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan, disamping itu ia juga membangun Istana dan mendirikan Masjidnya 1479 M yang sampai sekarang dikenal dengan Masjid Demak. Kerajaan Demak menjadi pelopor utama dalam penyebaran Agama Islam di Pulau Jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya, walaupun kerajaan ini tidak berumur panjang dan segera mengalami kemunduran karena terjadi perebutan kekuasaan diantara kerabat-kerabat kerajaan, maka pada tahun 1568 M Kerajaan Demak beralih menjadi Kerajaan Pajang yang didirikan oleh Jaka Tingkir.²¹⁸ Dengan demikian dapat dipahami bahwa Kerajaan Pajang merupakan kelanjutan dari kerajaan Demak dengan raja pertamanya dan sekaligus pendiri Kerajaan Pajang adalah Jaka Tingkir.

Berdirinya Kerajaan Palembang tidak terlepas dari pertikaian yang terjadi di Kerajaan Demak setelah Pangeran Trenggano pada tahun 1546 M. Pertikaian ini terjadi antara Aria Jipang dengan Pangeran Hadiwijaya dari Jipang. Dalam konflik tersebut Aria Penansang gugur pada saat pertempuran. Kemudian para pengikut Aria Penansang melarikan diri, dan salah satu pengikut utamanya adalah Ki Gede Ing Suro yang melarikan diri ke Palembang menemui ayahnya Seda Ing Lautan yang menjadi Adipati Demak di Palembang. Ki Gede Ing Suro menyingkir ke Palembang ini dengan membawa panji-panji kebesaran Jipang pada tahun 1552 M. Kemudian di Palembang dia mendirikan Kerajaan Palembang bercorak Islam dengan pusat pemerintahan di sekitar daerah PT Pupuk Sriwijaya

²¹⁷ Elly Roza. *Sejarah Tamaddun Melayu*. Penerbit Aswaja Presendo Sleman Jogjakarta. 2016 hlm 20-21

²¹⁸ Elly Roza. *Sejarah Tamaddun Melayu*. Penerbit Aswaja Presindo Sleman Jogjakarta. 2016 hlm 121.

sekarang.²¹⁹ Ki Gede Ing Suro merupakan pemimpin para bangsawan pengikut Aria Penansang, seorang Gede Ing Suro kalau dilihat aspek nama dan gelarnya dapat diketahui bahwa setidaknya dia merupakan seorang yang Pemberani, Gagah, Bersipat Kesatria dan laki-laki Perkasa.²²⁰

Walaupun Ki Gede Ing Suro Pemimpin para bangsawan dia menunjukkan sikap seorang yang berasal dari kalangan orang biasa, Pemimpin Kharismatik di lingkungan masyarakat di daerahnya.²²¹ Jadi dapat diketahui bahwa Ki Gede Ing Suro merupakan seorang yang berasal dari kalangan rakyat biasa yang menjadi pemimpin di lingkungan masyarakatnya. Setelah selama 17 tahun memerintah Ki Gede Ing Suro merasa kedudukannya harus ada yang menggantikan, pemerintahan kemudian beralih sampailah kepada Side Ing Rejek. Kemudian pada masa Pemerintahan Side Ing Rejek ini VOC mulai mengadakan perdagangan dengan Palembang, setelah pada tahun 1659 M hubungan Palembang dengan VOC mulai memburuk, dan sampai pada akhirnya peperangan tidak dapat dihindarkan lagi. Peperangan ini tidak menguntungkan Palembang, dimana Keraton Kuto Gawang dibakar habis oleh Kolonialis Belanda dan Side Ing Rejek melarikan diri ke Saka Tiga dan meninggal disana.²²²

Setelah Palembang rata dengan tanah karena penyerbuan Belanda pada tahun 1659 M tersebut, Ki Mas Hendi merupakan saudara Pangeran Side Ing Rejek diangkat sebagai Pangeran Palembang dengan persetujuan Belanda dan atas anjuran Penguasa Jambi, yang bersahabat dengan Belanda. Beberapa kali Ki Mas Hendi mengirimkan utusan ke Kerajaan Mataram pada masa kekuasaan Amangkurat I dan II, dalam usaha untuk memperbaiki hubungan antara Palembang dengan Mataram,

²¹⁹ Bambang Budi Otomo. *Perkembangan Kota Palembang dari Wanua Sriwijaya Menuju Palembang Modern*. Pemerintah Daerah Kota Palembang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2005 hlm 166

²²⁰ Zoetmulder dan Robson. dalam Bambang Budi Otomo. *Perkembangan Kota Palembang dari Wanua Sriwijaya Menuju Palembang Modern* Pemerintah Daerah Kota Palembang dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 1995 hlm 166

²²¹ H.J. De Graaf. *Disintegrasi Mataram di bawah Amangkurat Satu De Regering Van Sunan Mangkurat I Tegal Wangi Vorst Mataram 1646-1677* Penerbit PT Pustaka Grafitis Jakarta 1987

²²² Bambang Budi Otomo. *Perkembangan Kota Palembang dari Wanua Sriwijaya Menuju Palembang Modern*. Pemerintah Daerah Kota Palembang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 2005 hlm. 167

akan tetapi sambutan dari penguasa dari Mataram tidak seperti yang diharapkan dan beberapa kali di tolak oleh Sunan Mataram sehingga hubungan terputus, namun demikian Penguasa Mataram membiarkan saja hubungan yang lebih erat antara Palembang dengan VOC di Batavia.²²³

Dengan berakhirnya hubungan Politik, Ekonomi dan Kultural dengan Mataram, kemudian Ki Mas Hendi pada tahun 1675 M memakai gelar “Sultan” suatu gelar yang selama ini tabu untuk dipakai orang lain selain Sultan Agung Mataram, (Gelar ini di dapat Sultan Agung Mataram dari penguasa Mekkah pada tahun 1641 M). Melihat kondisi yang demikian itu maka Keraton dan kota Palembang di pindahkan dari kota Gawang ke Beringin Janggut, dimana corak pemerintahannya di transformasikan yang condong kepada corak Melayu dan lebih disesuaikan dengan ajaran agama Islam. Ki Mas Hendi kemudian bergelar Pangeran Kesumo Abdurrahman, Sultan kemudian disebut Susuhunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Syaigyidul Imam atau Jamaluddin Sultan Candi Walang. Susuhunan Abdurrahman memerintah dari tahun 1662 M sampai 1706 M. Selama Sultan Abdurrahman menjadi Penguasa Kesultanan, Kesultanan Palembang mengalami Kemajuan dan Kemakmuran sehingga rakyat hidup Bahagia dan Sejahtera.²²⁴

Kesultanan Palembang pada zaman Sultan Abdurrahman telah menguasai sebagian wilayah yang sekarang masuk daerah Jambi, yaitu daerah Tembesi, sebagian daerah Bengkulu (Daerah-daerah Rejang Lebong) dan sebagian daerah Lampung (Manggala, Tulang Bawang) dan juga pulau Bangka dan Belitung yang didapatnya akibat perkawinannya dengan puteri penguasa pulau tersebut.²²⁵ Dengan terjadinya perkawinan putra istana antara Jambi dan Palembang, daerah Tembesi diberikan sebagai mas kawin, kemudian daerah Tembesi tersebut masuk wilayah Jambi termasuk penduduknya. Meskipun daerah Tembesi masuk wilayah Jambi akan tetapi para penduduknya terdiri dari orang Palembang, kenyataannya mereka tetap setia dengan

²²³ Djohan Hanafiah. *Perang Palembang Melawan VOC*. Penerbit Karya Sari Palembang 1996. hlm 10.

²²⁴ Djohan Hanafiah. *Perang Palembang Melawam VOC*. Penerbit Karya Sari Palembang. 1996 hlm 10-11

²²⁵ Djohan Hanafiah. *Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan. Suatu Tinjauan Sejarah*. Deposit Pemerintah Sumatera Selatan. Palembang 2009 hlm 3

kepala-kepalanya yang lama. Biasanya, orang perbatasan selalu mencari pemerintahan yang paling sedikit memungut pajak dan dapat menjamin keamanan dan kesejahteraan, akibat ulah penduduk seperti ini, maka daerah Tembesi menjadi tempat perselisihan antara Palembang dan Jambi.

Terjadinya penyerangan yang dilakukan Raden Aria dan dibantu oleh Dakang Mangika, pada bulan Oktober 1680 M kedudukan Jambi menjadi terancam sehingga Jambi minta bantuan Johor dan Belanda, dan Jambi menjanjikan Belanda untuk memonopoli Produksi lada dan akhirnya Jambi dan Johor berhasil menghalau Palembang, malahan mengancam dengan serangan balasan. Kemudian giliran Palembang minta bantuan VOC sebagai pemisah dengan perjanjian menyerahkan orang-orang Makasar kepada Belanda. Kondisi yang demikian itu sangat menguntungkan Belanda baik secara politik maupun ekonomi. Apalagi pada waktu yang lalu Palembang dan VOC telah mengadakan kontrak dalam tahun 1678 M dimana VOC memperoleh hak untuk memonopoli lada di wilayah Palembang. Sedangkan daerah yang di sengketakan yaitu Tembesi tetap menjadi milik Jambi.²²⁶

Dalam sebuah catatan yang diuraikan oleh Barbara Watson Andaya tentang Batang Hari Sembilan pengertian Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo yang menyangkut perselisihan antara Banten dan Palembang, berkaitan wilayah Tulang Bawang di Lampung, Sultan Fatah Muhammad, Syafei Zainal Arifin, sebagai Sultan Banten mengklaim bahwa Lampung sejak tahun 263 Hijriah telah menjadi bawahan Banten dan sewa pajak dari Tulang Bawang sudah ditetapkan oleh kakeknya. Menurut Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo (1724-1757 M) mengatakan, nenek moyangnya telah melaksanakan kekuasaannya sejak dari dahulu dan menurut arsip tuanya, ada bukti-bukti menyatakan bahwa Lampung telah diduduki oleh seorang pendahulunya bukan oleh penguasa Sultan Banten.²²⁷

²²⁶ Djohan Hanafiah. *2009 Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan Suatu Tinjauan Sejarah*. Deposisit Pemerintah Sumatera Slatan Palembang 2009. hlm 4

²²⁷ Djohan Hanafiah. *Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan Suatu Tinjauan Sejarah* Pemerintah Daerah Sumatera Selatan. 2009

Menurut Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo, Orang Komerling Darat merupakan keturunan Palembang, dan Tulang Bawang bagian dari sungai Batang Hari Sembilan wilayah kekuasaan sudah ada sejak nenek moyangnya. Pemimpin Tulang Bawang sependapat dengan klaim Sultan Mahmud Badaruddin tersebut dengan syarat mereka bukanlah bawahan Palembang akan tetapi “*Saudara*” dan selamanya bebas pajak. Nenek moyang mereka datang dari Ranau “*Sebuah laut di tengah pulau*” dimana mereka didukung oleh Palembang untuk menempati Tulang Bawang. Pada masa awal kedatangannya Palembang dan Banten terjadi perselisihan puncaknya berakhir pada tahun 1737 M. Dengan aksi kekuatan Belanda yang telah berpihak kepada Banten khawatir akses ke Tulang Bawang akan berakhir dan ini akan berakibat fatal terhadap perekonomian Banten, maka Lampung merupakan mutiara mahkota Banten, jadi terpaksa ikut serta mengontrol alur distribusi lada dari Lampung ke Palembang.²²⁸

Bertitik tolak dari zaman Kesultanan Palembang, kalau diperhatikan dari aspek penduduk yang bertempat tinggal di daerah Sumatera Selatan terbagi atas dua bagian. *Pertama*, Penduduk yang tinggal di dalam kota Palembang. *Kedua*, Penduduk yang bertempat di daerah sekitarnya. Sementara penduduk yang tinggal di dalam kota terdapat dalam *Tiga* golongan besar, golongan bangsawan (*Priyai*) yang terdiri dari Pangeran, Raden, dan Masagus. Golongan pedagang pribumi dan Timur Asing (China, Arab, India), dan golongan rakyat biasa yang terdiri dari orang-orang Miji, Senan dan Budak-budak. Status bangsawan tidak berdasarkan pada kelahiran, akan tetapi karena dianggap berjasa kepada sultan, seperti penguasa-penguasa tradisional di daerah uluan yang memakai gelar pangeran.²²⁹

Golongan pedagang Timur Asing seperti orang Arab, India, dan China pada umumnya bertempat tinggal di Palembang dan biasanya tidak jauh dari pasar. Kehidupan mereka berbeda-beda

²²⁸ Djohan Hanafiah. *Kesultanan Palembang Darussalam dalam Prospek Sumatera Selatan dalam Perang Palembang Melawan VOC*. Penerbit Karya Sari Palembang. 1996 hlm 46

²²⁹ Alfian Ibrahim. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisasi dan Kolonialisme di daerah Sumatera Selatan*. Departemen Pemerintahan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Sejarah Nasional Jakarta. 1983 hlm 14-15

dan membentuk daerah perkampungan tersendiri. Sedangkan pedagang Pribumi bertempat tinggal di dalam lingkungan kota. Untuk rakyat biasa yang termasuk golongan non-elite dalam pemerintahan di Kesultanan Palembang terdiri dari berbagai golongan yang disebut orang Miji, orang-orang Senan dan orang-orang yang statusnya sebagai Budak belian. Orang Miji dan orang Senan yang dapat dipersamakan dengan penduduk uluan (*Matagawe*) bertempat tinggal di kota dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sebagai buruh.

1. Keadaan Wilayah Kesultanan Palembang

Keadaan wilayah Kesultanan Palembang merupakan wilayah daerah pemerintahan keresidenan Palembang pada zaman Belanda, walaupun batas-batasnya tidak sama, lebih tepat lagi kalau dikatakan bahwa keresidenan Palembang merupakan wilayah Hukum Palembang.²³⁰ Kalau dilihat dari sudut geogarfis wilayah Kesultanan Palembang merupakan suatu wilayah tersendiri, mulai dari wilayah Jambi dan Lampung kemudian dihubungkan oleh daerah rawa-rawa yang luas, dari daerah Bengkulu oleh Bukit Barisan. Sungai-sungai di dalamnya yang kesemuanya dapat dilayari, kemudian bertemu pada suatu titik yaitu Ibu kota Palembang, hal ini merupakan persyaratan untuk mendirikan suatu pusat kekuasaan yang kuat. Jaringan jalan-jalan air ini berupa sungai musi dengan cabang-cabang anak sungainya merupakan sarana perhubungan yang----mengikat bagian-bagian dari Kesultanan Palembang menjadi satu yang bukan merupakan satu kesatuan.

Akan tetapi keseluruhan bagian-bagiannya satu sama lain saling berkaitan dan sambung-menyambung secara terarah dan teratur. Letak dari muara-muara sungai yang lebar dan besar terhadap jalan, sehingga mengikat para pedagang asing untuk menetap di daerah ini.²³¹ Dalam sudut pandang yang lain dikatakan bahwa wilayah daerah Kesultanan Palembang diperkirakan meliputi Provinsi Sumatera Selatan saat ini, daerah ini berbatasan langsung dengan Jambi, Bengkulu dan Lampung.

²³⁰ Van Royen J.W. *De Palembangse Marga en Haar Grand en Waterrechten*, G.L. Van Der Berg Adrianis Boekhandel Leiden 1927. hlm V.

²³¹ H.A Dahlan. *Risalah Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II* Team Perumus Hasil-hasil Diskusi Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II 1981 hlm 10

Menurut cerita tutur Palembang, wilayah daerah negeri Palembang meliputi segala huluan batang hari sembilan,²³² dan negeri yang berada di luar seperti Bangka, Mentok, dan Belitung.²³³ Daerah batang hari sembilan adalah daerah sembilan sungai utama yang hampir semuanya bermuara di sungai Musi kecuali sungai Banyuasin. Kesembilan Sungai tersebut adalah sungai Kikim, sungai Kilingi, sungai Lakitan, sungai Rawas, sungai Lematang, sungai Enim, sungai Ogan, sungai Komering, dan sungai Banyu Asin.²³⁴

Hal senada dikemukakan Farida R Wargadalem, Menurutnya Wilayah Kesultanan Palembang pada awal Abad XIX M meliputi Komering Ilir, Komering Ulu, Ogan Ilir, Lematang Ulu, Buai Bawan, Belalau, Ranah, Buai Pemaca, Mahakam, Bual Runjung, Kisam Saka I, Kisam Saka II, Semendo Ulu Luas, Semendo Darat, Enim, Mulak Ulu, Kikim, Ulu Mauna, Pasumah Lebar, Pasumah Ulu Limlah, Pasumah Ulu Ayer Kroe, Empat Lawang, Rejang Tengah atau Musi Rawas, Lebang, dan Bangka Belitung.²³⁵ Dengan demikian batas-batas Giopolitik Kesultanan

²³² Batang Hari Sembilan sebuah lambang dari kosmologi yaitu adanya delapan penjuru mata angin, sedangkan penjuru kesembilan merupakan pusatnya. Jadi pusat kekuasaan itu memancar ke delapan penjuru jagat dimana pusat permancu atau canggeng. Sedangkan di luar itu boleh saja ditiup hembusan angin. Djohan Hanafiah. *Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan. Suatu Tinjauan Sejarah Palembang 2009* hlm 4.

²³³ M H. Court. *An Exposition of religiom of the British Government With the Sultan and the State of Palembang and the Desigus of the Nederlands Government Upon That Country.* London Parbury and Allen Landhall Sreet. 1821 hlm 115-118 dalam Husni Rahim *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam.* Ciputat Jakarta 1998 hlm 58

²³⁴ Husni Rahmi *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam Study Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial.* diterbitkan oleh PT Logos Wacana Ilmu Ciputat Jakarta 1998 hlm 58

²³⁵ Wilayah inilah yang nantinya menjadi wilayah Keresidenan Palembang pada seperempat Abad pertama Abad XIX M, sedangkan Bangka sejak tahun 1615 M sudah berada dibawah Raja-raja Palembang. Posisi ini diperkokoh dengan terjadinya perkawinan Politik antara Sultan Abdurrahman dengan janda Penguasa Bangka (Keilstra 1892, sementara itu Clereq 1895. 130). memiliki pendapat yang berbeda, bahwa bukan janda Penguasa Bangka yang dinikahi oleh Sultan Abdurrahman melainkan putri Bupati Nusantara (Penguasa Bangka). setelah bupati Nusantara wafat, putrinya mewarisi tahta Bangka dan Bangka ditempatkan dibawah protektorat Palembang. Untuk istilah Ilir (Iliran) dan Ulu (Uluhan), istilah ini biasa digunakan oleh masyarakat Palembang untuk membedakan wilayah berdasarkan aliran Sungai yang dikenal dengan nama Batang Hari Sembilan, yang terdiri dari Sungai Musi, Sungai Kelingi, Sungai Beliti, Sungai lakitan, Sungai Rawas, Sungai Rupit, Sungai Batang hari Leko, Sungai Ogan, dan Sungai Komering. Disamping itu istilah ini juga untuk membedakan kawasan daratan yingggi (Bagian Barat) dan

Palembang menurut O.W Wolters maupun Somersaid Moertono tentang batas lingkaran kekuasaan Sang Raja tergantung pada pribadi Raja yang memegang kekuasaan. Demikian juga dengan lingkaran “Cahayanya” di dekat pusat lingkaran kekuasaannya. Cahayanya sangat benderang, akan tetapi semakin jauh semakin redup. Sebagai contoh batas-batas Giopolitik.

Dengan demikian, berdirinya Kerajaan Demak menandai runtuhnya Kerajaan Majapahit. Runtuhnya Kerajaan Majapahit maka dimulailah Era Kerajaan Islam, pada saat itu pula agaknya Palembang mulai berada di bawah kekuasaan Kerajaan Islam. Ario Damar atau Ario Dillah yang tadinya adalah Adipati Kerajaan Majapahit yang beragama Hindu, kini memimpin Palembang yang telah menjadi Protektorat Kerajaan Demak yang Islam.²³⁶ Selama dua Abad selanjutnya (Abad XVI dan XVII M) Palembang terus berada dalam genggaman Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Pemerintahan Islam di Palembang baru berdiri sendiri kelak pada akhir Abad XVII M.²³⁷ Berdirinya Kesultanan Palembang oleh Kyai Mas Hindi yang bergelar Sultan Abdul Rahman Khalifatul Mukminin Sayidul Iman pada tahun 1659 s/d 1702 M. Kesultanan ini sebelumnya merupakan sebuah Kerajaan yang sudah berdiri sejak Abad XVI M kemudian memutuskan hubungan ke Vazalan dengan Kerajaan Mataram,²³⁸ dan sekaligus menyesuaikan Struktur Kesultanan dengan ajaran Islam yang didirikan sebagai Agama Kerajaan kemudian Kerajaan Palembang diubah menjadi Kesultanan Palembang Darussalam. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Islam memberikan corak Melayu terhadap bangunan Kesultanan Palembang.

daerah daratan rendah (Bagian Timur) pembagian wilayah ini didasarkan pada aliran Sungai sudah terjadi sejak masa Sultan Abdurahman. P. de Roo de la faille 1971:16) Veth 1869 651-652: Zed 2003:43 En 1932.265.266)

²³⁶ Kelak menurut Uka Tjandra Sasmita, keturunan Ario Dillah ini menjadi Raja-raja Islam di Palembang lihat Uka Tjandra Sasmita dan Hasan Muarif Ambary, *Sejarah Masuknya Islam di Sumatera Selatan*. dalam KHO Gajahnata Penerbit Universitas Indonesia (UI) Press Jakarta 1986 hlm 20-21

²³⁷ Ismail Sukardil. *Madrasah dan Pengolahan Sosial Politik di Keresidenan Palembang 1925-1942. Fenomena Historis Lembaga Pendidikan Islam di Sumatera Selatan pada masa Kolonial Belanda*. Penertbit IDEA Press Jogjakarta 2014 hlm 29

²³⁸ Keterkaitan Palembang dengan kerejaan Mataram sudah terjalin semenjak kerajaan Majapahit terus berlanjut pada masa kerajaan Demak, Pajang sampai Mataram.

Hal serupa dikemukakan Salman Ali menurutnya pada tahun 1675 M Kimas Hindi mengangkat dirinya sebagai sultan dengan gelar Khalifatul Mukmin Saiyyidul Imam, kemudian namanya dirubah menjadi Abdurahman, dengan perubahan ini Kimas Hindi tercatat dalam sejarah Palembang sebagai pendiri Kesultanan Palembang dan beliau merupakan Sultan Pertama. Beliaulah yang mentransformasi tradisi dalam hal pemakaian nama raja-raja, dari nama-nama tradisi kemudian dirubah menjadi Kesultanan Palembang yang berakulturasi kepada nama-nama bercorak Islam. Semenjak Ki Mas Hindi gelar raja-raja berubah status menjadi sultan, setelah itu Kerajaan Palembang berubah pula kedudukannya menjadi kesultanan dan dalam negara kesultanan, Islam menjadi agama resmi kesultanan.²³⁹ Oleh karenanya, tidak mengherankan apabila dalam tt. No. 414 diceritakan bahwa pada zaman Sultan Abdurahman Khalifatul Mukminin ini, Islam berkembang secara mendalam tidak hanya di Ibu kota akan tetapi masuk ke wilayah pedalaman. Pada masa Kesultanan Abdurahman Palembang ini tidak hanya berpengaruh di dalam negeri akan tetapi telah melampaui batas-batas di luar wilayah Kesultanan Palembang. Daerah-daerah sekitar merupakan tetangga Kesultanan sering datang ke Palembang untuk meminta bantuan menyelesaikan krisis yang mereka hadapi.

Bertransformasinya struktur kerajaan menjadi kesultanan maka pada tahun 1666 M Palembang secara resmi menjadi sebuah kesultanan yang berdiri sendiri, ketika Raden Tumenggung mengumumkan dirinya menjadi Sultan Ratu Abdurahman dan kemudian mengambil Gelar Sultan Jamaluddin pada tahun 1681 M.²⁴⁰ Semenjak tidak lagi menjadi

²³⁹ Salman Aly. *Sejarah Kesultanan Palembang Masuk dan Berkembangan Islam di Sumatera Selatan*. Dalam KHO Gajahnata Penerbit Universitas Indonesia UI Press Jakarta. 1998 hlm 159-150

²⁴⁰ Ketika Kesultanan Kota baru di tanah pilih Jambi mengalami krisis karena baru saja berdiri dan baru saja berhasil menguasai bajak laut pulou berhala, atas permintaannya, sultan mengirim pasukan untuk membantu Jambi. Turut dalam rombongan itu Daeng Mangika dari Makassar bersama pendekar-pendekarnya yang berbaju besi, mereka berharap kelak akan peroleh imbalan tempat kekuasaan. Tahun 1688 M, Jambi bersama-sama orang Bugis-Makassar dan Raja-raja laut dari Minang Kabau membuat kerusuhan di Batang Hari, bahkan sampai kepulau Bangka. Belanda meminta sultan mengulasi hal itu. Suatu ketika penguasa-penguasa Lampung berontak terhadap Sultan Banten dan mereka minta bantuan Sultan Palembang untuk membantu perjuangan mereka. Pertahanan itu tidak dikabulkan sultan karena

prolektorat Kerajaan Mataram, maka Islamisasi birokrasi gencar dilakukan struktur kekuasaan Kesultanan Palembang untuk langkah selanjutnya disesuaikan dengan Ajaran Islam.²⁴¹ Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa pada masa ini proses Islamisasi benar-benar menyentuh para elit kekuasaan yang berada di Kesultanan Palembang.

Menurut kesimpulan J.W. Van Royen, wilayah Kesultanan Palembang merupakan wilayah Keresidenan Palembang pada masa kolonial ditambah daerah Rejang Empat Petulai (Lebang) dan Belalan disebelah Selatan Danau Banua. Wilayah Bangka dan Belitung semula daerah wajib pajak kepada Kesultanan Palembang sejak tahun 1670 M akibat perkawinan dengan janda raja tersebut dengan Raja Palembang, maka Palembang memiliki kekuasaan kedaulatan atas pulau-pulau tersebut. Perebutan kekuasaan dari Kesultanan Palembang kepada Pemerintahan Belanda tidak jelas bagaimana ditetapkan batas-batasnya. Setidaknya batas-batas tersebut seperti apa yang diperkirakan oleh J.W. Van Royen.²⁴² Pada waktu terjadi perubahan belum seharusnya dikuasai Pemerintah Hindia Belanda karena masih ada perlawanan dari rakyat. Baru pada tahun 1866 M dapat di duduki oleh Belanda batas-batas wilayah dengan Lampung baru dapat diatur berdasarkan Stanblads 1824 No:27 yang menyebutkan “Mulai dari laut melalui sungai mesuji sampai mulawalu, dari sini dalam satu garis yang dibayangkan, sampai di muara sungai kecil tuba ke dalam sungai pisang dan

dihalang-halangi oleh ayahnya Raden Aria diamping dia itu juga tidak mendapat restu dari Belanda.

²⁴¹ Kerajaan Palembang muncul pada Abad XVI M dibawah pimpinan Ki Gede Ingsuro. Dari sinilah Palembang berkembang menjadi sebuah Kerajaan besar. Naik tahtanya Sultan Abdul rrahman setelah peristiwa perang antara Palembang melawan VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnei*) 1659 M mengakibatkan pangeran Sido Ing Rejek mundur ke pedalaman (Indralaya), bukti terakhir hubungan antara Palembang dan Mataram yaitu Sultan Abdurrahman mengirim sepuluh kapal ke Mataram untuk membantu Mataram membasmi pemberontakan trimojoyo (1677 M). setelah itu hubungan terputus. hal itu disebabkan makin kuatnya posisi Palembang secara Politik dan Ekonomi, juga karena makin eratnya hubungan antara Palembang dengan VOC. Sedangkan Mataram makin lemah. Sebelumnya Palembang diperintah oleh Raja-raja dengan Gelar Ki Gede, Kemas, Ki Mas dan Pangeran (Abdullah 1987:202 Woelders 1975:74 ENI 1932:265 Roo de la Faille 1971:24)

²⁴² Djohan Hanafiah. *Kesultanan Palembang Darussalam dan Pespektif Sumatera Selatan. Perang Palembang Melawan VOC*. Penerbit Karyasari Palembang. 1996 hlm 47

selanjutnya melalui sungai ini sampai ke uluan dari danau seraya kembali mengikuti dalam satu garis yang dibayangkan melewati puncak gunung Pungkau melewati bukit merida dan melewati pematang tigaman sampai bukit pesagi.”

Sementara perbatasan dengan wilayah Bengkulu pada tahun 1833 M masih terdapat kericuhan dengan terjadinya tindakan ketatanegaraan yang salah dengan memisahkan warga-warga Empat Lawang dan Rejang dari Palembang dan memasukkannya ke Bengkulu. Pada tahun 1840 M diadakannya penelitian dan ketentuan tersebut di tarik kembali. Baru pada tanggal 6 februari 1904 M Gubernur Jenderal mengeluarkan keputusan No.20 Standblads 118. Karenanya dari kaca mata sejarah pengembangan Islam di Kesultanan Palembang jarang sekali kalau pun ada fungsinya sebagai penyampai Syi'ar Agama, seperti contohnya apa yang dilakukan oleh Banten, Goa, Tallo, dan Ternate. Jangankan menyebarkan agama kesultanan harus disibukkan oleh berbagai corak konflik yang harus diatasi dan kesetiaan kepada daerah pedalaman yang merupakan sumber penghasil eksport yang harus dijamin. Akan tetapi tidak ada ulama yang mendampingi sultan betapapun perkasanya Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo ia tidak mempunyai Syekh Yusuf, yang selalu mendampingi Sultan Agung Tirtayasa dari Banten.²⁴³

Onderafdeeling Rejang Lebang dan beberapa marga dari *Onderafdeeling* Tebing Tinggi dari Keresidenan Palembang digabungkan ke dalam Keresidenan Bengkulu dan dijadikan *Afdeeling* baru Rejang Lebung dengan ibu kota Kepahiyang yaitu *Onderafdeeling* Rejang Lebung dan marga-marga Sundang Kelingi Ulu, Sundang Beliti suku tengah, Kepungutan dan Sundang Kelingi dimana termasuk pasar Padang Ulak Tanding. Dengan demikian, setelah diadakan penataan kembali wilayah ini maka dengan dikeluarkannya Standblads 1918 No.612, 1921 No. 465 dan 1930 No. 352 maka keresidenan Palembang dijadikan tiga *Afdeeling* dibawah pimpinan asisten Residen yaitu: *Palembangsche*, *Beneden Canden*, Ibu kotanya Lahat, dan Agam En Komering Ulu Ibukotanya di Baturaja. Dengan perundangan baru ini maka Tebing Tinggi kembali masuk ke dalam

²⁴³ Taufik Abdullah. *Beberapa Aspek Perkembangan Islam di Sumatera Selatan. Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. Penerbit Universitas Indonesia UI Press Jakarta.1986 hlm 62

Keresidenan Palembang. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa wilayah geografis Kesultanan Palembang merupakan wilayah yang relatif lebih luas jika dibandingkan dengan keadaan wilayah provinsi Sumatera Selatan yang ada pada saat sekarang ini.

2. Keadaan Penduduk Kesultanan Palembang

Peran historis Palembang yang sangat panjang sejak masa Kerajaan Sriwijaya Suwarna Bhumi hingga Kesultanan Palembang Darussalam serta besarnya potensi ekonomi yang dimilikinya merupakan faktor penting terbentuknya Palembang sebagai wilayah dengan komposisi penduduk yang sangat heterogen. Kemajemukan penduduk Palembang terlihat jelas dari kehadiran berbagai kelompok etnis yang ikut membentuk masyarakat Kesultanan Palembang. Terdapat kurang lebih dua puluh (20) Etnis di jumpai di wilayah Kesultanan Palembang yang bermukim di wilayah kota, pinggiran kota, pedalaman maupun Bangka dan Belitung.²⁴⁴ Wilayah Ibukota Palembang merupakan kawasan padat dengan ragam etnis yang banyak lagi hiterogen.

Keadaan penduduk Kesultanan Palembang merupakan awal pengkajian dalam penulisan ini, sebagaimana yang telah dikemukakan di awal, bahwa Kesultanan Palembang terletak di daerah sumatera bagian selatan dan menurut perhitungan Administrasi Pemerintahan Republik Indonesia sekarang termasuk ke dalam wilayah provinsi Sumatera Selatan dengan Ibukota Palembang.²⁴⁵ Kalau kita perhatikan dalam perspektif demografi dan sosial budaya, daerah Kesultanan Palembang merupakan daerah yang cukup unik di mana terjadi perpaduan antara budaya Melayu, Jawa, China, Arab maupun etnis lainnya. Sejarah panjang Palembang dari masa klasik Kerajaan Sriwijaya kemudian pengaruh Islam Kesultanan Palembang sampai penjajahan bangsa Barat (Belanda) telah melahirkan bentuk Struktur sosial masyarakat yang dinamis di setiap masanya sehingga beberapa penulis menyebutkan daerah ini dengan

²⁴⁴ Supriyanto. *Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864*. Penerbit Ombak Yogyakarta 2013 hlm 33

²⁴⁵ Alfian. T Ibrahim. *Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan kolonialisme di Daerah Sumatera Selatan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Sejarah Nasional. Proyek Evaluasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. Jakarta 1983 hlm 11

berbagai istilah merujuk kepada keunikan tersebut.²⁴⁶ Seperti Palembang sebagai “Melayu-Jawa” Hadramaut Yaman Selatan di samping sebutan-sebutan lainnya.

Berdasarkan catatan sejarah pada masa Abad XVII M penduduk kota Palembang berjumlah 53.788 jiwa yang terdiri dari 242 orang Eropa 46.870 orang Pribumi 4.726 orang China 1.825 orang keturunan Arab dan 126 orang keturunan India.²⁴⁷ Pada masa Kesultanan Palembang menurut perkiraan Van Sevenhoven, penduduk orang Arab sekitar 500 orang Sumatera dan penduduk China 800 jiwa.²⁴⁸ Kemudian keadaan penduduk Palembang mengalami transformasi siring dengan kemajuan wilayah ini, berdasarkan sensus penduduk tahun 1915, jumlah penduduk Palembang diperkirakan 650.000 jiwa yang terdiri dari 800 orang Eropa 7.000 orang China, 2.200 orang Arab, 200 orang Keling dan sisanya Pribumi. Kemudian pada tahun 1930 M jumlah penduduk Palembang mengalami perubahan dua kali lipat selama lima belas tahun, hal ini tergambar dalam tabel di bawah ini:

Tabel: 3.1. Penduduk Berdasarkan Etnik di Palembang

No	Wilayah	Etnik				Total
		Eropa	Pribumi	China	Lainnya	
1	Benederland en Ilir	2.577	528.705	18.922	4.285	544.469
	Benederland Ulu	1.117	25.773	5.523	331	332.744
3	Ogan dan Komering	153	207.489	1.621	79	209.342
Total		3.287	1.061.967	26.066	4.695	1.096.565

Sumber:

Indish Verdag 1941:13 dalam Mustika Zet. "The Dualistic Economy of Palembang in the late Colonial periode editor Thomas J. Lindblad, Historica Foundation of a National Economy in Indonesia 1890-1990 North Holland Amsterdam Iqypart/New York/Tokyo ; Koninklijk Nederlands Akademik Van Waterschapp Vergandelingen, Afd Letterkunde Nieuwe Reeks dell 167 1996

²⁴⁶ Jumhari. *Sejarah Sosial orang Melayu Keturunan Arab dan China di Palembang dari masa Kesultanan Palembang hingga Reformasi*. Penerbit BPNST Press Padang 2010 hlm 26

²⁴⁷ Rijnuan al Kemade. *De Hoofd'Plaats Palembang* dalam TNAG VII 1883

²⁴⁸ J.I. Van Sevenhoven. *Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang*. Penerbit Bantara Jakarta 1971 hlm 33

(hal 250); dalam, Jumhari, “Sejarah Sosial orang Melayu Keturunan Arab dan China di Palembang dari masa Kesultanan Palembang Sampai Reformasi”; Penerbit BPNST Padang Press Sumatera Barat Padang. 2010 (hlm 27).

Melihat data penduduk Palembang pada masa kesultanan sayangnya tidak bisa ditemukan sejauh ini. Tidak ada pencatatan membuat peneliti mengalami kesulitan untuk mengetahui secara pasti besarnya jumlah penduduk Palembang. Tabel berikut menyuguhkan gambaran pertumbuhan penduduk Palembang pada masa setelah berakhirnya kekuasaan kesultanan. Tampak jelas tabel bahwa penduduk Palembang secara terus-menerus mengalami pertumbuhan pesat dan menjelang pertengahan abad XIX M penduduk Palembang telah mencapai lebih dari satu juta.

Tabel 3.2. Pertumbuhan Penduduk Palembang 1825-1864

No	Tahun	Jumlah
1	1825	239.093
2	1827	244.832
3	1829	248.648
4	1833	251.732
5	1833	254.600
6	1835	256.422
7	1837	366.011
8	1839	554.100
9	1841	607.230
10	1843	754.484
11	1847	854.555
12	1849	1.054.699
13	1851	1.154.771
14	1853	1.254.843
15	1855	1.354.915
16	1857	1.454.987
17	1859	1.555.058
18	1861	1.655.130
19	1863	1.755.202
20	1864	1.805.238

Sumber: Algenen Verslag der Residentei Palembang over het jaar 1824, 1833, 1840, 1841, 1848, dan 1849 dalam Supriyanto Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864. Penerbit Ombak Jogjakarta 2013 hlm 35

Berjalannya proses Islamisasi dikalangan elit kekuasaan nampaknya terus terjadi selama periode Kesultanan Palembang sejak tahun 1666 M sampai dengan 1823 M. Akan tetapi selama ini menurut Taufik Abdullah, kalau kita bandingkan dengan beberapa daerah lain di nusantara perkembangan Islam di Sumatera Selatan berjalan agak lamban. Sekarang ini sekurang-kurangnya disebabkan dua hal. *Pertama*, kalangan umat Islam sendiri tidak memainkan peran yang berarti dalam proses tersebut. Para sultan lebih banyak disibukkan oleh masalah-masalah politik dan ekonomi sehingga kesempatan untuk melakukan Islamisasi menjadi berkurang. Sultan juga disibukkan oleh upaya memelihara kesetiaan daerah pedalaman yang berperan sebagai sumber komoditas eksport. *Kedua*, kalangan ulama khususnya ulama birokrat lebih sibuk melayani dan memenuhi kebutuhan dan tugas-tugas dari Istana. Walaupun demikian, ulama juga tidak mempunyai hubungan yang intim dengan Sultan Palembang. Pengaruh ulama sangat tergantung kepada kemampuan ulama meyakinkan sultan.²⁴⁹

Akan tetapi, bagaimanapun peran ulama para pewaris “Para Nabi” pada tingkat Keraton Pusat, ternyata dalam hal ini kondisi di Kesultanan Palembang lebih menyerupai Kesultanan Aceh dari pada Mataram. Meskipun “Birokrasi Agama” telah dijalankan---dalam arti adanya jabatan kepenghuluan---dan Keraton juga memelihara ulama-ulama para ulama tersebut tidaklah merupakan bagian dari Struktur Kekuasaan. Pengaruh ulama sangat tergantung pada kemampuannya untuk meyakinkan kesultanan (penguasa), hanya saja untuk meyakinkan penguasa, memang Palembang tidak mempunyai corak dan pola hubungan yang erat seperti yang terjadi antara Syeikh Syamsuddin as-Sumatrani dengan Sultan Iskandar Muda atau Syeikh Nuruddin al-Araniri dengan Sultan Iskandar Thani dari Aceh Darussalam.²⁵⁰

Oleh karenanya dari kacamata sejarah pengembangan Islam di Kesultanan Palembang jarang sekali, walaupun ada

²⁴⁹ Taufik Abdullah. *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia* Penerbit LP3ES. Jakarta 1987 hlm 207

²⁵⁰ Taufik Abdullah. *Beberapa Aspek Perkembangan Islam di Sumatera Selatan. Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. KHO Gajah Nata Sri Edi Suasono. *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. Penerbit Universitas Indonesia (UI) Press. Jakarta 1986 hlm 63.

fungsinya sebagai penyampai Syi'ar agama seperti contohnya apa yang dilakukan oleh Banten, Goa, Tallo, dan Ternate. Jangankan menyebarkan Agama Kesultanan harus disibukkan oleh berbagai corak konflik yang harus di atasi dan kesetiaan kepada daerah pedalaman yang merupakan sumber penghasilan ekspor yang harus dijamin. Akan tetapi kenyataannya tidak ada ulama yang kuat untuk mendampingi sultan. Betapun perkasanya Sultan Mahmud Badaruddin, ia tidak mempunyai Syekh Yusuf yang selalu mendampingi Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten.²⁵¹ Sebaliknya tidak seperti Mataram sesudah priode Sultan Agung di Kesultanan Palembang ulama-ulama tidaklah tampil sebagai *counter-ellit* yang dengan jaringan pesanteren mereka sekali-kali akan tampil sebagai pengeritik keras terhadap kekuasaan. Saingan berat dari sultan adalah keluarga keraton sendiri dan para *jenang* yang tidak setia dari kesultanan.

Dari konstruksi yang tidak lengkap ini dapat diperkirakan, karena kelangkaan sumber--- bahwa sampai dengan awal abad XIX M perkembangan Islam di daerah Sumatera Selatan berjalan secara wajar tanpa ada suatu peristiwa yang menentukan. Setelah Raden Temenggung menjadi Sultan Abdurrahman dan setelah unsur-unsur Islam diadaptasikan ke dalam undang-undang "Simbur Cahaya" peristiwa Islam yang perlu dicatat hanyalah munculnya para ulama pengarang dan bangkitnya para haji, pengikut Samaniah, melawan agresi Belanda di tahun 1819. Setelah Islam resmi dipeluk dan birokrasi agama dipertautkan pada struktur kekuasaan maka proses pendalaman, atau lebih tepat penyesuaian realitas kehidupan dengan doktrin yang dianut berjalan secara rutin. Bila diingat bahwa tulisan-tulisan keagamaan lebih bercorak "Dunia Melayu" atau kadang-kadang "Dunia Jawa" dari pada bercorak daerah lokal dan tidak pula terlalu jauh masuk ke dalam kehidupan masyarakat secara langsung, dan bila diperhatikan keberlakuan hukum agama yang diputuskan oleh penghulu (Mulai tingkat keraton sampai ke dusun-dusun) tergantung kepada persetujuan penguasa,

²⁵¹ Taufik Abdullah. *Beberapa Aspek Perkembangan Islam di Sumatera Selatan Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. Penerbit Universitas Indonesia (UI) Press Jakarta 1986 .hlm 62.

maka suasana rutin dari proses pendalaman Islam ini lebih bisa dimengerti.²⁵²

Selanjutnya dapat dipahami bahwa kesultanan merupakan suatu *Islamdom*, suatu pusat kekuasaan yang dengan sadar melibatkan diri pada tradisi dan ajaran Islam. Setidaknya secara formal kesultanan adalah suatu wadah yang lebih membuka kemungkinan bagi keberlanjutan Islamisasi internal. Tidaklah terlalu mengherankan jika *Islamdom* tersebut juga berusaha memperkuat wadah tersebut dengan berbagai institusionalisasi----seperti kedudukan kepenghuluan dan manipestasi simbolik dari kekuasaan sultan tersebut. Dengan demikian masjid besar Palembang di awal Abad XIX M dianggap oleh para pelapor Belanda sebagai salah satu bangunan yang terindah di Hindia Belanda.²⁵³ Akan tetapi, sekali lagi diungkapkan bahwa pada helaan nafas yang sama laoran-laporan tersebut akan menyebutkan bahwa penduduk pribumi, terutama yang berada di pedalaman *Slechts de naam van de Mohammedan* tanpa memiliki pengetahuan tentang tentang ajaran agama. Bahkan dikatakan pula bahwa “Sebagian besar *Priesters* Islam itu sedikit sekali atau bahkan tidak sama sekali mempunyai pengetahuan baik tentang ajaran agama maupun tentang prinsip-prinsip dasar akhlak.”²⁵⁴

B. Sistem Ekonomi Kesultanan Palembang

Sebelum membahas persoalan utamanya yang berkaitan dengan konsep Perekonomian Kesultanan Palembang pada Abad XVII - XIX M peneliti menjelaskan terlebih dahulu pengertian ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani (*Greek*) yang berarti ”Mengatur urusan rumah tangga, dimana anggota keluarga yang ada ikut menikmati apa yang mereka peroleh kemudian populasinya semakin banyak dalam rumah-rumah lalu menjadi suatu kelompok (*Community*) yang diperintah oleh

²⁵² Taufik Abdullah. *Beberapa aspek Perkembangan Islam di Sumatera Selatan*. Dalam KHO Gajahnata *Masuk dan berkembangnya Islam di Sumatera selatan* Penerbit Universitas Indonesia (UI) Press Jakarta 1986 hlm 64.

²⁵³ Taufik Abdullah, *Beberapa aspek Perkembangan Islam di Sumatera Selatan*. Dalam KHO Gajahnata. *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. Penerbit Universitas Indonesia (UI) Press Jakarta 1986 hlm 64.

²⁵⁴ J .WJ, Wellan *De Stand Palembang in 1935 Tweehonderd vijf en zeventig Jaar Geleden Als Phoenix Uit Haar A sch Herrzen (Koloniale Tijdschrift*. dalam KHO Gajahnata *Masuk dan Bekembangnya Islam di Sumatera Selatan* Penerbit Universitas Indonesia (UI) Press Jakarta 1986 hlm 64

satu negara.²⁵⁵ Hal senada, kata ekonomi berasal dari kata *Aikos* dan *Nomos*.²⁵⁶ kata *Aikos* di kemukakan berarti rumah tangga (*House-hold*) sedangkan kata *Nomos* memiliki arti yaitu mengatur. Dari sini dapat dipahami secara garis besar bahwa ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau menjelaskan rumah tangga,²⁵⁷ untuk mencapai kesejahteraan.

Dengan demikian kenyataannya ekonomi bukan hanya mengatur rumah tangga suatu keluarga atau mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kegiatan memperbanyak jumlah kekayaan serta menjaga pengadaannya, melainkan bisa juga berarti mengatur ekonomi pedesaan atau bahkan suatu negara. Dalam pandangan Islam kata yang digunakan untuk istilah ekonomi adalah *al-Iqtishad* yang artinya hemat dan penuh perhitungan. Kemiripan makna *al-Iqtishad* Dr. Bagir al-Hasani dalam buku *Essay al-Iqtishad* sebagaimana dikutip Hidayat,²⁵⁸ Ekonomi dan *al-Iqtishad* merupakan dua konsep yang berbeda meskipun banyak makna yang mengatakan bahwa ekonomi adalah *al-Iqtishad*. Menurutnya kata *al-Iqtishad* merupakan derivasi dari kata *qoshad* yang artinya *Equilibrium* (Keseimbangan, Pertengahan) sehingga kata *al-Iqtishad* lebih harmoni juga bila diambil dari hadits Nabi SAW yaitu '*Alaikum Bidiya Qosdha* maksudnya adalah diwajibkan atas kamu membelanjakan tengah. Pendapat Bagir al-Hasani diatas tampaknya terpaku pada makna *Qashad* yang artinya pertengahan, atau jalan tengah, tetapi juga hemat, perlu perhitungan dan pilihan-pilihan. Dengan demikian, kata *al-Iqtishad* masih relevan digunakan untuk istilah ekonomi.

Sementara Perekonomian menurut Chester. A. Bernard merupakan suatu sistem yang pada dasarnya adalah organisasi besar, pada sistem tersebut terjadi ikatan antara subjek dan objek. Dari definisi yang dikemukakan Chester ini bisa disimpulkan menjadi suatu sistem yang dikelola secara terpadu

²⁵⁵ Taqiyuddin An-Nabhani. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Penerbit Risalah Gusti Surabaya, 2009. hlm 47

²⁵⁶ Ely Masykuroh. *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan pada Teori Ekonomi Makro Islam*. STAIN Penerbit Panoraga Press. Panoraga 2008 h:lm 8

²⁵⁷ Yunia Fauzia Ika dan Abdul Kadir Riyadi : *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Moqoshidus al-Syari'ah*. Penerbit Prenada Media Group. Jakarta. 2015 hlm 2

²⁵⁸ Muhammad Hidayat. *An Introduction To The Syari'ah Economical Pengantar Ekonomi Syari'ah*. Penerbit Zukmal Hakim. Jakarta 2010 hlm 20

dan berbaur namun masing-masing bagian di dalamnya tetap memiliki karakteristik dan ciri-ciri tersendiri sehingga bagian-bagian yang tergabung mudah untuk dibedakan. Dumairy menyatakan perekonomian merupakan suatu bentuk sistem yang berfungsi untuk mengatur serta menyakini kerjasama dalam bidang ekonomi dilakukan antara hubungan manusia dan lembaga. Dumairy menambahkan pendapatnya perekonomian yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan tidak harus berdiri tunggal melainkan harus berdasarkan filsafah ideologi serta tradisi masyarakat yang berkembang serta turun temurun di suatu tempat.

James Harvey menyatakan Perekonomian merupakan suatu sistem yang berguna untuk membuat rangkaian komponen antara satu dengan yang lain dalam prosedur logis dan rasional guna mencapai tujuan tertentu yang lebih disepakati bersama. James Harvey menambahkan dan lebih menekankan bahwa kesatuan dalam perekonomian adalah yang mutlak terjadi dalam sistem perekonomian. Di samping itu, Jhon MC. Manawa mengemukakan perekonomian merupakan sebuah konsep yang menggabungkan keseluruhan fungsi ke dalam satu kesatuan organik dengan tujuan mencapai hasil yang efektif dan efisien dari kegiatan yang dilakukan. Kemudian Edgar F. Huse dan James L. Bowdier menerangkan gagasan mereka tentang Perekonomian. Perekonomian merupakan suatu sistem atau rangkaian yang saling terkait dan bergantung satu sama lain sehingga timbul hubungan timbal balik dan pengaruh dari hubungan tersebut, dalam arti kata, satu bagian, mempengaruhi bagian-bagian yang lain.²⁵⁹

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perekonomian merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk mengatur serta menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi sistem tersebut saling keterkaitan satu sama lain sehingga dapat mencapai hasil yang efektif dan efisien dari aktivitas yang dilakukan. Berkaitan dengan konsep perekonomian yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dan dihubungkan dengan konsep perekonomian Kesultanan Palembang pada Abad XVII - XIX M terlihat bahwa sistem dan

²⁵⁹ [http://perencanaan/pdn.ac.id/kajian/Perencanaan Pembangunan Nasional Pdn](http://perencanaan/pdn.ac.id/kajian/Perencanaan_Pembangunan_Nasional_Pdn). Diakses 16 Februari 2019

aktivitas yang dilakukan tergambar bahwa konsep perekonomian Kesultanan Palembang dalam melakukan aktivitas pada umumnya berdasarkan pada pertanian, perkebunan, perikanan, pengumpulan hasil hutan, Industri kerajinan dan hasil tambang.

Konsep perekonomian masyarakat di Kesultanan Palembang pada umumnya berdasarkan pada pola dan corak pertanian, perkebunan, perikanan, mengumpulkan hasil hutan, hasil tambang, dan industri kerajinan pada Abad XVII M hingga Abad XIX M. Hasil produksi komoditas tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau sebagian untuk eksport. Diantara komoditas primadona yang dihasilkan kesultanan dari wilayah Palembang pada masa itu adalah lada dan timah. Akan tetapi di samping komoditas tersebut masih banyak produksi pertanian yang lainnya.²⁶⁰ Untuk mengolah lahan pertaniannya masyarakat di wilayah kesultanan menggunakan pelatan berupa parang atau kapak beliung atau kapak ringan. Selain hasil pertanian lada masih banyak produk-produk pertanian lainnya yang dihasilkan oleh Kesultanan Palembang, seperti kapas (ditanam di lokasi pasca tanaman padi yang telah dipanen) gambir, nila, tembakau (tembakau Ranauw/ Ranau) yang sangat diminati oleh para konsumen baik di Kesultanan Palembang maupun di luar Palembang karena komoditas itu disukai oleh para konsumen.

Dengan demikian produksi lainnya memiliki nilai jual yang tinggi, ada berupa juga sirih, buah pinang, rami, pisang dan lain-lain. Sementara buah-buahan yang sangat terkenal adalah Mangga, Durian, Cempedak, Jeruk Nipis, Nanas, Jambu bol, Jambu biji, Pepaya, Srikaya, Buah nona, Langsung, Prambeh, Duku, Rambutan, Delima, dan Bidara.²⁶¹ Dalam kurun waktu dari Abad XVII M hingga awal Abad XIX M menempatkan Perekonomian Kesultanan Palembang sebagai salah satu Perekonomian Kesultanan terpenting di Nusantara. Kesultanan Palembang ini banyak menghasilkan komoditi yang sangat diminati dan laku di pasaran dunia yaitu komoditi lada dan

²⁶⁰ ANRI Bundel Palembang No. 62.7 *Java Government Gazette* 4 Juli 1812. dalam Jurnal Farida R Wargadalem *Perekonomian Kesultanan Palembang Abad XVII Hingga Awal XIX*. Dosen Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Palembang 2012 hlm 2

²⁶¹ ANRI Bundel Palembang No. 62.2 No. 62.7 *Java Government Gazette* 4 Juli 1812

timah di samping produk alam lainnya. Sultan dan kaum bangsawan menjadi pelaku utama dalam aktivitas Perekonomian tersebut.

Kondisi yang menguntungkan ini membawa Palembang menjadi target Belanda dan Inggris untuk menguasai Kesultanan Palembang baik secara perekonomian dan politik. Langkah-langkah yang diterapkan oleh Belanda kepada Kesultanan Palembang untuk menguasainya dengan mengikat berbagai kontrak perjanjian dalam bidang ekonomi dan politik, sedangkan Inggris terlibat aktif dengan perdagangan gelap. Sebagai Kerajaan yang berdaulat penuh maka Kesultanan Palembang semakin berkembang perekonomiannya. Dengan posisi yang sangat strategis dan ditopong oleh Pemerintahan yang Stabil, kesuksesan Palembang banyak menghasilkan komoditi yang sangat dibutuhkan baik oleh pasar domestik maupun internasional. Kondisi ini menjadi dilematis, sebab disatu sisi ini membawa keuntungan, akan tetapi disisi lain justru menjadi bumerang dan incaran bangsa-bangsa imperialisme dunia khususnya Belanda dan Inggris.²⁶² Pada masa ini secara global Perekonomian Kesultanan Palembang menjadi fenomena yang sangat menarik bagi bangsa-bangsa kolonialisme dunia sehingga muncul istilah “Semahal lada dan Emas hitam” untuk mewakili komoditas terpenting dunia yang dihasilkan oleh Kesultanan Palembang, kemudian di awal Abad XIX M adalah puncak terakhir keutuhan Kesultanan Palembang sebagai kesultanan yang berdaulat karena Kesultanan Palembang Darussalam jatuh ketangan imperialisme Barat.

Dalam konteks pertanian di wilayah Kesultanan Palembang berkembang dengan baik hal ini berkat kondisi tanahnya yang subur. Van Sevenhoven melaporkan terhadap apa yang disaksikannya ketika berada di Kesultanan Palembang bahwa tanah-tanah disekitar Ibukota Kesultanan dan daerah pedalaman menghasilkan banyak buah dan sayur-mayur dengan kualitas yang sangat baik. Tanaman-tanaman sayur dan buah ini tumbuh begitu subur bahkan menurut Van Sevenhoven pertumbuhannya jauh lebih sempurna dibandingkan dengan tanaman-tanaman sejenis yang tumbuh di tanah Jawa.

²⁶² Farida R Wargadalem Jurnal. *Perekonomian Kesultanan Palembang Abad ke XVII Hingga Awal Abad XIX*. Dosen Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya Palembang 2018

Menurut deskripsi kolonial tentang kondisi alam di Kesultanan Palembang datang dari William Marsden yang menyebutkan bahwa Kesultanan Palembang terletak di daratan rendah berupa tanah rata dan berawa-rawa selain itu bagian bawah daerah ini tidak cocok untuk pertanian. Berbeda dengan daerah pedalaman, daerah uluan merupakan daerah produktif dengan didukung oleh kondisi alam yang memiliki daratan tinggi menyebabkan terdapat kebun-kebun dengan hasil alam yang dapat dipasarkan untuk kebutuhan di luar daerah seperti lada, damar atau darah naga, jambur, telur, ikan, benang pualam, sutera merah yang masih sangat kasar, gading gajah, tawas, Arsemikun, kemenyan dan lain-lain. Hasil produksi dari kebun ini dibeli oleh para kaki tangan sultan dengan harga murah, sebaliknya orang iliran kembali menjual komoditas dan berbagai keperluan pedalaman seperti Candu, Garam dan bahan pakaian lainnya.²⁶³

Hasil-hasil produksi dari Kesultanan Palembang yang di ekspor menurut Van Sevenhoven adalah Rotan Ikat, Damar wangi, Kayu laka, Lilin, Taring gajah, Emas pasir, semua ini tidak saja dipelihara akan tetapi dikumpulkan dari hutan-hutan dan dari tepi-tepi Sungai. Komoditas Lada, Kopi, Gula, Gambir, Pinang, Tembakau, Nila adalah barang-barang yang ditanam, atau dipelihara dan hasil kerajinan, Ikan kering dan Ikan asin, barang pecah belah kasar, Tikar Rotan, dan jerami dan karung-karung barang-barang dari Kuningan Sutera, dijalin dengan benang emas dan Kain-kain dari Kapas. Akan tetapi barang yang di ekspor itu pada tahun 1822 M harganya tidak sampai separuh dari harga-harga barang yang di import, untuk menutupi kekurangan jumlah itu harus ditutupi dengan persediaan emas, perak, permata dan uang kontan sehingga Ibukota Palembang masa itu mempunyai neraca perdagangan yang menunjukkan kerugian.

Bahkan bukan itu saja buah-buahan dan sayur-mayur yang dihasilkan oleh wilayah Kesultanan Palembang menurut Van Sevenhoven jauh lebih empuk, mengandung lebih banyak air, lebih manis dan lebih enak. Kondisi yang demikian ini menjadi salah satu alasan pokok baginya untuk mengatakan

²⁶³ Didi Irwanto. *Iliran dan uluan Dikotomi dan Dinamika dalam Sejarah Kultural Palembang*. Penerbit Eja Publisher Sleman Jogjakarta 2010 hlm 43

bahwa Kesultanan Palembang akan menjadi salah satu tempat yang paling menyenangkan bagi orang-orang Eropa untuk tinggal dan menetap di Hindia Belanda.²⁶⁴ Di wilayah sekitar Kesultanan Palembang maupun daerah pedalaman Palembang juga di katakan sebagai wilayah yang menghasilkan produk-produk yang penting bagi Belanda untuk menyuplai komoditas pasar Eropa. William Marsden dalam bukunya *The History of Sumatera* seorang pegawai Inggris yang pernah bertugas di Bengkulu melaporkan bahwa di daerah pedalaman atau daerah yang bisa disebut dataran tinggi Palembang merupakan kawasan yang sangat produktif. Kondisi lahan-lahan yang berada di dataran tinggi ini terdapat banyak kebun-kebun lada yang di olah oleh penduduk.²⁶⁵

Secara lebih detail, penulis Inggris lainnya M.H. Court melaporkan pada tahun 1821 M menyatakan bahwa produk-produk hasil pertanian seperti Beras, Kapas, Lilin, Gambir, dan lada dihasilkan dari aliran Sungai Musi. Daerah aliran Sungai Lematang memproduksi Lada, Beras dan Kapas, sedangkan daerah aliran Sungai Ogan menghasilkan produk-produk berupa Beras, Lada dan Rotan, sedangkan daerah aliran Sungai Komering dan Sungai Banyuasin menghasilkan produk pertanian berupa Beras dan Lada.²⁶⁶ Produk-produk tersebut banyak diusahakan penduduk Palembang secara tradisional dengan menggunakan sistem ladang berpindah. Sistem yang demikian itu dalam konsep barat dikenal dengan istilah *Swiden Agriculture* atau *Slash and Bein Agriculture* sebagai praktek yang secara umum di jumpai di wilayah-wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang masih relatif rendah.²⁶⁷

Berkaitan dengan hal tersebut dapat dipahami bahwa pada masa Kesultanan Palembang memang menerapkan sistem monopoli perdagangan, perdagangan bebas, perdagangan gelap, dengan dibantu struktur kelembagaan *Fexo*, *Syahbandar*, *Tiban*

²⁶⁴ Van Seven Hoven. *Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang*. Penerbit Bhkratara Jakarta 1971 hlm 53-54

²⁶⁵ William Marsden. *F.R.S. Sejarah Sumatera The Histori Of Sumatera*. Penerbit Indoliterasi Bantul Jogjakarta 2008. hlm 330

²⁶⁶ Jereon Peeters dan Nenenschwander. *Kaum Tuo Kaum Mudo Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*. Penerbit INIS Jakarta 1988 hlm 2

²⁶⁷ Van Sevenhoven. *Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang*. Penerbit Bhkratara Jakarta 1971. hlm 47

dan Tukon, Raban dan Jenang, Kepungutan dan Sikap sebagai sumber perekonomian. Disamping itu penduduk diharuskan menanam tanaman tertentu salah satu tanaman terpenting yang diwajibkan bagi petani untuk menanam adalah tanaman lada. Hasil produksi lada yang diperoleh para petani kemudian di jual kepada sultan dengan harga telah pajak ditentukan sebagai ganti yang harus mereka bayar.²⁶⁸ Keberadaan komoditas lada sangat dibutuhkan dan sangat laku di pasaran global ini telah meningkatkan peran Kesultanan Palembang dalam perluasan areal penanaman lada di Palembang dan di tempat-tempat lainnya di pulau Sumatera seperti Pidi, Samudera Pasai, Indragiri, Kampar, Pariaman, Indrapura, Silebar, Jambi dan Lampung. Perluasan areal penanaman lada ini tidak terpisah dari adanya peningkatan permintaan pasar Eropa pada awal Abad XV M permintaan komoditas lada oleh Eropa mengalami peningkatan secara drastis dan pada Abad XVII M lada merupakan komoditas nusantara yang paling digemari di pasaran Eropa.²⁶⁹

Oleh karenanya pada tahun 1662 M harga lada di pasar Eropa seharga empat real untuk setiap pikul. Harga komoditas lada yang mahal dan keterikatan untuk menjualnya pada VOC disesuaikan dengan kontrak yang ditandatangani pihak Kesultanan Palembang, dalam kondisi demikian menyebabkan Sultan Palembang mewajibkan para penduduk untuk menanam komoditas lada pada lahan yang mereka garap terutama di kawasan Uluan, Bangka Belitung. Kebijakan yang dilakukan oleh sultan tersebut hasilnya adalah munculnya Kesultanan Palembang sebagai salah satu pusat produksi lada yang utama di wilayah Nusantara. Di samping itu, Kesultanan Palembang melakukan monopoli terhadap komoditas barang-barang import seperti garam, pakaian, kain dan lain-lain yang dibutuhkan rakyat untuk wilayah Kesultanan Palembang. Dalam kondisi demikian apabila rakyat membutuhkan barang-barang impor itu maka rakyat harus menukarkan produksi lada atau komoditas lain kepada sultan.²⁷⁰

²⁶⁸ Supriatno. *Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864*. Penerbit Obak Jakarta 2013 hlm 58

²⁶⁹ Farida R Wargadalem. *Perekonomian Kesultanan Palembang Jurnal Sejarah Lontar* Volume 6 No.1 tahun 2009 hlm 12-20

²⁷⁰ Masyhuri. *Perdagangan lada dan Perubahan Sosial Ekonomi di Palembang 1790-1825* (Thesis S2 tidak diterbitkan pada Universitas Indonesia Jakarta 1983 hlm 75 dalam Suprayitno)

Sultan Muhammad Bahauddin memiliki pengaruh kuat di wilayahnya sehingga mampu menguasai peredaran barang-barang import dan melakukan pengawasan terhadap rakyat, oleh karenanya sultan sebagai penguasa pusat mampu menetapkan harga jual barang-barang import untuk ditukarkan dengan produksi komoditas perkebunan rakyat. Pertukaran barang-barang import dengan komoditas lada di Kesultanan Palembang disebut dengan *Tiban*, sedangkan pembelian dengan uang hasil produksi lada rakyat oleh sultan disebut dengan *Tukon*. Akan tetapi, standar harga lada hampir di setiap warga berbeda-beda sesuai dengan ketetapan sultan.²⁷¹ Dalam menjalankan aktivitas perdagangan, sultan dibantu oleh *Raban* dan *Jenang* dan berkerjasama dengan lembaga-lembaga yang berada di bawahnya, diantaranya pesirah dan *proatin*. Dengan melalui lembaga-lembaga tersebut, aktivitas monopoli perdagangan Kesultanan dapat berlangsung bekerjasama dengan pejabat-pejabat pelabuhan di Palembang yang melakukan keluasaan dalam pengiriman barang dagangan yang merupakan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat pedusunan. Barang-barang dagangan itu diperoleh dari pedagang-pedagang China, Jawa, Melayu, Bugis dan Arab yang dibawa dari Batavia dan Riau, kemudian barang-barang itu oleh penguasa pelabuhan yang dibantu *Raban* dan *Jenang* disebarkan ke berbagai daerah negara.²⁷²

Dalam konteks sistem ekonomi kesultanan, sejarah peradaban manusia telah menyaksikan tumbuh dan tenggelamnya banyak sistem. Suatu program untuk perbaikan masyarakat tidaklah dapat mengabaikan lembaga fundamental dan rencana luas organisasi yang mendasarinya, termasuk sistem ekonomi secara keseluruhan. Sejak dari dahulu berbagai rencana komprehensif organisasi telah diusulkan sebagai dasar. Rencana itu adalah Anarkisme, Feodalisme, Sosialisme, Komunisme, Fasisme, dan Islam, dalam sistem ekonomi tertuju pada cara membandingkan prestasi. Oleh karenanya tidaklah dapat mencapai suatu kesimpulan saheh yang objektif bila objektifitas yang dimaksudkan suatu penilaian yang secara logis

²⁷¹ Supriyanto. *Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864*. Penerbit Ombak Jakarta 2013 hlm 59.

²⁷² Supriyanto. *Pelayarn dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864* Penerbit Ombak Jakarta. 2013 hlm 59

harus diterima oleh semua sistem ekonomi. Akan tetapi perbandingan tentang prestasi hanya dapat mencapai dua hal perbandingan yang dapat menunjukkan setiap sistem unggul di atas sistem lainnya.²⁷³

Oleh karenanya seluruh analisis Sistem Ekonomi tersebut bersifat subjektif, maka tidak perlu heran manakala mendapatkan tujuan berbeda atau memberikan bobot yang berbeda pada tujuan yang sama, dan menolak untuk menerima sudut pandang yang lain. Pada sisi yang lain meskipun ada kesamaan timbulnya Sistem Ekonomi dan aktivitas ekonomi, yang disebabkan oleh adanya kebutuhan dan keinginan manusia, namun karena cara manusia dalam memahami pemuas kebutuhan dan cara mendistribusikan alat kebutuhan tersebut didasari oleh filosofi yang berbeda, maka timbullah berbagai bentuk sistem dan praktek ekonomi dari banyak negara di dunia, termasuk juga di Kesultanan Palembang. Perbedaan ini tidak terlepas dari pengaruh Ideologi, Filsafat, Agama, dan Kepentingan Politik yang mendasari suatu negara penganut sistem tersebut.²⁷⁴ Jika disimak perjalanan Rasulullah SAW dalam membangun Perekonomian di Madinah, maka paling tidak ada tiga hal mendasar yang harus mendapat perhatian khusus jika ingin menerapkan dalam konteks Indonesia kontemporer termasuk Kesultanan Palembang. Ketiga hal tersebut mencakup *Pertama*, Landasan Filosofis, *Kedua* Prinsip Operasional dan *Ketiga*, Tujuan yang hendak dicapai dalam sebuah Sistem Ekonomi.

Landasan Filosofis, Sistem Ekonomi terutama ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang dibangun di atas nilai-nilai Islam, dimana prinsip Tauhid yang mengedepankan nilai-nilai Ilahiah menjadi inti dari sistem ini. Ekonomi bukanlah sebuah entitas yang berdiri sendiri, melainkan sebuah bagian kecil dari bingkai Ibadah kepada Allah SWT, sebagai sebuah ibadah ada rambu-rambu yang harus ditaati agar dapat diterima disisi Allah SWT, dan yang namanya ibadah harus di kerjakan secara maksimal, dan wajar kalau kemudian para pedagang

²⁷³ M. A Manan. *Islamic Economic Theory and Practice. Ekonomi Islam Teori dan Praktek. Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Penerbit Intermasa. Jakarta 1992 hlm 311.

²⁷⁴ Vaithzal Rivai. 2009. *Islamic Economic. Ekonomi Syari'ah. Bukan Opsi Tapi Solusi*. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta hlm 219.

muslim mampu menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk juga di Nusantara untuk berdagang dan berdakwah. Wajarlah apa yang pernah dikatakan Adam Smith yang dianggap sebagai bapaknya ekonomi kapitalis, Smith menganggap bahwa contoh terbaik masyarakat berperadaban tinggi yang kuat secara Ekonomi dan Politik adalah masyarakat Arab di bawah Kepemimpinan Muhammad SAW.²⁷⁵

Dengan demikian dapat dipahami bahwa mengadopsi nilai-nilai moralitas Islam dalam sistem ekonomi, termasuk juga Sistem Ekonomi Kesultanan Palembang merupakan syarat mutlak dalam membangun sistem ekonomi Kesultanan yang kuat dan berkah. Sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya bahwa sistem Perekonomian masyarakat di Kesultanan Palembang pada umumnya berdasarkan pada Pertanian, Perkebunan, Perikanan pengumpulan hasil hutan dan Pertambangan dalam kurun waktu Abad XVII dan XIX M tersebut komoditas hasil Pertanian, Perkebunan, hasil hutan, Pertambangan dan Perikanan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan sebagian untuk diekspor. Komoditi yang sangat di minati dan menjadi primadona dari Kesultanan Palembang adalah lada dan timah, disamping itu masih banyak produk-produk pertanian lainnya.²⁷⁶ Dinamika sistem ekonomi perdagangan pada masa Sultan Mahammad Bahauddin, 1778-1803 M dan akhir Kesultanan Palembang sebagai latar historis Kesultanan Palembang.

Pada masa kekuasaan Sultan Mahammad Bahauddin sampai akhir Kesultanan Palembang memiliki pola dan corak yang sama dalam Sistem Ekonomi dan Perdagangan, sultan menerapkan kebijakan sistem monopoli perdagangan. Disamping itu pada masa pemerintahan Sultan Mahammad Bahauddin mulai menerapkan kebijakan pembagian tugas secara jelas dan sistematis. Kebijakan Pemerintah Kesultanan tersebut diatur secara baik dan dibantu oleh aparatur keamanan, disamping telah muncul peraturan-peraturan bagi

²⁷⁵ Vaithzal Rivai. *Islamic Economic. Ekonomi Syari'ah Bukan Opsi Tapi Solusi*. Penerbit Bumi Aksara 2009. hlm 212

²⁷⁶ Farida R. Wargadalem. *Perekonomian Kesultanan Palembang. Abad XVII Hingga Awal Abad XIX* Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya 2012

pedagang atau para pendatang.²⁷⁷ Sultan Mahammad Bahauddin selalu memperhatikan keamanan di perairan Sungai Musi dan sekitarnya dari serangan perompak. Oleh karenanya banyak pedagang asing yang singgah di Palembang disebabkan di situ tidak terdapat gangguan keamanan dan mereka membawa barang dagangan tersebut merasa aman untuk dijual serta laku di pasaran dunia berupa komoditas lada dan timah. Kemudian didukung pula oleh letak pelabuhan Palembang yang cukup strategis dan tidak terlalu jauh dari muara Sungai ke arah Selat Bangka.²⁷⁸

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sistem Perekonomian Kesultanan Palembang sesuai dengan letaknya sangat dipengaruhi oleh perdagangan luar dan dalam negeri. Hasil-hasil dari berbagai perusahaan dapat disinggahi oleh kapal-kapal luar negeri, sementara sistem perairan dengan sungai-sungai memungkinkan pengangkutan barang-barang yang sangat lancar. Perdagangan diadakan dengan pulau Jawa, hingga kepulauan Riau, Singapura, Pulau Penang, Malaka, negeri Jiran dan negeri China, disamping itu dari pulau-pulau lainnya datang juga perahu-perahu membawa dan mengambil barang-barang dagangan. Barang-barang dagangan tersebut berupa macam-macam Kain Linen, Kain Cita Eropa dari yang kasar sampai yang halus. Selain itu ada juga barang-barang yang di import dari China seperti Sutera, Benang halus, Panci besi, Pecah belah, Obat-obatan teh manisan dan barang-barang lain.

Barang-barang dagangan penting lainnya adalah Minyak kelapa dan Minyak kacang diimport dari Jawa dan Siam. Gula Jawa, Bawang, Asam, Beras, Gula Pasir, Tembaga Besi, barang-barang kelontong dan sebagainya juga beberapa barang dari,²⁷⁹ pedagang Arab yang menguasai kain linen terbesar, ada yang memiliki kapal dan perahu sendiri, namun kebanyakan mereka hanya mengurus dagangan orang lain di luar

²⁷⁷ Supriyanto. *Pelayaran Dan Pelabuhan Palembang.1824-1864*. Penerbit Ombak Jogjakarta 2013 hlm 49

²⁷⁸ Supriyanto, *Pelayaran dan Pelabuhan Palembang 1824-1864*. Penerbit Ombak Jogjakarta 2013 hlm. 50.

²⁷⁹ H. M. Ali Amin. *Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam dan Beberapa Aspek Hukumnya*. dalam KHO Gajahnata. *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan* Penerbit. Universitas Indonesia Press. Jakarta 1986 hlm 99

Palembang. Setelah orang Arab, menyusul orang China yang membeli barang-barang dari perahu, orang-orang Palembang membeli dari orang Arab dan China serta membawa barang tersebut ke pedalaman untuk dijual di sana, orang Palembang membeli barang dengan kredit dan membayar dengan barang-barang pula.²⁸⁰ Menurut Dr. J. A. Van Leur. Sistem perdagangan adalah perdagangan penjajah (*pedding trade*) yaitu sistem perdagangan kapitalis yang memiliki ciri-ciri tertentu. Diantaranya perdagangan dilakukan disuatu tempat ke tempat lainnya, dari Pulau ke Pulau yang lain, dari Benua ke Benua yang lain, dengan membawa sejumlah barang dagangan tertentu yang tidak besar volumenya.²⁸¹

Perdagang bersangkutan mengunjungi suatu tempat ke tempat lain sampai barang dagangannya habis, tidak terdapat sikap yang terlalu menonjol dalam sistem perdagangan tersebut seperti halnya dalam sistem kapitalis modern, berupa investasi modal dari keuntungan. Perbedaan lainnya adalah barang dagangan tidak banyak dibandingkan dengan kapitalisme modern yang menghasilkan komoditi dalam jumlah massal dengan cara produksi melalui mesin, oleh karenanya tidaklah mengherankan jika barang-barang yang diperdagangkan juga barang yang cukup mahal.²⁸² Selain sistem *Pedding trade* terdapat pula apa yang dinamakan *Royal trade* yang dilakukan oleh penguasa, para Aristokrat mendominasi perdagangan bukan sebagai *Entrepreneur* akan tetapi sebagai pedagang atau pemilik uang yang kadang-kadang ikut berdagang. Perdagangan yang sesungguhnya dilakukan oleh orang-orang yang lebih rendah dalam bentuk penjajah.

Di Indonesia muncul *Marchan gentemen* yaitu pedagang besar dengan muatan yang bernilai sekitar 30.000 sampai 40.000 real, namun jumlahnya sedikit terutama para penguasa. Menurut Van Leur menyebutkan kapal-kapal di nusantara paling besar berukuran 100 ton, sedangkan dari China sekitar 600 ton., dari India sekitar 200 ton, dari Thailand dan Kamboja sekitar 400 ton. Adanya perdagangan antara negara dalam

²⁸⁰ Van Leur. *Perdagangan Masyarakat Indonesia. Esai-esai Tentang Sejarah Sosial dan Ekonomi. Asia*. Penerbit Ombak Jogjakarta 2018 hlm 69

²⁸¹ Van Leur. *Perdagangan Masyarakat Indonesia Esai-esai Tentang Sejarah Sosial dan Ekonomi Asia*. Penerbit Ombak Jogjakarta 2018. hlm 70

²⁸² Farida R Wargadalem. *Konflik Kepemimpinan di Kesultanan Palembang* Jurnal Sejarah Universitas Sriwijaya. 2012

jumlah besar sudah memerlukan suatu bentuk satuan mata uang sebagai alat pembayaran. Tidak diketahui secara pasti mata uang apa yang dijadikan patokan sebagai alat transaksi perdagangan tersebut. Akan tetapi di setiap kerajaan telah mencetak mata uang untuk keperluan transaksi perdagangan, termasuk di kesultanan Palembang diperkirakan telah terjadi transaksi antar negara. hal ini terbukti adanya peninggalan berbagai jenis mata uang di Nusantara, seperti uang “*Picis*” dari China dan “*Real*” dari Timur Tengah.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa di bidang Perekonomian, selain mendapatkan manfaat langsung dari daerah *Kepungutan*, sultan memperluas kesatuan wilayah yang disebut dengan “*Sikap*”. Menurut Albar S Sobari mengemukakan Wilayah basis daerah Kesultanan Palembang berada di daerah sekitar kota Palembang ditambah dengan daerah-daerah langsung dibawah pemerintahan sultan yaitu daerah Belida dan Pegagan. Sistem Perdikan merupakan daerah bebas pajak di Jawa di bawa dan diterapkan di Palembang dengan nama daerah “*Sikap*.” Usaha untuk menundukkan daerah uluan oleh penguasa Palembang telah mulai semenjak Adipati Karang Widara berkuasa tahun 1485 M. Dengan menyusuri ke Pedalaman melalui empat muara sungai yang berada di uluan Sungai Musi berhasil menundukkan kurang lebih seratus dusun dan sekaligus memberikan gelar kehormatan yaitu “*Pangeran*” gelar ini nampaknya sebagai upaya jalan “*Angkenan*” saudara karena “*Pangeran*” adalah gelar keluarga Kesultanan.²⁸³

Dalam konteks daerah *Sikap* adalah dusun-dusun (Belida, Sungsang, Sukarami dan Musi Banyuasin) yang sebagian pendudukannya bertugas membantu pekerjaan dan memenuhi kebutuhan keraton. Pada waktu-waktu tertentu mereka ditugaskan untuk membantu urusan rumah tangga di keraton dengan menggarap pertanian dan membawanya ke keraton. Menyiapkan tenaga pendayung membangun dan memperbaiki keraton atau rumah para Bangsawan, disamping itu pihak Kesultanan juga mempekerjakan kelompok orang *Miji* (Orang yang disetorkan).²⁸⁴ Perlu dikemukakan bahwa sumber

²⁸³ Hasil wawancara dengan Albar S. Sobari SH. MH. Ketua Pembina Adat Sumatera Selatan pada bulan Februari di Palembang 2020

²⁸⁴ Francis Herinnarigen Enz 111 hlm dalam P .De Roo de la faille. *Dari Zaman Kesultanan Palembang*. Penerbit Bhratara Jakarta 1971 hlm 48

pendapatan yang lain yang menjadi pemasukan utama Keraton adalah sultan memberlakukan sistem ekonomi perdagangan. *Tibang (tiban) dan Tukong (tukon)*. Dengan adanya sistem ekonomi *Tibang dan Tukong* ini pihak keraton menjalankan sistem ekonomi yang memonopoli terhadap produk-produk tertentu. Sistem monopoli menurut P. De Roo De la faille tidak berdasarkan kepada suatu pengertian karakter Melayu. Sistem Monopoli Perdagangan yang dijalankan oleh Sultan ini diperkuat oleh Albar S Sobari mengatakan bahwa Sultan sebagai penguasa tunggal, Pemimpin kharismatik, Agamis, berwibawa,

Akan tetapi sikap yang dimiliki sultan tersebut, Menurut Albar S Sobari SH. MH. digunakan untuk kepentingan-kepentingan lain contoh memonopoli perdagangan yang ada di daerah tersebut dengan menerapkan sistem *Tiban dan Tukon*.²⁸⁵ Lebih lanjut menurutnya dalam konteks perekonomian masyarakat awalnya berlaku sistem ekonomi kekeluargaan dalam istilah bahasa *Jurai tuo* (kaipati bahasa Komerling, apit jurai bahasa Semende) beraje-raje.²⁸⁶ Disamping itu berlaku hukum adat, adatnya kebersamaan dalam ikatan Geneologis untuk menjalin ekonomi kekeluargaan, persaudaan, dalam arti perekonomian dibangun atas dasar ikatan geneologis bermakna tidak ada kelompok yang diuntungkan maupun dirugikan yang penting ada keseimbangan hidup bersama, sama-sama menanggung susah dan senang ini konsep pertamanya.

Kemudian masa kedua masuk sultan diperkirakan 1630-an kondisi kehidupan daerah uluan aman tenteram, kemudian sultan masuk ke daerah uluan ini identik dengan kolonialisme tujuannya mencari pengaruh, mencari duit menyusuri Sungai Musi dengan menaklukkan beberapa dusun lebih kurang 100 dusun tujuan akhirnya mencari dukungan kekuasaan yang terbukti dengan membuat Marga Geneologis di teritorial-teritorial itu. Setiap dusun mempunyai puyang masing-masing kemudian digabung menjadi marga teritorial yang terikat dari dusun-dusun diperbuat sultan.

²⁸⁵ Hasil wawancara dengan Albar S. Sobari SH. MH. Ketua Pembina Adat Sumatera Selatan pada Bulan Februari di Palembang 2020,

²⁸⁶ Hasil wawancara dengan Albar Sobari SH. MH. Selaku Pembina Adat Sumatera Selatan Pada Bulan Pebruari di Palembang 2020,

Pemisahan-pemisahan daerah yang ia kuasai langsung maupun yang tidak dikuasai langsung seperti daerah Belida, Pegagan, Banyuasin, dan Sungsang sultan menunjuk petugas khusus. Sementara untuk daerah *Kepungutan* termasuk daerah Komering, Muara Enim, Ogan Komering Ilir dan Ogan Komering Ulu (*di Pungut*) ada perjanjian dengan *Kaipati* (Puyang dengan Sultan) Perjanjian itu menyatakan “Silahkan orang uluan berdagang ke Sungai Musi dengan perjanjian kalau mau berdagang harus membayar pajak.”

Disini nampaknya ada keterpaksaan untuk membayar pajak.²⁸⁷ Orang uluan tidak bisa menjual hasil komoditasnya keluar, kemudian dimanfaatkan oleh sultan untuk membayar pajak kalau mau berdagang di Sungai Musi. Melihat kondisi seperti ini akhirnya Ratu Sinuhun membuat kompilasi hukum Adat Undang-undang “Simbur Cahaya” Undang-undang Simbur Cahaya bukan hukum adat, hukum adat yang sebenarnya ada pada pada masa puyang-puyang dahulu, yang dibuat ratu Sinuhun merupakan kompilasi adat-istiadat.²⁸⁸ Undang-undang Simbur Cahaya sendiri mengandung aspek ekonomi diantaranya terdapat dalam Bab ke tiga Atoeran doesoen dan berladang pasal 26 ayat 1 berbunyi: “*Djika berjual beli, bergadai sawah atau pinjam sawah atau kebon ladang atau lain-lain barang yang tetap, atau tidak terangkat hendaklah berketerangan dimuka Pesirah.*”²⁸⁹ Ayat 2 berbunyi; “*Djika orang bergadai sawah, atau kebon atau ladang tidak dengan perdjanjian tidak boleh diteboes sebeloem terpoengoet olih orang yang pegang gadai itoe,*”

Dalam konteks kelembagaan kesultanan *Jenang* mempunyai tugas untuk mengontrol hasil bumi masyarakat yang datang dari luar, pada zaman Belanda fungsi *Jenang* diganti dengan nama *Konstrolir* (Pengawas) tidak lagi berfungsi mengontrol hasil bumi pada masa Kesultanan, Jadi sultan dalam mencari sumber pendapatan negara dengan memonopoli karena sultan membuat perjanjian dengan marga *Geneologis*

²⁸⁷ Hasil wawancara dengan Albar Sobari SH MH Selaku pemangku pembina Adat Sumatera Selatan Bulan Pebruari 2020. di Palembang,

²⁸⁸ Hasil wawancara dengan Albar Sobari SH MH. Selaku Pemangku Pembina Adat Sumatera Selatan Bulan Pebruaru 2020 di Palembang,

²⁸⁹ Oendang-oendang Simboer Tjahaya. Nieuwe redactie zooals vastgesteld op de Vergadering Vanafgevaadigde Volkshoolden gehouden van 2 tot en met 6 September 1927 te Palembang

(*depati*) dan belum boleh melakukan penjualan barang sebelum adanya perjanjian.²⁹⁰ Dengan demikian sistem ekonomi pada masa ini lebih pada tekan kepada masyarakat bawah (masyarakat uluan). kalau diperhatikan sebelum kedatangan kolonialisme sultan sudah menerapkan sistem monopoli perdagangan walaupun sultan memiliki sipat kepemimpinan kharismatik sikap itu sultan memanfaatkan untuk menekan masyarakat uluan. Berdasarkan data-data diatas secara ilmiah aktivitas sultan ini tidak dapat dibuktikan bahwa dia memonopoli pedagang akan tetapi secara logika dapat diterima berdasarkan fakta perjanjian-perjanjian.²⁹¹

Dalam sistem perekonomian ini pihak kesultanan atau penguasa tertinggi setempat membeli barang dengan harga yang lebih murah daripada harga yang berlaku di pasaran, sistem jual beli seperti ini dikenal dengan *Beli-belian natal*.²⁹² Dan ini pulalah yang harus ditaati oleh Van Waerwijek dalam tahun 1603 M dalam perdagangan ladanya di Banten.²⁹³ Ide dan tradisi *Tiban* yang berlaku di Kesultanan Palembang ini terinspirasi dari kerajaan-kerajaan Jawa yang intinya adalah dapat dibaca dalam *Eindresume der Javansche Grondrechten* (Ikhtiar akhir dari hak-hak atas tanah di Jawa) yang berhubungan dengan Banyumas.²⁹⁴ Dalam kaitan dengan wilayah pedalaman misalnya hubungan perdagangan istana kesultanan dengan kepal-kepada daerah dan rakyat di pedalaman diwujudkan dalam pola kewajiban *Tiban* dan *Tukon*. Pola ini dilakukan sultan dengan mengirimkan barang-barang dari Palembang dibutuhkan di daerah pedalaman seperti garam, kain, dan barang-barang lainnya dengan harga yang telah ditetapkan. Barang-barang akan dibeli dengan cara ditukar dengan

²⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Albar S Sobari SH.MH Selaku Pemangku Pembina Adat Sumatera Selatan Pada Bulan Pebruari di Palembang 2020

²⁹¹ Hasil wawancara dengan Albar S Sobari SH.MH. Selaku Pemangku Pembina Adat Sumatera Selatan pada Bulan Pebruari di Palembang 2020

²⁹² Heeres Corpud Diplom N.I.I hlm 29. Dalam P. De Roo De la faille. *Dari Zaman Kesultanan Palembang*. Penerbit Bhratara Jakarta 1971 hlm 48

²⁹³ Eindresume II Lamp K. hlm 48. Dalam P. De Roo De la faille. *Dari Zaman Kesultanan Palembang*. Penerbit Bhratara Jakarta 1971 48

²⁹⁴ Farida R Wargadalem. *Konflik Kepemimpinan di Kesultanan Palembang (1812 -1818) Disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Independa Sumatera Selatan, di Radio Republik Indonesia*. Palembang 22 Oktober 2012 hlm 6

produk-produk wilayah pedalaman misalnya lada, damar, kapas, dan beras.

Oleh karenanya dengan cara ini pihak keraton Kesultanan Palembang menjalankan sistem ekonomi yang memonopoli terhadap produk-produk tersebut diantaranya baju Jawa, kain bangala putih, kapak, parang besi dan garam. Di luar produk di atas tidak diperkenankan dimasukkan ke dalam *Tibang* dan *Tukong*.²⁹⁵ Tentu saja sultan tidak menjalankan dan mengatur sendiri kegiatan perdagangan tersebut melainkan menyerahkan pengurusannya kepada pejabat atau lembaga dipercaya yang biasa disebut dengan *Syahbandar*. Tugas yang diberikan sultan Palembang kepada syahbandar meliputi mengurus Bea keluar masuk kapal-kapal di pelabuhan menjaga keamanan para pedagang dari gangguan penjahat, memajukan pelayaran dan perdagangan, *Syahbandar* juga diberi wewenang untuk mengadili pedagang.

Berkaitan dengan berbagai kontrak monopoli perdagangan khususnya Belanda, dan Inggris terjadi pasang surut maksudnya, disaat kolonialis posisinya kuat mereka memiliki *Bargaining Power* yang tinggi agar kontrak ditaati oleh sultan. Akan tetapi pada saat kondisi kolonialis lemah khususnya diakhir Abad XVIII dan awal Abad XIX M (dihapuskan VOC dan masa sesudahnya), maka pihak kesultanan akan meraup keuntungan yang besar. Keuntungan itu diperoleh kesultanan melalui perdagangan "*Illegal*" (dijual dipasar bebas dengan harga kompetitif) istilah "*Illegal*" ini tentu dilihat dari sudut pandang kaum Imperialis. Disinilah nampak "kemampuan, kelihaian dan kepawaiian" sultan sebagai pemimpin yang mampu bermain sedemikian rupa demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi Kerajaan dipimpinnya.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di awal bahwa Sultan Palembang dalam menjalankan sistem ekonomi perdagangan dengan masyarakat memberlakukan sistem *Tibang (tiban) dan Tukong (tukon)*. Sistem ini sekaligus berfungsi sebagai pajak. Oleh karenanya hanya untuk barang-barang yang akan diserahkan kembali kepada penduduk yang komoditas dari

²⁹⁵ Husnu Rahim *Sistem Otoritas Administrasi Islam Studi Tentang Pejabat Agama masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang* Penerbit Logos Wacana Ilmu Pemulang Timur Ciputat 1998.hlm 278-279/

uluan dinaikkan harganya sebesar seratus hingga dua ratus persen. Sebaliknya produk dari uluan yang dijual kepada sultan harganya diturunkan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa penduduk uluan membeli barang dari Sultan Palembang dengan harga yang telah di naikkan dan menerima uang dari hasil penjualan produk mereka dengan harga yang lebih rendah diluar produk tersebut. Sultan tidak memungut *Tibang dan Tukong* diantaranya produk lada, kopi, lilin, gading gajah, kapas, tembakau, gambir dan beras.

Dari kedua sistem ekonomi dan perdagangan yang dijalankan sultan berdampak pada perolehan menumpuk kekayaan, di samping ada sumber lainnya yang diperoleh Kesultanan Palembang berupa produksi hasil tambang timah Bangka yang merupakan komoditas sangat diminati saat itu. Sementara alat tukar digunakan koin Palembang yang dikenal dengan "*Pitis/picis*" dan "*Dukotan*"²⁹⁶ Berdasarkan data-data tersebut dapat dipahami bahwa adanya sistem ekonomi perdagangan *Tukong*, berarti penggunaan mata uang sudah merata di Kesultanan Palembang pada masa itu. Oleh karenanya uang yang beredar umumnya dollar Spanyol serta mata uang lokal yang dikeluarkan oleh pihak Kesultanan. Pemungutan *Tibang dan Tukong* pada masa pemerintahan Sultan Najamuddin II dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan sultan dikarenakan adanya penyimpangan.²⁹⁷

Setiap marga ditetapkan untuk menyetorkan beberapa komoditas yang sebelumnya tidak termasuk ke dalam *Tibang dan Tukong*, komoditas tersebut berupa beras, lada, kopi, gambir, lilin, rotan, dan kerbau yang jumlahnya di naikkan dari 50-100 real. Hal ini dilakukan sampai empat kali dalam setahun (Sebelumnya hanya satu kali dalam setahun atau dua kali dalam setahun) secara rutin sehingga rakyat kehilangan sumber penghidupan sepanjang tahun. Kewajiban ini diserahkan oleh

²⁹⁶ ANRI Bundel Palembang No 15. 7 Bundel Palembang No 47.6. *Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik 1804-1825*. Penerbit Gedung Kompas Gramedia 2017 hlm 26

²⁹⁷ Sultan Najamuddin II tidak memiliki kekayaan dengan mundurnya Sultan Badaruddin II ke Uluan 1812 M. Maka Sultan Badaruddin II membawa harta kekayaan ke Pedalaman. Sultan Najamuddin II juga kehilangan sumber pendapatan utama berupa komoditas (lada dan timah) dengan diserahkan pulau Bangka dan Belitung kepada Inggris serta Blokade dan gangguan keamanan yang dikerahkan oleh Sultan Mahmud Badaruddin II dari gangguan daerah Rawas. (Woelders 1975. 8 Kiplstra. 1982. 82 Kemp 1898. 255

Jenang kepada *Depati*, selanjutnya *Depati* mendelegasikan kepada para *Proatin* terakhir *Proatin* membebaskan kepada para *Matagawe* yang dibantu oleh orang *Alingan*. Tidak seorang pun bebas dari pajak, kondisi di atas sangat membebani rakyat Kesultanan Palembang.²⁹⁸

C. Kelembagaan Perekonomian

Sebelum membahas persoalan utama yang berhubungan dengan kelembagaan Perekonomian Kesultanan Palembang, perlu dikemukakan terlebih dahulu struktur kelembagaan perekonomian kehidupan kesultanan Palembang Abad XVII-XIX M, tidak terdapat data-data yang pasti kapan mulai munculnya kelembagaan kehidupan perekonomian Kesultanan Palembang.²⁹⁹ Menurut hemat penulis kelembagaan perekonomian kesultanan Palembang muncul tatkala berasimilasinya sistem kekuasaan dari kerajaan ke kesultanan, dimana sistem kelembagaan perekonomian kesultanan meliputi *Syahbandar, Fexo, Tiban dan Tukon, Raban dan Jenang daerah Kepungutan dan Sikap*. Namun bagaimanapun masyarakat telah mengalami perubahan yang mendasar dalam berbagai aspek termasuk lembaga perekonomian, sejak kultur Agraris mulai dipertanyakan oleh kekuatan lain diluar dirinya. Proses industrialisasi telah menjadi kekuatan penting yang selain memperkenalkan suatu pola organisasi dan kelembagaan. Produksi baru juga memaksa penyesuaian nilai dan norma dalam kehidupan terutama dalam kehidupan Ekonomi Melayu Kesultanan Palembang.³⁰⁰

Proses perubahan yang kemudian terjadi secara meluas, paling tidak dapat dilihat dalam tiga tahapan, yaitu *Pertama*, Masuknya pasar ke dalam masyarakat pada saat petani mulai mempengaruhi kultur agraris, khususnya menyangkut tekanan ide dan praktek pasar yang tidak hanya mempengaruhi proses

²⁹⁸ ANRI Bundel Palembang No 15.7 Bundel Palembang No 47.6 dalam Farida Wargadalam *Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik 1804-1825* Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia Gedung Kompas Gramedia Jakarta 2017 hlm 30

²⁹⁹ Ismail Sukardi. *Madrasah dan Pergolakan Sosial Politik di Keresidenan Palembang 1925-1942 Penomena Historis Lembaga Pendidikan Islam di Sumatera Selatan Pada Masa Kolonial Belanda*. Penerbit CV Iea Sejahtera Bantul Jogjakarta .2014. hlm 4

³⁰⁰ Irwan Abdullah. *Konstruksi dan Refproduksi Kebudayaan* Penerbit Pustaka Pelajar Offset Jogjakarta, 2015 hlm. 16

komodifikasi dari hasil-hasil pertanian yang merubah sistem produksi subsistem dan barter, akan tetapi telah memperluas jaringan sosial dan orientasi masyarakat keluar daerah. Ciri-ciri lokal mulai yang berkaitan dengan model produksi mulai bergeser (*Bertransformasi*) sejalan dengan melebarnya batas-batas interaksi dan batasan pengetahuan penduduk.³⁰¹ Sumber daya yang dapat dimobilisir pada masa ini menjadi lebih luas di karenakan mulai melintasi batas wilayah. Penggunaan tenaga kerja dalam pertanian mulai masuk antar daerah tentu saja merubah bentuk kewajiban sosial antara anggota masyarakat akibat meluasnya batas-batas solidaritas sosial.

Kedua, terjadinya integrasi pasar, yang mempengaruhi pasar menjadi lebih kuat sejalan dengan terikatnya penduduk ke dalam suatu tatanan lebih luas ke dalam suatu ide, nilai dan praktek yang bersifat nasional. Selain komoditas barang lokal yang mulai menyebar ke berbagai tempat, dampak dari terintegrasinya ke dalam suatu pasar, komoditas barang-barang baru mulai masuk ke daerah-daerah yang secara langsung mulai menggeser pola aktifitas ekonomi masyarakat. Aktivitas pertukangan, kerajinan dan pertanian itu sendiri mulai ditujukan untuk menghasilkan komoditas yang memiliki nilai jual tinggi sehingga suatu produksi mulai dihubungkan dengan “Permintaan pasar.” Dalam bidang pertanian orang mulai mengenal program pembangunan pertanian.³⁰²

Ketiga, tahapan perubahan yang disebut sebagai ekspansi pasar yaitu suatu perubahan pusat kekuasaan ke pasar dalam penataan sistem sosial orientasi ini tidak hanya bersipat nasional akan tetapi meluas ke dunia global dengan serangkaian nilai-nilai dan norma baru. Sumber daya dapat di mobilisasi jauh lebih luas pasar muncul sebagai kekuatan dalam membangun “Dunia” kehidupan dunia sehari-hari dengan memindah-mindahkan batas dari ikatan tradisional mengikuti logika berpikir pasar. Perubahan yang digambarkan diatas dapat dipertegas dengan melihat pada berbagai fakta. *Pertama*, munculnya produksi baru dalam kehidupan penduduk yang pilihan itu telah menyebabkan terjadinya *diperensiasi*.

³⁰¹ Irwan Abdullah. *Konstruksi dan Refproduksi Kebudayaan*. Penerbit Pustaka Pelajar Offset Yogyakarta, 2015 hlm. 16

³⁰² Irwan Abdullah. *Konstruksi dan Refproduksi Kebudayaan*. Penerbit Pustaka Pelajar Offset Yogyakarta 2015 hlm 18 -19.

Komonalisme mulai runtuh dalam penataan sosial secara umum yang memunculkan bentuk solidaritas baru dengan logika yang berbeda sesuai dengan agen sosial yang terlibat dalam proses konstruksinya.³⁰³ *Kedua*, melemahnya ikatan tradisional otoritas tradisi dan mulai digantikan dengan rasionalitas yang kemudian menjadi pegangan dalam setiap pengambilan keputusan. *Ketiga*, Posisi mesin dari teknologi menjadi semakin penting dari waktu ke waktu serta cara kerja dan nilai-nilai yang melekat sangat mempengaruhi ritual kehidupan dan norma-norma yang terbentuk. *Ketiga* fakta ini merupakan keadaan yang menjadi pra kondisi bagi perubahan jangka panjang menuju kearah tertentu.³⁰⁴ Proyeksi tentang arah dan tujuan dari proses perubahan kehidupan Perekonomian Melayu merupakan bidang kajian yang perlu diperhatikan, khususnya dalam menempatkan Pranata Perekonomian Kesultanan Palembang yang memungkinkan untuk berkembang kearah yang lebih baik.

Dalam konteks Pranata Perekonomiam Kesultanan Palembang mulai dari awal kekuasaan sultan-sultan sebelumnya dan berlanjut ke Sultan Muhammad Bahauddin sampai akhir Kesultanan Palembang mempunyai pola dan corak yang sama dalam sistem kelembagaan Perekonomian.³⁰⁵ Kelembagaan Perekonomian Kesultanan Palembang mempunyai pola dan corak yang sama dalam mengambil kebijakan untuk menerapkan dan memberlakukan sistem monopoli perekonomian dan perdagangan dengan melibatkan lembaga-lembaga birokrasi kesultanan diantaranya *Tiban* dan *Tukon*, *Raban* dan *Jenang*, *Syahbandar*, *Fexo*, *Pasirah* dan *Proatin*, *Sikap* serta *Kepungutan*. Lembaga-lembaga ini cukup berperan untuk memberlakukan sitem monopoli perdagangan terkait aktivitas perekonomian dimana sultan sebagai pelaku tunggal dan menguasai Perekonomian.

Kesultanan Palembang menerapkan sistem monopoli perdagangan sebagai sumber perekonomian, karena Sultan sebagai penguasa tunggal, yang mengharuskan masyarakat menanam-tanaman tertentu untuk dijual kepada sultan,

³⁰³ Irwan Abdullah. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Penertbit Pustaka Pelajar Offset Jokjakarta 2015 hlm. 19

³⁰⁴ Irwan Abdullah. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Penerbit Pustaka Pelajar Offset Jogjakarta 2015 hlm. 20

³⁰⁵ Supriyanto. *Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864* Penerbit Ombak Jogjakarta. 2013 hlm. 49

tanaman tersebut berupa lada dengan harga yang telah ditentukan sebagai ganti dari pajak tidak hanya komoditas tertentu saja diberlakukan monopoli akan tetapi Kesultanan Palembang melakukan monopoli barang-barang import seperti garam, pakaian, kain dan lain-lain yang dibutuhkan masyarakat di wilayah Kesultanan Palembang. Apabila masyarakat membutuhkan barang-barang import maka masyarakat menukar Produksi lada atau yang lainnya kepada sultan.³⁰⁶ Sultan Bahauddin mempunyai pengaruh yang begitu kuat di daerah pedalaman sehingga mampu menguasai barang-barang import dan melakukan pengawasan terhadap rakyat. Oleh karenanya sebagai penguasa pusat mampu menerapkan harga jual barang-barang import untuk ditukarkan dengan produksi pertanian dan perkebunan rakyat. Transaksi pertukaran antar barang-barang import dengan komoditas lada di Kesultanan Palembang di sebut *Tiban*, sementara pembelian dengan uang hasil produksi lada rakyat oleh sultan disebut *Tukon*, akan tetapi harga komoditas lada berbeda-beda hampir disetiap marga sesuai dengan ketetapan sultan.³⁰⁷

Sebagaimana yang telah dikemukakan diawal bahwa sultan menganggap dirinya sebagai satu-satunya pemilik tanah dan mau memberikan sebagai pinjaman, akan tetapi tidak pernah sebagai milik, tentu saja seorang pemilik tanah yang haknya diragukan tidak mau mendirikan rumah batu disitu ia tidak mempunyai jaminan bahwa tanah itu tidak akan dicabut kembali. Terkait ekonomi sultan memiliki kekuasaan dalam mengirim barang dagangan yang merupakan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat pedalaman. Sebagai penguasa tunggal dan pemegang monopoli perdagangan dengan rakyat, barang-barang yang dibutuhkan rakyat baju Jawa, kain bengala putih, kapak, parang besi dan garam, barang-barang ini biasa nilainya dinaikkan seratus atau bahkan diselewengkan sampai

³⁰⁶ Masyhuri. *Perdagangan Lada dan Perubahan Sosial Ekonomi di Palembang 1790-1825*. Thesis S2 tidak diterbitkan pada Universitas Indonesia Jakarta 1983 hlm 75 dalam Supriyanto Penerbit Ombak Jogjakarta 2013 hlm 58

³⁰⁷ Masyhuri. *Perdagangan lada dan Perubahan Sosial Ekonomi di Palembang 1790-1825*. Thesis Universitas Indonesia tidak diterbitkan. Jakarta 1983 hlm 59

duaratus.³⁰⁸ Kondisi ini menunjukkan bahwa sultan mempunyai kekuasaan dan perbawa raja adalah sewenang-wenang. Dalam urusan-urusan yang tidak diperdulikannya, ia menyatakan hukum-hukum seperti yang terdapat dalam undang-undang dan piagam-piagam dan al-Qur'an, akan tetapi segala sesuatu yang menyangkut kepentingan atau jika ia ingin mencampuri supaya dapat memberikan ganjaran atau hukuman maka kemauannya menjadi suatu hukum suatu keharusan dan tidak seorangpun berani menentangnya. termasuk dalam hal *Tiban* dan *Tukon*.³⁰⁹

Dalam hubungannya dengan *Tukong* dikemukakan bahwa penggunaan keuangan di Kesultanan Palembang sudah merata, uang yang beredar pada umumnya mata uang dollar Spanyol, disamping itu digunakan juga mata uang lokal yang dikeluarkan oleh pihak kesultanan disebut mata uang "*Pitis*".³¹⁰ Dengan melalui jalur lembaga-lembaga tersebut aktivitas monopoli perdagangan kesultanan dapat berlangsung dan pejabat-pejabat pelabuhan di Kesultanan Palembang memiliki kekuasaan penuh dalam pengiriman komoditas barang dagangan yang merupakan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat desa. Barang-barang dagangan tersebut diperoleh dari pedagang-pedagang China, pedagang Jawa, Melayu, Bugis, dan pedagang Arab, yang dibawa dari Batavia dan Riau. Kemudian barang dagangan itu oleh penguasa pelabuhan yang dibantu oleh *Raban* dan *Jenang* untuk disalurkan keberbagai daerah dan marga.³¹¹

Disamping itu kesultanan Palembang dimasa berkuasanya berusaha untuk mengontrol semua produksi dan distribusi. Monopoli Kesultanan atas Perekonomian di wilayah Kesultanan salah-satunya diaplikasikan dalam sistem *Tiban* dan *Tukon* yang merupakan kelembagaan Perekonomian yang

³⁰⁸ Husni Rahim Sistem Otoritas dan Administrasi Islam Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang. Penerbit Logos Wacana Ilmu Jakarta 1988 hlm 194

³⁰⁹ Husni Rahim Sistem Otoritas dan Administrasi Islam Studi tentang Pejabat Agama masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang. Penerbit Logos Wacana Ilmu Jakarta 1988.hlm 194

³¹⁰ William Marsden. *Sejarah Sumatera The History of Sumatera*. Penerbit Indoliterasi Jogjakarta. 2016

³¹¹ Masyhuri. *Perdagangan Lada dan Perubahan Saosial Ekonomi di Palembang 1790-1825*. Thesis tidak diterbitkan pada Universitas Indonesia Jakarta. 1983 hlm. 59

dikenakan kepada petani yang masuk wilayah *Kepungutan* dan *Sikap*. Dalam sistem lembaga *Tiban dan Tukon*, penduduk di wilayah *Kepungutan* dan *Sikap* sebagai abdi sultan diharuskan menanam tanaman-tanaman yang sudah ditentukan oleh pihak Kesultanan serta menjualnya melalui *Pesirah* dan *Jenang* untuk dibawa ke ibukota kesultanan yang nantinya akan di jual ke pasar Internasional. Melalui sistem *Tiban* masyarakat pedalaman menukar komoditasnya dengan garam atau tekstil, dan kebutuhan lainnya yang pendistribusiaanya diatur oleh *Jenang dan Pesirah*, sementara dalam sistem *Tukon* komoditas dibeli dengan uang tetapi biasanya uang di bayarkan oleh *Jenang* atau *Pesirah* di bawah harga pasaran.

Baik *Jenang* maupun *Pesirah* pada dasarnya adalah peran yang diperoleh kalangan *Priyayi*. Selain dari pembelian hasil pertanian, sumber penghasilan *Priyayi* juga berasal dari tugasnya sebagai pelaksana kekuasaan sultan dalam monopoli perdagangan timah dan bea atas perdagangan antar pulau.³¹² Kemudian bagian yang di terima sultan melalui sistem upeti, pajak dan pengerahan tenaga penduduk (*Matagawe*). Keperluan sultan sebenarnya tidak begitu banyak, sebelum jatuh ketangan pribadi sultan bagian terbesar masuk kekantong-kantong priyayi yang mendapatkan jabatan, dengan kata lain baik pemakaian kerja maupun upeti yang masuk ke kas kesultanan terlebih di topang persenan bagi para pejabat yang dilewati oleh prosedur tersebut, hal ini terjadi karena keuangan di kesultanan tidak dilakukan secara terpusat, tidak ada penggajian seperti yang bersifat bergerak dikenal pada organisasi modern untuk membiayai keperluan pribadi atau keperluan jabatan.

Para pejabat kesultanan harus mencari sendiri sumber keuangan dari hak-hak istimewa yang di berikan sultan, disamping itu kekayaan para bangsawan ini dapat berupa uang tunai atau barang bersifat bergerak, mudah disembunyikan atau dibawa ketempat lain, sehingga sukar diawasi.³¹³ Dalam kasus Palembang kalau dilihat aspek kelembagaan perekonomian prakolonial berikut sistem ekonomi perdagangan *Tiban dan*

³¹² Bambang Purwanto. *From Dusun To Market Native Rubber Cultivation in Southern Sumatra.1890-1940* PhD Thesisi in School Of Orientaland1 African Studies Universitas of London 1992.

³¹³ Ryllian Chandra. *Islam dan Warisan Kesenian Kesultanan Palembang Darussalam*. Dosen Prodi Pradaban Islam Fakultas Adab Universits Islam Negeri Raden Fatah Palembang . Jurnal di akses. Juli 2019 hlm. 7

Tukon, menunjukkan bahwa sistem dan peraktek *Tiban* dan *Tukon* di kelembagaan kesultanan yang meyertainya jelas memperlihatkan sentralisasi kekuasaan pihak kesultanan. Sultan mengeluarkan kebijakan yang intinya segenap sumber daya termasuk lembaga-lembaga Perekonomian di kerahkan sedemikian rupa untuk mendukung kesultanan, harta kekayaan dikumpulkan dan dibagikan secara merata kepada bawahan untuk menjamin kesetiaan politik mereka, cara ini dilakukan untuk melanggengkan kekuasaan dengan menyerahkan atau mengkuasakan jabatan tertentu kepada orang kepercayaan yaitu *Jenang* atau *Raban*.

Aktivitas perdagangan dan transaksi tukar-menukar komoditas di Palembang memang mengalami kemajuan pesat sepanjang Abad XVII dan Abad XVIII M, sultan dan para pembesar Istana mampu menguasai seluruh lembaga-lembaga perekonomian, baik di sektor Produksi, distribusi dan tukar-menukar komoditas barang import melalui monopoli yang melibatkan lembaga-lembaga *Tiban* dan *Tukon*. Sementara kaum bangsawan umumnya banyak menguasai kelembagaan-kelembagaan Perekonomian di sektor produksi. Mereka melakukan berbagai aktivitas usaha di bidang Industri Kerajinan dan dengan modal sendiri membangun kelompok-kelompok persekutuan kepengusahaan serta mempekerjakan beberapa orang "*Miji*"³¹⁴

Sisa-sisa warisan zaman Kesultanan Palembang masih dapat dikenali dari sumber Belanda Abad XIX M, khususnya yang berkaitan dengan berbagai macam aktivitas kepengusahaan dalam profesi pekerjaan diluar sektor pertanian. Penguasaan modal biasanya berasal dari kaum bangsawan kota, dan terkadang dari segelintir pembesar Kesultanan, kepengusahaan tersebut terus-menerus berkembang dan mencakup sekitar empat puluh jenis usaha dengan melibatkan ribuan *Miji*.³¹⁵ Kesultanan Palembang sendiri sejak masa

³¹⁴ Mustika Zet. *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950*. Penerbit Yayasan Adi Karya IKAPI dan Ford Foundatioan Jakarta 2003 hlm. 42

³¹⁵ C.F.E Praterius. *Einige Bijzonderheden on tren Palembang*. dalam Indische (1843) hlm 376-459 Van's Gravensande Loe.Cit hlm. 446-447 dalam Mustika Zet *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950*. Penerbit Gedung Kompas Gramedia Jakarta 2003 hlm. 42

akhirnya menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya berbagai bentuk usaha dan keahlian yang terpusat dalam *Guguk*.³¹⁶

D. Sektor-Sektor Ekonomi Produktif

1. Pertanian

Dalam konteks masyarakat tradisional termasuk Kesultanan Palembang terdapat keterkaitan erat antara penduduk dan kemakmuran. Para penguasa kerajaan-kerajaan tradisional di nusantara umumnya dan Kesultanan Palembang pada khususnya, menjadikan penduduk sebagai sumber terpenting di dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan kesultanan Palembang, tanpa adanya penduduk kekayaan alam yang melimpah tidak ada artinya bagi penguasa, Karena mereka tidak mungkin mengeksploitasi sendiri secara langsung kekayaan yang dimiliki. Penguasa memerlukan penduduk bukan hanya dalam kaitan suplai tenaga untuk kepentingan pertahanan dan stabilitas kekuasaan melainkan sebagai sumber terpenting untuk angkatan kerja yang diperlukan dalam mengeksploitasi sumber kekayaan alam yang dimiliki kesultanan demi kepentingan stabilitas kekuasaan.³¹⁷

Oleh karenanya, dalam konteks ini penulis hanya menyajikan dari sisi sumber pendapatan kehidupan perekonomian di sekitar Kesultanan Palembang terutama yang terkait dengan pertanian. Pertanian merupakan aktivitas ekonomi terpenting sebagai sumber pendapatan bagi Kesultanan Palembang. Sektor ini menyerap sebahagian besar aktivitas penduduk khususnya di kawasan pedesaan dan paling banyak

³¹⁶ Di kota Palembang sekarang masih terkenal nama-nama Perkampungan tempat usaha kerajinan di bawah sistem kelembagaan "*Guguk*". Semasa Kesultanan Palembang, nama-nama kampung mencerminkan kegiatan utama yang dilakukan seperti kampung "Pelampitan" (berhubungan dengan kerajinan "*Lampit*" atau "*Tikar*"), "Sayangan" (Pembuat barang-barang dari tembaga dan perak), Kuningan (Pembuat barang-barang dari kuningan), "*Kepandean*" (Pande besi) dan "*Pelagan*", pengolah minyak dan lain-lain. Lihat Djohan Hanafiah "*Guguk*" Lembaga Sosial Ekonomi di Kota Palembang pada Abad XVIII dan XIX M dalam *Jambatan Tijdschrift Voor de Geschiedenis van Indonesie*" Jaarbang 7 No 2 1989 hlm 83 selanjutnya disingkat *Jambatan*.

³¹⁷ Nowiyanto, dan Eko Crys Endrayadi *Kesultanan Palembang Darussalam Sejarah dan Warisan Budaya University Press* Penerbit Tarutama Nusantara Jember. 2016 hlm 69

menyumbang pendapatan Kesultanan Palembang.³¹⁸ Dalam bidang pertanian berkembang dengan baik di berbagai wilayah Kesultanan Palembang, hal ini berkat didukung oleh kondisi alam dan tanah yang subur. Van Sevenhoven mengemukakan apa yang disaksikannya ketika berada di Kesultanan Palembang Darussalam bahwa tanah-tanah yang ada disekitar Ibu kota Kesultanan dan pedalaman Palembang banyak menghasilkan buah dan sayur-sayuran dengan kualitas yang sangat baik. Tanaman sayur dan buah tumbuh begitu subur, bahkan menurut Van Sevenhoven, pertumbuhannya jauh lebih sempurna dibandingkan dengan tanaman-tanaman serupa yang tumbuh di wilayah Jawa.

Bahkan bukan itu saja, menurut Van Sevenhoven,³¹⁹ buah-buahan dan sayur-mayur yang dihasilkan di Kesultanan Palembang jauh lebih empuk, mengandung lebih banyak air, lebih manis dan lebih enak. Kondisi alam yang demikian subur itu menjadikan salah satu alasan pokok baginya untuk menyatakan bahwa wilayah Kesultanan Palembang akan menjadi salah satu tempat yang paling menyenangkan bagi orang-orang Eropa tinggal menetap di Hindia Belanda. Bahkan bukan hanya di wilayah sekitar Ibukota, di Pedalaman Palembang menurut Van Sevenhoven merupakan wilayah penghasil produk-produk yang penting bagi Belanda untuk mensuplai kebutuhan pasar Eropa. William Marsden pada saat bertugas di Bengkulu melaporkan bahwa daerah pedalaman Bengkulu atau biasa disebut dataran tinggi Palembang merupakan kawasan yang sangat produktif. Di lahan-lahan dataran tinggi ini terdapat banyak kebun-kebun lada yang diusahakan oleh penduduk setempat.³²⁰ M.H. Court seorang penulis Inggris secara lebih detil melaporkan pada tahun 1821 M bahwa produk-produk pertanian seperti beras, kapas, lili, gambir, dan Lada dihasilkan di daerah aliran Sungai Musi, kemudian daerah aliran Sungai Lematang menghasilkan komoditas yang memproduksi lada, beras, dan kapas.

³¹⁸ Hyun Jun-Kim. *Reformist Muslims in a Jogjakarta Village The Islamic Transformation of Contemporari Sosio-Religius Life*. Disertasi Doktoral Hyung Jun-Kim di the Australia National University 1996. h;m29.

³¹⁹ Van Sevenhoven. *Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang* Penerbit Bhratara Jakarta. 1971. hlm 53-54

³²⁰ William Marsden. *History of Sumatera. Sejarah Sumatera* Penerbit Komunitas Bambu Indoliterasi Yogyakarta. 2008

Sementara komoditas di daerah Sungai Ogan, Produk-produk yang dihasilkan adalah beras, lada, dan rotan. Untuk daerah aliran Sungai Komering dan Sungai Banyuasin menghasilkan produk pertanian berupa beras dan lada.³²¹ Produk-produk komoditas pertanian tersebut banyak diusahakan penduduk Kesultanan Palembang secara tradisional dengan menggunakan sistem ladang berpindah.³²² Perlu dicatat bahwa dalam sistem kekuasaan Kesultanan Palembang, sultan menganggap dirinya sebagai satu-satunya pemilik tanah dan memberikannya kepada para pangeran atau bangsawan yang fungsinya hanya sebagai peminjaman, bukan sebagai hak milik. Sebagai imbalan peminjaman tanah tersebut diwajibkan membantu sultan baik di waktu perang dengan prajurit-prajurit perahu yang di persenjatai, maupun di waktu damai dengan balok-balok kayu atau barang-barang yang dibutuhkan oleh sultan.³²³ Dalam konteks komoditas pertanian, jenis tanaman yang paling penting adalah yang dibudidayakan tidak hanya di Sumatera khususnya Kesultanan Palembang akan tetapi diseluruh kawasan timur adalah komoditas padi. Tanaman padi ini merupakan bahan pangan pokok yang telah di konsumsi oleh ratusan juta penduduk khususnya Kesultanan Palembang walaupun hanya dilakukan di kawasan tropis.

Jenis-jenis padi sangatlah beragam, secara umum dibedakan dalam dua golongan komprehensif yaitu padi ladang (*gogo*) padi yang tumbuh di dataran tinggi dalam tanah yang kering dan padi sawah yang ditanam di dataran rendah dalam tanah berlumpur. Masing-masing varitas tersebut terdiri dari 10 atau 15 varitas dengan perbedaan bentuk, ukuran dan warna biji-bijiannya, cara menanamnya, serta kelezatan rasanya.³²⁴ William Mersden dalam pengamatan yang dilakukannya menyatakan bahwa pada umumnya padi dengan biji-bijian yang besar tidak terlalu disukai penduduk dibandingkan dengan yang

³²¹ Court. *An Exposition of the British Government with the sultan and State of Palembang and the Design of the Netherland Government Upon the Country*. London darbury and ellen. 1821

³²² Suprayitno 2013. *Pelayaran danPerdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864*. Penerbit Ombak Jogjakarta 2019 hlm 115-118

³²³ Alfian Ibrahim. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Sumatera Selatan*. Departemen pendidikan dan kebudayaan sejarah nasional. 1983/1984

³²⁴ William Marsden. *History of Sumatera Sejarah Sumatera* Penerbit Komonitas Bambu Indoliterasi Jogjakarta. 2016 hlm 96

berbiji kecil, karena hasil berasnya lebih putih dan pada suhu tertentu menjadi berwarna transparan.³²⁵ Dalam tulisan M. Poivre yang berjudul *Travel of a Philosopher* Marsden mendapatkan informasi awal tentang dua golongan padi pada pertanian Indonesia, kualitas padi ladang atau padi gogo jauh lebih bagus dari padi yang ada di sawah karena lebih putih, lebih mengenyangkan, dan rasanya lebih enak, serta tidak mudah basi.

Lebih lanjut beliau menjelaskan mengkonsumsi beras jenis ini merupakan salah satu cara tradisional untuk menjaga kesehatan dari pada mengkonsumsi beras sawah yang lebih berair, kurang pulen ketika di masak, dan lebih cepat basi. Oleh karenanya, padi tersebut lebih murah harganya dan lebih umum di konsumsi. Berkaitan dengan benih, masing-masing jenis dipisahkan oleh penduduk, mereka menyakini bahwa kedua jenis tersebut tidak bisa tumbuh dengan baik bila ditanam ditempat yang sama secara bersamaan.³²⁶ Dalam konteks budidaya padi gogo lahan hutan yang lebih disukai pada umumnya hutan yang sudah tua umurnya dan akan semakin baik karena tanahnya sangat subur. Dedaunan yang gugur dari pohonnya yang terus menerus lalu membusuk akan membentuk lapisan humus yang tidak akan ditemui dilahan terbuka yang telah terkikis oleh paparan sinar matahari mengakibatkan tumbuhnya ilalang.³²⁷ Menjelang musim kemarau (April-Mei), para petani memiliki tempat untuk dijadikan ladang atau tempat menanam padi gogo.

Proses pembukaan lahan pertanian ini membutuhkan kerja keras yang tidak hanya mengandalkan kekuatan alat, akan tetapi membutuhkan keterampilan dan kegigihan. Proses kerja pembukaan lahan ini dibagi menjadi dua tahap. *Pertama* tebas-menebas, yaitu memotong semak belukar dan tanaman rambat yang kemudian mengering selama selang waktu kurang lebih dua minggu, tergantung cuaca. *Kedua*, tebang-menebang,

³²⁵ William Marsden. *History of Sumatera: Sejarah Sumatera*. Penerbit Komonitas Bambu Indoliterasi Jogjakarta. 2016 hlm 96

³²⁶ William Marsden. *Histori of Sumatera Sejarah Sumatera* Penerbit komonitas bambu Indoliterasi Jogjakarta. 2016 hlm 97

³²⁷ William Marsden. *History of Sumatera Sejarah Sumatera* Penerbit komonitas Bambu Indoliterasi Jogjakarta. 2016 hlm 98

yaitu meruntuhkan pohon-pohon besar.³²⁸ Pembukaan ladang berpindah ini berpengaruh besar terhadap kohesi Jurai yang mengharuskan anggota jurai berkerjasama dalam ikatan patrelenial. terutama penebangan pohon hutan primer dan penjurangan akar untuk membuka ladang baru membutuhkan tenaga lebih banyak dari keluarga inti yang hanya terdiri dari sepasang suami istri. Untuk menjadikan hutan lahan produktif dibutuhkan penggalangan tenaga kerja dua sampai enam pasang orang dewasa yang dapat bekerjasama menebang pohon dan menggali akar-akarnya. Pimpinan siklus ladang berada ditangan jurai tuo, bila di akhir kemarau sudah tiba, waktu untuk menebang sebagian hutan.

Jurai tuo mengumpulkan kerabatnya di kampung dan merundingkan bidang tanah hutan yang akan di garap. Sesudah semua mufakat tentang bagian hutan yang akan di tebang diambil, maka pada bulan agustus mereka pergi bersama ke tempat yang dipilih, lalu kaum pria mendirikan tempat tinggal. Kemudian sebelum awal musim hujan, sesudah pohon ditebang dengan menggali akar-akarnya, ladang dibakar habis suatu pekerjaan intensif yang memerlukan waktu beberapa minggu.³²⁹ Seusai penanaman benih, tanaman dibiarkan lima bulan di ladang sampai tanaman itu dapat di panen pada bulan april, di awal musim kering. Sesudah istirahat kira-kira dua bulan siklus tahunan ini diulangi lagi. Di separuh pertama Abad XIX M, masa okupasi ladang demikian berkisar antara satu sampai dua tahun.³³⁰ Dengan demikian untuk penggarapan ladang lebih berarti dan ekstensif diperlukan area ladang terpaksa dibuka dalam radius 10 sampai 30 km disekitar daerah itu.

Dalam konteks pertanian, ladang yang terlalu intensif sebagian besar daerah iliran sudah gundul pada awal Abad XIX M di tepi Sungai hanya kelihatan hutan kecil dan belukar. Meningkatnya tekanan terhadap lingkungan akan memaksa penduduk yang jumlahnya relatif besar meninggalkan sistem

³²⁸ William Marsden. *History of Sumatera Sejarah Sumatera* Penerbit Komonitas Bambu Indoliterasi Jogjakarta. 2016 hlm 100

³²⁹ ARA. 2.10.01.3075. Laporan Kruseman 12 dalam Jeroen Peeters. *Kaum Tuo Kaum Mudo Perubahan Regelius di Palembang 1821-1842* Penerbit INIS Jakarta 1997 hlm 18

³³⁰ ARA 2.10.01.3075. Laporan Kruseman 13 De Sturler 1843:123 dalam Jeroen Peeters *Kaum Tuo Kaum Mudo Perubahan Regelius di Palembang 1821-1942* Penerbit INIS Jakarta. 1997 hlm 48

ladang dan beralih ke sistem pertanian yang lebih intensif. Zona ini memiliki hubungan khusus antara air dan tanah, terutama letak untuk tanaman padi basah. Bagaimana dan kapan tepatnya transformasi ini terjadi tidak dapat disusun kembali secara teliti dengan bantuan sumber tulisan. Menurut cerita secara turun-temurun daerah setempat budidaya ini diperkenalkan sekitar Abad XVIII M oleh tiga orang dari desa Muara Penimbung, yaitu Seladan, Laju dan Joran, dari daerah ini, kemudian pembudidayaan padi basah disebarkan keseluruh pegagan.³³¹ Budidaya ini terutama didorong oleh kehadiran kota Palembang yang mempunyai lebih dari 20,000 konsumen sehingga produksi panen padi di Ogan Komering Ilir mendapat pasar yang mudah. Surplus produksi panen padi yang besar selama Abad XIX M merupakan dasar pertanian komersial di Ogan Komering Ilir.³³²

Perbedaan penting dalam sistem pertanian di tanah talang adalah di tanah lebak hanya ditumbuhi rumput rawa, sehingga tenaga kerja beberapa orang dewasa sudah cukup untuk mempersiapkan tanah tempat penanaman padi. Turunnya permukaan air di tanah lebak yang biasanya terendam, dapat ditentukan saat yang tepat kapan mulai menyiapkan tanah, menanam dan memanen.³³³ Namun sebaiknya peralihan yang tidak dapat diramalkan dari musim kemarau ke Musim hujan menyebabkan fluktuasi produksi tahunan. Cepatnya arus air pertama menggenangi kembali sawah-sawah, sebagian besar menentukan suksesnya Musim panen. Jika tidak terjadi banjir, butir yang termuda ditanam

³³¹ KITLV. H. 2051 996:7 dalam Jeroen Peeters *Kaum Tuo Kaum Mudo Perubahan Religi di Palembang*. Penerbit INIS Jakarta 1997 hlm. 42

³³² ARA 2.10.01.3075. dalam Jeroen Peeters *Kaum Tuo Kaum Mudo Perubahan Religi di Palembang*. Penerbit INIS Jakarta 1997. hlm 43. 21-2

³³³ Kegiatan Rakyat dimulai jika air dalam--permukaan air tinggi di musim hujan--- mulai diganti oleh air surut di awal musim kemarau, apabila di bulan April sebagian tanah sudah menjadi kering dapat di mulai penanaman padi. Proses tanah lebih menjadi kering secara alami menyebabkan pengairan tidak diperlukan lagi. Proses tanah lebak yang lebih tinggi memberi kesempatan kepada jenis rumputan-rumputan yang tidak berharga untuk mulai tumbuh. Padi yang tumbuh di sawah ini harus di siangi dua kali, tanah lebak yang kemudian menjadi kering lebih sedikit di dibandingkan dengan tanah lebak yang lebih tinggi dan kering. Karena musim panen terhambat, dan hasil pun terancam hilang seluruhnya atau sebagian bila turun hujan deras. Pertama di Musim hujan yang menggenangi kembali daeah delta Ogan Komering Ilir. (KITLV. H. 1051.96)

dapat menjadi matang, maka panen ini dinamakan ngetam seribu atau selibu. Akan tetapi, karena Musim datang tidak menentu, sering terjadi kegagalan panen yang menyeluruh atau sebagian. Jika panen Musim sebelumnya sudah disimpan, di Musim berikutnya dapat dipilih tanah baru untuk limo lebak yang lain. Dalam dasawarsa pertama Abad XIX M tanah lebak lazim ditanami selama dua sampai tiga tahun disusul periode singkat, dimana tanah dibiarkan menjadi liar selama beberapa tahun.³³⁴

Berbeda dengan daerah Iliran Palembang, penanaman padi basah secara besar-besaran belum mendapat sambutan baik dari uluan Palembang. Hanya di beberapa lokasi di Bukit Barisan, penduduk berhasil membuat saluran irigasi untuk sawah. Sebagai gantinya padi kering merupakan budi daya yang mendominasi uluan Palembang, terutama di tanah Pematang dan tanah di tepi sungai. Tanah talang yang terletak lebih ke dalam juga dipakai untuk membuka ladang, akan tetapi tanah pematang lebih di sukai petani, mengingat tanah aluvial ini memberikan hasil lebih baik berkat lapisan endapan sumber yang tinggal setiap tahunnya sesudah banjir. Produksi di daerah ini bahkan dapat memberikan hasil panen dua kali lipat di bandingkan tanah talang.³³⁵ Pada pertengahan Abad XIX M tanah renah atau pematang ditanam lima sampai tujuh tahun berturut-turut disusul masa berikutnya selama delapan tahun.³³⁶

Disamping pematang, digunakan juga tanah talang meskipun tanah yang terletak lebih tinggi ini tidak dapat di

³³⁴ Tidak hanya tanah basah, tetapi juga tanah yang kering memberi petani pegangan sumber penghasil yang kaya. Di pulau alami yang di bentuk oleh pertemuan aliran Ogan Komering Ilir dan Bengkulu banyak sekali ditemukan pohon Nur atau kelapa aren (*Areca Catechu*). Pohon yang tumbuh liar ini memberikan banyak hasil berupa Gula jawa. Pemakaian buah kelapa aren oleh kepala desa dibagi rata diantara sepuluh warga. Tiap rumah tangga biasanya menyadap air buah dari lebih 50 pohon sebulan, berarti rata-rata menghasilkan 300 keping gula. Produksi ini dengan harga pasar sembilan *Spaanse Matten* (Mata uang Spanyol pada tahun 1822 M) tidak saja dijual di pasar di dekat Ibukota, tetapi di eksport ke Bangka. Ini beberapa keluarga menghasilkan bebrapa "*Spaanse Matten*" sebluan. (ARA. 2:10.01 Laporan Krusman 3075:13 dalam Jeroen Peeters. *Kaum Tuo Kaum Mudo Perubahan Regelius di Palembang* Penerbit INIS Jakarta 1997 hlm 43)

³³⁵ ARNAS. Laporan Tahunan 1836-1838: 13-2. Lasitluan Catatan Kaki

³³⁶ Laporan Tahunan. 1836-1838 31.2 Gersens 1860: 444

pupuk dengan endapan sungai yang membawa kesuburan, jenis tanah ini masih dapat di panen rata-rata 14 sampai 15 pikul perban. Akan tetapi pertumbuhan padi di ladang sangat tergantung pada lapisan pupuk alami yang di bentuk oleh bekas penanaman. Kesuburan demikian hanya bersifat sementara. Di separo pertama Abad XIX M tanah ditinggalkan sesudah satu atau dua kali panen, dan tempat itu kemudian dibiarkan 10 tahun atau lebih. Walaupun begitu pertumbuhan yang tinggi di lahan ini dapat menghasilkan rekor panen dengan jumlah tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan penanaman sawah di Jawa. Di samping itu hasil padi yang berasal dari tanah talang sangat harum dan lezat sehingga rakyat lebih menyukai tanah ini.³³⁷

Sebagaimana diketahui, padi merupakan produk utama nusantara termasuk juga di Kesultanan Palembang, karena padi merupakan makanan pokok penduduk pribumi maka aktivitas pengolahan kebutuhan bahan pokok ini menempati lebih dari setengah area pertanian pribumi. Produksi padi Hindia Belanda mencapai 6.444 juta kilogram padi sementara hasil per unit lahan adalah 2.182 kg per hektar. Jumlah ini dapat pembandingan dengan negara-negara penghasil beras lainnya. Produksi tersebut berhasil melebihi jumlah produksi negara penghasil beras lain yang juga diperhitungkan dalam pasar Internasional.³³⁸ Pengolahan padi dilakukan dengan dua cara yang berbeda padi ditanam pada lahan-lahan sawah yang memiliki sistem irigasi yang cukup baik dan berterus-terus, penanaman padi ini memberikan sekitar 93 persen dari total Produksi padi di Hindia Belanda. Kemudian pengolahan padi dilakukan di lahan kering (ladang), selama tahun-tahun terakhir penanaman padi di ladang ini telah digabung dengan pemeliharaan tanaman layak jual lainnya terutama spesies tanaman *Over Seasoned* yang memiliki derajat perawatan yang mudah.

Hasil panen tanaman padi yang berlebih dan tidak dimaksudkan untuk memenuhi konsumsi lokal akan dijual ke

³³⁷ Gresen: 1860: 444-6 De Sturler 1843:121. KITL II 590 B:37 dalam Jeroen Peeters. *Kaum Tuo Kaum Mudo Perubahan Regelius Di Palembang* Penerbit INIS Jakarta 1997 hlm 46

³³⁸ J. Stroomberg. *Devision of Commerce of Departement of Agriculture Industry and Commerce, Buitenzorg Java Hindia Belanda 1930* .Penerbit IRCiSoD Jogjakarta 2018 hlm 211

pedagang.³³⁹ Disamping tanaman padi, jagung biasanya ditanam secara bergiliran dengan padi. Seperempat dari luas area lahan pertanian biasanya disediakan untuk tanaman jagung, tanaman ini merupakan komoditas permakanan pokok dari masyarakat Sumatera termasuk juga penduduk Kesultanan Palembang. Penanaman jagung di Sumatera masih dilakukan setelah padi, hasil panen yang berlebih dari komoditas ini biasanya akan dijual untuk di eksport. Tanaman jagung ini sebagian besar tumbuh di tanah kurang subur dan kering. Maka hasil perhektarnya menjadi amat rendah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah melalui dinas pertanian pusat kemudian memperkenalkan pupuk hijau. Dengan bantuan pupuk hijau ini diharapkan akan sangat membantu peningkatan produktivitas tanaman ini. Selain tanaman jagung, singkong merupakan tanaman yang menempati sekitar sepersembilan area yang bisa ditanami di kepulauan Jawa dan Madura.

Akan tetapi di kepulauan luar termasuk Sumatera dan Palembang, pengolahan singkong termasuk berkembang. Singkong tumbuh hampir secara eksklusif di lahan kering dan pada dasarnya berlaku sebagai tanaman, makanan pokok penduduk, tanaman ini disediakan untuk memproduksi tapioka.³⁴⁰ Singkong kering (*Gaplek*) juga termasuk komoditas ekspor penting di samping komoditas lain seperti kacang tanah, tembakau, kelapa, sagu, dan sayuran kentang. Komoditas ini memang telah di format untuk menghasilkan komoditas yang berorientasi untuk keperluan eksport.³⁴¹ Walaupun secara keseluruhan hanya sedikit komoditas dari pertanian yang mengalami peningkatan, atau minimal mencapai mencelah tolak produksi singkong di Hindia Belanda. Pada tahun 1928 M diperkirakan mencapai 6.161.400 metrik ton akar ubi segar. Singkong ini memiliki kedudukan yang hampir sama dengan kentang di negara-negara Eropa Barat.

Di samping itu, sebagian besar tanaman ini disediakan untuk memproduksi tapioka di pabrik-pabrik. Dalam hubungan

³³⁹ J. Stroomberg. *Division of Commerce of Departement of Agriculture Industry and Commerce Java*. Penerbit Ivada Jogjakarta. 2018 hlm 213

³⁴⁰ J. Stroomberg. *Devision of Comerce of Devartement of Agriculture Industri and Commerce Java*. Penerbit Ivada Jogjakarta 2018 hlm 214

³⁴¹ J. Stroomberg. *Devartement of Commerce of Devartement of Agriculture Industri Java* Penerbit Ivada Jogjakarta 2018 hlm 177

ini manufaktur tepung tapioka menjadi pesaing serius tepung kentang. Tepung tapioka dihasilkan oleh pabrik pribumi termasuk kualitas rendah. Untuk mencapai kualitas tepung yang layak ekspor masih harus melalui pengilahan final untuk menghasilkan tepung yang berstruktur seperti kristal salju atau mutiara.

2. Pertambangan

Pandangan dan pemikiran tentang ciri-ciri orang-orang Melayu pasif, malas dengan ekonominya yang subsistem sebenarnya merupakan *Stereotype* yang diciptakan oleh pemerintah kolonial. *Stereotype* semacam ini di kontradiksi ketika para developmentalis sedang menggolongkan modernisasi dan menganggap bahwa sistem ekonomi semacam itu telah menjadi kendala dalam memajukan orang-orang Melayu. Banyak penulis menolak karakteristik orang-orang Melayu semacam ini. Syed Hassan al-Attas dalam bukunya *The myth of the lazy native* mengatakan bahwa *Stereotype* Melayu semacam ini penuh dengan muatan kepentingan kolonial.³⁴² Penolakan semacam ini telah mengilhami ilmuan sosial yang lain untuk lebih mendalami dinamika sosial ekonomi dan politik masyarakat Melayu, khususnya masyarakat Melayu Kesultanan Palembang.

Salah satu temuan ketidakpasifan dan ketidakmalasan masyarakat Melayu awalnya dikemukakan oleh Elsbeth Locher Scholten.³⁴³ Menurutnya kesalahan Belanda menilai remeh lemahnya penguasa Melayu Jambi dalam mengendalikan kesultanan. Penilaian ini muncul dalam konteks kebangkitan Era imperialisme dan kolonialisme di mana kedatangan Belanda dianggap sebagai “Dewa Penyelamat” Kesultanan. Kesalahpahaman itu memunculkan banyak penafsiran. Menurut Scholten, hal itu berangkat dari ketidaktahuan, merasa diri tinggi dan sekaligus cermin dari ketidakmampuan Belanda

³⁴² Syeh Hassan Alatas. *The Myth of the Lazy Native. A Study of the Image of the Malays, Philipinos, and Javanese From 16th to the 20th Century and its Function in the Ideology of Colonial Capitalism* (London routledge. 1977) dalam, *Erwiza Erman Menguak Sejarah Timah Bangka-Belitung*. Penerbit Ombak, Jogjakarta 2009 hlm 71

³⁴³ Elsbeth Locher Scholten. *Kesultanan Sumatera dan Negara Kolonial Hubungan Jambi-Batavia (1830-1907) dan Bangkitnya Imperialisasi Belanda* (Jakarta Banana. KITLV. 2008 hlm 48-50)

membentuk atau memanipulasi Negara Melayu sesuka hatinya. Kesultanan Melayu muncul dengan kondisi Geografis, demografis yang spesifik dan telah memperhatikan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan sendiri. Lebih jauh, Locher Schlten menjelaskan bahwa penguasa Melayu Jambi dikatakan “Lemah” oleh Kolonial terbukti merupakan citra yang cerdas, setidaknya-tidaknya sama cerdasnya dengan penguasa “Kuat” akan tetapi kecerdikan itu untuk alasan yang terbuka.

Pembuktian lebih jauh untuk menolak atau menerima argumen diatas memang diperlukan dengan mengambil kasus bisnis tambang timah Sultan Melayu dengan VOC di Palembang.³⁴⁴ Di Kesultanan Palembang sudah sejak lama mempunyai hubungan dengan Belanda. Kesultanan ini penting posisinya yang strategis, dan kedaulatannya atas pulau-pulau Bangka dan Belitung. Timah telah ditemukan di Bangka pada awal Abad XVII M setelah merosotnya VOC pada akhir Abad itu, tambang timah telah memperoleh arti penting dan baru mencapai produktivitas yang lebih tinggi pada awal Abad XIX M termasuk juga di Belitung. Belitung juga memiliki kandungan timah dan diduduki Belanda pada tahun 1817 M tanpa menghiraukan protes dari pihak Inggris, pelaku utama dalam drama area Palembang ini Sultan Mahmud Badaruddin II, tahun 1804-1812, 1813-1821.³⁴⁵

Kesultanan Palembang menyadari bahwa salah satu sumber pendapatannya adalah timah yang dihasilkan di pulau Bangka dan Belitung. Hasil produksi tambang ini merupakan barang komoditi yang sangat menguntungkan. Oleh karena sangat menguntungkan Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo harus mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Gangguan itu dalam bentuk Pencurian timah, Penyelundupan dan Perampokan. Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo juga mewaspadai para pedagang asing seperti Inggris dan Belanda yang juga bernafsu menguasai komoditi

³⁴⁴ Erwiza Erman. *Dari Pembentukan Kampung Ke Perkara Gelap Menguak Sejarah Timah Bangka dan Belitung*. Penerbit Ombak Jogjakarta 2009 hlm 7.

³⁴⁵ M. Ricklefs. *A History of Modern Indonesia*. Monash university. Penerbit Gajah Mada University Press. Jogjakarta 2007 hlm 212-213

ini.³⁴⁶ Sebagaimana diketahui bahwa pulau Bangka dan Belitung merupakan suatu wilayah yang sangat kaya akan sumber mineral terutama biji timah. Tanah di sebagian besar wilayah pulau ini tidak dapat diolah untuk Produksi Pertanian, akan tetapi sejumlah tambang yang didirikan di wilayah tersebut mampu memberikan sumbangan luar biasa besar terhadap Produksi timah dunia.³⁴⁷

Pertambangan timah Kesultanan Palembang terdapat di pulau Bangka, Pulau ini merupakan pemasok timah terbesar di Asia,³⁴⁸ dan dilakukan oleh pemerintah Sultan Muhammad Badaruddin Joyo Wikromo secara lebih intensif. Pada tahun 1747-an para Residen mencatat paling tidak ada 17 perkampungan pertambangan timah dan pada saat pertengahan tahun 1750-an diperkirakan terdapat sekitar 4000 orang China Bangka. Selanjutnya, walaupun Melayu “Bugis” dan “Orang gunung” terus menambang timah dan orang-orang China mayoritas pekerja tambang.³⁴⁹ Daerah-daerah yang menjadi tempat penambangan tersebut adalah Bela, Sungai Buluh, Tempilang, Biat, Bunut, Bendul, Rambat, Panji, Layang, Sungai Liat, Cengal, Pangkal Pinang, Kobar, Badar dan Toboali.³⁵⁰ Untuk keperluan intensifikasi penambangan, Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo merekrut pekerja-pekerja asing khususnya Siam dan menyediakan rumah-rumah bagi penambang. Pengawasan terhadap penambang dilakukan dengan menempatkan para *Demang* di wilayah penambangan.

Perubahan demkorafis ini pada gilirannya mempengaruhi tingkat produksi timah karena metode penambangan yang dilakukan lebih efisien, canggih, dan berharga dari pada metode yang digunakan oleh penambang lokal, akan tetapi mereka masih tetap terlibat dalam kordinasi tenaga kerja manusia dari

³⁴⁶ Bambang Budi Otomo. *Perkembangan Kota Palembang dari Wanua Sriwijaya Menuju Palembang Modern*. Pemerintah daerah Kota Palembang. Dinas Pariwisata Kebudayaan Palembang 2005 hlm 189.

³⁴⁷ J. Stroomberg. *Hindia Belanda 1930 Hanbook of The Nderland East Indies*. Penerbit IRGiSoD 2018 hlm 273

³⁴⁸ Djohan Hanafiah. *Kuto Besak Upaya Kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan*. Penerbit CV. Haji Masagung Jakarta 1989 hlm 111

³⁴⁹ Barbara Watson Andaya. *Hidup Bersaudara Sumatera Tenggara Pada Abad -XVII dan XVIII*. Penerbit Ombak Jogjakarta 2018 hlm 321.

³⁵⁰ Supriyanto. *Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864*. Penerbit Ombak Jakarta 2013. hlm 52

pada mesin yang kompleks.³⁵¹ Dengan demikian teknik ekstensifikasi dibawa oleh orang China menjadikan produksi timah menjadi bertambah tinggi penjualan kepada VOC tahun 1730-1740 M rata-rata 20.000 pikul pertahun 1 pikul= 62,5kg negeri China di Kontan merupakan pasar terbesar. Pemakaian timah di China sebagian besar untuk peralatan upacara keagamaan, selanjutnya guna pemakaian pelapis kotak teh agar kedap penguap dan air.³⁵² Sementara dari Semenanjung Malaya antara tahun 1780-1790 M produksi timah rata-rata pertahun 10.000 pikul dan wilayah Thailand Selatan rata-rata antara 3000 sampai 9000 pikul.³⁵³

Produksi timah dari pulau Bangka ternyata jauh lebih besar jumlahnya dan lebih baik kualitasnya dari timah-timah kawasan lain, termasuk dari Malaysia. Memang belum diketahui kapan persisnya orang Bangka pertama kali menambang timah, akan tetapi yang jelas dari histografi tradisional cerita Bangka ternyata Sultan Palembang telah mulai menambang timah di daerah kuasanya sekitar tahun 1710 M.³⁵⁴ Menjelang akhir tahun 1740-an produksi timah meningkat dengan bantuan seribu penambang China yang dibawa ke Bangka. Dari sumber VOC diketahui bahwa Sultan Palembang telah menjual timahnya ke VOC dari 4.704 pikul pada tahun 1740 M naik drastis menjadi 18.483 pikul pada tahun 1748 M dan kemudian naik hampir dua kali lipat pada tahun 1762 M yakni 33.395 pikul.³⁵⁵ Perlu diketahui bahwa teknik penambangan yang dilakukan oleh orang China dengan metode pengerjaan terbuka memberi keuntungan yang besar melebihi metode yang dilakukan secara

³⁵¹ Barbara Watson Andaya. *Hidup Bersaudara Sumatera Tenggara Pada Abad XVII-XVIII* Penerbit Ombak Jogjakarta . 2018 hlm 22

³⁵² Ernest Shedges Tin. *In Social and Economic History* London 1964 hlm 23-94:95 tahun 1996 hlm 54

³⁵³ Reinout Vos Gentle Janus marchant. 1993 hlm 8 dalam Erwiza Erman. *Menguak Sejarah Timah Bangka-Belitung dari Pembentukan Kampung ke Perkara Gelap* Penerbit Ombak Jogjakarta 2009 hlm 79

³⁵⁴ FSA de Clereg "Bijdrage tot de Gescheendeus Van het Eilamel Bangka naar een Maleish Handschrift" dalam *Bijdragen tot de taal, Laud. En valkenkunde van Naderlandsch Indie*. 1895 hlm 4 dalam Erwiza Erman. *Menguak Sejarah Timah Bangka-Belitung dari Pembentukan Kampung ke Perkara Gelap*. Penerbit Ombak Jogjakarta 2009 hlm 76

³⁵⁵ Penout. Vos gentle Janus Merchant Prince.1993 Appendix II dalam Erwiza Erman. *Menguak Sejarah Timah Bangka dan Belitung*. Penerbit Ombak Jogjakarta 2009.

tradisional dengan mengandalkan penggalian lubang silinder yang sempit.

Dalam kurun waktu tahun 1733-1754 M, timah yang dikirim ke Batavia meningkat dari 1879 M pikul hingga mencapai 16.000 pikul per tahun. Apabila VOC membeli timah dengan harga yang relatif rendah yaitu 7.5 real Spanyol perpikul, pembelian itu sudah memberikan sebuah pendapatan yang besar bagi penguasa Kesultanan dan pada faktanya, kebanyakan timah Bangka dijual secara diam-diam di tempat lain dengan jumlah yang jauh lebih tinggi. Akan tetapi berada di tangan orang-orang yang ditunjuk oleh Sultan Mahmud Badaruddin, para pejabat mengumpulkan timah dari para pekerja tambang dan membawanya ke Palembang dan kemudian membawa pulang barang-barang dan makanan, khususnya beras. Dalam pandangan para Residen, aliran beras ke Bangka merupakan salah satu faktor pendukung utama untuk meningkatkan produksi timah.³⁵⁶

Dengan demikian, tanpa komoditas tersebut (Beras), timah yang ada di Bangka akan berkurang secara substansial. Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo membuat kebijakan untuk memberikan tambang dan pelebur timah dengan bubuk mesiu dan amunisi yang dia beli secara sembunyi-sembunyi di Riau atau memesannya dari Batavia sehingga para pekerja tambang dapat melindungi diri mereka sendiri dari serangan para perampok. Sultan Mahmud Joyo Wikromo sendiri mengirimkan armada bersenjata dan terkadang jumlahnya mencapai lebih dari 100 armada kapal, semuanya dipersenjatai untuk berpatroli dan bahkan persiapan perang di perairan Bangka untuk memberantas penyelundupan timah dari berbagai gangguan keamanan lainnya di wilayah ini.³⁵⁷ Sultan Palembang menempatkan beberapa orang menteri untuk mengontrol penyelundupan atau perdagangan swasta yang memantik bertambahnya keluhan Belanda yang terjadi sepengetahuan dan keterlibatan Sultan Mahmud secara langsung.³⁵⁸

³⁵⁶ Barbara Watson Andaya. *Hidup Bersaudara Sumatera Tenggara pada Abad XVII-XVIII* Penerbit Ombak. Jogjakarta 2018 hlm 323.

³⁵⁷ Nowiyanto dan Eko Crys Endrayadi. *Kesultanan Palembang Darussalam Sejarah dan Warisan Budaya*. Penerbit Terutama Jember 2016 hlm 81

³⁵⁸ Barbara Watson Andaya. *Hidup Bersaudara Sumatera Tenggara Pada Abad XVII-XVIII* Penerbit Ombak. Jogjakarta 2018 hlm 323

Oleh karenanya harga yang ditawarkan VOC untuk membeli timah secara komparatif lebih rendah dan Belanda tidak bersedia membeli semua timah yang diproduksi oleh Kesultanan Palembang, langkah yang dilakukan untuk lebih menguntungkan di bawalah muatan timah ke pos dagang yang berada di luar pengawasan VOC seperti di daerah Riau atau menjualnya secara langsung kepada para pembeli asing.³⁵⁹ Timah merupakan komoditas yang sangat bernilai, dan komoditas ini memang sangat dibutuhkan Belanda dan negara-negara Eropa lainnya, oleh karenanya Belanda selalu berusaha membujuk Sultan Palembang agar memberikan hak monopoli perdagangan timah kepada Belanda. Timah merupakan komoditas yang sangat menguntungkan pasokan lebih besar, serta keterjaminan pasokan melalui hak monopoli.

Tabel: 3.3.

Realisasi Penjualan Timah Kesultanan Palembang Kepada VOC Tahun 1750-1790

Periode	Volume/Pikul
1750 - 1760	15000
1760 - 1770	22000
1770 - 1780	18000
1780 - 1790	15000

Sumber: Reinot Vos De VOC en de Palembang Tinsmokol in de 18 de eeuw Jambatan Jrg 6No 2/1987 hlm 53 dalam Nanang S Soetadji Djohan Hanafiah *Perang Palembang Melawan VOC* Penerbit Karyasari Palembang 1996 hlm 54.

Sedangkan produksi keseluruhan timah Bangka sebenarnya kurang lebih 50.000 sampai 60.000 pikul pertahun. Baik Johannes Paravacini 1755 M Hoge Regering 1766 M maupun Van Braan Holickgeest 1790 M memperkirakan luasnya penyelundupan hampir sama dengan pengeluaran VOC. Pemberitaan dari kantor VOC di Kontan lebih memperjelas bahwa pada tahun 1767 M Jung-jung dari Palembang telah memasukkan ke Kontan 20.000 pikul timah sedangkan pada tahun 1772 M sebanyak 14.000 pikul. Kemudian pada tahun 1783 M sebanyak 30.000 pikul timah Bangka oleh orang

³⁵⁹ Barbara Watson Andaya. *Hidup Bersaudara Sumatera Tenggara Pada Abad XVII-XVIII* Penerbit Ombak. Jogjakarta, 2018 hlm 323

Palembang dibawa menuju Riau. Gambaran angka perdagangan timah ini bertambah ramai jika kita membaca arsip Inggris tentang import timah di Kontan oleh kapal Inggris.³⁶⁰ Angka-angka perdagangan timah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Impor Timah

No.	Periode	Volume/Pikul
1	Tahun 1774	72.772 Pikul
2	Tahun 1778	15.777 Pikul
3	Tahun 1779	32.0000 Pikul
4	Tahun 17792	24.992 Pikul

Sumber: Nanang Soetadji dan Djohan Hanafiah. *Perang Palembang Melawan VOC.*

Dapat diketahui bahwa saham terbesar dari hasil perdagangan adalah timah Bangka. Pada tahun 1789 sesuai pemberitahuan dari pegawai VOC di Kanton, sejumlah timah Bangka di import oleh Inggris dari Bangka sebanyak 19.808 pikul seperti apa yang dinyatakan Staringh karena adanya kebebasan perdagangan pada tahun tersebut. Dengan demikian perdagangan gelap atau perdagangan bebas jauh lebih besar dari realisasi kontrak monopoli dengan VOC. Dampak dari aktivitas perdagangan ini adalah Kemakmuran yang sangat meningkat bagi Kesultanan Palembang, dan ini terjadi pada zaman Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo sampai kepada Mahmud Badaruddin II dimana timah mencuat sebagai sumber kekayaan Kesultanan Palembang.³⁶¹ Setiap tahun berbagai pedagang datang ke Palembang dan membawa timah dari Bangka dan Besi dari Belitung, semuanya memawanya ke Palembang dan negeri ini benar-benar makmur dan sejahtera dari kedua sumber komoditas tersebut.³⁶²

Dengan kemakmuran dan kekayaan yang dimiliki Kesultanan Palembang inilah dapat membangun dan mendirikan bangunan modern pada zamannya, diantara

³⁶⁰ Nanang Soetadji dan Djohan Hanafiah. *Perang Palembang Melawan VOC.* Penerbit Karyasari Palembang 1996 hlm 55

³⁶¹ Nanang Soetadji dan Djohan Hanafiah. *Perang Palembang Melawan VOC.* Penerbit Karyasari Palembang. 1996 hlm 56

³⁶² Barbara Watson Andaya. *Hidup Bersaudara Sumatera Tenggara pada Abad XVII-XVIII* Penerbit Ombak. Jogjakarta 2018 hlm 329

bangunan tersebut antara lain makam raja-raja, keraton bahkan yang terbesar dan dikenal sebagai Kuto Besak. Masjid Agung merupakan Masjid yang terbesar dan terindah pada zamannya yang selesai dibangun pada tahun 1748 M demikian juga dengan teknologi pembuatan kanal-kanal untuk Perdagangan, Pertanian atau sekaligus Pertahanan. Thomas Raffles memandang kekayaan Palembang selain mengagumkan dia juga khawatir, seperti apa yang dilaporkannya kepada atasannya yaitu Lord Minto pada tanggal 15 Desember 1810 M,³⁶³ mengatakan dengan ungkapan: “Sultan Palembang adalah seorang Pangeran Melayu yang terkaya dan benar-benar apa yang dikatakan bahwa gudangnya penuh dengan dollar dan emas yang telah diturunkan oleh para leluhurnya. Saya anggap inilah merupakan suatu pokok yang penting untuk menghalangi Daendells memanfaatkan pengadaan sumber yang besar tersebut.”

3. Perikanan

Aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan sebagian besar penduduk Kesultanan yang berdomisili di sepanjang garis pantai nusantara pada umumnya komoditas tangkapan ikan tersebut diprioritaskan untuk perdagangan. Disepanjang pantai Utara Jawa dan Madura, juga beberapa daerah pantai di kepulauan luar, mata pencaharian penduduk yang menempati kawasan tersebut kebanyakan nelayan. Di wilayah tersebut banyak berkembang sentra-sentra perdagangan ikan yang dikelola secara mandiri oleh penduduk dalam skala kecil.³⁶⁴ Begitu juga sebagian penduduk Kesultanan Palembang menggeluti sektor perikanan, berkembangnya sektor perikanan ini dalam masyarakat Kesultanan Palembang tidak terpisah dari fakta lingkungan wilayah yang banyak dialiri aliran Sungai besar yang biasa disebut Batang Hari Sembilan dengan Sungai Musi sebagai induknya.

Potensi Sungai-sungai ini dengan rawa-rawa maupun kawasan lautnya bermuara ke Muara Sungsang mempunyai kandungan kekayaan ikan yang melimpah dan mampu memberikan penghidupan bagi penduduk di Kesultanan

³⁶³ Nanang Soetadji dan Djohan Hanafiah. *Perang Palembang Melawan VOC*. Penerbit Karyasari Palembang, 1996 hlm 56

³⁶⁴ J. Stroomberg. *Devision of Commerce of Devartement of Agriculture Industri and Commerce Java* Penerbit IRGiSoD Jogjakarta, 2018 hlm 249

Palembang.³⁶⁵ Penangkapan ikan di Sungai atau lebak lebung tidak saja merupakan mata pencaharian tambahan akan tetapi menjadi komoditas yang dapat di perdagangkan sebagai bahan olahan *Home Industri*. Aktivitas bersama dalam menangkap ikan dilakukan pada saat waktu air surut atau kering di sungai atau di lebak lebung dengan menggunakan alat-alat perangkap secara tradisional.³⁶⁶ Beberapa jenis ikan yang di tangkap di sungai-sungai yang ada di Palembang dan sekitarnya misalnya Gurami, Bager Tebakang, Belida, Gabus, Udang, Lais, Gabus dan beberapa jenis ikan lainnya.³⁶⁷

Tidak mengherankan apabila penangkapan ikan telah menjadi sumber mata pencaharian utama sebagian besar penduduk, dan ikan menjadi bahan makanan utama bagi penduduk Kesultanan Palembang. Bahkan produk-produk ikan dari Kesultanan Palembang tidak hanya digunakan untuk konsumsi keluarga sendiri, akan tetapi juga sebagai barang perdagangan penting dari Kesultanan Palembang. Berbagai produk hasil industri perikanan dan udang dalam bentuk kering dan terasi dikirim sebagai barang perdagangan ke Jawa dan pulau-pulau lain disekitarnya.³⁶⁸

Wilayah Kesultanan Palembang terbagi atas kawasan dataran tinggi dan dataran rendah dan kepulauan Bangka dan Belitung. Wilayah yang luas ini banyak terdapat Sungai-sungai besar dan kecil kemudian ada rawa-rawa di dataran rendah serta laut dan selat yang memisahkan daratan Palembang dengan pulau Bangka Belitung dan kawasan ini sangat kaya akan hasil perikanannya. Itulah sebabnya profesi sebagai penangkap ikan merupakan mata pencaharian utama penduduk dan ikan merupakan bahan makanan utama. Sebagai contoh penduduk Sungsang (Muara Sungai Musi) menggantungkan hidup mereka sepenuhnya dari hasil tangkapan ikan. Ikan-ikan

³⁶⁵ Nowiyanto Eko Crys Endrayadi. *Kesultanan Palembang Darussalam Sejarah dan Warisan Budayanya*. Penerbit Tarutama Jember 2016 hlm 74

³⁶⁶ Ma'mun Abdullah dan kawan kawan. *Sistem Ekonomi Tradisi Awal Daerah Sumatera Selatan*. Departemen Produk Direktorat Jenderal Kebudayaan. Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Dokumentisasi dan Dokumentarisasi Kebudayaan Daerah. 1986/1987, Palembang 1986. hlm 61

³⁶⁷ Van Sevenhoven. *Lukisan Tentang Ibukota Palembang*. Penerbit Bhratara Jakrta 1971 hlm 63

³⁶⁸ Farida Wargadalem. *Perekonomian Kesultanan Palembang Abad XVII Hingga awal Abad XIX*. *Jurnal Sejarah*. Lontar Volume 6 No.1 (Januari - Juli 2009 hlm 12-20)

dan udang yang telah dikeringkan dalam bentuk kering dan terasi dijual keluar Palembang dan diantaranya ke pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya.³⁶⁹

Dari berbagai Produk komersial yang dihasilkan oleh Kesultanan Palembang, maka tidak mengherankan kalau kesultanan ini tidak pernah ditinggalkan oleh Bangsa Eropa (Belanda dan Inggris).³⁷⁰ Sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu, wilayah Kesultanan Palembang terdiri dari atas kawasan dataran tinggi dan rendah dan daerah Kesultanan Palembang ini banyak dialiri oleh Sungai-sungai besar dan kecil, rawa-rawa dan selat, laut, sungai-sungai besar yang terdapat di wilayah Kesultanan Palembang ini dikenal dengan nama Batang Hari Sembilan. Kondisi demikian,³⁷¹ menyebabkan Kesultanan Palembang sangat kaya akan hasil perikananannya. Oleh karenanya, salah satu sumber mata pencaharian utama penduduk di wilayah itu adalah menangkap ikan, sebagai contoh penduduk Sungsang menggantungkan hidup mereka dari menangkap ikan dan udang kering, terasi dijual ke pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya.³⁷²

4. Perkebunan

Sejarah Indonesia sejak masa kolonial sampai saat ini tidak dapat dipisahkan dari sektor perkebunan, mengingat

³⁶⁹ Jenis-jenis ikan yang dihasilkan daerah ini adalah Tapa, Lemak, Lais, Tebanglan, Patin, Bandeng, Kluyu, Pareh, Dalum, Belidah, Sagaret, Arok, Toman, Tongkol, Delak, Buju, Lele, Juara, Blutulang, Tebakang, dan masih banyak lagi. Ikan-ikan ini yang menjadi primadona Palembang. no.62.7 Bundel Palembang No.62.2 dalam Farida R Wargadalam. *Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik 1804-1025* Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia Jakarta 2017 hlm 31

³⁷⁰ ANRI Bundel Palembang No. 62.7. Bundel Palembang No. 62.2 dalam Farida R Wargadalam *Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik 1804-1825* Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia Jakarta 2017 hlm 27

³⁷¹ Kerajaan Jambi merupakan contoh wilayah yang ditinggalkan Inggris pada tahun 1679 M. bahkan para pedagang Maritim Nusantara dari Jawa, Makassar dan Eropa lainnya tidak lagi berlabuh di pelabuhan Jambi pada awal Abad XIX M (Loecher Scholten 2008:44 dan 48) sejak pertengahan Abad XVII sampai Abad XIX M, Belanda mengabaikan posnya di Jambi (Ricklefs 2008:158

³⁷² Jenis-jenis ikan yang dihasilkan di wilayah Palembang antara lain Tapa, Ikan lemak, Lais Tembakang, Patin, Bandeng, Kluyu, Pare, Dakum, Belidah, Sagaret, Arok, Toman, Tongal, Delak, Biyu, Lele, Juara belutulang, Tebakang dan lain lain. ANRI Bundel Palembang No. 62.7 No. 62.2 dalam Farida R Wargadalam. *Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik 1804-1825*. Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia Jakarta 2017 hlm 29.

sektor perkebunan memiliki peran yang sangat penting dan menentukan dalam pembentukan dari berbagai realitas ekonomi dan sosial masyarakat diberbagai wilayah tanah air termasuk juga di Kesultanan Palembang pada masa itu. Perkembangan perkebunan pada satu sisi dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan masyarakat Indonesia dengan ekonomi dunia, sehingga dapat memberikan keuntungan finansial yang besar serta membuka kesempatan ekonomi baru, akan tetapi pada sisi yang lain perkembangan perkebunan juga dianggap sebagai kendala bagi diversifikasi ekonomi masyarakat yang lebih luas, sumber penindasan serta salah satu faktor penting yang menimbulkan kemiskinan struktural bahkan dalam konteks masa lalu ada yang berpendapat bahwa sejarah kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia merupakan sejarah perkebunan itu sendiri.

Sejak awal kedatangan bangsa Barat yang mengidentifikasi diri sebagai pedagang sampai pada masa-masa ketika Barat identik dengan kekuasaan kolonial dan pemilik modal perkebunan menjadi salah satu fakta atau variabel yang tidak bisa diabaikan untuk menstrukturisasi dan menjelaskan realitas masa lalu yang ada termasuk di Kesultanan Palembang.³⁷³ Di Kesultanan Palembang sektor perkebunan telah bertahan tanpa adanya perubahan karakternya selama berabad-abad, oleh karenanya memang hanya diarahkan pada produksi tanaman makanan untuk konsumsi domestik. Namun seiring dengan perjalanan waktu, peningkatan populasi penduduk pun mulai terjadi di banyak wilayah.³⁷⁴ Sehingga mengharuskan masyarakat untuk membuka lahan-lahan baru serta pemanfaatan ladang-ladang yang biasanya ditanami dengan tanaman perkebunan berupa karet, lada, tembakau, kopi, teh dan lain lain. Tanaman karet merupakan komoditas ekspor yang menempati posisi terakhir dari industri perkebunan di area Palembang. Komoditas karet memiliki luas area penanaman yang paling besar bila dibandingkan dengan tanaman komoditas lainnya dan tidak

³⁷³ Bambang Purwanto. *Menyelusuri Akar Ketimpangan dan Kesempatan Baru, Catatan Tentang Sejarah Perkebunan Indonesia*. Sumber [https // www Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Ugm ac.id](https://www.SejarahFakultasIlmuBudayaUgm.ac.id). Diakses Bulan September 2019

³⁷⁴ Stroombergh. *Hindia Belanda 1930 Terj Handhbook of the Nederland East Indies IRCiSoD* Jogjakarta 2018 hlm 183

satupun tanaman yang lebih membanggakan daripada karet karena permintaan pasar atas produksi ini begitu menggiurkan di dunia Internasional.

Satu-satunya pohon yang menghasilkan getah karet dan dapat diolah untuk tujuan komoditas ekspor adalah pohon *Havea Brasiliensis* atau pohon karet para. Sebahagian besar pohon ini ditanam pada perkebunan di elevasi sekitar 100 sampai 500 meter (1500 kaki) di atas permukaan laut. Sangat jarang perkebunan karet berada di elevasi yang lebih rendah atau lebih tinggi. Sumatera merupakan pulau penghasil karet terbesar termasuk juga di wilayah Kesultanan Palembang, mayoritas perkebunan karet berada di ketinggian kurang dari 100 meter, karena areal-areal di elevasi tersebut masih berpenduduk jarang serta hanya diliputi hutan purba dengan nilai ekonomi rendah sehingga dapat dibersihkan untuk memberi tempat bagi perkebunan *Havea* secara lebih luas.³⁷⁵ Perkebunan karet pertama dimulai tahun 1900-1905 M akan tetapi permintaan getah karet meningkat pesat maka dalam waktu yang begitu singkat, penanaman *Havea* secara massal mulai dilakukan pada tahun 1900 M sehingga industri perkebunan karet bisa dikatakan sebagai industri perkebunan terbesar pada waktu itu.

Perkebunan karet rakyat di Palembang berkembang pada awal Abad XIX M, pelopornya orang-orang Melayu sekembalinya dari menunaikan ibadah haji, mereka singgah di Semenanjung Malaka dan membawa buah karet untuk ditanam di ladang-ladang mereka. Perkembangan perkebunan karet di Palembang cukup menggembirakan karena tidak membutuhkan investasi dalam bentuk pabrik pengolahan (*Manufaktur*) mudah dikerjakan oleh rakyat. Ekologi karet ternyata tidak berbeda jauh dengan ekologi perladangan, di samping itu pengolahan karet tidak membutuhkan mesin-mesin yang tidak mungkin dibeli oleh rakyat. Pengolahan *Havea* untuk menjadi komoditi perdagangan cukup diasapi dengan cara yang sederhana saja.³⁷⁶

Pengolahan yang banyak diterapkan untuk menghasilkan komoditas karet yang siap dijual adalah melalui mekanisme

³⁷⁵ Stroombergh. *Hindia Belanda 1930 Terj Hanhbook of the Netherlands East Indies*. Penerbit IRCiSoD Jogjakarta. 2018 hlm 199

³⁷⁶ R.Z Leirissa. *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Penerbit Ombak. Jogjakarta, 2102 hlm 77

pengasapan terhadap lembaran karet yang memiliki ketebalan sekitar 3-3 1/2 mm.³⁷⁷ Komoditas karet rakyat di wilayah Palembang dibeli oleh para tengkulak dari Singapura, walaupun mutunya kurang baik akan tetapi dapat laku dipasaran nasional dan internasional. Sampai tahun 1939 ternyata volume ekspor karet rakyat jauh melampaui volume karet perkebunan pemerintah.³⁷⁸ Tercatat pada tahun 1919 M jumlah eksport komoditas karet siap jual yang dihasilkan dari perkebunan masyarakat mencapai kurang lebih 13.000 ton. Jumlah ini meningkat signifikan pada tahun 1922 M sekitar 20.000 ton tahun 1925 M mencapai 88.000 ton, terakhir selama periode 1928 M mencapai total 91.543 ton. Diharapkan komoditas produksi karet rakyat terutama di daerah Palembang di masa mendatang akan dapat meningkat sehingga mencapai 200.000 ton karet kering.

Perlu diketahui bahwa produksi karet rakyat sangat berkaitan erat dengan fluktuasi harga pasar atas komoditas tersebut. Pada saat harga mengalami penurunan perkebunan karet milik rakyat biasanya sering ditinggalkan, karena hasil produksi karet tersebut sulit mendatangkan keuntungan. Namun terlepas dari hal itu semua mengingat masifnya perluasan areal tanaman komoditas ini, diperkirakan selama beberapa tahun kedepan jumlah areal perkebunan karet akan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 750.000 hektar dengan perkiraan produktivitas (Areal dengan produktif aktif) sekitar 200.000 hektar. Dengan mempertimbangkan perluasan areal penanaman tersebut diharapkan peningkatan areal produksi aktif sangat besar yang akan diperoleh hasil produksi dari komoditas karet tersebut.³⁷⁹

Dengan demikian, daerah-daerah pedalaman Keresidenan Palembang sangat cocok untuk ditanami dengan tanaman dagang yang mempunyai nilai eksport cukup baik di pasaran dunia terutama karet. Dengan adanya komoditas tersebut, maka mengalirlah modal Eropa ke daerah dan mulailah tumbuh tanah-tanah “*Erpah*” yaitu tanah sewa turun-temurun dengan

³⁷⁷ J. Stroombergh. *Division of Commerce of Devartement of Agreculture Industri and Commerce Java*. Penerbit IRCiSoD Jogjakarta, 2018 hlm 192

³⁷⁸ R.Z Leirissa. *Sejarah Perekonomian Indonesia* Penerbit Ombak Jogjakarta, 2012 hlm 77

³⁷⁹ Stroombergh. *Division of Commerce of Devartement of Agriculture Industri and Commerce Java*. Penerbit Ivada IRGiSoD Jogjakarta 2018 hlm 193

batas waktu tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut maka puluhan pertama Abad XIX M dibukalah *Onderneming*. *Onderneming* karet pada umumnya dikuasai oleh orang-orang Belgia yaitu *Onderneming* Melanian, Musi Landas, Musi Pait dan Tebenan yang semuanya terletak di Banyu Asin.³⁸⁰ Akan tetapi, sepanjang tahun 1919-1922 M kehidupan masyarakat khususnya di daerah Uluan Palembang merasakan penderitaan akibat dari semua hasil hutan dan perkebunan amat murah harganya, termasuk juga harga karet. Pada masa itu masyarakat Uluan hampir putus harapan tentang kebun-kebun karetnya sehingga banyak perkebunan karet dibiarkan bercampur baur dengan semak belukar, bahkan ada yang menjual kebun karetnya dengan harga amat murah, dan ditambah lagi dengan melambungnyanya harga beras, sementara hasil ladang mereka kurang baik.

Kemudian semenjak tahun 1923 M kehidupan masyarakat daerah uluan mengalami perubahan dikarenakan semua hasil kebun mulai bergairah dan memiliki harga kembali. Lebih-lebih terhadap komoditas getah karet yang mengalami lonjakan harga sangat signifikan. Dengan kenaikan harga karet tersebut membawa implikasi besar dengan munculnya orang-orang kaya baru di dalam masyarakat hampir di setiap dusun di daerah uluan memiliki mobil, sehingga apabila di akhir pekan berpuluh-puluh mobil ilir-mudik penuh penumpang untuk pelesir menghabiskan uangnya.³⁸¹ Selain tanaman yang lebih banyak bersifat pemenuhan kebutuhan sustantif, tanaman komersialisasi utama, kemudian muncul dalam bentuk tanaman lain berupa tanaman kopi.³⁸² Tanaman kopi mulai diperkenalkan di Indonesia oleh VOC pada Abad XVII M pada kurun waktu itu VOC mencoba membudidayakan di beberapa tempat di pulau Jawa terutama disekitar daerah Priangan, Jawa Barat.

³⁸⁰ T. Alfian Ibrahim. *Sejarah Pelawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Sumatera Selatan*. Pendidikan dan. Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisi tahun Jakarta 1983/1984 Jakarta, 1983 hlm 78.

³⁸¹ Dedi Irwanto M. Santun. *Iliran Uluan Dikotomi dan Dinamika dalam Sejarah Kultural Palembang*. Penerbit Eja Publish JogJakarta. 2010 hlm 133

³⁸² Dedi Irwanto M Santun. *Iliran dan Uluan Dikotomi dan Dinamika dalam Sejarah Kultural Palembang*. Penerbit Eja Publish Jogjakarta 2010 hlm 61

Usaha pembudidayaan kopi di pulau Jawa oleh VOC ini berkaitan erat dengan adanya permintaan akan komoditas ini di pasaran Eropa,³⁸³ satu komoditas yang dikenal tertua dan terbaik di Hindia Belanda. Di zaman VOC penanaman komoditas kopi ini sudah dilakukan dalam skala besar sementara selama Abad XIX M pengolahan kopi diambil alih oleh perkebunan pemerintah dan menjadi salah satu komoditas yang mendukung struktur sistem tanam yang diterapkan pemerintah di akhir Abad XIX M. Sementara perkebunan rakyat mulai muncul setelah tahun 1880 M dan semula perluasan lahan perkebunan ini menyebar dengan cepat,³⁸⁴ jenis tanaman kopi pertama yang dikenalkan di daerah Uluan Palembang ini adalah kopi Arabika. Menurut Sroombergh kopi Arabika merupakan kopi yang paling baik pertumbuhannya diantara kopi Robusta dan kopi Liberia. Kopi ini ditanam di daerah Uluan Palembang sebelah utara yang lebih banyak berbentuk pegunungan. Penanaman kopi Arabika ini sudah ada sejak masa Kesultanan Palembang terutama di daerah uluan Musi dan Empat Lawang di *Onderafdeling*, Lematang hulu, Lahat dan *Onderafdeling* Pagar Alam. Akan tetapi produksinya hanya terbatas pada pasar internal karena kesulitan transportasi untuk dibawa ke luar. Pada awalnya komoditas kopi Arabika ini lebih dulu dikenal lewat pasar daerah Padang yang dibawa dari pelabuhan Bangkulu karena perhubungan terbuka waktu itu lebih mudah lewat dataran tinggi yang menurun ke Keresidenan Bengkulu. Baru setelah jalur Bukit Barisan Melayu Keresidenan Palembang lewat uluan Musi terbuka. Kopi Arabika mulai mendapat tempat karena meningkatnya persaingan. Menariknya, harga kopi ini kemudian memicu penanaman kopi Arabika di dataran tinggi Bukit Barisan, di daerah Uluan Palembang lain yakni Basemah lebar di *Onderafdeling* Lematang hulu Lahat dan di Semendo pada *Onderafdeling* Lematang hilir Muara Enim, akibatnya Lahat dan Muara Enim muncul sebagai pusat perdagangan kopi di Uluan.³⁸⁵

³⁸³ K. Asnan Gusti. *Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera*. Penerbit Ombak Jogjakarta . 2007 hlm 203

³⁸⁴ J. Stroombergh. *Devision of Commerce of Devartement of Agriculture Industri and Commerce Java* Penerbit Ivada IRGiSoD Jogjakarta 2018 hlm 197

³⁸⁵ Dedi Irwanto M Santun. *Iiran Uluan Dikotomi dan Dinamika Sejarah Kultur Palembang* Penerbit Eja Publishert Jogjakarta 2010. hlm 62

Sebagaimana yang telah dikemukakan di awal bahwa tanaman kopi sama halnya dengan komoditas kapas hulu dan bukanlah produksi tanaman baru sebab pada tahun 1823 M Reynst telah menemukan perkebunan kopi kecil di hulu Musi dan di lembah Empat Lawang. Akan tetapi menurut perkiraan Reynst, produksi tanaman kopi belum mencapai setengah ton pada saat itu. Dikarenakan pada awal Abad XIX M belum ada rangsangan produksi untuk pasar eksternal, antara lain disebabkan tidak adanya jalur pengangkutan yang baik dari Bukit Barisan ke dataran rendah Palembang. Setelah pendudukan militer di pegunungan selesai tahun 1866 M, usaha pertama kali dilakukan dengan membuka jalur hubungan darat antara Palembang dan Bengkulu, melalui jalan setapak dengan melewati Bukit Barisan, reaksi atas pembangunan jalan militer ini pertama kali di lihat di Empat Lawang. Di lembah bukit itu seorang pensiunan sersan mayor pasukan pendudukan di Uluhan Palembang bernama Anslijn, Anslijn mulai membeli kopi dari masyarakat setempat. dampaknya masyarakat terobsesi untuk membuat kebun baru yang lebih besar.

Disamping itu Anslijn memberikan petunjuk kepada masyarakat setempat untuk memperhatikan pohon-pohon kopi tersebut agar dirawat dan dipelihara lebih baik sehingga komoditas kopi dapat ditingkatkan produksinya.³⁸⁶ Keberhasilan produksi kopi pertama kali di daerah ini menyebabkan pada tahun 1866 M beberapa saudagar China dari Bengkulu memilih menetap di Empat Lawang untuk mengurus pengangkutan produksi selanjutnya dikirim ke tempat lain. Terobosan struktur terjadi tatkala gerobak sapi dipakai untuk pengangkutan komoditas kopi dari lereng terjal Bukit Barisan ke Bengkulu berdampak pada biaya pengangkutan yang tinggi dapat ditekan serta keteresolasian dapat ditembus. Dari pelabuhan Bengkulu kopi daerah Palembang dikapalkan untuk dibawa ke Padang dan memperoleh harga sedikit diatas varitas Arabika lokal kelas kedua. Dorongan untuk memperbesar skala diperkuat ketika dari sisi Bukit Barisan ke Palembang, juga ditunjukkan perhatian besar atas budidaya kopi. Pembeli dari Palembang bertolak ke Empat Lawang mencoba menarik

³⁸⁶ Jeroen Peeters. *Kaum Tuo-Kaum Mudo Perubahan Religius di Palembang 1824-1942* Penerbit INIS Jakarta 1997 hlm 53

sebagian besar kembali dilakukan lewat uluan ke Musi, persaingan yang meningkat dengan pemborong China dari Bengkulu sangat menggalakkan penetapan harga setempat.

Dengan demikian harga kopi perpikul naik dari Nlg.15 per tahun 1867 M ke Nlg. 25 sampai Nlg. 30 pada tahun 1870 M dan pada tahun 1873 M untuk sementara mencapai puncaknya dengan harga sebesar Nlg.52.³⁸⁷ Dengan tingginya harga komoditas kopi Arabika tersebut, mendorong masyarakat untuk mempersiapkan persediaan produksi walaupun akhirnya antara permintaan dan penawaran yang tersedia tidak seimbang dengan kebutuhan pasar dan berdampak pada kemampuan daerah untuk menyediakan lahan yang ditanami rakyat hanya berpenduduk 22.000 orang. Untuk mengatasi persoalan sulitnya menyediakan tenaga kerja di dalam memperluas lahan perkebunan kopi tersebut, dan mereka sendiri tidak sanggup menangani seluruh produksi, maka didatangkanlah tenaga kerja dari wilayah Bengkulu dengan perjanjian bagi hasil disamping itu ditambah tenaga kerja ekstra.

Ketika tahun 1873 M, untuk pertama kali perawatan angkutan pemerintah pendudukan militer Talang Padang di Empat Lawang dapat dilakukan tanpa jasa kuli rakyat. Berkenaan dengan itu pada tahun 1870-an terjadi perbaikan infrastruktur perhubungan jalan secara besar-besaran sehingga untuk pertama kali diadakan angkutan kendaraan dari Empat Lawang ke Mandi Aur dan Tebing Tinggi.³⁸⁸ Disamping komoditas kopi ada juga berbagai hasil bumi di Sumatera ternasuk juga di wilayah Kesultanan Palembang yang dijadikan komoditas perdagangan adalah lada. Lada menduduki peringkat utama dan menjadi komoditas terpenting serta terbesar di pulau ini. Lada merupakan objek perdagangan utama yang di monopoli langsung oleh *East India Compain* (EIC) dan para pedagang yang bersaing dikarenakan warga bebas memperdagangkan komoditas tersebut.³⁸⁹ Sumber-sumber tertua mengatakan bahwa tanaman ini mulai ditanam diwilayah Kesultanan Palembang sejak awal atau pertengahan Abad-XVI M kawasan

³⁸⁷ Jeroen Peeters. *Kaum Tuo-Kaum Mudo Perubahan Regilius di Palembang 1824-1942* Penerbit INIS Jakarta 1997 hlm 54

³⁸⁸ Jeroen Peeters. *Kaum Mudo-Kaum Tuo Perubahan Religi di Palembang 1824-1942* Penerbit INIS Jakarta 1997hlm 54-55

³⁸⁹ William Marsden. *Sejarah Sumatera. The History of Sumatera.* Penerbit Indoliterasi Jogjakarta 2016 hlm 191

Noordelijke Afdeling juga dikenal sebagai penghasil utama produk lada ini. Sehingga banyak laporan Belanda menyebutkan pelabuhan-pelabuhan di kawasan *Noordelijke Afdeling* ini dengan *Paper Havens* pelabuhan-pelabuhan lada. Pada umumnya lada ditanam petani di daerah yang tidak begitu jauh dari pantai, pembudidayaan tanaman ini relatif sulit karena membutuhkan ketelitian dan kesungguhan dalam pemeliharannya.³⁹⁰

Tanaman lada ini mulai berbuah setelah berumur tiga tahun dan dapat memproduksi secara optimal antara tahun ke delapan hingga tahun ke dua belas³⁹¹ atau hasil produksi paling maksimal, kondisi ini akan bertahan sampai empat tahun berikutnya tergantung pada tingkat kesuburan lahannya. Lalu menurun secara bertahap dengan siklus yang sama sampai hasilnya tidak sepadan dengan beban perawatannya. Tanaman lada menjadi sumber pendapatan utama Kesultanan Palembang. Tanaman ini dibudidayakan di kepulauan Bangka, Belitung dan di pedalaman Palembang. Komoditi ini cukup digemari oleh pedagang asing baik pedagang dari Eropa (Inggris, Belanda, Spanyol, dan China), dan pada Abad XVII M Palembang merupakan penghasil lada terbesar di kawasan ini.³⁹²

Dari data-data tersebut dapat dipahami bahwa permintaan bangsa Eropa akan komoditas merica tersebut jelas memberikan keuntungan para penguasa hilir dan kesetiaan penduduk pedalaman untuk ikut bergelut dengan pembudidayaan tanaman komersial cukup tinggi, ini menandakan bahwa mereka mengetahui keuntungan yang dapat mereka peroleh kemudian hari.³⁹³ Pengolahan varitas rempah-rempah berbeda pada Abad XVI dan XVII M rempah-rempah merupakan salah satu sumber utama kemakmuran nusantara. Akan tetapi sekarang sangat kehilangan signifikasinya jika dibandingkan dengan produksi

³⁹⁰ Asnan Gusti. *Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera*. Penerbit Ombak Jogjakarta 2007 hlm 111

³⁹¹ William Marsden. *Sejarah Sumatera. The History of Sumatera*. Penerbit Indoliterasi Jogjakarta 2016 hlm

³⁹² Bambang Budi Oetomo. *Perkembangan Kota Palembang dari Wanua Sriwijaya Menuju Palembang Modern. Pemerintah Kota Madya Palembang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan*. Palembang 2005 hlm 190

³⁹³ Barbara Watson Andaya. *Hidup Bersadara Sumatera Tengah pada Abad XVII -XVIII* Penerbit Ombak Jogjakarta 2016 hlm 131

barang-barang mayoritas meskipun pengilahan cengkeh salah satu jenis rempah-rempah masih dilakukan di Ambon dan Saparuna (Maluku). Namun popularitasnya masih kalah dengan pala terutama untuk pasar ekspor. Komoditas rempah-rempah yang benar-benar paling unggul di Hindia Belanda dalam beberapa waktu adalah lada, hampir seluruh pengolahan tanaman ini dilakukan oleh bangsa China dan Pribumi kepulauan Sumatera dan Borneo (Kalimantan).

Produksi lada hitam yang dihasilkan oleh pertanian pribumi dari kedua kepulauan ini pada tahun 1928 M mencapai 16.815 metrik ton. Wilayah Lampung 73.6 persen, Aceh 8.7 persen, sisanya disumbang oleh wilayah Sumatera lain sebanyak 13.9 persen dan Borneo 3.8 persen.³⁹⁴ Sementara hasil lada putih pada tahun 1928 M mencapai 7.741 metrik ton. Terdiri dari Bangka 76.3 persen, sisanya bagian Sumatera 2.4 persen dan Borneo 21.3 persen. Komoditas lada yang produksinya termasuk sangat kecil di Sumatera dan Borneo, lada diolah secara ekstensif seperti tanaman hutan oleh penduduk pribumi karena tanaman ini tidak memerlukan banyak perhatian dan perawatan hal ini kontras dengan pengolahan yang dilakukan oleh bangsa China di pulau Bangka, mereka menerapkan pola penanaman dengan format hortikultura paling sempurna. Akan tetapi pada saat yang sama manakala metode ini ingin diterapkan di kawasan lainnya, sangat diperlukan investasi modal yang besar.³⁹⁵

Pada masa pemerintahan Sultan Abdurrahman, produksi lada merupakan kekuatan perekonomian Palembang sehingga pada akhir Abad XVII M kekayaan Sultan Abdurrahman menjadi sebuah legenda, kemudian sultan dikenal sebagai *The Greatest Pepper Merchant*. Disamping itu, dari hasil perdagangan lada, Sultan Abdurrahman merupakan orang pertama menerima keuntungan dari perdagangan luar negeri, juga menerima persentase pajak dan cukai keluar masuk barang dagangan. Kunci sukses Sultan Abdurrahman dalam meningkatkan kekayaan dan kemakmuran negeri ditopang oleh penduduk

³⁹⁴ J. Stroombergh. *Devision of Commerce of Devartement of Agriculture Industri and Commerce Java* Penerbit Ivada IGRiSoD Jogjakarta 2018 hlm 210

³⁹⁵ J. Stroombergh. *Devision of Commerce of Devartement of Agricultur Industri and Commerce Java* Penerbit Ivada IRGiSoD Jogjakarta 2018 hlm 210-211

daerah pedalaman dengan pembukaan perkebunan-perkebunan di areal lahan baru dan pekerjanya didatangkan dari Jambi dan orang-orang Minangkabau yang biasa menanam lada di uluan Tembesi yang mengakui Sultan Palembang sebagai tuannya.³⁹⁶

5. Industri

Sebelum menjelaskan sektor Industri terutama Industri Kerajinan di Kesultanan Palembang terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian industri. Istilah Industri berasal dari bahasa Latin “Indusrtia.” berarti buruh atau tenaga kerja, istilah industri sering digunakan secara umum dan luas artinya semua kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rangka mencapai kesejahteraan. Menurut Sudono Sukirno Istilah industri adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor sekunder kegiatan itu berupa pabrik tekstil, perakitan, pembuatan rokok. Industri merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mengolah barang mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi untuk dijadikan barang yang lebih tinggi kegunaannya.³⁹⁷ Undang-undang No 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, menyatakan Industri merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.³⁹⁸

Menurut Ensklopedi Nasional Indonesia, Industri merupakan bagian dari proses produksi yang tidak mengambil bahan-bahan tersebut langsung dari alam untuk di konsumsi akan tetapi bahan-bahan itu diproses dan akhirnya menjadi komoditas berharga kepada masyarakat.³⁹⁹ Pendepenisian senada dengan Istilah Industri mengacu kepada pemahaman Lipczynski menurutnya istilah industri mengacu kepada sejumlah perusahaan yang memproduksi dan menjual sejumlah

³⁹⁶ Djohan Hanafiah. *Sejarah Kota Palembang*. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang 2013 hlm 27

³⁹⁷ Sudono Sukirno. *Pengantar Teori Ekonomi Mikro* edisi kedua Penerbit PT Karya Grafindo Persada Jakarta 1995 hlm 54.

³⁹⁸ Sritomo Wignjosobroto. *Pengantar Teknik dan Manajemen Industri*. Edisi pertama Penerbit Gunawidya Jakarta 2003 hlm 19

³⁹⁹ Bambang Harsrinuksmo. *Ensklopedi Nasional Indonesia*. cetakan pertama Penerbit PT Delta Pamungkas Jakarta 1988

produk yang serupa, memanfaatkan teknologi yang serupa dan mungkin juga mengakses faktor produksi (*Input*) dari pasar faktor produksi yang sama. Kesulitan untuk menentukan batasan industri seringkali muncul dalam hal menentukan jenis perusahaan yang menghasilkan produk yang sejenis, mengacu kepada Clarkson (1982) Gwin (2000) dan Lipczynski (2005) dalam prakteknya perusahaan tersebut diatasi dengan pemanfaatan standar pengklasifikasian industri seperti *Standar Industrial Classification* (SIC) yang dikenal di Inggris pada tahun 1948 diperbaharui pada tahun 1980 dan 1982. Nomenclatur yang diperkenalkan di Uni Eropa pada tahun 1992 dan *North American industrial classification system* (NICS) yang awalnya diperkenalkan negara-negara Amerika Utara.⁴⁰⁰

Standar pengklasifikasian industri di Indonesia didasarkan pada klasifikasi baku lapangan usaha industri (KBLI) alami yang pada awal perkembangannya disebut klasifikasi lapangan usaha Indonesia (KLUI). KBLI mengklasifikasi seluruh kegiatan ekonomi menjadi beberapa lapangan usaha. Pendekatan KBLI menekankan ekonomi dalam menciptakan barang dan jasa pada pendekatan fungsi pelaku ekonomi dalam menciptakan barang dan jasa dan pendekatan fungsi pelaku ekonomi dalam menciptakan barang dan jasa.⁴⁰¹ Dari definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa industri adalah suatu usaha atau aktivitas pengelolaan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah guna mendapatkan keuntungan.

Berkaitan dengan industri tersebut di Kesultanan Palembang, selain aktivitas industri pertanian, perkebunan dan perikanan, sektor Industri kerajinan merupakan aktivitas ekonomi yang penting bagi penduduk Kesultanan Palembang Darussalam khususnya penduduk yang berdomisili di wilayah Ibu kota. Di Kesultanan Palembang di kenal maju dalam Industri Pertukangan, Pengolahan Besi, Ukir gading gajah, Emas dan

⁴⁰⁰ Lincoln Arsyad. *Ekonomika Industri Pendekatan Struktur Prilaku dan Kinerja* Cetakan Pertama Penerbit dan Pencetak UPPSTIM YKPN Jogjakarta 2009 hlm 4-5

⁴⁰¹ Badan Pusat Statistik BPS *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia* Badan Pusat Statistik Jakarta 2009 hlm 5 dalam Lincoln Arsyad. *Ekonomika Industri Pendekatan Struktur Prilaku dan Kinerja*. Cetakan Perama Penerbit dan Pencetak UPPSTIM YKPN Jogjakarta. 2014 hlm 5

Perak.⁴⁰² Produksi hasil kerajinan ini di ekspor ke negara Siam. Kemudian nilai harga jual ekspor itu mencapai 500-1000 dollar Spanyol .atau seukuran dengan f 3.500 - f 7.000 pertahun. Komoditas tembaga hitam merupakan campuran tembaga murni dengan emas, dari campuran ini menghasilkan perhiasan yang sangat bermutu tinggi. Dalam hal memproduksi ini penduduk kesultanan Palembang telah mengenal teknik perekatan dengan baik sehingga mampu mengolah tembaga dan timah menjadi kuningan, yang nantinya diolah kembali untuk dijadikan bahan dasar pembauatan meriam kecil (*lila*), kotak sirih, nampan, ketel besi, ketel teh, permata dan gading.⁴⁰³ Dalam proses produksi bukan hanya kaum laki-laki yang terlibat, akan tetapi kaum perempuan ikut serta memproduksi kerajinan tangan, berupa kain sutera, dan kain-kain katun yang bersulam benang emas dengan ragam bentuk hiasan dan bunga-bunga. Produksi industri kerajinan kaum perempuan Kesultanan Palembang ini dikirim sebagai barang dagangan ke berbagai tempat.⁴⁰⁴

Dengan demikian dapat dipahami dari data-data di atas bahwa industri yang ada di Kesultanan Palembang tidak hanya industri yang bergerak di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan industri kerajinan akan tetapi Kesultanan Palembang sudah mampu memproduksi Industri pertahanan akan negara dalam bentuk memproduksi Senapan, Meriam beserta Amunisinya. Disamping itu ada keahlian lainnya, penduduk Kesultanan Palembang mampu melukis, bertukang kayu, pengrajin sepatu, dan pembuat perahu. Menurut laporan Gubernur Jenderal De Cock pada tahun 1821 M seusai penaklukan Palembang, orang Palembang ahli didalam membuat amunisi.⁴⁰⁵ Kemudian pada tahun 1822 M misalnya, memproduksi hasil industri kerajinan meliputi antara lain

⁴⁰² P. De Roo de La faille. *Dari Zaman Kesultanan Palembang*. Penerbit Bhratara Jakarta 1971 hlm 35

⁴⁰³ Farida R. Wargadalem. *Kesultanan Palembang dalam pusran Konflik 1804-1825* Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia bekerja sama dengan Ecole francaise d'Extreme Orient Penerbit Gedung Kompas Gramedia, Jakarta 2017 hlm 30

⁴⁰⁴ Louter vol 6 No.1 Jemari-jemari 2019 hlm 12-20

⁴⁰⁵ Farida R Wargadalem. *Kesultanan Palembang dalam Pusran Konflik 18204-1825*. Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia bekerja sama dengan Ecole francaise d' Extreme Orient Penerbit Gedung Kompas Gramedia Jakarta 2017 hlm 30

benang layar, tikar, taplak, sampang, kotak firi, periuk, dan barang-barang pecah belah lainnya. Harga taplak yang bersulam emas dijual di pasaran dengan harga 44 gulden perhelai.⁴⁰⁶

Di samping itu industri-industri yang ada di Kesultanan Palembang lebih berorientasi untuk menghasilkan barang-barang agar dapat memenuhi kebutuhan penduduk di wilayah Kesultanan, kecuali ada beberapa produk industri yang berguna secara khusus memang di orientasikan untuk komoditi di ekspor. Sebagian besar industri yang dimiliki Kesultanan Palembang dikelola dengan infrastruktur yang masih sangat sederhana. Di wilayah pedesaan dan di Kesultanan Palembang tradisi Pertanian masih menguasai kehidupan ekonomi penduduk. hal ini telah menyebabkan jumlah orang yang bermata pencaharian sebagai buruh menjadi sangat terbatas.⁴⁰⁷ Industri-industri yang ada di Kesultanan Palembang tentu saja penting dari sudut pandang kuantitatif, namun dari sudut pandang kualitatif, dengan beberapa pengecualian bahwa keberadaan industri di wilayah Kesultanan Palembang masih berada di level menengah ke bawah.⁴⁰⁸

Akan tetapi dari hasil industri dan perdagangan yang diekspor keluar wilayah Kesultanan Palembang yang paling penting secara ekonomi adalah hasil industri pertambangan timah. Timah merupakan produk industri terpenting sebagai sumber pendapatan bagi Kesultanan,⁴⁰⁹ dan untuk tingkat yang lebih rendah, memisahkan emas dan perak dari bijinya. Tembaga hitam merupakan campuran tembaga murni dengan emas, dari campuran ini menghasilkan perhiasan yang sangat berkualitas. Penduduk Kesultanan Palembang telah mengenal teknik perekatan yang baik sehingga mampu mengolah tembaga dan timah menjadi kuningan yang nantinya diproses kembali untuk dijadikan bahan dasar pembuatan lila (Meriam kecil), Kotak sirih, Nampan, Kotak teh, dan berbagai jenis peralatan rumah tangga. Mereka juga ahli mengolah Perak, Permata dan

⁴⁰⁶ Van Sevenhoven. *Lukisan tentang Ibukota Palembang* Penerbit Bharata Jakarta 1971 hlm 70-71

⁴⁰⁷ Stroombergh. *Devision of Commerce of Devartement of Agriculture Industri and Commerce Java*. Penerbit Ivada IRGiSoD Jogjakarta. 2018 hlm 297

⁴⁰⁸ Stroombergh. *Devision of Commerce of Devartement of Agricultur Industri and Commerce Java*. Penerbit Ivada IRGiSoD Jogjakarta 2018 hlm 301

⁴⁰⁹ William Marsden. *Sejarah Sumatera The History of Sumatra*. Penerbit Indoliterasi Bantul Jogjakarta 2008 hlm 333

Gading. Keahlian lainnya adalah melukis, Pertukangan, Pengrajin sepatu dan pembuat perak.

Berdasarkan laporan De Cock kepada Gubernur Jenderal Belanda pada tahun 1821 M, orang Palembang ahli dalam membuat Amunisi.⁴¹⁰ Meriam, pengecor kuningan dan pembuat senapan, pengecor kuningan dan pembuatan senapan umumnya orang Tionghoa.⁴¹¹ Para perempuan pada umumnya membuat bahan pakaiannya sendiri dengan membuat sarung, penutup kepala, dan pakaian dengan menggunakan katun yang berasal dari Eropa yang dihiasi dengan berbagai motif bunga. Produk mereka sangat menonjol karena berkualitas tinggi para pengrajin Palembang sangat terkenal dengan keahliannya menenun baju dan kopiah Arab dengan benang emas pelet (prada), dan bordir seperti jenis trawangan dan katun putih *Seulam kait* yang indah. Bahkan benang yang indah yang terdapat di Padang dan bagian Sumatera lainnya berasal dari Palembang. Di daerah uluan juga terdapat kerajinan katun tapi bahan dan cara pembuatannya masih kasar.⁴¹²

E. Inovasi dan Kreativitas Masyarakat dalam Kerajinan Alternatif Ekonomi Produktif

Dalam kamus besar bahasa Indonesia "*Inovasi*" artinya pemasukan atau pengenalan hal-hal baru penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya.⁴¹³ Sementara ada beberapa pengertian *inovasi* menurut para ahli yang dikemukakan Udin Syaifudin Su'ud diantaranya.⁴¹⁴ *Pertama*. Donal P. Ely *Inovasi* merupakan

⁴¹⁰ Bahan Utama Mesiu adalah Campuran Salpeter dan Belerang. Bahan-bahan ini banyak ditemukan di Daerah Rejang. (ANRI Bundel Palembang No. 62.2)

⁴¹¹ ANRI Bundel Palembang no.47.6 No. 62.2 Veth 1869:654) dalam Farida R Wargadalam *Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik 1804-1825* Penerbit Kompas Gramedia 2017 hlm 30

⁴¹² Farida R Wargadalam *Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik 1804-1825* Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia bekerja sama dengan Ecolefrancaise d'Extreme-Orient Gedung Kompas Gramedia Jakarta 2017 hlm 30

⁴¹³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Diterbitkan oleh Balai Pustaka Cetakan Pertama 1988 [http:// wikipedia.kbbi.web.id](http://wikipedia.kbbi.web.id) *Innovasi diakses Bulan Februari. 2020*

⁴¹⁴ Udin Syaifuddin Su'ud *Innovasi Pendidikan cetakan ketujuh Penerbit .Alfabeta Bandung 2014 hlm 4. diakses dari Repo Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung ac.id Minggu 26 april 2020 pukul 10.00*

sebuah ide dan sebuah cara/langkah baru untuk melengkapi langkah sosial. *Kedua* Huberman *Inovasi* merupakan proses kreatif dalam memilih, mengorganisasikan dan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya material dengan cara-cara baru atau unit yang akan menghasilkan pencapaian lebih tinggi yang telah ditetapkan. *Ketiga* Schumpeter Menurutnya *Inovasi* merupakan kreasi dan mengimplementasikan sesuatu menjadi satu kombinasi, dapat menambah nilai produk pelayanan proses kerja, pemasaran, sistem pengirinan, dan kebijakan, tidak hanya bagi perusahaan tetapi *Stakeholder* dan masyarakat.⁴¹⁵

Dalam pengertian yang lain terkait dengan Inovasi adalah aktivitas penelitian pengembangan atau rekayasa yang bertujuan untuk mengembangkan aplikasi praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.⁴¹⁶ Dengan demikian dapat dipahami dari definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut bahwa inovasi bermakna “Baru” merupakan sesuatu yang belum ada, dimengerti, diterima/dilakukan oleh penerima inovasi, “Baru” disini sipatnya kualitatif hal ini dikemukakan oleh M. Rogers “*The perceived newness of the idea for the individual determines his or her reaction to it if the idea seems to be new to the individual, it is an innovation.*”⁴¹⁷ “Kesenjangan” berinovasi dilakukan secara sengaja dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Kemudian “Terprogram” *Inovasi* dirancang, disusun secara sistematis dan terstruktur, dengan tujuan yang jelas. Lemahnya struktur pendukung, kurangnya proses konsultatif, pendekatan secara *Holistik* serta tidak adanya evaluasi dan

⁴¹⁵ De Jong J.PJ & D.N. Den Hartog, *Determinanten van innovatief gedrag: een onderzoek onder kenniswerkers in het MKB (Determinants of innovation behaviour; an investigation among knowledge worker in SMEs) Gedrag & Organistie 18 (5) 235-259, 2005 Diakses dari Ondernemerschap pantenial/pdf-ez/h200820 pdf. Senen 27 April 2020 pukul 11.00 WIB*

⁴¹⁶ Undang-undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2002, Sistem Nasional Pendidikan, Pengembang dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

⁴¹⁷ Udin Syaefuddin Su'ud. *Inovasi Pendidikan*. cetakan ke tujuh. Penerbit Alfabeta Bandung. 2014 hlm 4

perbaikan akan merusak proses, ⁴¹⁸ penerapan *inovasi* dilembaga pendidikan, termasuk juga di sektor perekonomian paling tidak ada tiga hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif, diantaranya *Pertama, Kreativitas Kedua, Inovasi Ketiga, Penemuan (Invention)*. Kreativitas tersebut merupakan sumber daya terbarukan dan tidak akan ada habis-habisnya jikalau sumber daya manusia berkreasi dan menciptakan nilai tambah serta didukung oleh kondisi yang aman. Kreativitas merupakan suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari sebelumnya baik berupa gagasan atau karyanyata dengan menggabungkan unsur-unsur yang ada sebelumnya, hal baru di sini merupakan sesuatu yang belum diketahui oleh yang bersangkutan (Masyarakat sekitar) meskipun hal baru tersebut tidak asing bagi orang lain dan bukan hanya dari yang tidak menjadi ada tetapi kombinasi baru dari sesuatu yang sudah ada.

Oleh karenanya kita harus dapat menjadikan pemahaman masyarakat mendapatkan Pemahaman baru, berimajinasi, berinisiatif penuh semangat berani mengambil resiko dalam mengungkapkan pendapatnya. ⁴¹⁹ Kreativitas merupakan faktor utama dalam terciptanya inovasi baru menghasilkan ide baru yang dapat melalui proses *Inkubasi* atau pengamatan secara langsung dari lembaga lainnya. ⁴²⁰ Adanya inovasi dan dibarengi dengan kreativitas maka akan mendorong peningkatan produktivitas yang bernilai jual tinggi. Dengan demikian dalam mewujudkan ekonomi kreatif yang di inginkan adalah berinovasi dan berkreasi yang tinggi sangat dibutuhkan. Berinovasi dapat diartikan sebagai suatu perubahan yang sipatnya khusus (*Spesifiks*) yang mengandung kebaruan (*Novel*) disengaja melalui program yang direncanakan terlebih dahulu (*Planned and deliberate*) dan dirancang untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui suatu sistem tertentu (*Goals of the system*).⁴²¹ Ekonomi kreatif sudah menjadi penting

⁴¹⁸ Alffret Otara. *Innovation A Strategy for Survival of Education Organization Jurnal Internasional Volume 2 No 9 September 2012*. di akses dari www.ajcrnet.com/Journal/vol2no9_september..2012.pdf Minggu 29 Pebruari 2016 pk 23.00

⁴¹⁹ Aldy Purnomo. *Rahmat Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia*. Surakarta Ziyad Visi Media 2016 hlm 48

⁴²⁰ Manajemen Mutu. *Sekolah Strategi Peningkatan Mutu dan Daya saing Lembaga Pendidikan Islam*. Penerbit Ar-Ruzz Media 2013 hlm 206

⁴²¹ Matthew.B. Milles. *innovation in Education Teacher Coliege Press Colombia University New York 1973* hlm 14.

karena bersumber pada kreatifitas yang menjadi sumber daya terbarukan. Di masa akan datang peran ekonomi kreatif semakin penting terutama saat sumber daya tidak terbarukan semakin terbatas. Kreativitas akan terus merubah paradigma perekonomian yang biasa terpusat pada keterbatasan (*Scarcity*) menjadi berpusat pada keberlimpahan (*Abundancy*). Menurut Mile sebagaimana dikemukakan Hasibuan proses perubahan tersebut berkaitan dengan pengembangan (*Development*), penyebaran secara spontan (*Diffusion*), penyebaran yang terarah dan teratur (*Diseminasi*) perencanaan (*Planning*), adopsi (*Adoption*) penerapan (*Implementation*) dan evaluasi (*Evaluation*).⁴²²

Ekonomi kreatif menjadi salah satu konsep untuk mengembangkan perekonomian dan menjadi model ide dan talenta dari rakyat agar dapat berinovasi untuk menciptakan produk baru. Cara berfikir kreatif sangat dibutuhkan untuk tetap tumbuh berkembang dan bertahan di masa akan datang. Tumbuhnya industri kreatif disebabkan adanya krisis global sehingga memunculkan semangat untuk berkreasi menciptakan dan menginovasi sesuatu dalam menciptakan ide-ide dan karya-karya baru. Menurut Arief Johari pertumbuhan industri kreatif yang baik belum mampu memberikan pengaruh positif dan signifikan salah satu penyebabnya adalah manajemen problem yaitu suatu pemikiran yang menyebabkan adanya pemikiran sebuah produk yang dihasilkan hanya untuk konsumsi sendiri.⁴²³

Dalam konteks industri kreatif pemerintah mulai mengembangkan industri kreatif melalui kebijakan berupa instruksi presiden No. 6 tahun 2009. Kebijakan dilakukan dalam rangka menggerakkan dan menstimulus industri kecil melalui kebijakan industri kreatif. Dengan adanya perubahan pemerintahan dari Kemenbudpar menjadi kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif (Kemenparekraf) ditandai dengan terbitnya Perpres No. 92 thn 2011 memberi ruang kepada industri kecil untuk mengembangkan industri kreatif. Menurut

⁴²² Kementerian Agama Sumut .<https://www.Sumut.Kemenag.go.id> diakses pada hari Senin 27 April 2020 pukul 11.00

⁴²³ Arief Johari. *Globalisasi dan Dampak Desain Serta Relasinya Terhadap Industri Kreatif* Magister Desain Institut Teknologi Bandung. 27111006

Jhon Howkins (2001) dalam makalah Reanse Usman mendefinisikan ekonomi kreatif merupakan ekonomi menjadikan kreativitas, budaya, warisan budaya dan lingkungan sebagai tumpuan masa depan mengingat manusia senantiasa hidup dalam kreasi untuk mencipta itu melalui ide-ide, pandangan ini tidak terlepas dari indikator penciptaan kebudayaan.⁴²⁴

Hal ini senada dengan pandangan Geertz (2010) Mengatakan bahwa kebudayaan sebagai sekumpulan ide dalam proses kreatif dari akal budi yang diwariskan kemudian mewarnai kehidupan sebuah kemasyarakatan yang mana kebudayaan akan menciptakan tata nilai kehidupan manusia dan manusia akan membentuk Inovasi untuk melahirkan kebudayaan yang bermartabat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kreativitas manusia yang mampu menciptakan budaya dan dengan kreativitas manusia dapat mempertahankan kebudayaan. kedua masalah ini Akan membentuk suatu nilai ekonomis yang mampu mengembangkan budaya warisan lokal yang melekat pada dirinya. Pengembangan nilai ekonomi melalui industri kreatif berbasis pada kebudayaan lokal akan menjadi kekuatan yang melakat secara turun-temurun serta basis ekonomi akan semakin kuat.⁴²⁵

Dalam konteks Kesultanan Palembang sebagian besar wilayahnya terdiri dari dataran rendah. Kondisi yang demikian tidak memungkinkan penduduknya untuk bertani dan mengumpulkan hasil hutan. Itulah sebabnya mereka beinovasi dengan mengembangkan industri kerajinan sebagai bentuk dari ekonomi produktif. Industri kerajinan rumah tangga Kesultanan Palembang yang tidak kalah pentingnya adalah industri kerajinan menenun, menyulam menganyam tikat dan pengrajin rotan. Hampir setiap ibu rumah tangga dan wanita pada umumnya memiliki keterampilan menenun dan menyulam (*Bordir*), yaitu dengan alat-alat tradisional mereka menenun. Kain songket dalam berbagai corak seperti kain songket pilir,

⁴²⁴ Rianse Usman. *Peran Pemerintahan dan Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Lokal*. Makalah Seminar Nasional 2003 hlm 795

⁴²⁵ Clifford Geertz. *Biographical Memories Proceeding Of The American Philosophical Society* 2010 vol 145 no 1

kain songket bungamas, kain songket bunga china, kain songket lepus dan kain songket cukitan.⁴²⁶

Industri kerajinan rumah tangga berupa kain songket yang dikerjakan secara tradisional ini apakah bahan bakunya berasal dari benang emas dan perak, dikenal dengan nama “Songket Palembang.” Disamping itu dikenal pula dengan nama “kain tajung” yang berasal dari benang sutera-katun. Mengingat proses pembuatannya dikerjakan tangan dan memakan waktu yang cukup lama, maka tidak mengherankan apabila harganya cukup mahal dan hanya dapat di jangkau oleh golongan masyarakat kelas menengah tertentu. Begitu pula mengenai sulama-sulaman yang dikerjakan oleh gadis-gadis maupun hasil pekerjaan tangan yang sangat menarik. Para ibu-ibu yang sudah lanjut usianya, untuk mengisi waktu kosongnya mereka menganyam tikar batang padi dengan membuat bakul, membuat tikar dari anyaman purun dan sebagainya.⁴²⁷ Di samping itu para pengrajin ini mereka juga ahli dalam mengolah perak, permata dan gading. Sementara keahlian yang lain mereka juga ada sebagai pesulap, pelukis, tukang kayu dan tukang batu, pembuat sepatu dan pembuat perahu.

Golongan kaum laki-laki yang memiliki modal yang secukupnya mereka dapat pula berinvestasi dengan mendirikan semacam industri perahu-perahu tambangan, yaitu suatu alat transportasi sungai untuk disewakan pada orang miji atau senan yang dikenal dengan “Tukang tambangan”. Transportasi tambangan-tambangan ini merupakan baca air yang sangat penting artinya bagi penduduk kota untuk bepergian mengunjungi keluarga yang berada di dalam kota karena biaya transportasinya relatif lebih murah. Kalau melihat kondisi dan letak kota berada dua meter berada diatas permukaan laut dan sebagian besar terdiri dari daerah rawa-rawa dengan anak sungai yang cukup banyak, maka secara fisik kota ini memiliki

⁴²⁶ Makmun Abdullah dan kawan-kawan. *Kota Palembang sebagai Kota Dagang dan kota Industri*, Departemen pendidikan dan kebudayaan direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1984-1985. Milik Dekdikbut tidak diperdagangkan Jakarta 1984 hlm 97

⁴²⁷ Kementrian Penerangan Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan Palembang 1954 hlm412 lihat JL Van Sevenhoven Op-cit hlm 36 Interviu dengan Kepala Sejarah Militer Kodam IV Sriwijaya (Overste A Mukti) Palembang Agustus 1982 dalam Makmun Abdullah. 1984.

lalu lintas air yang sangat ramai.⁴²⁸ Kesibukan lalu lintas transportasi air yang menggunakan perahu-perahu tambangan masih terasa penting setelah berakhirnya “Revolusi fisik” di daerah ini.

Akan tetapi setelah dibangunnya jembatan “Ampera” yang menghubungkan daerah Ilir dan Ulu maka transportasi menggunakan perahu tambangan semakin berkurang. Dalam hal sumber daya alam yang dimiliki daerah ini tidak hanya terbatas pada hasil produksi hutan industri dan perkebunan saja, daerah ini juga secara potensial telah banyak menghasilkan bahan mineral yang memberikan keuntungan besar bagi pemerintah kolonialis; seperti industri tambang timah di Bangka dan Belitung tambang batu bara Bukit Asam di Tanjung Enim dan beberapa sumber minyak yang kemudian berdirilah industri *Sell Oil Company* di dalam tahun 1907 yang memiliki industri penyulingan minyak di Plaju dengan nama *Battafasche Patroleum Mij*.⁴²⁹

Sementara para kaum perempuan pada umumnya membuat bahan pakaian sendiri juga membuat sarung, penutup kepala serta pakai yang lainnya dengan menggunakan katun Eropa atau seni katun yang dihiasi dengan berbagai motif bunga dan lainnya. Hasil produksi mereka sangat menonjol karena sangat berkualitas baik dilihat dari warna maupun Kelahannya. Para pengrajin Palembang sangat terkenal keahlian menenun baju dan kopiah Arab dengan benang emas, pelet dan bordir. Contohnya jenis trawangan dan katun putih sulam cat yang sangat Indah bahkan benang yang sangat indah dari Padang dan bagian Sumatera lainnya dibuat di Palembang. Disamping itu di daerah Pedalaman juga terdapat kerajinan katun bahan dan cara pembuatannya masih kasar tetapi kuat.⁴³⁰

Dengan demikian dapat dipahami bahwa penduduk Palembang dikenal sebagai pekerja-pekerja tangan yang ulet

⁴²⁸ H.C Zentraaf & W.A. Van Goudever Sumatraantjes's s-Gravenhage Uitgeverij W Van Hoeve 1947 hlm 28 dalam Makmun Abdullah. *Kota Palembang Sebagai Kota Dagang dan Indurtri*, 1984 hlm. 98.

⁴²⁹ Kementerian Penerangan Republik Indonesia Propensi Sumatera Selatan Palembang 1954 hlm 395. Bandingkan dengan D. G Stibble Of-cit hlm 1189. dalam Makmun Abdullah *Palembang sebagai Kota Dagang dan Industri* 1984. hlm. 98.

⁴³⁰ ANRI Bundel Palembang No. 62:2 Veth 1867. 654 dalam Farida R Wargadalam. *Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konfliks 1804-1825*. Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia Jakarta 2017 hlm 30

teknik dan sangat teliti dan cara mereka mengerjakan kerajinan Pertukangan kayu dikerjakan begitu sempurna sehingga ahli-ahli bangunan mengatakan bahwa mereka menyukai dan menghubungkan-hubungkan berbagai bagian dengan perhitungan berdasarkan keahlian serta kekokohan dan ketepatan hubungan itu tidak dapat diperbaiki bahkan oleh pekerja tangan bangsa Eropa sekalipun.⁴³¹ Pekerja pengrajin gading mereka buat dengan Indah dan membuat semua bentuk sampai-sampai bola bilyard mereka pahat pada semua gambar yang diberikan. Berkaitan dengan pekerjaan tembaga dan besi mereka kerjakan dengan sangat baik, mengecor meriam-meriam dari tembaga dan pekerjaan apa saja yang diberikan kepada mereka di situ dibuat dengan sempurna. Industri kerajinan, senapan-senapan, pedang dan keris dibuat dengan sangat baik dan kedua benda terakhir ini bahkan lebih disukai dari pada yang berasal dari Jawa.⁴³²

Para pengrajin membuat alat rumah tangga dari timah dan ahli juga di bidang pekerjaan perak dan emas, terutama dalam membuat pahatan timbul, disamping itu juga mereka memproduksi obat bedil yang dinyatakan sangat baik oleh para ahli. Apa yang dibawa ke Kesultanan Palembang dan tidak merupakan suatu rahasia seni, karena struktur atau organisasinya pasti dapat ditiru. Perempuan-perempuan tidak kurang cerdas dalam pekerjaan tangan, sutra-sutra terbaik dan kain-kain yang di selingi dengan Benang emas dibuat di Kesultanan Palembang dan dikirim keluar daerah. Para pengrajin sangat pandai dalam menyulam, melukis berbagai bentuk dan bunga-bunga dari emas di atas kain sutra dan katun.⁴³³ Aktivitas para pengrajin dalam konteks kekinian dikenal dengan industri kreatif. Untuk menumbuhkan ekonomi produktif disektor industri kreatif yang dikembangkan di Kesultanan Palembang sudah ada masa kesultanan adalah Industri kerajinan berbasis budaya Melayu yaitu memanfaatkan

⁴³¹ Melihat kondisi sekarang ini, mereka mungkin penduduk yang berasal dari daerah Tanjung Atap Tanjung Batu setidaknya dari Marga Tanjung Batu.

⁴³² Salman Aly. *Sejarah Kesultanan Palembang* dalam KHO Gajahnata *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. Penerbit Universitas Indonesia (UI) Press Jakarta 1986 hlm 158.

⁴³³ Salman Aly. *Sejarah Kesultanan Palembang* dalam KHO Gajahnata *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. Universitas Indonesia Press Jakarta 1986 hlm 158

dan mengembangkan produk budaya menjadi produk ekonomi bernilai komersial berorientasi pasar dan menjanjikan para pengrajin beberapa Industri kerajinan tersebut berupa batik dan Tenun Songket.⁴³⁴

Aktivitas tersebut sudah lama ditekuni oleh masyarakat Melayu dan sudah mengena industri membuat kain tenun secara tradisional.⁴³⁵ Songket merupakan jenis kain tenun tradisional Melayu di Indonesia Malaysia, dan Brunai Darussalam. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa di dalam waktu yang senggang bagi perempuan baik secara sendiri maupun kelompok (*Collectief*) mengisi waktunya dengan pekerjaan menurut bakat dan selera (*Hobby*) masing-masing dilapangan seperti menenu, menyulam, merenda, Songket atau mengukir dan membuat minuman dari sari buah dan makanan.⁴³⁶ Diantara kegemaran yang paling utama bagi perempuan-perempuan adalah menyongket dasar yang digunakan untuk menenu kain songket benang sutera yang ditenun dengan benang emas benang-demi benang. Di dalam setiap usaha pembangunan maka pekerjaan yang paling penting, dan biasanya karena pentingnya itu juga yang paling sulit, adalah pekerjaan perencanaan, apabila perencanaan itu sudah matang maka pelaksanaannya berjakan dengan lancar.⁴³⁷

Begitu juga dengan aktivitas menyongket ini benar-benar dicukit benang demi benang menurut corak dan motif-motif dan jenis macamnya sesuai dengan tujuannya. Penyusunan dan penyukitan inilah yang menghendaki karena ada rasa seni dan ketekunan dalam mengambil dan memanfaatkan waktu. Penyusunan penyukitan inilah yang dinamakan Songket dalam bahasa aslinya adalah *design* atau perencanaan. Apabila penyusunan dan perencanaan ini selesai, maka setiap orang dapat menenunya hingga selesai atau dengan kata lain tidak

⁴³⁴ Siti Heidi Karmela. *Batik dan Tenun Cerminkan Budaya Melayu bagian dari Ekonomi dan Industri Kreatif di Kota Jambi*. Jurnal ilmiah Universitas Batang Hari Jambi Vol 15 No. 4 thn 2015 hlm 153

⁴³⁵ Fadlin bin Muhammad Dja'far. *Budaya Melayu Sumatera Utara dan Enkulaturasinya* (Medan : tt) hlm 14

⁴³⁶ R.H.A. Akib. *Sejarah dan Kebudayaan Palembang Buku Pertama Tentang Rumah Adat Palembang. Perencana Miniatur Indonesia "Indonesia Indah"* Sumatera Selatan 1996 hlm 63

⁴³⁷ R.H.A. Akib. *Sejarah dan Kebudayaan Palembang Buku Pertama Tentang Rumah Adat Palembang Perencana Miniatur Indonesia "Indonesia Indah"* Sumatra Selatan 1996. hlm. 63-64.

memerlukan keahlian dan kesenian lagi.⁴³⁸ Dengan kata lain arti songket secara resmi belum diketemukan namun ada beberapa sumber yang dapat dijadikan rujukan bahwa songket berasal dari istilah *Sungkit* dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia yang berarti *Mengait* dan *Mencungkil*. Dengan demikian asal pengertian songket ini ada kaitannya dengan metode pembuatannya, yaitu mengaitkan, menyongket dan mengambil sejempit kain tenun, kemudian menyelipkan benang emas, perak dan benang logam metalik, sehingga yang tertenen berlatar kain menimbulkan efek kemilau cemerlang.⁴³⁹

Kerajinan songket ini memiliki jenis-jenis dan itu dapat dibedakan menurut motif-motif dan komposisi keseluruhannya termasuk warnanya. Diantara beberapa jenis dan motif-motif yang paling utama yang kita kenal adalah *Pertama*, songket benang emas lepus dan berwarna warni *Kedua*, songket benang biasa *Ketiga*, songket Janda barhias (hijau, kuning, merah) *Keempat* songket benang emas lepus pengantin (hijau, merah) *Kelima*, bunga Intan, *Keenam*, tretes midar *Ketujuh*, pulir biru *Kedelapan*, kembang siku hijau *Kesembilan*, bunga China (spesil pakaian untuk wanita Tionghoa) *Kesepuluh*, bunga paceik (pakaian khas wanita Arab dalam upacara adat) dan banyak lagi yang lainnya, begitu juga selendang dan ikat-ikat tanjak seperti kemben benang khas limar angkinan bersulam.⁴⁴⁰ Ikat-ikat limar Mentok berkandang dan lain-lain menjadilah keahlian menenun songket benang emas ini suatu keagungan tiap keluarga dan kesibukan kaum perempuannya terutama para gadis-gadis, dan suatu rumah tangga yang menjadi incaran para pemuda, karena suara tenun menandakan bahwa disitu berada gadis yang terhormat.

Dalam konteks pembuatan songket para pekerja memandang usaha sebagai budaya warisan nenek moyang (budaya Melayu) di mana produksi hasil tenun merupakan hasil seni kerajinan (Karya seni) yang sangat dibanggakan dan perlu

⁴³⁸ R.H.A. Akib *Sejarah dan kebudayaan Palembang Buku Pertama Tentang Rumah Adat Palembang Perancang Miniatur Indonesia "Indonesia Indah"* Sumatera selatan 1996 ,hlm 64.

⁴³⁹ Syarofie. *Songket Palembang Nilai filosofi Jejak Sejarah, dan Tradisi*. Palembang. Dinas Nasional Provinsi Sumatera Selatan, 2007 hlm 2.

⁴⁴⁰ R.H.M. Akib *Sejarah dan Kenbudayaan Palembang Buku Pertama Tentang Rumah Adat Limas Palembang Perencana Miniatur Indonesia "Indonesia Indah"* Sumatera Selatan 1996 hlm 64.

dilestarikan secara terus-menerus. Kalau diperhatikan dari aspek upah orang Melayu kurang terbuka untuk mengungkapkan besaran upah yang akan diterimanya. Bahkan ketika ditanyakan nominal upah yang akan diterimanya mereka tidak mau mengungkapkannya. Oleh sebab itu orang Melayu tidak pernah meminta kenaikan upah dan akan menerima berapa saja upah yang diberikan oleh pemilik sentra produksi songket. Kondisi seperti ini dapat dimanfaatkan oleh dan menjadi ruang bagi pemilik sentra produksi songket yang tidak memiliki cara pandang kemelayuan untuk mengeksploitir tenaga para pekerja songket dalam memperoleh keuntungan yang lebih besar. Akan tetapi dari sudut pandang yang lain para pengusaha memandang usaha kerajinan songket ini sebagai budaya Melayu.⁴⁴¹

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dari aspek “*Penetapan Upah*” para pekerja kerajinan songket tidak mencerminkan nilai-nilai kemelayuan. Justru yang terlihat jelas dalam praktiknya secara konvensional di mana usah kerajinan songket ini merupakan peluang bisnis “*Economic Oriented*” motivasinya muncul didorong oleh kebutuhan ekonomi. Disamping itu dalam penetapan Upah tidak didasari pada nilai-nilai Islam yang mengajarkan untuk memberikan upah yang sesuai dengan kondisi pasar. Para pengusaha yang berfikir menetapkan upah secara konvensional akan berhadapan dengan pekerja dengan orientasi Kemelayuan. hal ini ada kemungkinan kuat bahwa para pengusaha akan mendapatkan keuntungan yang besar dikarenakan para pekerja tidak banyak menuntut persoalan upah. Sehingga para pengusaha dapat memperoleh keuntungan yang tinggi dalam hal ini pengusaha semakin kaya sementara para pekerja sekadar cukup makan. Inilah yang membuat terjadinya ketimpangan pendapatan terlalu jauh antara pengusaha dan pekerja pada kasus usaha industri kerajinan Songket Palembang.⁴⁴²

Kerajinan tenun songket merupakan salah satu contoh kekhasan industri kerajinan budaya Melayu. Usaha kerajinan

⁴⁴¹ Antoni. *Upah dan Etos Kerja pada Kasus Usaha Songket Palembang dalam Perspektif Islam dan Melayu* Disertasi Program doktor S3 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2017 hlm 265

⁴⁴² Antoni *Upah dan Etos Kerja pada Kasus Usaha Songket Palembang dalam Perspektif Islam Melayu*. Disertasi Program Doktor S3 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2017 hlm 266.

songket Palembang memiliki problem diantaranya diperlihatkan beberapa kasus yang berkenaan dengan proses dan hasil efisiensi kerja seperti tingkat produktivitas Perajin Songket Palembang masih rendah, aktivitas usaha yang belum menunjukkan efisiensi dan efektifitas, kebijakan-kebijakan efisiensi internal antara pengrajin dan perajin belum bernilai keadilan, motivasi para pengrajin dan perajin berdaya konsumtif bukan produktif yang pada akhirnya membentuk rendahnya kreativitas perajin dan bantuan kemitraan yang belum berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan, serta jaringan pemasaran yang rendah disebabkan tidak jelasnya peta penjualan secara efisien dan efektif.⁴⁴³

Menurut Tiner Prilia lebih jelas mengatakan bahwa rendahnya manajemen terutama ketegasan dalam membuat keputusan yang berkenaan dengan peningkatan produktivitas dan kualitas songket, kendala pemasaran, sulitnya bahan baku, kalah persaingan akibat rendahnya kreativitas.⁴⁴⁴ Keterbatasan modal merupakan salah satu hal yang sangat mempengaruhi upaya peningkatan kesejahteraan keluarga. Keterbatasan biaya ini meliputi kurangnya modal usaha untuk melakukan kegiatan produksi, kurangnya upah yang diperoleh dari hasil bekerja sebagai pengrajin tenun kemudian terjadi tumpang tindih antara waktu untuk bekerja dan memproduksi barang dengan waktu untuk mengurus urusan rumah tangga.

Disamping itu kerajinan songket yang dihasilkan tidak hanya menjadi produk budaya Melayu semata akan tetapi telah berubah menjadi Produk ekonomi dengan melakukan diversifikasi produk yang mengandalkan kreatifitas dengan jiwa inovatif sehingga produk yang dihasilkan pengrajin menjadi bagian dari sektor industri kreatif hal ini dikarenakan seiring dengan perkembangan zaman menyebabkan produk kerajinan tersebut tidak dapat menolak arus Globalisasi yang menuntut pengrajin harus ekstra kerja keras untuk mensejahterakan

⁴⁴³ Heri Junaidi. *Ekonomi Masyarakat Melayu dan Pengembangan Usaha Mikro*. Proceeding International Seminar Malay Islamic Civilization Tradition And Contribution To The Development Of Islam At South Asia In Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2015 hlm 169

⁴⁴⁴ Heri Junaidi *Ekonomi Masyarakat Melayu dan Pengembangan Usaha Mikro*. Proceeding Internasional Seminar Malay Islamic Civilization Tradition and Contribution to the Development of Islam at South Asia in Raden Fatah Palembang . 2015 hlm 170

dirinya dengan cara menjadikan kerajinan yang dibuat merupakan bagian dari salah satu sub sektor industri berbasis kreativitas.⁴⁴⁵ Di Palembang berdasarkan Pemetaan industri kreatif Produk budaya Melayu Produk ekonomi dengan banyak memproduksi kerajinan songket Palembang dengan berbagai motif dan pemasarannya tidak saja ditingkat lokal nasional hingga ke internasional kerajinan tenun ini telah mengalami perubahan fungsi dari produk budaya menjadi produk ekonomi.

⁴⁴⁵ Heri Junaidi. *Ekonomi Masyarakat Melayu dan Pengembangan Usaha Mikro*. Proceeding International Seminar Malay Islamic Civilization Tardition and Contribution to the Develovment of Islam at South Asia in Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2015 hlm 171



BAB IV

EKONOMI POLITIK KESULTANAN PALEMBANG ABAD KE XVII DAN XIX

A. Struktur Politik Ekonomi

Struktur Politik dan ekonomi Kesultanan Palembang dikatakan tidak terlalu jauh berbeda dengan struktur politik dan ekonomi pemerintahan tradisional yang ada di daerah Jawa. Dalam hal ini dapat dikemukakan oleh B. J.O Schrieke :

“Kerajaan-kerajaan Melayu yang kecil-kecil terletak di pantai-pantai lama maupun yang baru pada abad-abad yang lalu umumnya berorientasi ke pulau Jawa secara periodik berbakti dan mempersembahkan upetinya untuk raja Jawa. Oleh karena itu, lembaga-lembaga Jawa kerap kali secara sadar ditiru di negeri sendiri untuk mengindentifikasikan dirinya dengan penguasa-penguasa yang tertinggi dan agar mendapatkan kebesaran dan baru karenanya. Merupakan ciri khas bahwa keluarga-keluarga raja biasanya berdarah campuran, mereka bercampur dengan unsur Jawa atau Bugis.”⁴⁴⁶

Pada awal Pemerintahan Kesultanan Palembang memerintah dengan sikap kompromistis dengan penduduk yang ada di daerah pedalaman konsep pemerintahan tradisional Jawa ini hanya berlaku di pusat pemerintahan yaitu Ibukota sebagai negara agung, sementara di luar ibukota apa yang disebut “Manca Negara” diatur berdasarkan sikap kompromi atau Status Quo. Akan tetapi ada beberapa daerah yang paling lemah dan dekat dengan ibukota menjadi kekuasaan langsung penguasa tertinggi Kesultanan Palembang. Pendekatan ke daerah-daerah di luar Kesultanan Palembang dapat dilakukan melalui lembaga perkawinan. Menurut Sultan Abdurrahman perkawinannya

⁴⁴⁶ B.J.O. Schrieke. *Penguasa-penguasa Pribumi*. dalam Djohan Hanafiah Kuto Gawang Penerbit Bharata Jakarta. 1974. hlm 6

dengan putri penguasa Bangka, mendapat warisan kepulauan Bangka.

Perkembangan politik terhadap kekuasaan Kesultanan Palembang ini dapat di bandingkan dengan apa yang telah ditulis oleh B.J.O. Schrieke

“Kehidupan hukum masyarakat yang ada di bawah kekuasaan sultan biasanya berjalan sesuai dengan adat kebiasaan masing-masing. Akan tetapi kadang-kadang mereka terdesak sampai tergusur, disisi lain tempat konsentrasi hukumnya mengalami perubahan (transformasi) hak ulayat kepala-kepala rakyat yang telah turun-temurun. Contohnya tetap berlaku seperti semula akan tetapi selanjutnya di jelaskan seolah-olah didasarkan atas satu karunia dari sultan”.⁴⁴⁷

Sikap kompromi dan Status Quo penguasa Kesultanan Palembang tercermin pada peraturan penguasa kesultanan yang dikenal dengan undang-undang “Simbur Cahaya.” Undang-undang itu sendiri dibuat oleh Ratu Sinuhun yang merupakan istri Pangeran Sade Ing Kenayan. Undang-undang Simbur Cahaya ini sekedar pedoman dalam hidup bermasyarakat bukan dimaksudkan untuk dijadikan hukum positif. Substansi atau isi dari Simbur Cahaya ini lebih banyak mengatur tentang pergaulan sosial masyarakat yang ada di daerah pedalaman. Menurut pemahaman dan penilaian J.W. Van Royen dalam karyanya (*De Palembangsehe en Haur en Waterrechten*) mengatakan sultan-sultan tidak bisa berbuat lain dari pada mengukuhkan (*Vastlengen*) hukum adat yang berlaku.⁴⁴⁸ Berupa Undang-undang Simbur Cahaya tersebut.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sikap-sikap penguasa Kesultanan Palembang ini dengan jelas tergambar dalam pernyataan. P. De Roo de la faille. Orang Pasemah bukan semata-mata orang bawahan mereka lebih merupakan kawan-kawan seperjuangan dari sultan yang dilindunginya, meskipun pada fakta nya mereka seperti terbukti dari Piagam Susuhunan Ratu, yang telah menerima penjagaan batas

⁴⁴⁷ B. J. O. Schrieke. 1974 hlm 29 dalam Djohan Hanafi. *Kuto Gawang Pergolakan dan Permainan Politik dalam Kelahiran Sultan Palembang Darussalam*. Penerbit Retno Purwati Personal Collection Palembang 1987

⁴⁴⁸ Djohan Hanafiah. *Kota Gawang Pergolakan dan Permainan Politik dalam Kelahiran Kesultanan Palembang Darussalam*. Penerbit Retno Purwanti Personal Collection Palembang. 1987 hlm 7.

(*Sindang*) sebagai tugas dan mengikat diri untuk mentaati beberapa peraturan yang menunjukkan kepada pengakuan dari pada kekuasaannya. Bukan hanya orang-orang Pasemah harus berurusan dengan kepalanya sendiri (tidak ada bukti adanya *Jenang-Jenang* dari sultan) akan tetapi mereka adalah benar-benar kepala rakyat yang tidak mempunyai kewajiban untuk membayar upeti.

Dalam menjalankan politik, ekonomi dan pemerintahan Kesultanan dibantu oleh Pejabat-pejabat negara yang biasa disebut empat Manca Negara, yakni Papatih pangeran nata diraja, Pangeran nata agama, Temenggung karta dan Pangeran citra.⁴⁴⁹ Papatih membantu sultan dalam melaksanakan perintah-perintahnya, Papatih inilah yang mengawasi pengumpulan pendapatan kesultanan, menerima laporan semua urusan pekerjaan, menyampaikan urusan terkait urusan semua pajak-pajak dan pekerjaan wajib bagi sultan, menguasai alat-alat perlengkapan perang memberikan nasehat dan pertimbangan kepada sultan terkait dengan kebijakan yang dibuatnya, sultan juga dibantu oleh Adipati atau putra mahkota yang memainkan peran sebagai penasehat langsung, wakil dan pengganti sultan manakala sultan sendiri berhalangan.⁴⁵⁰

Dalam kondisi perang, Pangeran Natadiraja dan jajarannya bertanggung Jawab untuk memobilisasi penduduk dari ibukota hingga ke uluan. Tumenggung Karta membawahi empat pegawai yang bertanggung Jawab dibidangnya masing-masing, yaitu Tumenggung urusan administrasi, Ronggo urusan keluarga Istana, Demang menangani masalah keamanan dan pengaduan masyarakat dan Ngabehi/ingabehi bertugas sebagai mata-mata pemerintahan. Berkaitan dengan urusan keagamaan sultan dibantu oleh Pangeran penghulu nato agama umumnya berasal dari keluarga sultan tugas utamanya adalah melaksanakan upacara keagamaan di Masjid Agung, Penasehat sultan mengawasi perselisihan agama Pejabat dibawah Pangeran nato agama adalah penghulu-penghulu dan khatib. tugas mereka menangani masalah warisan, Perkawinan, Penceraian dan Peribadatan. Sementara itu Pangeran Citra bertindak

⁴⁴⁹ J.L Van Sevenhovem. *Lukisan tentang Ibu kota Palembang*. Penerbit Bhratara Jakarta 1971 hlm 14

⁴⁵⁰ J.L Van Sevenhoven. *Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang*. Penerbit Bhratara Jakarta 1971 hlm 15

sebagai kepala pengelolaan atau hulu balang sultan yang disertai tugas melakukan penjagaan keamanan Ibukota serta menjalankan eksekusi hukuman mati terhadap para terpidana.⁴⁵¹

Dalam bidang perekonomian dan perdagangan dipercayakan kepada *Syahbandar*. *Syahbandar* diberikan kepercayaan oleh sultan untuk menangani masalah Perekonomian dan perdagangan serta urusan keluar masuk komoditas di pelabuhan termasuk juga menangani masalah penting dibidang perdagangan, terkait perselisihan yang terjadi antara awak kapal atau perahu. Untuk menjalankan tugasnya *Syahbandar* membidangi perdagangan sistem *Tiban dan Tukon* dan bea cukai atas komoditas import tetap seperti Perak, Koin, Garam, Sutera, Benang emas selain para pegawai tersebut masih ada lagi pegawai-pegawai lain di Istana yang bertugas membantu dan memperlancar jalannya pemerintahan.⁴⁵²

Selain ke empat manca negara, ada pembantu sultan lainnya dari golongan pegawai yang dalam istilah setempat dinamakan *Raban dan Jenang*. Kedua istilah ini merujuk kepada orang-orang yang mengoreksi hak penguasaan atas dusun atau marga atas nama sultan. Dengan adanya hak yang dipercayakan oleh sultan tersebut *Raban dan Jenang*,⁴⁵³ merupakan figur yang mempunyai otoritas untuk mengumpulkan berbagai hasil produksi yang dihasilkan oleh marga atau dusun yang dikuasainya, menyelesaikan persoalan yang muncul di dalam berbagai kasus yang rumit dan tidak ditemukan jalan penyelesaiannya. Merekalah yang akan membawa persoalan tersebut kepada pepatih atau sultan. Melalui *Jenang atau Raban* pulalah semua perintah sultan disampaikan ke bawah kepada kepala marga atau dusun untuk kemudian ditindaklanjuti pelaksanaannya sebagaimana yang dikehendaki oleh sultan⁴⁵⁴.

⁴⁵¹ P.De Roo De La Faille. *Dari Zaman Kesultanan Palembang*. Penerbit Bharatara Jakarta 1971 hlm 32

⁴⁵² Java Government Gazetti, 2 Mei 1812 No 10 Van Sevenhoven 1971 25-29. Wouder 1975. 85 Masy. Thn 1983 42.44 Peeters 1997 : 11.12 dalam Farida Wargadalem. 2012

⁴⁵³ J.L Van Sevenhoven. *Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang*. Penerbit Bharatara Jakarta 1971. hlm 14.15

⁴⁵⁴ *Tiban dan Tukon* suatu bentuk dari barter barang antara Sultan dan para Depati di daerah Sindang. Sultan mengirim Garam, Kain, Panci besi, Obat-obatan, dan lain-lain yang didapat dari pedagang China dan Arab

Sebagaimana yang telah dikemukakan di awal bahwa daerah kepungutan merupakan wilayah kesultanan yang berada di pedalaman dan dipimpin oleh seorang *Raban dan Jenang* kemudian membawahi marga dan dusun semua persoalan menjadi tanggung Jawabnya, dalam pelaksanaan tugasnya *Raban dan Jenang* bertanggung jawab kepada Papatih. *Raban dan Jenang* merupakan jabatan perantara antara Sultan dan Pasirah (kepala marga) atau *Proatin* (kepala dusun) perintah sultan disampaikan melalui *Raban atau Jenang* dan mereka mendapatkan penghasilan dari pajak atau cukai beserta hasil bumi yang dikumpulkan setiap waktu oleh Pasirah dan *Proatin* kemudian disampaikan kepada Sultan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa *Raban dan Jenang* merupakan jabatan perantara antara pusat kesultanan dengan daerah pedalaman.

Sementara daerah *Sindang* merupakan daerah perbatasan dengan daerah *Kepungutan*. Daerah *Sindang* ini mengakui sultan akan tetapi mereka diberi kebebasan mengatur daerahnya sendiri. Daerah *Sindang* ini juga disebut daerah sekutu dan dipimpin oleh seorang Depati (Raja Kecil) yang bebas (*Vry Heren*) serta tidak dibebani pajak dan tidak pula membayar upeti akan tetapi berkewajiban melindungi wilayah-wilayah perbatasan kesultanan dari serbuan orang luar daerah.⁴⁵⁵ Baru kemudian diantara mereka diwajibkan *Tiban dan Tukon* sebagai tanda dari raja, salah satu daerah sindang yang terkenal adalah daerah Pasemah, hal ini ditegaskan P.De Roo de la faille bahwa orang Pasemah bukan semata-mata orang bawahan. Akan tetapi mereka lebih seperti kawan-kawan seperjuangan dari sultan yang dilindunginya meskipun mereka terbukti memiliki Piagam dari Susuhunan Ratu sebagai penerima penjagaan perbatasan (*Sindang*) sebagai tugas dan mengikat diri untuk mentaati beberapa peraturan yang menunjuk kepada pengakuan daripada kekuasaannya.⁴⁵⁶

Palembang. Selain itu depati mengirimkan Beras, Kapas, Damar, dan lain-lain kepada Sultan. Lihat P. De Roo de la Faille *Dari Zaman Kesultanan Palembang*, 1971. hlm 40

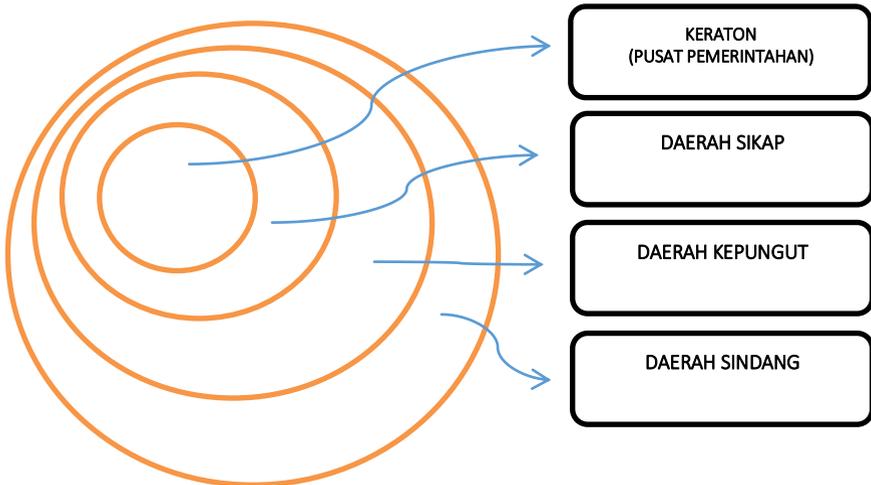
⁴⁵⁵ *Raban dan Jenang* merupakan gelar untuk jabatan yang sama/ ketika Kesultanan Palembang Perang melawan Belanda, berbagai daerah *Sindang* di minta bantuan tentaranya.

⁴⁵⁶ P. De Roo de La Faille. *Dari Zaman Kesultanan Palembang*. Penerbit Bhratara Jakarta 1971. hlm 40

Agar dapat memahami Struktur Wilayah pemerintahan Kesultanan Palembang dapat dilihat bagan sebagai berikut:

Bagan: 4.1.

Struktur Wilayah Pemerintahan Kesultanan Palembang



Daerah Sindang berarti perbatasan, merupakan kawasan yang disebut kawasan yang biasa disebut oleh masyarakat setempat sebagai kawasan Uluan. Wilayah Sindang meliputi Pasemah, Rejang, Ampat lawang, Kikim dan Kisam. Sedangkan daerah yang terletak di antara Lampung dan Palembang, Iiran yang termasuk kelompok Sindang Merdeka. Wilayah ini dikuasai oleh para pemimpin, lokal atau yang biasa disebut Pasirah atau bergelar Depati. Para Depati bertindak sebagai kepala kelompok masyarakat yang ke Sukuan dan Otonom. Depati berposisi bukan sebagai bawahan sultan, kekuasaan sultan dalam bentuk pemberlakuan hak-hak untuk melakukan pemungutan dan kerja wajib bagi Istana secara langsung kepada kelompok masyarakat di wilayah *Sindang* secara praktis tidak berlaku pada masyarakat *Sindang* diatur dengan perangkat hukum tersendiri yang dinamakan Undang-undang *Sindang Merdeka*.⁴⁵⁷ Undang-undang Sindang Merdeka merupakan perangkat hukum yang digunakan dalam menggerakkan roda pemerintahan di wilayah Sindang.

⁴⁵⁷ Mustika Zet. 2003. *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900- 1950*. Penerbit Pustaka LP3ES.Indonesia Jakarta. 2003 hlm 43-44

Para Depati dibantu oleh beberapa *Proatin* (anak buah) Baginda dan Kria tugas yang menjadi tanggung Jawab pelaksanaannya dipundak mereka adalah menjalankan roda Pemerintahan Peradilan dan memelihara adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat sindang. Kelompok-kelompok kesukuan masyarakat Sindang oleh sultan tidak dipandang sebagai bawahan atau kawula melainkan sebagai mitra yang membentuk hubungan *Patron Clie*n. Sultan bertindak sebagai *Patron Klien* (Pelindung) terhadap masyarakat *Sindang*, karena jasa mereka dalam menjaga keamanan daerah perbatasan (*Sindang*) sebagai bentuk timbal balik, sultan memberi mereka perlindungan dan jaminan atas pemenuhan kebutuhan hidup seperti: Garam, Kapas, dan Barang lainnya. Pengakuan atas pola hubungan yang bersifat kemitraan tersebut terungkap dalam pemberian persembahan kepada sultan sebagai tanda hormat, bukan sebagai Upeti dari bawahan.⁴⁵⁸

Dalam mengatur masalah teritorial yang terkait dengan hak dan kewajiban penduduk seperti daerah Pasemah di atas dikarenakan teritorial adalah perbatasan kerajaan yang disebut daerah *Sindang*, yang menyebabkan penduduknya mendapat status mardika (merdeka/bebas) dan tugas penduduk sebagai penjaga perbatasan. Sebaliknya penguasa Kesultanan Palembang mempunyai daerah yang langsung di bawah kekuasaannya disebut kepungut.⁴⁵⁹ Di wilayah *Kepungutan* terdapat kesatuan wilayah yang disebut dengan *Sikap*. Pembentukannya untuk memenuhi kebutuhan Istana *Sikap* merupakan dusun yang sebagian penduduknya mendapat tugas dari keraton. Pada waktu waktu tertentu mereka bekerja untuk kepentingan keraton, contohnya mengangkat hasil bumi dan menyediakan tenaga pendayung perahu keraton, menggarap sawah dan membangun rumah untuk sultan sebagai imbalannya mereka bebas membayar pajak.

Daerah yang bebas dari membayar pajak contohnya penduduk Belida Musi Ilir bekerja dalam keraton untuk mengambil air pada kurun waktu 1818-1819 M mereka

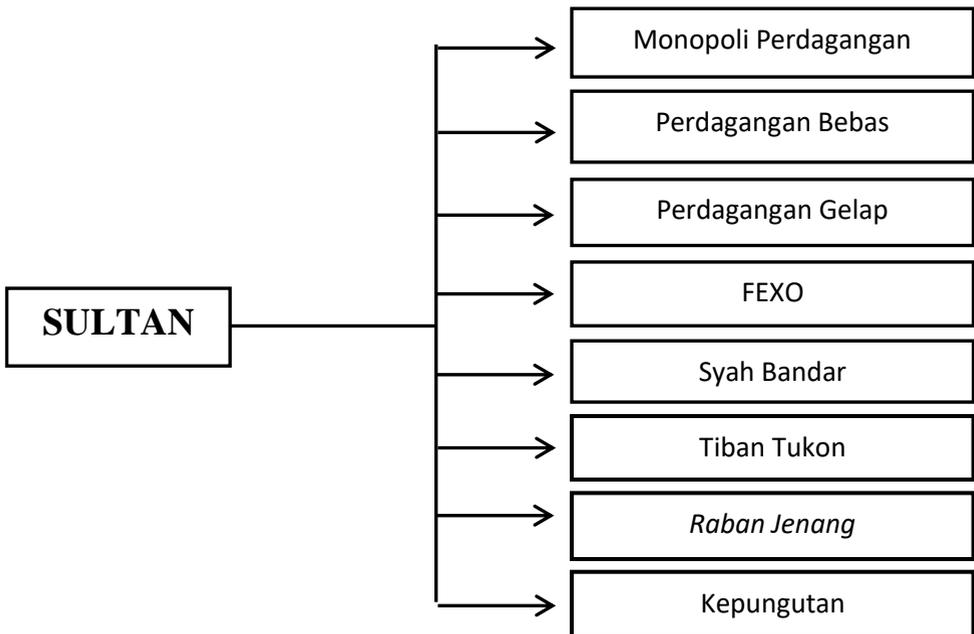
⁴⁵⁸ Farida R Wargadalem 2003. hlm 5. *Konflik Kepemimpinan Di Kesultanan Palembang*. Makalah Pada Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Oleh Pemuda Sumatera

⁴⁵⁹ Djohan Hanafiah. *Kuto Gawang Pergolakan dan Permainan Politik dalam Kelahiran Kesultanan Palembang Darussalam*. Penerbit Retno Purwanto Personal Colection Palembang 1981 hlm 9

berjumlah sekitar 500-600 orang. Sementara daerah lain yang termasuk ke dalam kelompok *Sikap* adalah Sungsang, Sukarami Musi Ulu dan daerah-daerah yang terdapat aliran-aliran sungai besar. Tugas mereka adalah mendayung perahu sultan, selain itu terdapat orang *Miji* orang yang disetorkan yaitu penduduk yang menyerahkan tenaganya untuk kepentingan sultan.⁴⁶⁰ Dari paparan tersebut dapat dipahami bahwa ada beberapa anggota masyarakat yang mempunyai kewajiban mengabdikan dirinya kepada sultan dan keluarganya pengabdian tersebut bukan merupakan beban bagi penduduk. Dalam hal ini disebabkan karena beban yang diberikan hanya kepada sebagian kecil penduduk pada waktu-waktu tertentu, juga pengabdian tersebut dikaitkan dengan bakti kepada sultan. Karena sultan adalah seorang *Khalifah* oleh karenanya bekerja untuk sultan merupakan “*Anugerah*” bagi mereka dan akan dapat “*Berkah*.”

Bagan : 4.2.

Struktur dan Pranata Perekonomian Kesultanan Palembang.



⁴⁶⁰ ANRI Bundel Palembang No. 62. 2 No 15. 7 No 47.6 Stuler 1855: 243 dalam Farida R. Wargadalem. Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia Jakarta. 2017. hlm 26

Terkait dengan Struktur Ekonomi Perdagangan diawal kedatangan Belanda di belahan Barat nusantara khususnya daerah Palembang, Jambi dan Siak merupakan daerah yang bebas dari monopoli perdagangan yang diperlakukan Aceh dan Banten, jadi praktek monopoli di Sumatera bagian Utara dipegang oleh Aceh sementara di Sumatera bagian selatan dipegang oleh Banten. Diantaranya terletak daerah yang tidak berada dibawah kekuasaan kedua kesultanan tersebut yaitu Palembang Jambi dan Siak. Sultan Banten berusaha mempengaruhi daerah ini akan tetapi tidak berhasil orang-orang Jawa, Tionghoa dan Eropa lebih suka memabeli lada didaerah itu karena disana mereka terlepas dari monopoli perdagangan Aceh dan Banten.⁴⁶¹ Kedudukan ini dipertegas oleh J.C Van leur Both were indeventent and orientend to Java rather to the Malay Panensula.⁴⁶²

Sebaliknya perekonomian dan perdagangan dalam negeri Palembang ini dikuasai sepenuhnya oleh golongan bangsawan Palembang seperti yang ditulis William Marsden dalam bukunya the History of Sumatera The interioer or upland distriction the contrary are very productive and there the papper is cultivate, which the king's agent (for trade in these part isusually monopolized by the sovereign power) purchases at a cheap he supplies the country people with opium, salt and piece goods.⁴⁶³ Selanjutnya perdagangan ini dilakukan oleh para kelompok elit Palembang itu di ibu kota kepada para pedagang asing, atau mereka sendiri mengirimkannya keluar, Seperti yang dikutip oleh Van Leur dari *Daghregister 167. In 1637 a Pangeran of Palembang sent ten picul of Papper (not quite a single ton) to Batavia in a junk going Concigned in the hand of one Chenese Celled Jucko.*⁴⁶⁴

Kurang jelas bagaimana dengan Kesultanan Palembang itu sendiri apakah dia terlibat langsung perdagangan seperti

⁴⁶¹ D.H. Burger dan Prajudi. *Sejarah Ekonomi dan Sosiologi Indonesia* J.B. Wolters. Penerbit PT Pradnya Pratama Jakarta 1957 hlm 62

⁴⁶² Van Leur J.C. *Indonesia Trade & Society* Penerbit Sumur Bandung. Bandung 1960 hlm 143

⁴⁶³ William Marsden. *The History of sumatera* .Penerbit Oxford University Press 1966 hlm 359

⁴⁶⁴ Van Leur JC *Indonesia Trade Society Perdagangan Masyarakat Indonesia Esay-esai tentang Sejarah Sosial dan Ekonomi Asia*. Penerbit Sumur Bandung. Bandung 1960 hlm 170

Sultan Iskandar Muda dari Aceh atau Sultan Banten. Akan tetapi yang pasti Penguasa Palembang ini mempunyai lembaga *Syahbandar* dan *Fexo* (yaitu kasir atau wakil sultan). P de Roo de la faille dalam bukunya “Dari Zaman Kesultanan Palembang” menjelaskan tergantung dari kecakapan yang mereka miliki, menjadi sumber uang Sultan dan karenanya mendapat kepercayaan Sultan, maka dihadiahkanlah salah satu pangkat diantara pembesar-pembesar keraton dan kekuasaan untuk memerintah distrik ini. Setelah mereka diangkat dalam jabatan ini tidak ada seorangpun yang berani menolaknya, semua yang mereka miliki sampai kepada isteri dan anak-anaknya menjadi biaya luar biasa dari Sultan.⁴⁶⁵

Terkait dengan lembaga *Syahbandar* menurut P de Roo de la Faille.⁴⁶⁶ Di Palembang *Syahbandar* sepanjang menyangkut kepentingan Sultan harus melindungi pedagang-pedagang dari gangguan rakyat, melancarkan perdagangan dan urusan mereka dan mengusahakan agar piutang mereka dibayar, dan juga menerima bea dari pedagang-pedagang itu. Akan tetapi menurut konterak tahun 1681 dan 1722 M, Pedagang-pedagang asing ada yang dibawah pemerintahan dan peradilan kepala tertinggi kompeni dan karenanya berhentilah hampir seluruh pengadilan lama yang dijalankan oleh *Syahbandar*. Sebetulnya lembaga *Syahbandar* merupakan bagian dari dunia perdagangan nusantara baik perdagangan antar daerah kesultanan maupun dengan negara-negara lain diluarnya, tidak terlepas dari aturan yang mengharuskan memabayar bea, Apabila perdagangan pada waktu itu merupakan monopoli kesultanan pelaksanaan pungutan bea cukai tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang diangkat seperti *Syahbandar* dan pejabat-pejabat dibawahnya.

Selain komoditas lada, komoditi perdagangan lain yang di eksport Palembang Menurut Marwati Djoened. Posponegoro dan Nugroho Notosusanto.⁴⁶⁷ “Budak-budak yang di export dari Palembang ke Malaka disamping Beras, Bawang putih dan Bawang merah, Daging, Arak, Hasil hutan, Madu, Damar, Katun dan sedikit Emas dan Besi banyak berasal dari Pedalaman.

⁴⁶⁵ De Roo De La Faille. *Dari Zaman Kesultanan Palembang*. Penerbit Bharata Jakarta 1971 hlm 35

⁴⁶⁶ De Roo De La Faille. *Dari Zaman Kesultanan Palembang*. Penerbit Bharata Jakarta 1971 hlm 36

⁴⁶⁷ Poesponegoro Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia. jilid tiga* Penerbit Balai Pustaka. Jakarta 1984 hlm 48

Sementara Palembang mengimport sebagaimana dikemukakan oleh William Marsden,⁴⁶⁸ Pelabuhannya sangat ramai dengan kapal-kapal kebanyakan dari Jawa, Madura, Bali dan Sulawesi yang membawa Beras, Garam, dan Pakaian yang dibuat oleh pulau-pulau tersebut. Candu dan barang pecah belah dari India, Komoditas dari Eropa ditawarkan oleh orang-orang Belanda dari Batavia ataupun perantaranya. Menurut Tome Pires (1512-1515 M) seorang penulis Portugis saat berkunjung ke Palembang mengatakan bahwa jumlah penduduk Palembang lebih kurang 10.000 orang. Tentunya seabad kemudian jumlah penduduk Palembang lebih banyak dari itu.⁴⁶⁹

Kalau diperhatikan warga kota Palembang pada Abad XVII M terdiri dari orang Eropa China, Cochin China, Kamboja, Siam, Pattani, Jawa, Sulawesi dan kepulauan nusantara lainnya, nampak jelas kota ini bersiap terbuka dan internasional. Sementara mata uang yang digunakan waktu itu adalah mata uang kerajaan Palembang yang disebut dengan "Pitis" (Uang logam yang terbuat dari timah hitam dan timah putih bentuknya bulat pipih dengan tengahnya persegi empat) disamping mata uang lain berupa mata uang dollar Spanyol. Dapat disimpulkan bahwa Kesultanan Palembang cukup makmur disebabkan oleh jasa dan perdagangannya, disamping income lain didapat dari pajak dan upeti sebagai akibat bentuk pemerintahannya yang tradisional.

B. Kebijakan Internal Masyarakat

Kebijakan Kesultanan Palembang dalam membangun Sistem Perekonomian Kesultanan antara tahun 1662-1825 M diantara tahun tersebut penulis mengambil masa Kesultanan Pangeran Kesumo Abdurrahman Khalifatul Mukminin, masa Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo atau Sultan Mahmud Badaruddin I. Masa Sultan Bahauddin dan masa Sultan Mahmud Badaruddin II. Pada masa-masa kesultanan tersebut terjadi berbagai perubahan cukup spektakuler yang menjangkau berbagai sektor pembangunan diantaranya membangun infrastruktur contohnya membangun kraton

⁴⁶⁸ William Marsden. *The History of Sumatera* Penerbit Oxford University Press. 1966 hlm 359

⁴⁶⁹ Tome Pires. *Suma Oriental Perjalanan dari Laut Merah Ke Cina* Buku Fransisco Rodrigues. Penerbit Ombak Jogjakarta. 2015 hlm 221

kotagawang pemakaman raja-raja, Masjid Agung, sementara dari sektor perekonomian terjadi perdagangan bebas secara besar-besaran dan akibatnya dapat merugikan pihak penduduk pribumi maupun VOC. Pada masa itu kejayaan Perekonomian Kesultanan Palembang mencapai puncak kemakmuran karena terjadinya aktivitas Perekonomian berupa eksport-import komoditas barang kesultanan.

Masa pemerintahan Sultan Abdurrahman (Kiemas Hindi) beberapa kali mengirimkan utusan ke Kerajaan Mataram, pada masa itu kekuasaan dipegang oleh Amangkurat I dan II. Usaha yang dilakukan Sultan Abdurrahman dalam rangka memperbaiki hubungan *Vassal* dengan Kerajaan Mataram. Akan tetapi sambutan dari penguasa Kerajaan Mataram tidak seperti yang diharapkan dan beberapa kali utusan Sultan Abdurrahman ditolak oleh Susuhunan Mataram. Kemudian hubungan ini menjadi putus sama sekali dan penguasa Kerajaan Mataram membiarkan saja hubungan erat antara Kesultanan Palembang dengan VOC di Batavia. Setelah hubungan politik dan kultural dengan Mataram diakhiri Kiemas Hindi pada tahun 1675 M memakai gelar “Sultan” suatu gelar yang selama ini tabu untuk dipakai orang lain selain Sultan Agung Mataram (Gelar yang didapat Sultan Agung dari penguasa Makkah tahun 1641 M).⁴⁷⁰ Dalam konteks Kerajaan Mataram Islam, Sultan Agung merupakan Sultan yang paling berkuasa beliau memerintah tahun 1613-1646 M. Pada masa berkuasanya Sultan Agung mampu memindahkan Istananya dari Kotagede ke Kerto, disamping itu Sultan mendirikan pemakaman kerajaan baru di Puncak Bukit Imogiri tempat ia di makamkan pada tahun 1646 M.⁴⁷¹ Setelah itu Kotagede maupun Imogiri digunakan sebagai tempat pemakaman resmi keturunan anggota Kerajaan Mataram Islam. Pemakaman Kerajaan Kotagede kelihatannya memegang nilai istimewa dalam hal kesejahteraan Kerajaan Mataram Islam

⁴⁷⁰ Nanang S Soetadji. *Kesultanan Palembang. Perang Palembang Melawan VOC*. Penerbit Karyasari Palembang. 1996 hlm 10

⁴⁷¹ Mitsuo Nakamura. *The Crescent Arises over the Bayan Tree A Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town c, 1910s-2010*. (Secand Enlarged Edition) Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) 2012. *Bulan Sabit terbit di atas Pohon Beringin Studi tentang Pegerakan Muhammadiyah di Kotagede sekitar tahun 1910-2010*. Penerbit Suara Muhammadiyah Jogjakarta. 2017 hlm 20

sebagaimana ditunjukkan sebuah anekdot dalam riwayat lokal sebagai berikut:

Suatu ketika saat Sinuhun Amangkurat Amral (Amangkurat II 1677-1703 M) tengah memerintah Kerajaan Mataram di Kartasura (sebagai ibu kota), negeri itu menderita akibat kurangnya bahan pangan dan banyak orang tidak dapat makan. Sang Sinuhun amat patah semangat dan memanggil saudaranya Pangeran Puger menghadap sang Sinuhun dan berkata: “Jika situasi ini terus berlangsung, saya berniat mundur dan bunuh diri, saya tidak dapat mentolerir ini saya tidak bisa memerintah negeri ini. Saya tidak seharusnya dihormati oleh kawula di kerajaan karena saya merupakan seorang raja yang hina.” Pangeran Puger menjawab “Mohon bersabar saya hendak pamit dan akan meminta pertolongan Allah SWT, saya akan mengunjungi Pesareyan Mataram. Dengan memakai gelar “Sultan” Kiemas Hindi memindahkan Keraton Kota Palembang dari Kota Gawang ke Beringin Janggut, kemudian corak pemerintahannya di transformasikan yang condong ke corak Melayu dan lebih disesuaikan dengan ajaran Agama Islam. Kiemas Hindi kemudian bergelar Pangeran Kesumo Abdurrahman.

Gelar tersebut lebih lengkapnya Sultan Susuhunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam atau Jamaluddin Sultan Candiwalang. Ia memerintah dari tahun 1662 sampai 1706 M.⁴⁷² Pada tahun 1675 M Kiemas Hindi mengangkat dirinya sebagai Sultan Abdurrahman dan di Keraton Palembang dipakai Gelar Pangeran, Gelar Adipati, Gelar Raden. Perubahan yang terjadi di Keraton Kesultanan Palembang berdampak dan mengakibatkan hampir seluruh pola dan corak serta sistem pemerintahan bertransformasi contohnya Keris Jawa berubah menjadi keris Melayu, pakaian Melayu menggantikan pakaian Jawa kemudian aksara Jawa diganti dengan aksara Melayu (Arab gundul/aksara Jawi) akan tetapi bahasa-bahasa keraton masih mempergunakan bahasa Jawa, Namun rakyatnya memakai bahasa Melayu Palembang.⁴⁷³ Dalam memperkuat kekuasaannya Sultan Abdurrahman

⁴⁷² Nanang S Soetadji Perang Palembang Melawan VOC Penertbit Karyasari Palembang 1996. hlm 10

⁴⁷³ Djohan Hanafiah. *Sejarah kota Palembang*. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Deposit.Palembang 2004 hlm 26-27

membuat kebijakan hubungan yang baik dengan penduduk terutama di pedalaman secara kekeluargaan dan secara formal.

Dalam mempererat hubungan dengan kepulauan Bangka maka sultan melakukan ikatan perkawinan, bahkan Sultan Abdurrahman sendiri menikah dengan putri penguasa Bangka. Rakyat Bangka menerima pernikahan ini dengan mengakui penguasa Kesultanan Palembang sebagai Sultan yang sah bagi mereka dan Kepulauan Bangka diserahkan sepenuhnya kepada Sultan Abdurrahman. Apabila terjadi perkawinan antara laki-laki luar keraton dengan wanita keraton, maka anaknya diberi hak untuk menyandang gelar dari garis keturunan ibunya. Dengan adanya lembaga perkawinan ini, maka bertambahlah barisan Melayu menjadi Melayu Jawa. Selanjutnya dalam memperkuat kekuasaan dan wibawanya, Sultan Abdurrahman melaksanakan kebijakan-kebijakan secara Adat dan Agama seperti apa yang telah ditulis oleh Barbara Watson Andaya.⁴⁷⁴

“Berkaitan dengan penunjukkan sejumlah pejabat yang mengikat antara pedalaman (Uluu) dengan keraton orang-orang Eropa pada awal Abad XIX M hanya memberikan perhatian yang kecil terhadap ikatan kekeluargaan (*Kinship*) yang berdampak pada politik dan ekonomi, kadang-kadang bagaimanapun sumber-sumber yang ada hanya berisikan selintas menjelaskan praktek-praktek sosial seperti adat “Saudara susuan diantara para bangsawan dan para pembesar Bali” kelas bawah dapat memperoleh banyak saudara dimana mereka dilindungi darimana mereka memperoleh perlindungan. Pada gaya yang sama ada pertukaran wanita diberikan oleh seorang penguasa yang ikatan darahnya jauh masih merupakan sarana yang fundamental untuk mengesahkan ikatan antara keraton dan masyarakat pedalaman (Uluu).”

Saudara susuan dalam istilah adat Palembang adalah “*Pale atau Suson*” dimana ikatan darah menjadi Syah, bahkan dalam pewarisan saudara susuan mendapat hak penuh. Demikian pula pemberian gelar dan pemberian pengantin wanita kepada tokoh-tokoh pedalaman, membuat Elit Melayu-Jawa semakin membesar serta pengaruh kekuasaan pusat semakin

⁴⁷⁴ Djohan Hanafiah. *Sejarah kota Palembang*. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang Deposit. 2004 hlm 26

stabil. *Piyagem* merupakan Undang-undang Kesultanan Palembang yang dipahat di atas lempengan perak tanpa diberi tanggal yang jelas. Diperkirakan dari Sultan Abdurrahman yang memberikan kepada Pangeran Purba Buana Ing Pasemah, Dusun Tanjung Kurung yang ditugaskan kepadanya untuk diumumkan disana peraturan-peraturan Sultan yang berlaku umum agar daerah-daerah ini dapat tumbuh dalam suasana damai.

Sultan Abdurrahman membuat kebijakan untuk menjalin hubungan dengan VOC hal ini terbukti semenjak tahun 1640 M sudah tujuh buah kontrak dagang yang telah ditanda tangani oleh Sultan Abdurrahman. Hubungan ini memang sudah diperhitungkan oleh Sultan Abdurrahman karena VOC merupakan perisai yang diharapkan oleh sultan untuk membantu menghadapi Kerajaan Banten dan Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Abdurrahman kekuatan Perekonomian Kesultanan Palembang terletak pada produksi lada. Sehingga dipenghujung Abad XVII M kekayaan Sultan Abdurahman menjadi sebuah legenda sehingga dikenal sebagai *The Greatest Pepper Marchant*. Di samping dari perdagangan lada Sultan Abdurrahman merupakan orang pertama yang menerima keuntungan perdagangan luar negeri dan ia menerima persentase pajak serta cukai keluar masuknya barang dagangan. Kebijakan lain yang menjadi sumber pendapatan sultan adalah dari ketentuan hukum adat yang menyatakan bahwa kematian seseorang pedagang asing memberikan hak kepada sultan untuk menguasai kapal dan barang dagangannya.⁴⁷⁵

Kalau diperhatikan kunci kesuksesan Sultan Abdurrahman dalam meningkatkan kekayaan dan kemakmuran negerinya didukung sepenuhnya oleh penduduk daerah pedalaman. Sultan menerapkan kebijakan untuk membuka lahan baru dan menyediakan pekerjanya didatangkan dari wilayah Jambi dan Minangkabau mereka sudah terbiasa menanam lada di Uluan Trembesi dan mereka mengakui Sultan Palembang sebagai tuannya. Disamping itu Sultan Abdurrahman pada tahun 1762 M lebih tiga puluh orang saudagar China dimanfaatkan oleh sultan, empat orang

⁴⁷⁵ Djohan Hanafiah. *Sejarah Kota Palembang*. Dinas Pariwisata Kota Palembang 2013 hlm 27

diantaranya dijadikan pengawas perdagangan dengan VOC. Semua pedagang China ini beragama Islam, termasuk juga pedagang India yang beragama Islam. Dalam struktur pemerintahan Kesultanan Palembang semasa Sultan Abdurrahman telah mengikuti pola-pola kerajaan-kerajaan Melayu dan Islam sebagai agama negara. Sultan adalah bertindak sebagai pemimpin negara dan juga pemimpin agama hal ini tercermin dari gelar Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam.⁴⁷⁶

Dari data-data terdahulu dapat dikemukakan bahwa untuk menegakkan kembali harkat dan martabat Palembang, Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam mencari satu bentuk identitas dan wawasan dengan mengambil kebijakan. *Pertama*, Setelah beberapa kali utusannya ke Kerajaan Mataram di remehkan dan ditolak, bahkan dihina perintah susuhunan tegas bahwa tidak seorang pun utusan sultan mereka diizinkan masuk kecuali sultan mereka sendiri. *Kedua*, Memantapkan kharismatik dan legalitasnya maka Sultan Abdurrahman mengangkat dirinya sebagai pemimpin tertinggi agama Islam di negaranya dan menyandang gelar Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam. Dengan demikian Islam telah menjadi agama Kesultanan Palembang dan pelaksanaan hukum Islam berdasarkan kebijakan resmi.⁴⁷⁷

Ketiga, Perluasan lembaga dan kebangsawanan dengan menarik sebanyak mungkin kepada para “Pemuka” Melayu ataupun pembantu-pembantu non elite Jawa melalui lembaga perkawinan. Perkawinan politik yang dipelopori oleh sultan sendiri melalui perkawinannya dengan putri penguasa Bangka yang merupakan Adipati Banten di Bangka. *Keempat*, Hubungan pusat Ibukota dengan daerah pedalaman diatur berdasarkan penempatan wakil-wakil mutlak sultan dibeberapa dusun atau marga yang disebut juga sebagai *Jenang dan Raban*.

Menurut Van Sevenhoven,⁴⁷⁸ mengemukakan bahwa *Raban dan Jenang* memiliki arti yang sama *Pertama*, diberikan dari seorang Priyai, dan *Kedua* berasal dari bukan Priyai. *Raban*

⁴⁷⁶ Djohan Hanafiah. *Sejarah Kota Palembang* Dinas Parawisata Kota Palembang 2013 hlm 27-28

⁴⁷⁷ Djohan Hanafiah. *Melayu Jawa Citra Budaya Sejarah Kota Palembang*. Penerbit Raja Grafindo Persada. Jakarta 1995 hlm 199

⁴⁷⁸ Van Sevenhoven. *Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang*. Penerbit Bharata Jakarta 1971 hlm 30

dan *Jenang* adalah seseorang sultan beberapa marga atau dusun agar dapat hidup dari padanya, ini terjadi baik kepada keluarga dekat sultan maupun menteri atas dasar kemurahan secara khusus. *Raban dan Jenang* bukan saja pemakai atau pengumpul dari hasil marga atau dusun melainkan harus dilaporkan dahulu kepadanya. *Jenang* mencoba menyelesaikan urusan-urusan tersebut dan jika tidak berhasil maka ia melaporkan kepada Patih atau kepada pemerintahan kerajaan. Jika perlu dari sini urusan-urusan itu sampai kepada sultan. Semua perintah dan tuntutan tidak disampaikan kepada marga atau dusun, akan tetapi kepada *Raban atau Jenang* yang menyerahkan kepada marga atau dusun untuk melaksanakannya.

Dengan demikian sistem ini merupakan sistem langsung antara pusat dan daerah yang menyebabkan ketergantungan daerah pada pusat, dan kekuasaan pusat sangat tertanam kuat di daerah. Sultan mendapatkan kesempatan untuk menguasai seluruh kekuatan politik dan ekonomi di ibukota sebagai konsekuensi sentralisasi kekuasaan, ini merupakan modal bagi sultan untuk mencapai tujuan ekonominya. Dalam hal ini monopoli perdagangan kesultanan dapat dibandingkan bahwa semenjak Sultan Abdurrahman mengeluarkan kebijakan tentang penanaman lada maka di daerah pedalaman penanaman ladanya meningkat. Sebagai perbandingan jikalau pada kontrak tahun 1662 M hanya diminta oleh VOC 2000 sejumlah karung lada atau 1000 pikul, maka kontrak 1772 M di mulai sebanyak 30.000 pikul atau 60.000 karung lada dapat dibayangkan betapa intensifnya penanaman lada ini.⁴⁷⁹

Dengan sistem *Raban dan Jenang* ini. Menurut J.W.J Welan *Djenang* S.C Happen (*Onderafdelhgen*) diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Sultan Abdurrahman banyak mengeluarkan peraturan-peraturan dalam bentuk Piagam dan kadang-kadang ditulis di atas piring perak seperti piagam yang diberikan kepada Purba Buana Ing Pasemah desa Tanjung Kurung berisi peraturan sultan yang berlaku secara umum dan ditulis dengan menggunakan aksara Jawi kemudian

⁴⁷⁹ Djohan Hanafiah. *Melayu Jawa Citra Budaya dan Sejarah Palembang*. Diterbitkan atas Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Tingkat dua Kotamadya Palembang. Penerbit Raja Grfindo Persada Jakarta 1995 hlm 200

bertransformasi menjadi tulisan Arab Melayu.⁴⁸⁰ Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin I tahun 1724 M atau dikenal dengan Sultan Joyo Wikromo, bahkan oleh rakyatnya dikenal sebagai tokoh legendaris yang heroik kehidupannya penuh dengan petualangan. Sebelum mendapatkan mahkotanya beliau melakukan petualangan di nusantara terutama Selat Malaka dan Laut China Selatan. Para pengikutnya merupakan bangsawan Bugis dan Makasar. Pelarian dari kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan sejak VOC menduduki wilayah tersebut.

Hubungan dengan Sulawesi Selatan menjadi satu ikatan bathin sehingga pada tahun 1737 M beliau menikah dengan seorang Putri Mandar dari Cendana. Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo mempunyai kelebihan tersendiri terutama tentang kepemilikan kekayaan, harta kekayaannya melebihi harta kekayaan pendahulunya, Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan Pendahulunya terutama kekayaan harta,⁴⁸¹ sehingga pada tahun 1755 M utusan VOC dipimpin oleh J. Paravicini seorang Syahbandar dari Batavia mengatakan bahwa Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo sangat kaya dengan Uang, Emas, Perak, Permata yang kekayaannya tidak dapat dihitung. Kalau Sultan Abdurrahman Khalifatul Mikminin sayyidul Imam memiliki kebijakan dalam bidang ekonomi dengan memperluas lahan dan menambah sumber daya manusia di perkebunan lada.

Akan tetapi Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo mengambil kebijakan dengan mengeksploitasi tambang timah di Bangka dengan menambah Sumberdaya Manusia tenaga-tenaga kerjanya adalah orang-orang China, Siam, Kamboja, Vietnam maupun China perantau di Nusantara.⁴⁸² Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo dalam melaksanakan sistem pemerintahan sangat bijaksana dan sangat dipatuhi rakyatnya. Beliau berhasil mengikat hati rakyat pedalaman dengan menempatkan puteranya kepada keluarga di pedalaman perbatasan Jambi.

⁴⁸⁰ J. W. J Wellan, *Economicsch hlm 163 dalam Djohan Hanafiah Melayu Jawa Citra dan Sejarah Palembang*. 1995 hlm 170.

⁴⁸¹ Djohan Hanafiah. *Sejarah Kota Palembang*. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang 2011. hlm 29

⁴⁸² Djohan Hanafiah, *Sejarah Kota Palembang*. Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata Kota Palembang 2011. hlm 20

Keberhasilan Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo dalam pembangunan Politik, Ekonomi dan Sosial budaya menyebabkan Palembang diberi julukan *Hate Indische Venetie* bahkan nama *Darussalam* diterjemahkan sebagai *De Stad des vredes* tempat yang tentram, *Darussalam* merupakan nama rezim Kesultanan Palembang atas julukan yang diberikan oleh orang Eropa tersebut memang merupakan kenyataan yang ada, sebagaimana yang ditulis oleh Residen Inggris Mayor M. H Court:

“Dari seluruh pelabuhan di wilayah orang-orang Melayu, Palembang telah membuktikan dan terus secara seksama menjadi pelabuhan yang paling aman dan dengan peraturan yang paling baik seperti dinyatakan oleh orang-orang pribumi dan orang-orang Eropa. Begitu memasuki perairan Sungai, perahu-perahu kecil dengan kewaspadaan yang biasa dan tindakan-tindakan pencegahan yang akan mengamankan dari kekerasan dan perampasan. Dibagian luar negeri perahu-perahu kecil perampok setiap saat bersembunyi di dalam sungai dan terlindung di bawah hutan sepanjang pantai sungai akan memangsa perahu-perahu dagang kecil yang memasuki sungai, akan tetapi hal ini jarang terjadi, karena di halau oleh kekuatan sultan dengan segala peralatannya”.

Kondisi demikian tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa sikap politik Kesultanan dan pelayanan di bidang perdagangan di Palembang sudah sedemikian baik, sehingga mempunyai citra tersendiri. Wajar kalau pujian tentang kemakmuran keamanan Palembang juga dinyatakan dalam kronik Palembang.

“Dan rakyat seisi negeri dengan segala itu banyak beruntung sebab negeri sentosa. Segala dagang pun banyak masuk dari laut dan dari darat dan dari ulu. Karena raja Palembang pada zaman now terlalu adil sentosa pemerintahnya, memelihara segala rakyat negeri dan sentosa dagang”.

Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo perkembangan kota Palembang mengalami kemajuan dan juga modernisasi bahkan merupakan tokoh yang kontroversial dan seorang tokoh pembangunan modern, realisasi dan pragmatis juga seorang petualang yang kompromistis. Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo merupakan tokoh utama dalam pembangunan Palembang baik di bidang ekonomi,

politik, maupun tatanan sosial. Pembangunan pengairan, sepanjang Sungai Mesuji, Ogan, Komering, dan Musi, bukan saja untuk pertanian akan tetapi sekaligus untuk pertahanan. Ada tiga buah bangunan monumental yang didirikan Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo dengan visi, Arsitektur dan fungsi berlainan satu sama lain.

Pada masa Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo dikenal sebagai tokoh Pembangunan Palembang Modern dalam arti Pembangunan fisik sementara. Sultan Mahammad Bahauddin memerintah 1776-1803 M dikenal sebagai tokoh pembangunan Perekonomian dan budaya. Masa Pemerintahan Bahauddin banyak mengalami transformasi terutama dibidang Perekonomian yang tentunya dapat memakmurkan rakyatnya. Dibidang budaya Kesultanan Palembang pada masa Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo pernah menjadi pusat kebudayaan dan pusat penyiaran agama Islam dikawasan belahan Barat Nusantara. Pada saat Sultan Ratu Ahmad Najamuddin memerintah Kesultanan Palembang Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo menjadi pangeran ratu melalui suatu kesepakatan diantara para pangeran, menteri dan para pembesar kesultanan. Kemudian pada bulan Agustus 1774 M Pangeran Ratu dinobatkan menjadi Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo. Pangeran Ratu Ahmad Najamuddin diangkat menjadi Susuhunan Ratu Kesultanan Palembang Darussalam.⁴⁸³

Di dalam suatu pemerintahan paling tidak ada tiga hal yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi, ketiga hal tersebut. *Pertama*, Keadaan Politik. *Kedua*, Keadaan Sosial masyarakat dan *Ketiga*, Keadaan Ekonomi. Kestabilan politik dapat mempengaruhi keadaan sosial dan ekonomi masyarakat. Politik yang stabil menjadikan majunya perekonomian dan perekonomian yang maju tidak memungkinkan terjadinya gejolak sosial di masyarakat. Semuanya itu tergantung kepada pemimpin yang berkuasa di pemerintahan itu. Selama masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo Kesultanan Palembang mengalami kemajuan di bidang politik, ekonomi dan budaya. Kemajuan di bidang politik dimulai ketika

⁴⁸³ Bambang Budi Otomo. *Perkembangan kota Palembang dari Wanua Sriwijaya Menuju Palembang Modern: Pemerintah Kota Palembang*. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.Palembang 2005 hlm 187

pergantian kekuasaan dari Sultan Ratu Ahmad Najamuddin ke Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo hingga ke penggantinya Sultan Mahmud Badaruddin II.⁴⁸⁴ Di dalam lingkungan kraton relatif tidak ada gejolak politik, hukum di dalam pemerintahan benar-benar diberlakukan dengan baik dan penuh dengan ketegasan.

Masa pemerintahan Sultan Muhammad Bahauddin beliau membuat kebijakan membangun Kuto Baru atau Kuto Besak pada tahun 1780 M dan selesai tahun 1797 M. Dengan kekayaan dan kejayaan Keraton Palembang saat itu membuat kekaguman tokoh-tokoh Eropa, antara lain Thomas Raffles sendiri menyatakan kepada atasannya Lord Minto dalam surat tanggal 15 Desember 1810 M yang berisi:⁴⁸⁵

“Sultan Palembang merupakan salah seorang Pangeran Melayu yang terkaya dan benar apa yang dikatakan bahwa gudangnya penuh dengan dollar dan emas yang telah ditimbun oleh leluhurnya.”

Dengan kekayaan yang dimiliki oleh Sultan Mahmud Bahauddin maka dia sanggup mengambil kebijakan untuk mengeluarkan uang sendiri dalam membangun sebuah Kuto yang baru atau Kuto Besak. Menurut J.L Van Sevenhoven seorang komisaris Belanda di Palembang tahun 1821 menyatakan:

“Kuto Besak berukuran lebar 77 dan panggung 49 Roede (*Amsterdam Roede* kurang lebih 3.75 M atau panjang 288.75 M dan lebar 183.75 M) dengan keliling tembok yang kuat dan tingginya 30 kaki serta lebarnya 6 atau 7 kaki. Tembok ini diperkuat dengan 4 bastion (*Baluarti*). di dalam masih ada tembok yang serupa hampir sama tingginya dengan pintu-pintu gerbang yang kuat, sehingga dapat dipergunakan untuk pertahanan jika tembok pertama dapat di dobrak.”⁴⁸⁶

Komentar orang Eropa pada waktu itu yang mengagumi Benteng Kuto Besak antara lain Ambter Belanda J.A Van Rijn Van Al Kemedede mengemukakan:

⁴⁸⁴ Bambang Budi Otomo, *Perkembangan Kota Palembang dari Wanua Sriwijaya Menuju Palembang Modern*. Pemerintah Kota Palembang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Palembang 2005. hlm 188

⁴⁸⁵ Djohan Hanafiah. *Sejarah Kota Palembang*. Dinas Pariwisata Kota Palembang. 2004 hlm 39-40

⁴⁸⁶ Djohan Hanafiah. *Sejarah Kota Palembang*. Dinas Pariwisata Kota Palembang. 2004 hlm 40

“Benteng ini adalah salah satu yang terbesar di kepulauan Hindia (Indonesia Sekarang) dan tidak dapat dikalahkan oleh musuh pedalaman”. Selanjutnya Mayor M.H Court, Residen Inggris untuk Palembang kemudian menjadi Residen dan komandan di Bangka mengatakan keraton sultan adalah bangunan yang sangat indah (*Magnificent Structure*) dibuat dari bata serta dikelilingi oleh dinding yang kuat. Tempat tinggalnya para pemimpinnya sangat luas dan nyaman, meskipun demikian tidak dapat menunjukkan kemewahan.”

Sultan Mahammad Bahauddin mengambil kebijakan untuk mengatasi segala macam bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam Negeri, gangguan itu dalam bentuk pencurian timah, penyelundupan, dan perampokan. Karena Timah merupakan salah satu sumber pendapatan Kesultanan Palembang yang dihasilkan dari pulau Bangka dan Belitung. Justru karena itu sultan Bahauddin selalu mewaspadai para pedagang Asing seperti Inggris dan Belanda yang juga bernafsu untuk memonopoli komoditas ini. Kepulauan Bangka dan Belitung termasuk wilayah Kesultanan Palembang . pada masa pemerintahan sultan Mahammad Bahauddin terjadi kemelut perdagangan Internasional yang terjadi di sekitar kepulauan tersebut. Kemelut ini dapat di selesaikan oleh Sultan Bahauddin dengan baik, dan langkah berikutnya sultan mengambil kebijakan dengan membentuk armada laut, memantapkan pemerintahan di Bangka dan Belitung dan di Mentok yang menghadap Selat Bangka di bangun sebuah Benteng batu yang kuat.⁴⁸⁷

Disamping itu pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Bahauddin, perdagangan lada juga memasuki perdagangan bebas dan daerah pemasarannya di Kepulauan Riau. Pada masa itu perdagangan-perdagangan di kepulauan Riau masih dalam kontrak pedagang Bugis dan belum disentuh oleh VOC. Kapal-kapal Riau dan Palembang berlayar menuju Riau dengan muatan Lada Palembang. Oleh karena ramainya perdagangan ini mengakibatkan pelabuhan Riau tumbuh

⁴⁸⁷ Bambang Budi Otomo. *Perkembangan Kota Palembang dari Wanua Sriwijaya Menuju Palembang Modern*. Pemerintah Daerah Kota Palembang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Palembang 2005. hlm 190

menjadi pelabuhan yang besar dan ramai. Wilayah ini tempat pedagang China dan Inggris bertemu dengan pedagang setempat yaitu Palembang Bugis Melayu dan Jawa. Kemudian Sultan Mahmud Badaruddin wafat pada tanggal 21 Dzulhijah tahun 1218 H. waktu ashar dan bertepatan dengan 3 April 1803 M dan kesultanan digantikan oleh putera sehubungan Raden Hasan Pangeran Ratu dengan Gelar Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai Sultan Palembang ke-7 yang memerintah tahun 1803-1821 M.

Sultan Mahmud Badaruddin II dikenal sebagai penguasa Palembang yang mempunyai keunggulan menonjol. Seorang penulis Belanda W.L de Sturler melukiskan Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai seorang pemimpin yang memiliki kepribadian yang kuat, kesatria pemberani dan jantan, cepat bertindak, cekatan, memanfaatkan waktu yang tepat, teguh pendirian.⁴⁸⁸ Sultan Mahmud Badaruddin II digambarkan juga sebagai seorang penguasa yang pandai dalam berdiplomasi, cerdas dan berwibawa, terdidik serta ahli dalam strategi perang dan diakui sebagai seorang organisator yang sangat ulung serta ahli sastra yang produktif. Kualitas yang dimiliki dalam bidang sastra tampak dari karya-karya yang dihasilkan, contoh Hikayat Martalaya. Syair Nuri, Pantun Sultan Badaruddin dan Syair perang menteng.

Sultan Mahmud Badaruddin II mewarisi tahta dari ayahnya pada tahun 1804 M. Secara ekonomi dan politik Kesultanan Palembang berada dalam kondisi mapan dan stabilitas yang stabil. Dalam bidang Perekonomian sejak akhir Abad XVIII M Palembang mengalami keutungan besar melalui perdagangan gelap. hal ini disebabkan lemah dan hancurnya armada VOC dan tidak mempunya melakukan pengawasan diperairan Palembang khususnya di Selat Bangka. Kondisi demikian dimanfaatkan secara maksimal oleh sultan untuk mengabaikan setoran wajib ke Batavia sesuai kontrak. Kondisi menguntungkan ini terus berlangsung sampai pada masa pemerintahan Daendels (1808-1811.M) semua peraturan yang berkaitan dengan perdagangan yang ditetapkan semasa VOC dihapuskan. Secara keseluruhan kondisi Palembang ditinjau

⁴⁸⁸ Nata Diraja. *Riwayat Hidup Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang*. 1984 hlm 3

dari aspek politik tetap dalam keadaan stabil.⁴⁸⁹ Sejak Sultan Mahmud Badaruddin II naik tahta, Belanda berusaha terus untuk mendekati sultan, agar kontrak-kontrak yang telah disepakati sebelumnya dengan para penduduk, sultan dapat di kokohkan kembali. Langkah pertama yang dilakukan Belanda dengan memberikan informasi kepada Sultan Mahmud Badaruddin II, tentang adiknya pangeran Adipati yang membangkang dan masalah yang berkaitan dengan perdagangan. Belanda tetap tidak percaya tentang masa depan hubungan kedua bangsa. Belanda mencurigai sultan sebagai orang yang tidak patuh terhadap pemerintahan kolonial. hal ini berdasarkan bukti surat-surat Residen Belanda di Palembang kepada Gubernur Jendral di Batavia yang menyatakan bahwa Sultan Mahmud Badaruddin II berupaya untuk melepaskan diri dari pemerintahan kolonial. Bukti lain dari hasil bukti-bukti lainnya menunjukkan dari hasil pengamatan terhadap sikap sikap sultan yang enggan untuk menjalin hubungan harmonis dengan mereka.

Disamping itu terlihat juga dari pelanggaran terhadap kontrak yang telah disepakati sebelumnya antara Sultan Palembang dengan kompeni. Kontrak terakhir antara Sultan Palembang dan kompeni terjadi pada tahun 1791.⁴⁹⁰ Dan kenyataannya Sultan Mahmud Badaruddin II bersikokoh tetap melakukan pelanggaran. Pada kenyataannya ada usaha pihak Belanda untuk mewakili berbagai pelanggaran terhadap isi kontrak yang ada namun tidak ada reaksi dari Sultan Mahmud Badaruddin II. Dalam konteks ini Belanda membandingkan Sultan Mahmud Badaruddin II dengan ayahnya. Kondisi ini dapat diketahui dari pernyataan Residen Aartguin Palm yang membandingkan Sultan Mahmud Badaruddin II dengan ayahnya. Menurutny, Sultan Mahmud

⁴⁸⁹ ANRI Bundel Palembang No 19, dalam Farida R.Wargadalem *Perekonomian Kesultanan Palembang Abad Ke XVII-XIX* Fakultas Keguruan Ilmu Pendidkn UNSRI 2017 hlm 38

⁴⁹⁰ Kontrak 1791 M. Menyatakan antara lain bahwa VOC adalah Memegang Monopoli Timah dan Lada di Kesultanan Palembang. Larangan keras bagi kapal-kapal asing untuk berlabuh di Pelabuhan-pelabuhan Palembang dan Perdagangan Gelap Harus di Cegah (Norma 1857. 85) dalam Farida R Wargadalem *Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik* Penerbit Gedung Kompas Gremedia Jakarta 2017 hlm 39

Badaruddin Juyo Wikromo sangat baik tidak ada yang mampu menyamainya.⁴⁹¹

Sejak awal Pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin II telah menghadapi berbagai persoalan yang rumit dan belum terselesaikan. Di sisi lain sultan harus berhadapan dengan kedatangan pasukan Inggris yang juga ingin berkuasa di tanah Indonesia termasuk di Kesultanan Palembang. Dalam menghadapi Inggris dan Belanda sultan membuat kebijakan dengan membangun sistem pertahanan. Berdasarkan atas pertimbangan kekuatan lalu lintas Sungai.⁴⁹² Kemudian menghimpun Rakyatnya, Punggawa, Menteri segala Pucukan batang hari Sembilan, mengerjakan dan memelihara semua benteng dan kubu pertahanan, memperbaiki saluran-saluran air dan Sungai-sungai menurut kegunaannya, sebagai strategi peperangan dan keamanan. Oleh karena itu, sultan mengeluarkan kebijakan agar penjagaan negeri diperkuat.

Kebijakan tersebut tidak hanya strategi perang dan keamanan akan tetapi berkaitan juga dengan pengawasan di Kuala dan tempat-tempat lainnya. Semua pendekatan yang ada di dalam benteng diperiksa kembali dan apabila ada kemungkinan perlu ditambah supaya dapat berfungsi dengan baik. Strategi diatur untuk megantisipasi kemungkinan tempat masuknya musuh dari luar. Semua strategi pertahnan dipelajari dan diperhitungkan oleh Sultan Mahmud Badaruddin II dengan maksimal. Satu-satunya pintu masuk yang perlu diperkuat yaitu Sungai Musi dan muaranya sisi kanan dan sisi kiri hingga jauh ke pedalaman. oleh karenanya, semua benteng dan kubu pertahanan di pinggir pintu masuk diperkuat.⁴⁹³

Sultan Mahmud Badaruddin II membangun benteng pertahanan tersebut dindingnya diberi lubang guna untuk menembak musuh yang menyerang dari luar, dan kemudian benteng-benteng pertahanan dibangun juga di tempat-tempat tertentu di sepanjang Sungai Musi, mulai dari daerah Sungsang sampai Muara Rawas. Bangunan benteng itu diperkuat dengan

⁴⁹¹ ANRI Budel Palembang No 19 dalam Farida R.Wargadalem *Perekonomian Kesultanan Palembang Abad ke XVII-XIX. Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universits Sriwijaya* . 2017 hlm 38

⁴⁹² Supriyanto, *Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864*. Penerbit Ombak Jakarta 2013. hlm 61

⁴⁹³ R.H.M Akib. 1978. *Sejarah Perjuangan Sri Sultan Mahmud Badaruddin II*. Penerbit. Rahama . Palembang 1978 hlm 39

tiang-tiang kayu yang dipancangkan ke dalam air. Diantara benteng kota besak yang dikelilingi paret yang lebar, Benteng Pulo Kemaro, Hagun Topo dan Tambak Baya.⁴⁹⁴ Dalam rangka pengamanan daerah maritim yang berhubungan dengan perdagangan rempah-rempah seperti, lada, cengkeh, kopi, dan semua hasil tambang timah di pulau Bangka dan Belitung.

Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin II pengelolaan sistem pertahanan dan keamanan dipusat kota adalah golongan Pengalasan yaitu golongan pegawai keraton yang memiliki kewenangan kepolisian sementara kedudukannya di bawah Pangeran Citro. Sistem pertahanan dan keamanan Kesultanan Palembang dapat digambarkan. *Pertama*, Pertahanan di wilayah setiap yang berfungsi sebagai pemeliharaan jalur-jalur pelayaran Sungai, pengadaan dan pemeliharaan perahu-perahu dan tenaga pendayungnya. Penjaga di Muara Rawas, yaitu benteng Muara Sungsang, benteng Muara Pulau Borang, Tambak Bayo, Kuto Besak, Kuto Lamo, Pulau Kemarau dan Muara Rawas. Pemasangan Cerucuk-cerucuk kayu yang berfungsi menghalangi lalu lintas di Sungai Musi ke tempat pembuatan rakit-rakit yang di siapkan dibakar ketika musuh menyerang.⁴⁹⁵

Berkaitan dalam bidang Politik dan ekonomi Sultan Mahmud Badaruddin II telah membuat kebijakan untuk melakukan sistem perdagangan bebas. Oleh karenanya setiap negara diberikan kebebasan oleh sultan untuk berdagang di Kesultanan Palembang dan sultan menegaskan tidak ada "Monopoli Perdagangan." Sultan Mahmud Badaruddin II menolak tuntutan Inggris yang berusaha menggantikan kedudukan Belanda untuk menghadang monopoli perdagangan timah dan lada yang berada di pulau Bangka. disamping itu Inggris menuntut Sultan Mahmud Badaruddin II menghormati perjanjian antara Inggris dan Belanda yang berarti mengambil alihan kekuasaan atas loji Sungai Aur dari tangan Belanda kepada Inggris.

⁴⁹⁴ J.I Van Sevenhoven. *Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang*. Penerbit Bhratara Jakarta.1971. hlm 13-14

⁴⁹⁵ Suprayitno. *Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864*. Penerbit Ombak Jakarta. 2013 hlm 62

C. Kebijakan di Luar Kesultanan

Kerjasama antara Kesultanan Palembang dengan kompeni Belanda telah berlangsung sejak tahun 1616 M, kerjasama tersebut dimulai ketika wakil *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) dijabat oleh Andries Soury mengirim hadiah kepada Raja Palembang Pangeran Madi Ing Angkoso 1594-1627 M melalui utusan Palembang yang bertugas ke Jambi pada kesempatan tersebut dikemukakan harapan agar terjalannya kerjasama perdagangan antara Palembang dengan VOC. Kemudian pada tahun 1617 M VOC mengirimkan Crijn Van Ralmbureh yang didampingi Soury Andries untuk bermusyawarah ke Palembang, mereka diterima oleh sultan dan dihadiri pula oleh Raja Bangka yang merupakan mertua Sultan Palembang. Dalam pertemuan dengan VOC tersebut berkeinginan untuk membeli barang-barang dari Palembang berupa komoditas Kemenyan, Getah pohon berwarna, lilin, Gading gajah, Lada dan kayu.⁴⁹⁶

Perundingan tersebut ditindak lanjuti pada tahun 1619 M, dan di Palembang telah ada perwakilan dagang Belanda yang dipimpin oleh seorang asisten perdagangan. Jan Pieters Zoon Coen mengambil kebijakan menghapuskan perwakilan dagang di Palembang atas pertimbangan penghematan, akan tetapi hubungan dengan Palembang tidak dihapuskan sama sekali. Pada masa kekosongan perwakilan dagang Belanda di Palembang sikap dan tindakan beberapa Pedagang Bebas Belanda, sering memaksa pedagang pribumi untuk menjual hasil bumi kepada mereka dan walaupun perlu merampok penduduk diperairan Pantai Timur Sumatera. Kondisi ini telah mempersulit posisi Batavia kecil berhubungan dengan Palembang. Oleh karenanya Jan Pieters Zoon Coen pada tahun 1622 M mengulangi pengiriman utusan ke Palembang untuk memperbaiki kerjasama dan persahabatan dan mohon maaf atas kesalahan para Pedagang Bebas Belanda dan minta agar kejadian itu dilupakan saja.

Pendekatan dilanjutkan masa Gubernur Jenderal Jacques Speek 1629-1636 M dan menghasilkan kebijakan berupa hubungan

⁴⁹⁶ Rahim Husni. *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam Studi Tentang Pejabat Agama masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang. Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*. Diterbitkan Logos Wacana Ilmu Ciptat. Jakarta 1998 hlm 70

dagang serta izin mendirikan loji dekat Istana Batu Ampar pada tahun 1630 M dan ini terjadi pada masa pemerintahan Pangeran Sedo Ing Puro 1629-1636 M.⁴⁹⁷ Perkembangan politik Imperialisme dan Kolonialisme tersebut dimulai oleh kompeni Belanda dengan mengadakan pendekatan kepada penguasa Palembang Prakesultanan. Kebijakan yang berkaitan dengan dagang tersebut baru dibuat pada tanggal 20 oktober 1642 M, dan ini terjadi pada masa pangeran Sedo Ing Kenayan. Pada perkembangan selanjutnya semasa pangeran Sido Ing Rajek tahun 1657 M timbul perselisihan dalam hal pelaksanaan kontrak dan diselesaikan dengan perang. inilah perang pertama antara Palembang dengan kompeni Belanda, perang ini terjadi dalam tahun 1658-1659 M. Dalam perang ini Loji Belanda maupun dalam kesultanan yang berada di Batu Ampar musnah.⁴⁹⁸

Dengan terjadinya perang ini peralihan pemerintahan kepada Kyai Mas Endi, maka dibuat kebijakan baru antara kompeni Belanda dengan Palembang pada tanggal 29 juni 1662 M. Dengan adanya perjanjian baru tersebut kompeni diberi izin untuk mendirikan sebuah loji baru Sungai Aur yang berada di tepian sebelah kanan Sungai Aur berhadapan dengan dalem Beringin Janggut yang dibangun oleh Sultan Susuhunan untuk menggantikan dalem Batu Ampar. Oleh karena mengharapkan keuntungan dagang yang lebih banyak dan jaminan keamanan yang lebih luas, perjanjian tahun 1662 M diperkuat dengan perjanjian tanggal 20 april 1678 M, dan kemudian perjanjian ini diubah dan diperbaharui dengan perjanjian tahun 1679 M tanggal 19 mei 1681 M dan tanggal 15 januari 1691 M. Suksesi pergantian tahta kesultanan oleh Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikromo di pergunakan oleh Belanda untuk mencampuri urusan politik dalam negeri dari kesultanan. Dalam suksesi tersebut sultan berhadapan dengan kakaknya Pangeran Mangkubumi, Muhamad Ali, Sultan Anom Alimuddin, Belanda yang berada di loji Sungai Aur ikut serta menjaga keamanan.

⁴⁹⁷ Rahim Husni. *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam Studi Pejabat Agama masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang. Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*. Diterbitkan Logos Wacana Ilmu Ciputat. Jakarta 1978 hlm 71

⁴⁹⁸ H .M Ali Amin. *Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam dalam Beberapa Aspek Hukumnya*. dalam KHO. Gajahnata. *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. Penerbit Universitas Indonesia. Penerbit Universitas Indonesia Press Jakarta 1986 hlm 102

Dengan adanya gerakan ini pihak kesultanan baru menyadari bahwa Belanda di loji Sungai Aur mempersiapkan 300 orang serdadu yang selama ini tidak pernah diketahui oleh pihak kesultanan, kesempatan ikut menjaga keamanan ini oleh Belanda dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Belanda dalam menjalankan politik balas budi meminta upah atas jerih payahnya ikut mengamankan pergolakan politik di kesultanan, meminta pengurangan harga monopoli atas timah dan lada kepada sultan, kemudian timbullah sederet peristiwa yang muncul dari pihak Belanda yang didorong oleh sifat penjajahan mereka.⁴⁹⁹ *Pertama*, Pada bulan oktober 1731 M ada 90 orang dari Palembang dirantai untuk dikerjakan di Batavia, dalam bulan april 1733 M tinggal 14 orang yang hidup. Latar belakangnya tidak ada catatan sejarah. *Kedua*, dengan adanya plakat tanggal 21 maret 1746 M kompeni Belanda melarang perdagangan, penyelundupan, dan pengangkutan lada dan timah di Burneo, Bantam, Palembang, Belitung dan pulau-pulau sekitarnya.

Ketiga, kapal-kapal China yang berada di Kesultanan Palembang dikenakan Bea masuk oleh Belanda dan dipercayakan kepada Paehter China di Betawi terjadi pada tanggal 21 April 1752 M. *Keempat*, kapal-kapal perang Belanda dilarang melepaskan tembakan pada saat mau berangkat atau kedatangan di Palembang, Jambi, Banjarmasin timur, Bantam dan Jawa ini terjadi pada tanggal 20 Agustus 1754. *Kelima*, Bea pengiriman beras di Palembang ditentukan oleh Belanda sebanyak 10 *Rijksdaalders* untuk satu *Koyan*. Disamping itu pihak kompeni Belanda membuat kebijakan berupa surat perjanjian perdagangan untuk monopoli lada dan timah, walaupun pihak Belanda sudah kekurangan uang real dan ini terjadi pada tanggal 10 September 1755 M.

Pada masa Sultan Susuhunan, Ahmad Najamuddin Adi Kesumo, dibuat kebijakan berupa surat perjanjian dengan Belanda, perjanjian itu keterkaitan dengan perdagangan hasil bumi Bangka pada tanggal 15 Juni 1763 M, atas dasar tidak saling percaya dan sudah menjadi garis politik Belanda dalam

⁴⁹⁹ H.M Ali Amin. *Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam dalam Beberapa Aspek Hukumnya* KHO Gajahnata. *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. Penerbit Universitas Indonesia UI Press. Jakarta 1986. hlm 102

membuat surat perjanjian serta ditentukan berlaku sampai kepada ahli waris raja terakhir. Kemudian ditentukan beberapa pasal yang bersifat pertolongan, manakala terjadi pergantian tahta. Surat perjanjian diperbaharui dengan penguasa yang baru. Pada tanggal 31 Agustus 1791 M dibuat kebijakan berupa perjanjian persahabatan yang baru antara Sultan Mahmud Badaruddin dengan Gubernur Jenderal Mc. William Arnold Alting dan Raden Van Indie yang diwakili oleh Kapten Ter Zee Anthony Hendrik Christian Staringh diatas Fregat the tisal yang bersandar dimuka loji isi perjanjian itu antara lain.⁵⁰⁰

Pertama, Monopoli lada bersih dengan harga enam real diterima di gudang kompeni di Batavia. *Kedua*, Jaminan keselamatan lada di daerah Kesultanan Palembang. *Ketiga*, pengadaan dalam tahun pertama 2000 pikul yang berat 125 pond Olanda, tahun kedua dan ketiga 3000 pikul, tahun keempat, kelima, keenam dan seterusnya 4000 pikul. *Keempat*, Bangsa kulit putih lainnya dilarang singgah atau berniaga di pulau Bangka. *Kelima*, Memberantas penyelundupan lada, timah, opium dan kain-kain, syahbandar harus membantu kompeni. *Keenam*, Kompeni memberi izin kepada rakyat untuk berlayar dengan ketentuan tidak boleh singgah di Banten dipihak Masyrik Batavia sampai sepanjang lor tanah Jawa kepihak Barat sampai di Malaka diperkirakan oleh Gubernur Jenderal atas permintaan sultan. Sultan boleh memberi izin ke negeri Siam kecuali kebagian Utara Siam. *Ketujuh*, Pelayaran dari dan ke negeri China dilarang. *Kedelapan*, Orang kompeni mencuri lada harus dilaporkan oleh sultan ke Gubernur Jenderal. *Kesembilan*, Menjamin keamanan laut Bangka dan laut Belitung.

Dari isi perjanjian tersebut dapat dipahami bahwa kompeni Belanda lebih menekan pihak kesultanan, oleh karenanya dalam tahun 1787 M terjadi konflik antara Kesultanan Palembang dengan pihak kompeni Belanda yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak terdahulu. Disamping itu pada kenyataannya sering terjadi perubahan, pembaharuan dari persetujuan persahabatan perdagangan, dan diperkirakan

⁵⁰⁰ H.M Ali Amin. *Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam dalam beberapa Aspek Hukumnya*. dalam KHO Gajahnata. *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. Penerbit Univesitas Indonesia. UI Press Jakarta 1998 hlm 103

selain disebabkan oleh adanya pergantian tahta kesultanan dan adanya sebab-sebab lain diantaranya. *Pertama*, Mutu lada yang kurang baik menurut kompeni Belanda. *Kedua*, Kompeni Belanda tidak menepati cara pembayaran dikarenakan kekurangan mata uang real (*Spaanse Matten*). *Ketiga*, Tingginya harga barang-barang dagangan Belanda yang harus dibeli kesultanan. *Keempat*, Jatah barang kerap kali tidak mencapai target yang ditetapkan. *Kelima*, masalah keamanan dan *Keenam*, Penyelundupan.⁵⁰¹

Ketika Belanda mulai mendapat persaingan dari pedagang Eropa lainnya seperti Inggris dan Prancis, Maka mulai muncul harapan baru bagi Sultan Palembang untuk mengadakan hubungan dagang dengan Inggris dan Prancis serta mengurangi hubungan dagang dengan Belanda. Oleh karenanya dimungkinkan sejak adanya perjanjian Paris 1784 M yang menghapuskan hak monopoli pelayaran di perairan Indonesia dari Belanda, maka hal ini menyebabkan terbukanya kesempatan bagi orang Eropa lainnya dalam melaksanakan hubungan dagang. Mulai saat itu juga Inggris menjadi saingan utama Belanda dalam perdagangan rempah-rempah dan timah di Palembang. Oleh karena sering terjadi perdagangan gelap dengan Inggris dalam rangka menghindari monopoli Belanda. Kondisi VOC semakin merosot dan menghadapi persaingan dagang dengan Inggris, Prancis dan Portugis yang akhirnya mengharuskan pemerintahan Belanda untuk mengambil alih dan membubarkan VOC pada 31 desember 1799 M.⁵⁰²

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab keruntuhan VOC dan akhirnya di likwidasi pada tanggal 31 Desember 1799 M antara lain. *Pertama* Mundurnya perdagangan, *Kedua* Penyelundupan-penyelundupan dan *Ketiga* Korupsi yang dilakukan oleh pejabat VOC. Padahal pada abad-abad sebelumnya VOC mempunyai kontribusi besar terhadap negara asal yang didukung oleh kekuatan dan

⁵⁰¹ H. M Ali Amin. *Sejarah Kesultana Palembang Darussalam dan Beberapa Aspek Hukumnya* dalam KHO Gajahnata. *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. Penerbit Universitas Indonesia UI Press. Jakarta 1986 hlm 103

⁵⁰² Husni Rohim. *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang* Penerbit Logos Wacana Ilmu Ciputat Jakarta 1998 hlm 78-79

kekayaan yang dimilikinya. Pada saat itu VOC mengkonsentrasikan kegiatannya hanya di wilayah Jawa Barat, pantai Utara pulau Jawa dan kepulauan Maluku. Akan tetapi VOC berhadapan persaingan dagang dengan orang Inggris yang berada di Palembang. Pos-pos VOC di Palembang, Timor, Makasar, Padang dan Kalimantan Selatan, pada dasarnya hanya sekedar simbol kekuasaan yang sudah sangat lemah sehingga langkah-langkah yang perlu dilakukan VOC untuk menutupinya dengan menambah hutang baru. Pada tahun 1783 M hutang VOC sudah mencapai f 55 juta menjelang akhir Abad XVIII M hutang VOC membengkak menjadi 12 milyar gulden. Dengan demikian akhir Abad XVII M VOC sebagai bandar dagang terbesar abad itu terlilit hutang yang besar, ketidak efisienan dan krisis keuangan itu membawanya pada kebangkrutan.⁵⁰³

Begitu pula perdagangan dan pelayaran VOC yang ada di Kesultanan Palembang juga mengalami kemunduran pada tahun 1870 M. Dengan menurunnya peran VOC sebagai bandar dagang milik Belanda, menyebabkan terjadi pula penurunan penyerahan timah oleh Kesultanan Palembang kepada VOC oleh karena itu VOC tidak mampu lagi membeli komoditas timah, lada dan barang ekspor lainnya. Sebagaimana diketahui bahwa laporan Residen Palembang tanggal 5 April 1788 M VOC hanya mampu membeli lada sebesar 2000 pikul, sementara jumlah lada yang dijual oleh pedagang Palembang ke Tiongkok mencapai 20.000 pikul tiap tahun. Begitu pula sejak tahun 1787 M produksi timah menurun disebabkan terjadinya perang antara VOC dan gabungan kekuatan raja-raja Riau dan Lingga yang didukung oleh bajak laut dan berdampak kepada terjadinya penjarahan, penghancuran dan pembunuhan di Kepulauan Bangka. Justru karena itu pada tahun 1796 M VOC hanya mampu membeli timah sebanyak 1400 pikul setahun.⁵⁰⁴

⁵⁰³ Farida R. Wargadalem. *Konflik Kepemimpinan di Kesultanan Palembang 1812-1818* Disampaikan pada Seminar Nasional Radio Republik Indonesia Sum-Sel 2012.

⁵⁰⁴ ANRI. Bundel Palembang no 49 veth 162-163, Erman 2009. 77 dalam Farida R. Wargadalem *Perekonomian Kesultanan Palembang Abad XVII-XIX* Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Palembang 2017 hlm 32

D. Kebijakan Masyarakat

Langkah politik yang dilakukan masyarakat terutama keterkaitan kebijakan masyarakat yang berhubungan dengan edialogi perekonomian kesultanan serta keterkaitan dengan karakteristik lingkungan fisik wilayah Palembang kemudian dapat disederhanakan menjadi pola aliran dan uluan. Dua istilah yang lazim digunakan masyarakat untuk membedakan kawasan daratan rendah dan kawasan daratan tinggi, kedua pola itu juga merujuk kepada perbedaan sosial, ekonomi dan kultur politik masing-masing wilayah.⁵⁰⁵ Dalam literatur kolonial ketika berbicara Keresidenan Palembang bacaan yang nampak dan selalu muncul adalah dikatomi dan polarisasi dua masyarakat uluan dan iliran. Dikatomi kedua kutub tersebut berpusat dan bertitik tolak pada konsepsi orang yang berada di Palembang.

Menariknya sikap bertentangan itu hampir masuk ke dalam segi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya termasuk juga agama, yang menentang dan menjadi landasan terbentuknya kedua masyarakat itu. Akar geografis termasuk juga dalam kajian Mustika Zet maupun Jeroen Peeters, selalu ditarik ketika melihat latar belakang munculnya dua perbedaan tersebut, inilah realitas historisnya, iliran diidentifikasi mendapat pengaruh kuat dari pusat dan bercorak modern, sementara uluan dikategorikan masih berada pada kondisi tradisional. Dalam bagian ini penulis akan mencoba mengenali beberapa perbedaan atau barangkali lebih tepatnya peragian masyarakat Palembang Prakolonial di kedua kawasan dengan menjadi ciri khas dan ikatan yang melandasinya. Peragian semacam itu memudahkan dalam melihat sejauh mana berlangsungnya transformasi struktural pada masa kolonial, saat kekuasaan Belanda semakin terlibat intensif menjangkau daerah-daerah pedalaman.⁵⁰⁶

Disamping segi topografis dataran tinggi dengan pertanian tanah kering dan daerah aliran Sungai, perbedaan kedua kawasan tersebut dapat dipahami dari tradisi daerah setempat. Adat dan budaya yang dilihat serta dijalankan masyarakat daerah tersebut berpijak pada aturan yang terdapat dalam

⁵⁰⁵ Mustika Zet. *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950* Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia Jakarta. 2003 hlm 34

⁵⁰⁶ Dedi Irwanto. *Iliran dan Uluan Dikatami dan Dinamika dalam Sejarah Kultural Palembang* Penerbit Eja Publisier Jogjakarta. 2010 hlm 1

undang-undang Simbur Cahaya. Undang-undang yang disusun pada masa Kesultanan Palembang itu (sekitar pertengahan Abat XVII M) dan sesungguhnya hanya sebahagian kecil dari bentuk adat tertulis yang isinya terutama berkenaan dengan penjabaran hak-hak dan kewajiban anggota masyarakat dalam berbagai tingkatan dan jenis kegiatan yang dalam batas tertentu juga mencerminkan kompleksitas hubungan kekuasaan masa Kesultanan Palembang (1553-1814 M).⁵⁰⁷

Berkaitan dengan undang-undang Simbur Cahaya, Van Den Berg seorang ahli hukum Belanda dalam studinya menyimpulkan bahwa melalui undang-undang Simbur Cahaya sedikit atau banyak dapat dipahami sebagai corak hukum Islam dan adat yang pernah hidup dan berfungsi dalam masyarakat kesultanan, ini sebab di dalam undang-undang tersebut terlihat berbagai unsur ajaran hukum Islam yang telah diusahakan dan diadaptasi. Penyesuaian terhadap materi adat dengan ajaran hukum Islam, wajar apabila undang-undang Simbur Cahaya menjadi suatu undang-undang yang menarik dan komprehensif terutama karena kehadirannya berpangkal dari kebijakan masyarakat adat daerah yang di kompilasi oleh Kesultanan Palembang melalui prakarsa Ratu Sinuhun.⁵⁰⁸

Proses kompromisasi antara ajaran hukum Islam dengan nilai-nilai adat, ajaran-ajaran yang ditekankan dalam Islam cukup berperan dalam rangka untuk memberikan pondasi dasar terhadap nilai adat tersebut, bahkan Islam tidak merasa perlu untuk melakukan Islamisasi, Islam justru akan memberikan wewenang lebih besar bagi tradisi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam itu untuk berperan dalam menentukan sebuah kebijakan. Oleh karenanya kehandalan Ratu Sinuhun dalam mengkompilasi dan sekaligus menyusun kebijakan masyarakat adat-adat daerah di pedalaman terlihat dari susunan undang-undang “Simbur Cahaya” yang komprehensif pada masanya, undang-undang tersebut dijadikan sebagai kebijakan masyarakat atau aturan masyarakat adat merupakan aturan umum yang berlaku diseluruh uluan di wilayah kesultanan dan Keresidenan Palembang. Isinya mencakup hubungan

⁵⁰⁷ Mustika Zet. *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950*. Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia Jakarta. 2003 hlm 34

⁵⁰⁸ Mustika Zet. *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950*. Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia Jakarta. 20 03 hlm 35

masyarakat mulai dari aturan-aturan dusun, bujang gadis dan aturan pernikahan, aturan marga, aturan dusun dan berladang aturan kaoem dan adat perhukuman. Seluruh isi naskah Simbur Cahaya dalam prakteknya telah menjangkau perilaku masyarakat, baik bersifat individu maupun bersifat umum untuk seluruh masyarakat.⁵⁰⁹

Kesultanan Palembang dianggap memiliki berbagai macam kebijakan dan hak yang mencakup kemampuan mengendalikan dan mengkoordinasikan segala sumber daya kekuasaan baik yang bersifat ekonomi maupun politik. Sistem ketatanegaraan yang dijalankan semasa Kesultanan Palembang merupakan sarana pengawasan yang amat khas dan cukup efektif, akan tetapi penerapan kebijakan yang berkaitan dengan kekuasaan tidak berlaku sama untuk daerah iliran dan kawasan uluan. Wilayah iliran yang biasa dikenal dengan kawasan *Kepungutan* dan wilayah uluan dikenal dengan kawasan *Sindang* terbagi dalam sistem yang berbeda. Di wilayah *Kepungutan* (berasal dari kata pungut) yang merujuk pada kawasan Iliran. Sultan dan para pembesar istana mempunyai kebijakan dan kekuasaan langsung serta dapat mengenakan berbagai pungutan pajak dan merekrut tenaga kerja di wilayah ini. Mereka juga memiliki "*Privilege*" tertentu seperti berhak menguasai hasil-hasil perdagangan yang di monopoli mereka.⁵¹⁰

Sementara kalau dilihat di wilayah *Sindang* (secara harfiah daerah perbatasan) adalah daerah yang oleh masyarakat setempat disebut sebagai kawasan uluan. Di wilayah *Sindang* sultan dan para pembesar kerajaan tidak mempunyai otoritas dalam hal kebijakan untuk menerapkan apalagi memaksakan kebijakan-kebijakan seperti yang mereka miliki di wilayah *Kepungutan*.⁵¹¹ Kelompok masyarakat perairan sungai yang lebih berorientasi kepada perniagaan dapat ditemui di kawasan

⁵⁰⁹ Muhammad Adil. *Dinamika Pembaharuan Hukum Islam di Palembang Mengurai Isi Undang-undang Simbur Cahaya*. Jurnal Nurani Vol 14, No 2, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Desember 2014 hlm 60-63

⁵¹⁰ Muhammad Adil. *Dinamika Pembaharuan Hukum Islam di Palembang Mengurai isi Undang-undang Simbur Cahaya*. Jurnal Nurani Vol 14, NO 2. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2014 hlm 60-63

⁵¹¹ Mustika Zet. *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang*. Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia Jakarta. 2003. hlm 35

Iliran.⁵¹² Masyarakat yang menetap di kawasan tersebut sudah lama terikat dengan dunia perdagangan yang berpusat di kota pelabuhan Palembang. Sungai-sungai yang didominasi kawasan itu tidak hanya berfungsi sebagai sarana utama penghubung antar kawasan utama iliran atau daerah uluan di pedalaman dengan daerah iliran yang berpusat di Palembang. Akan tetapi juga memberikan kehidupan pokok bagi penduduk setempat sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bagaimana pengaruh sungai terhadap siklus pertanian penduduk kawasan Iliran dan keterlibatan mereka dalam kegiatan perdagangan. Sungai sangat dan turut mempengaruhi cara berpikir “pandangan dunia” (*World view*) penduduk setempat. Sungai-sungai tersebut mempunyai fungsi dalam menentukan arah dan dunia tempat tinggal mereka serta menjadi rujukan *Sosio-kultural* masyarakat sekitar.

Berkaitan dengan penduduk yang mendiami dataran *Sindang* merupakan kelompok masyarakat “kesukuan” yang hampir sepenuhnya memiliki otoritas Otonom Pasemah, Rejang, Ampat Lawang, Kikim dan Kisam, serta beberapa daerah yang terletak diantara Lampung dan Palembang Iliran masuk dalam kelompok suku *Sindang Mardika*.⁵¹³ Orang Pasemah juga termasuk Rejang misalnya tidak pernah mengaku tunduk pada kekuasaan Kesultanan Palembang. Kelompok masyarakat daerah ini memiliki kebijakan dan aturan tersendiri bernama undang-undang “*Sindang Merdeka*” berbagai pranata adat daerah *Kepungutan*, seperti kedudukan *Jenang* (wakil) sultan daerah *pungutan pajak dan praktek tiban dan tukon*.

⁵¹² Lihat W A Callin “*Basemah Concepts a Study of The Culture of People of South Sumatra*” (Disertasi PhD Michigan 1979) dalam Mustika Zet. *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang* Penerbit Pusaka LP3ES Indonesia Jakarta. 2003 hlm 35

⁵¹³ Sebagian besar penulis terbiasa menggunakan istilah “Kerajaan Maritim”. Untuk menyebut ciri-ciri masyarakat pantai” di Palembang. Zaman Sriwijaya dan periode kemudian (Walters, Cowen, Van Naershen dan R.C de Longh) saya cenderung menggunakan istilah Perairan Sungai’ Alasannya cukup jelas, istilah”Masyarakat pantai” hanya relevan dan terbatas untuk periode tertentu, Konsep itu hanya menekankan eksestensi Palembang dari sudut hubungan dengan dunia luar dan kurang menjelaskan kaitan internal yang ada, karena masyarakat Palembang di daerah pantai sekalipun juga,memiliki corak masyarakat agraris Cf. G.J. Missen,Viewpoint on Indonesia A GiographicalStudy:Thomas Nelson (Australia) ltd 1972 hlm 98. dalam Mustika Zet *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950* Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia Jakarta 2003 hlm 36

Dengan beberapa pengecualian tidak dikenal di daerah *Sindang*, masyarakat kesultanan daerah *Sindang* hanya tunduk kepada kepala-kepala suku yang posisinya berada dibawah dewan “Jurai tua” yang dikepalai oleh seorang *Depati*. Berbeda dengan *Pasirah*, yaitu kepala-kepala marga yang tersebar di pedalaman *Kepungutan* yang mewakili kepentingan penguasa pusat ditingkat lokal, *depati* (kepala-kepala sumbai daerah *sindang*) adalah pemimpin rakyat dan bukan bawahan sultan,⁵¹⁴ dimana basis kekuasaan *depati* terletak pada tali kekerabatan satu keluarga tertentu (*Kinsihip*) yang dihubungkan secara geneologis dengan nenek moyang pertama. Status keluarga terhormat ditentukan oleh garis keturunan nenek moyang tertua pendatang awal di dusun, pengaruh mereka sangat menentukan baik dalam kepemilikan harta dan pewaris tanah maupun dalam hubungan perkawinan.⁵¹⁵

Kelompok-kelompok suku yang berada di daerah *Sindang* dipandang oleh pihak kesultanan sebagai “*Mitra*.” Di sini berlaku hubungan mirip dengan “*Patron clien*”. Mereka di lindungi sultan karena sebagai penjaga perbatasan (*Sindang*) mampu membendung serangan Banten yang hendak menyerbu Kesultanan Palembang 1596 M. Jika Sultan Palembang merasa terlindungi oleh orang-orang *Sindang* dengan tugas mereka menjaga perbatasan paling ujung maka sebaliknya Orang-orang *Sindang* juga menerima baik perlindungan sultan dengan menerima garam, kapas dan candu. Bukti bahwa kekuasaan mereka diakui oleh pihak Kesultanan Palembang adalah ketika mereka datang ke Kesultanan Palembang untuk menyerahkan hadiah persembahan yang bukan merupakan upeti tersebut adalah tanda hormat atas pengakuan sultan terhadap kelompok mereka sebagai warga terhormat dalam lingkup Kesultanan Palembang. Kedudukan mereka dalam struktur Kesultanan

⁵¹⁴ *Depati* dan *pesirah*, kadang-kadang pangeran sering digunakan mengacu pada kepala Marga dari zaman kolonial lihat “Günter. Loc- cit. hlm 78 Jw. Van royen “adat verbanden dalam Mustika Zet. *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950*. Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia Jakarta 2003 hlm 44

⁵¹⁵ JW Boers Lets de Pasemah-Lauder of Eiland Sumatera dalam TNI 11 2 (1813) hlm 62-63Presgrave Coc-Cit hlm 43-44 JSG Gramberg De Ingling Non Het Pasamah Batavia HM Van Dorp 1865 hlm 28-29 dalam Mustika Zet *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950*. Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia Jakarta 2003 hlm 44

Palembang bukan *Matagawe* dan bukan pula mata pajeg seperti diberlakukan terhadap rakyat *Kepungutan*.

Masyarakat suku daratan tinggi *Sindang* merupakan kelompok “petani murni” mereka adalah petani penggarap yang menggarap lahan pertanian terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, walaupun selama Abad XVII dan XVIII M terjadi perubahan hubungan dagang antara Palembang dan VOC. Nampaknya tidak terlalu mempengaruhi struktur ekonomi daerah *Sindang*. Tanah-tanah luas di daerah dataran tinggi memungkinkan penduduk *Sindang* mengembangkan areal pertanian dengan lebih leluasa. Sebelum perkebunan *Onderneming* diperkenalkan Belanda awal Abad XX M, kelompok-kelompok suku itu nyaris terisolasi dari dunia berkekayaan hutan seperti damar, rotan, tumbuhan obat-obatan, gading gajah dan lain-lain diproduksi dalam jumlah terbatas.⁵¹⁶

Perekonomian *Sindang* hampir sepenuhnya tergantung pada kegiatan pertanian subsistem serta ternak khususnya kerbau, mereka petani bukan hanya dalam pengertian ekonomi akan tetapi juga petani dalam pengertian budaya dan politik, kelompok *Sindang* merupakan bagian dari komunitas yang memiliki tradisi tertentu dan sadar dengan perbedaan budaya serta tempat mereka dalam suatu imperium lebih besar Kesultanan Palembang. Kelompok suku-suku daerah *Sindang* lebih suka menganggap diri sebagai “Kelompok Etnik” tersendiri. Mereka mengidentifikasi diri sebagai kelompok yang memiliki kesamaan sosial kultural, mereka memahami adanya perbedaan dengan orang Palembang Iliran, khususnya orang-orang tinggal dari ibukota. Bukan hanya berbeda bahasa atau dealek akan tetapi juga dalam sistem politik Kesultanan Palembang.

Meskipun mereka memandang “Orang Palembang sebagai orang lain” mitos tentang genologis nenek moyang mereka sesungguhnya hampir tidak jauh berbeda dengan apa yang diyakini oleh para penduduk dusun-dusun daerah *Kepungutan* pada umumnya seperti halnya Kesultanan Palembang. Kelompok suku-suku daerah *Sindang* juga mengaitkan Puyang (nenek moyang) mereka sebagai keturunan kerajaan Majapahit

⁵¹⁶ Mustika Zet. *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950*. Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia Jakarta 2003. hlm 45

di Jawa dari Pagaruyung Minangkabau.⁵¹⁷ Legitimasi genologis dalam arti menggambarkan bahwa orang *Sindang* mengidentifikasi diri sebagai kelompok *Sosio-kultural* tersendiri saat berhadapan dengan Kesultanan Palembang. Orang *Sindang* bangga dengan karakter eksklusif sebagai pemberani, keras dan akrab dengan “budaya menjarah” negeri-negeri di luar daerah.⁵¹⁸ Golongan suku-suku *Sindang* memiliki sentimen sebagai kelompok sosial tersendiri seperti tercermin dari kedudukan mereka dalam Kesultanan Palembang.

Orang *Sindang* mengakui kedaulatan kesultanan, akan tetapi mereka tidak mau disamakan dengan matagawe daerah iliran, mereka merasa bebas dari ikatan feodalisme yang memberlakukan penduduk sebagai *Tiban dan Tukon*. *Matagawe* merupakan sumber pungutan pajak tenaga kerja atau praktek monopoli legitimasi atas mitos geneologis nenek moyang dijadikan kebijakan masyarakat *Sindang* untuk menganggap diri mereka sebagai masyarakat terhormat Kesultanan Palembang. Sudut pandang serupa juga dipedomani oleh orang-orang Palembang daerah iliran, mereka bangga disebut orang iliran. Apalagi apabila dihadapkan dengan orang uluan, orang Palembang di kawasan iliran mengasosiasikan diri sebagai bagian dari peradaban dunia maju, pusat kekuasaan dan menikmati berbagai kemakmuran yang mereka peroleh dari hubungan dagang.

Orang iliran cenderung menganggap diri mereka sebagai kelompok masyarakat yang menurut definisi Robert Redfield, mendukung “Tradisi besar” (*Great tradition*) dengan mendefinisikan masyarakat seputar pusat kerajaan.⁵¹⁹ Pusat kerajaan dimaksud merupakan sumber pranata serta fenomena nilai-nilai keyakinan dan dianggap tertinggi tidak dapat dijabarkan lagi. Disamping itu pusat kerajaan merupakan tempat sultan dan pembesar istana sebagai simbol kemegahan

⁵¹⁷ Collin if cit hlm 55-64 Galizia loe-cit hlm 57-69 Van Royen loc cit hlm 324-325 dalam Mustika Zet *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1925*. Penerbit Pustaka Indonesia Jakarta. 2003 hlm 45

⁵¹⁸ Lihat Robert Redfield. *Peasant Society And Cultural* (Chicago University of Chicago 1956) dalam Mustika Zet *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950* Penerbit LP3ES Indonesia Jakarta 2003 hlm 46

⁵¹⁹ Lihat Robert Redfield. *Peasant Society And Cultural* (Chicago University of Chicago 1956) dalam Mustika Zet *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950* Penerbit LP3ES Indonesia Jakarta 2003 hlm 46

budaya imperium kesultanan yang berhadapan dengan orang uluan mengandung makna udik atau keterbelakangan. Golongan masyarakat uluan merupakan *Steriotipe* dari sosio-kultural masyarakat petani, *The locus of a little tradition* yang didominasi oleh “Peradaban besar.”⁵²⁰ Masyarakat dataran tinggi suatu dunia yang terpisah dari peradaban kota yang terdapat di dataran rendah, sejarah mereka hampir selalu tetap merupakan pinggiran dari gelombang peradaban besar.

Pembelahan menjadi dua dunia yang terdapat dalam kasus Palembang, tercermin dalam masyarakat *Sindang* dataran tinggi dengan masyarakat *kepungutan* dataran rendah yang terkonsentrasi di Kesultanan Palembang. Salah satu perubahan (*Transformasi*) penting yang berlangsung pada Abad XIX M, dipersatukannya daerah *Sindang dan Kepungutan* di bawah kekuasaan kolonial yang berpusat di Batavia. Hubungan antara *Sindang* di kawasan uluan dengan *Kepungutan* di kawasan aliran semasa Kesultanan Palembang tercermin lewat kebijakan-kebijakan politik, ekonomi dan budaya. Kompleksitas kebijakan itu dilakukan oleh ikatan adat masyarakat yang terkait erat dengan kebijakan-kebijakan normatif yang menentukan tempat seseorang atau kelompok tertentu serta mempengaruhi prilaku pribadi atau kelompok dalam konteks masyarakat. Kebijakan masyarakat adat merupakan kunci mekanisme sosial politik yang dilestarikan secara turun-temurun seperti tercermin dalam undang-undang Simbur Cahaya.⁵²¹

Undang-undang itu sendiri sebenarnya hanya merupakan sebahagian dari kebijakan masyarakat adat yang tertulis, karena isinya lebih dominan menekankan masalah kewajiban ketimbang hak-hak masyarakat biasa dalam berbagai kegiatan dan tingkatan, maka kebijakan masyarakat adat yang tertulis itu jelas menguntungkan pihak kesultanan. Inti dari kekuasaan sultan berdasarkan kebijakan masyarakat adat yang tercermin dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian dapat dipahami pula bahwa hubungan antara penguasa “pusat” (kesultanan dan pembesar istana) dengan pedalaman

⁵²⁰ Brandel the Mediteranian and Word in the age of Philif II (New york an London herper and row, 1975) hlm 34

⁵²¹ Mustika Zet. *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950*. Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia Jakarta. 2003 hlm 51

sentralisasi dalam bentuk kekuasaan yang terpusat pada figur sultan. Sentralisasi kekuasaan yang terpusat pada sultan mengandung arti bahwa pusat bukanlah sekedar tempat akan tetapi sumber dari segala pranata dan dunia nilai-nilai serta kepercayaan yang mengatur orde sosial.⁵²²

Undang-undang Simbur Cahaya, pada mulanya merupakan aturan negeri yang menjadi dasar sultan untuk mengatur pemerintahan khususnya berkaitan dengan daerah uluan. Akan tetapi oleh kolonial Belanda aturan undang-undang tersebut diubah dan dijadikan undang-undang adat. Menurut catatan P. De Roo de la faille tentang undang-undang Simbur Cahaya cukup menarik, beliau mengatakan:

“Adalah pangeran Seding Ing Kenayan itu beristri sepupunya bernama Ratu Sinuhun, itulah yang tempo buat aturan negeri dari pada hasil-hasil sultan atas sekalian uluan dan yang mulai atur dari perintah-perintah tanam lada dan kapas, aturan perintah-perintah dan lain-lain sehingga sampai pada zaman ini. Semuanya uluan dan ada juga di dalam negeri, aturan tersebut piagam Ratu Sinuhun. Tiada sekali nama suaminya pangeran Seding Ing Kenayan, hanya tersebut nama Ratu Sinuhun lagi sampai sekarang sangat di permulia orang uluan dan setengah orang negeri atas kuburnya.”⁵²³

Penyebutan ini menunjukkan bahwa nama yang diberikan inilah yang paling dikenal dan di akui eksistensinya dalam masyarakat dan termasuk oleh ahli hukum Belanda Van den Berg, dialah orang yang pertama kali mengidentifikasi dari kalangan ahli hukum Belanda dan mempelajari “undang-undang Simbur Cahaya” ini secara ilmiah sebelum diundangkan sebagai undang-undang Simbur Cahaya. Undang-undang Simbur Cahaya ini sebenarnya bukanlah nama yang diberikan sejak awal akan tetapi ketika undang-undang ini pertama kali dikenal dengan sebutan “piagam Ratu Sinuhun” pada masa pemerintahan Sido Ing Kenayan. Ratu Sinuhun

⁵²² Naskah tulisan tangan pada KITL V Leiden No 201 dalam Husni Rahim. *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam Studi Tentang Pejabat Agama masa Kesultanan dan Kolonial* diterbitkan oleh Logos Wacana Ilmu Ciputat Jakarta. 1998 hlm 114

⁵²³ Muhammad Adil. *Dinamika Perubahan Hukum Islam di Palembang, Negara Undang-undang Simbur Cahaya*. Jurnal Nurani Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Vol 14, 2014 no 2 hlm 57-58

dikenal sebagai orang yang aktif membuat kebijakan yang berkaitan dengan kesultanan. Menurut Salman Aly pernyataan di atas memperlihatkan adanya kemungkinan nama Undang-undang Simbur Cahaya pada awalnya seperti yang di tulis ini Piagam Ratu Sinuhun.

Akan tetapi Salman Aly mengatakan bahwa perubahan nama “Piagam Ratu Sinuhun” menjadi “Undang-undang marga” pada masa pemerintahan Sultan Abdurahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam, setelah dilakukan perubahan dan diperluas pemberlakuannya, nama “Simbur Cahaya” baru diberikan pada waktu undang-undang ini diberlakukan sebagai aturan adat. Ketika Palembang berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda, dalam kedudukannya sebagai sumber legitimasi peradatan masyarakat. Secara logis undang-undang Simbur Cahaya telah berperan sebagai salah satu unsur dalam pembentukan watak dasar masyarakat, perlindungan dan pengaturan tentang berbagai aspek kehidupan masyarakat baik yang bersifat politis terlihat dalam aturan marga, Aturan dusun dengan birokrasinya akhlak pemerintahan, sopan santun, pernikahan dan aspek lainnya.

E. Dampak Kebijakan Kesultanan

Dampak kebijakan kesultanan terhadap ekonomi dan politik Palembang tidak dapat dilepaskan dari sosok sultan yang menjadi pigur kepemimpinan tertinggi di Kesultanan. Semenjak kesultanan berdiri pada pertengahan Abad XVI sampai Abad XVIII M selama lebih kurang 250 tahun terjadi silih berganti sultan-sultan yang berkuasa, di wilayah yang membentang dari daerah Empat lawang dan Rejang di sebelah Barat, Rawas di sebelah utara, Kisam dan Makau di sebelah selatan dan pulau Bangka dan Belitung di sebelah Timur.⁵²⁴ Wilayah yang begitu luas berada di posisi strategis dalam jalur perdagangan saat itu, disamping memiliki wilayah begitu luas, kesultanan ini menghasilkan barang tambang berupa timah di temukan tahun 1710 M. hasil perkebunan serta hasil hutan berupa Lada, Katun,

⁵²⁴ Veth. P.J. 1869. *Aarderijksdig Woorderboek Van Nederlandsch Indie Amsterdam, P.N. Van Kampen.* dalam Farida Wargadalem: *Jurnal Konflik Kepemimpinan di Kesultanan Palembang 1812-1824* Seminar Nasional oleh Independa Sum-Sel di Radio Republik Indonesia Palembang 2012 hlm 4.

Tembakau, Pinang, Sirih, Gambir, Nila, Tarum Godong, Pipit, dan Rami yang sangat besar dan kaya akan sumber daya alam.

Sultan sebagai pemimpin yang berkuasa secara turun-temurun dan dijamin oleh lembaga historis, penguasa tertinggi di pusat pemerintahan kesultanan adalah sultan memerintah tidak dibatasi oleh aturan-aturan hukum. Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan sultan di bantu oleh putra mahkota pangeran ratu. Pangeran ratu berperan sebagai calon sultan berkuasa penuh apabila sultan berhalangan dan sekaligus berfungsi sebagai penasehat.⁵²⁵ Dengan demikian dapat di pahami bahwa meskipun kekuasaan sultan tidak dibatasi oleh aturan-aturan hukum, akan tetapi pemerintahan kesultanan Palembang tetap diatur dengan rapi, begitu juga aparaturnya. kemudian untuk memperkuat stabilitas kesultanan diadakan peraturan-peraturan bagi para pedagang dan penduduk pendatang.⁵²⁶ Disamping itu pemegang kekuasaan tertinggi adalah sultan yang telah menentukan keputusan-keputusan selalu berdasarkan kepada al-Qur'an, Undang-undang dan Piagam-piagam.⁵²⁷

Di Kesultanan Palembang berlaku hukum-hukum adat yang bersumber pada kitab undang-undang "*Simbur Cahaya*", kemudian ditambah lagi dengan undang-undang wilayah yaitu undang-undang "*Sindang Mardike*"⁵²⁸ dalam bidang peradilan dikenal dua macam peradilan. *Pertama*, Peradilan yang mengadili perkara-perkara keagamaan di pimpin oleh pangeran penghulu. *Kedua*, Mengadili dalam perkara-perkara yang diancam dengan hukuman badan yang dipimpin oleh Temenggung Karto negoro. Sementara dalam pengelolaan pelabuhan yang berkuasa adalah Syahbandar, setiap kapal yang masuk dikenakan bea masuk pelabuhan yang besarnya

⁵²⁵ Sturler. 1855. *Java Government Gazette*. 2 Mei 1812 No. 10; 71 dalam Farida R Wargadalem 2012 hlm 5

⁵²⁶ Van Royen hlm 41. Dalam *Risalah Sejarah Perjuangan Kesultanan Palembang*. Team Perumus hasil-hasil diskusi Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang 1981 hlm 25

⁵²⁷ Van Sevenhoven *Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang* Penerbit Bhratara Jakarta 1971 hlm 25

⁵²⁸ Boedani dan Djovid. "*Tambo Kerajaan Sriwijaya*" Penerbit Terate, Bandung 1961 hlm 26. dalam H.A. Dahlan dan kawan-kawan. *Risalah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang* Oleh Team Perumus Hasil-hasil diskusi Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II. Palembang 1981

menurut banyaknya anak kapal. Kesultanan Palembang sejak dahulu mengadakan hubungan dengan luar negeri dalam bentuk hubungan dagang, hubungan dagang tersebut berdasarkan perjanjian (kontrak dagang) dengan tidak adanya hak monopoli. Contohnya kontrak dagang dengan VOC yang sudah ada semenjak Abad XVII M sampai awal Abad XIX M.

Di samping itu, pada masa Sultan Abdurrahman, Kesultanan Palembang tidak hanya berpengaruh di dalam negeri akan tetapi telah melampaui batas-batas wilayah Palembang. Daerah-daerah di sekitar yang merupakan tetangga kesultanan sering datang ke Kesultanan Palembang untuk meminta bantuan menyelesaikan krisis yang mereka hadapi,⁵²⁹ kadang-kadang permohonan ini dikabulkan oleh sultan dan kadang-kadang tidak. Telah dikemukakan terdahulu bahwa Undang-undang yang dibuat Ratu Sinuhun di masa Sultan Abdurrahman dijalankan secara efektif. Mula-mula mengadakan evaluasi terlebih dahulu dan kemudian dilakukan perubahan disesuaikan dengan keadaan masa itu, lalu Undang-undang tersebut diberi nama undang-undang “Sindang Merdika” Undang-undang ini disebarakan ke pedalaman yang berada di dalam kuasanya agar di pedomani, yang menariknya penguasa-penguasa pedalaman mematuhi.⁵³⁰ Disamping memantapkan struktur Kesultanan, Sultan Abdurrahman dengan giat mengukuhkan kewibawaan pemerintahan di kalangan penguasa pedalaman. Untuk itu ia melakukan perjalanan ke pedalaman selama tahun 1691-1706 M, dan hasilnya cukup menggembirakan. Pajak-pajak semakin mengalir

⁵²⁹ Ketika Kesultanan kota baru di tanah Jambi mengalami krisis karena baru saja berhasil menguasai bajak laut, pulo berhala, atas permintaannya sultan mengirim pasukan untuk membantu Jambi, turut dalam rombongan itu daeng mangika dari Makassar bersama pendekar-pendekarnya yang berbaju besi, mereka berharap kalah akan beroleh imbalan berupa kekuasaan, tahun 1688 M Jambi bersama-sama orang Bugis-Makassar dan raja-raja laut dari Minang Kabau membuat kerusuhan di Batang Hari, bahkan sampai ke pulau Bangka, Belanda kemudian meminta sultan untuk mengatasi hal itu. Suatu ketika penguasa-penguasa Lampung berontak terhadap Sultan Banten dan mereka meminta bantuan Sultan Palembang untuk membantu perjuangan mereka. Permohonan ini tidak dikabulkan sultan karena dihalang-halangi oleh ayahnya Raden Aria di samping juga tidak mendapat restu dari Belanda.

⁵³⁰ Salman Ali. 1986. *Sejarah Kesultanan Palembang. Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. K.H.O. Gajahnata Sri Edi Suasono. *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. Diterbitkan oleh Universitas Indonesia UI Press. Jakarta 1986 hlm 151

dan masuk ke kas Kesultanan, penguasa-penguasa di Pasemah pada periode sebelumnya kurang berintegrasi kepada Kesultanan, kini menerima baik perlindungan sultan, dan sebagai bukti untuk itu mereka turun ke ibu kota Milir Seba dan bersumpah setia di Bukit Siguntang.⁵³¹

Dengan demikian dapat dipahami bahwa menguatnya penguasa dalam struktur pemerintahan tidak terlepas dari dukungan ibu kota (iliran) dan daerah pedalaman yang sering disebut daerah uluan.⁵³² Pemerintah daerah uluan dibagi kepada tiga bentuk wilayah pemerintahan yaitu daerah “*Sikap*”, daerah “*Kepungutan*”, dan daerah “*Sindang*”. Daerah *sikap* merupakan daerah kelompok dusun atau himpunan dusun yang tidak berada dalam suatu wilayah Marga yang diperintah langsung oleh pegawai Kesultanan.⁵³³ Daerah *sikap* ini dibebaskan dari kewajiban pajak, akan tetapi mereka mempunyai kewajiban bekerja kepada sultan, kerja dengan sultan ini dikenal dengan *Gawe Rajo*,⁵³⁴ merupakan kerja yang bersifat langsung kepada sultan seperti mengayuh perahu atau sebagai penunjuk jalan, daerah *Sikap* ini biasanya mendapat berbagai tugas khusus dari sultan.

Kemudian daerah *Kepungutan* merupakan wilayah kesultanan yang berada di pedalaman dan dipimpin oleh seorang *Raban* dan *Jenang* bertanggung jawab kepada *Pepatih*. *Raban* atau *Jenang* merupakan jabatan perantara antara sultan dengan *Pesirah* (kepala marga) atau *Proatin* (kepala dusun), perintah sultan disampaikan melalui *Raban* atau *Jenang*.⁵³⁵ *Raban* atau *Jenang* mendapatkan sumber penghasilan dari

⁵³¹ Salman Ali. *Sejarah Kesultanan Palembang* dalam KHO Gajahnata. *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan* Penerbit Universitas Indonesia UI Press. Jakarta 1986 hlm 153

⁵³² Daerah uluan adalah daerah yang berada di hulu Sungai Batang Hari Sembilan sebagai lawan Palembang yang berada di daerah hilir.

⁵³³ J.W. Van Royen. *De Palembang Sche Margaan Haar Gronden Waterechten Leiden G.L.* Van den Berg Andri Anis boek Handeel, 1927 hlm 37 Dalam Rahim. *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kolonial di Palembang* Penerbit Logos Wacana ilmu Jakarta 1998 hlm 63

⁵³⁴ Setelah Palembang dibawah Belanda maka istilah *Gawe Rajo* tetap dipakai dengan istilah Belanda *Beerendienst* pekerjaan badan yang diwajibkan atas orang-orang pribumi laki-laki di daerah Palembang.

⁵³⁵ Lihat JL. Van Sevenhoven hlm 30-31 dan lihat juga H.M Ali Amin. *Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam dan Beberapa Aspek Hukumnya* dalam KHO Gajahnata *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan* Penerbit Universitas Indonesia UI Press Jakarta. 1986 hlm 93-94

pajak atau cukai berupa hasil bumi yang dikumpulkan setiap saat oleh *pasirah* dan *Proatin* untuk disampaikan kepada sultan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa *Raban* dan *Jenag* merupakan suatu jabatan yang di amanahkan oleh sultan suatu jabatan perantara antara pusat kesultanan dengan daerah pedalaman. Kemudian daerah *Sindang* merupakan daerah perbatasan dengan daerah *Kepungutan*, daerah *Sindang* ini mengakui sultan akan tetapi mereka diberikan kebebasan oleh sultan untuk mengatur daerahnya sendiri (*Otonom*). Daerah *Sindang* disebut juga sebagai daerah sekutu dan daerah ini dipimpin oleh seorang depati (Raja kecil) yang bebas (*Vry heren*), tidak dibebani pajak dan tidak pula membayar upeti, akan tetapi berkewajiban melindungi perbatasan daerah Kesultanan dari serbuan orang luar.⁵³⁶

Berkaitan dengan menguatnya pemerintahan Kesultanan Palembang tidak terlepas dari keterlibatan sultan dan dibantu oleh pejabat-pejabat negara yang biasa disebut empat manca negara yang biasa yakni pepatih (pangeran natadiraja, pangeran nata agama, tumenggung karta, dan pangeran citra).⁵³⁷ Pepatih membantu sultan dalam melaksanakan perintah-perintahnya. *Pepatih* inilah yang mengawasi pengumpulan pendapatan kesultanan, menerima laporan, semua urusan kerajaan, menyampaikan urusan terkait urusan pajak dan kerja wajib bagi sultan menguasai alat-alat perlengkapan perang, memberikan nasehat dan pertimbangan kepada sultan terkait kebijakan yang dibuatnya. sultan juga dibantu oleh adipati atau putera mahkota yang memainkan peran sebagai nasehat langsung, wakil, dan pengganti sultan manakala sultan sendiri berhalangan.⁵³⁸

Dari data-data terdahulu dapat dipahami bahwa dengan adanya sistem serta struktur pemerintahan dan peradilan seperti yang dikemukakan diatas maka akan menguatlah sistem kekuasaan serta akan terjaminlah tertib masyarakat, dengan tertibnya masyarakat maka akan menumbuhkan rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga akan

⁵³⁶ Ketika Kesultanan Palembang Melawan Belanda, Berbagai daerah *Sindang* ini di minta bantuannya.

⁵³⁷ De Roo de La Faille. *Dari Zaman Kesultanan Palembang*. Penerbit Bhratara Jakarta 1971 hlm 31-33

⁵³⁸ Van Sevenhoven. *Lukisan Tentang Ibukota Palembang*. Penerbit Bhratara Jakarta 1971 hlm 14-15

berkembanglah berbagai aktivitas yang ada di dalam masyarakat di wilayah Kesultanan Palembang saat itu seperti sektor pertanian, perekonomian, perdagangan, budaya, kesenian, dan kesejahteraan masyarakat akan terwujud..

1. Aspek Pendapatan

Kesultanan Palembang kalau di lihat dari aspek pendapatan dan sumber daya alam bukanlah merupakan suatu daerah yang menghasilkan. Sumberdaya alam tidak terdapat di Kesultanan Palembang. Akan tetapi pusat Kesultanan Palembang ini mampu dan berhasil mengelola sumberdaya alam yang terdapat di wilayah sekitarnya. Para penguasa kesultanan yang berkedudukan di Kesultanan Palembang mempunyai daerah kekuasaan yang kaya akan sumber daya alam. Sumberdaya alam tersebut misalnya, terdapat di pulau Bangka dan Belitung yang kaya akan hasil tambang timah. Disamping itu daerah pedalaman yang kaya akan hasil hutan dan kebunnya kemudian wilayah-wilayah inilah yang sesungguhnya menjadi sumber penghasilan untuk menopang perekonomian untuk Kesultanan Palembang.⁵³⁹

Berdasarkan latar belakang sejarah “pendapatan” dan perkembangan Kesultanan Palembang tidak terlepas dari penempatannya di jalur perdagangan di muara-muara Sungai besar yang menghubungkan daerah hilir dan daerah hulu sebagai daerah penghasil sumber daya alam. Dengan demikian hidup dan berkembangnya Kesultanan Palembang dikarenakan faktor perdagangan sebagai sumber pendapatan. Kesultanan Palembang tidak dapat hidup dan berkembang tanpa daerah-daerah penghasil baik yang berada di hulu maupun di hilir musi. Oleh karenanya para penguasa kesultanan telah menetapkan kota Palembang sebagai pusat pemerintahan. Sultan tetap mengusahakan daerah-daerah tersebut sebagai sumber serta penopang penghasilan dan wilayahnya tetap berada di bawah kekuasaannya. Sejak masa Kerajaan Palembang-Islam hingga masa Kesultanan Palembang wilayah kekuasaannya meliputi daerah-daerah pedalaman dan

⁵³⁹ Bambang Budi Otomo. 2015. *Perkembangan Kota Palembang Menuju Palembang Modern*. Pemerintah Daerah Kota Palembang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Deposit Palembang 2005 hlm 188

anak-anak Sungai hingga keperbatasan Bengkulu, Lampung dan Pulau Bangka dan Belitung.⁵⁴⁰

Berdasarkan letaknya yang strategis dan sentral ini menyebabkan Kesultanan Palembang sebagai kota bandar cepat berkembang dan memegang peranan penting dalam bidang politik, ekonomi dan penyebaran Islam karena Palembang merupakan titik pertemuan antara pantai dan pedalaman. Daerah pantai menerima pengaruh segala jenis kebudayaan, sementara daerah pedalaman menyalurkan hasil-hasil hutan, kebun dan kain-kain. Itulah sebabnya ruang lingkup kehidupan sosial ekonomi Kesultanan Palembang bertopang pada aktivitas pelayaran-perdagangan. Pada umumnya Sultan Palembang menunjuk dan mengangkat *Syahbandar*.⁵⁴¹ Dengan tugas khusus *Pertama*, Merupakan perdagangan dan pelayanan. *Kedua*, Memungut bea masuk dan keluar. *Ketiga*, Menjaga agar pedagang-pedagang asing tidak menemui kesulitan dari perusuh-perusuh yang tidak bertanggung Jawab.

Syahbandar merupakan lembaga dalam sistem Kesultanan Palembang, nampaknya tidak hanya mengurus bea cukai dan perdagangan saja, akan tetapi juga mengurus orang asing yang akan bertemu dengan sultan. Selain *Syahbandar* ada juga lembaga lain yang juga berusaha untuk memasukkan pendapatan dan keuangan sultan yang dinamakan *fexo*. *Fexo* berasal dari pedagang Melayu yang kaya raya memberikan bantuan keuangan kepada sultan, sehingga mereka dianggap sebagai anak emas sultan. Karena tugasnya istimewa sebagai kasir Kesultanan dan berkewajiban menambah khazanah pendapatan dan keuangan sultan, maka mereka diberi gelar kehormatan kebangsawanan. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa sumber pendapatan dan keuangan sultan, *Pertama* Berasal dari berbagai macam pajak yang berasal dari daerah uluan dan kegiatan para pedagang asing dalam Kesultanan Palembang. *Kedua*, Berasal dari sistem monopoli perdagangan yang disebut *Tiban* dan *Tukon* yaitu suatu hak sultan untuk membeli barang-barang dari daerah uluan dengan

⁵⁴⁰ Bambang Budi Otomo *Perkembangan Kota Palembang dari Wanua Sriwijaya Menuju Palembang Modern*, Pemerintah Daerah Kota Palembang Dinas Parawisata. Deposit Palembang 2015 hlm 189

⁵⁴¹ Anom Se Van Palembang dalam TNI II (1844) hlm 281 bandingkan dengan P. De Roo de La Faille *Dari Zaman Kesultanan Palembang*. Penerbit Bhratara Jakarta. 1971 hlm 36

harga murah. Daerah *sindang* atau *sikap*,⁵⁴² di bebaskan dari *Tiban* dan *Tukon* karena daerah ini sudah ditugaskan sultan untuk mengatur pengangkutan barang milik sultan lewat jalur Sungai.

Kasus Palembang pra kolonial berikut sistem monopoli perdagangan *tiban* dan *tukon* serta sistem politik kesultanan yang menyertainya jelas memperlihatkan sentralisasi kekuasaan pihak kesultanan. Segenap sumber daya dikerahkan dengan sedemikian rupa untuk mendukung kesultanan. Harta kekayaan dikumpulkan dan didistribusikan secara merata kepada bawahan demi menjamin kesetiaan politik mereka. Cara lain untuk melanggengkan kekuasaan adalah dengan menyerahkan atau menugaskan jabatan tertinggi kepada orang-orang kepercayaan semacam *Raban* dan *Jenang*. Aktivitas dagang dan tukar-menukar di daerah kesultanan memang mengalami kemajuan yang pesat pada Abad XVII dan Abad XVIII M. Sultan dan para pembesar Istana mampu menguasai sektor produksi, distribusi dan tukar-menukar barang import melalui monopoli *Tiban* dan *Tukon*. Sementara kaum Bangsawan pada umumnya hanya banyak mengandalkan sektor produksi. Mereka mengandalkan berbagai kegiatan kerajinan dan dengan modal sendiri membangun kelompok-kelompok persekutuan “kepengusahaan” dan memperkerjakan para *Miji*.⁵⁴³

Sebelum dihapuskannya Kesultanan Palembang pada tahun 1824 M sosial, politik dan ekonomi di Kesultanan Palembang dikuasai oleh sultan dan lingkungan keraton sebagai pusat kesultanan. Kesultanan di waktu berkuasanya berusaha mengontrol produksi dan distribusi, monopoli kesultanan atas perekonomian wilayah kesultanan salah satunya dalam sistem *Tiban* dan *Tukon* yang dikenakan kepada petani yang masuk dalam wilayah *Kepungutan* dan *Sikap*. Dalam sistem *Tiban* dan *Tukon* penduduk di wilayah *Kepungutan* dan *Sikap* sebagai abdi sultan diharuskan menanam tanaman yang sudah ditentukan oleh pihak kesultanan, menjualnya kepada *Jenang* dan *Raban* atau Pasirah untuk dibawa ke ibukota kesultanan kemudian dijual di pasar Internasional. Melalui sistem *Tiban* dan *Tukon*

⁵⁴² Anom. *Bijdrage Tot de Kennis der Oorspronke Lijke Instellingen Van Palembang* TNI. II 1853 hlm 454

⁵⁴³ Mustika Zet. *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950*. Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia Jakarta. 2003 hlm 42

masyarakat di pedalaman menukar komoditasnya dengan garam atau tekstil dan kebutuhan lainnya yang pendistribusiannya diatur oleh *Jenang* atau *Pasirah*.

Sementara dalam sistem *tukon* komoditas dibeli dengan uang namun biasanya uang yang dibayarkan oleh *Jenang* atau *Pasirah* pada dasarnya adalah peran yang diperoleh kalangan priyai. Selain dari pembelian hasil pertanian sumber pendapatan priyai juga dari tugasnya sebagai pelaksana kekuasaan sultan yang memonopoli perdagangan timah Bangka dan bea atas perdagangan antara pulau.⁵⁴⁴ Dengan demikian pendapatan yang diterima oleh sultan melalui sistem upeti, pajak dan pengerahan tenaga penduduk (*Matagawe*). Untuk keperluan sultan sebenarnya tidak begitu banyak, akan tetapi sebelum jatuh ke tangan sultan bagian terbesar masuk ke kantong-kantong priyai yang mendapat jabatan. Dengan kata lain baik penggunaan tenaga kerja maupun upeti yang masuk ke kas kesultanan terlebih dahulu dipotong persenan bagi para pejabat yang dilewati oleh prosedur tersebut. Hal ini terjadi akibat sistem keuangan di kesultanan tidak dilakukan secara terpusat dan tidak ada penggajian yang dikenal pada organisasi modern.

Sementara untuk membiayai keperluan pribadi atau jabatan, para pejabat kesultanan harus mencari sumber pendapatan dan keuangan dari hak-hak istimewa yang diberikan sultan. Kekayaan para bangsawan ini dapat berupa uang tunai atau barang yang bersifat mobil, mudah disembunyikan atau dibawa ke tempat lain sehingga sukar untuk di awasi.⁵⁴⁵ Disamping itu, pendapatan Kesultanan Palembang, sebagian diperoleh dari bantuan *Fexo* yaitu pedagang Melayu yang kaya raya sering memberikan bantuan kepada sultan dalam segi keuangan, sehingga mereka dianggap sebagai anak mas sultan. Oleh karena tugas istimewa sebagai kasir kesultanan, maka dia berkewajiban untuk menambah khazanah pendapatan dan keuangan sultan, maka diberi gelar kebangsawanan atau diberi tanah. Sultan sebagai penguasa

⁵⁴⁴ Bambang Purwanto. *From Dusun To Market Native Rubber Cultivation in Southern Sumatera 1890 -1940* (Phd Thesis in School Of Oriental and African Studies University of London 1992. hlm 29

⁵⁴⁵ Ryllian Chandra. *Islam dan Warisan Kesenian Kesultanan Palembang Darussalam*. Dosen Prodi Politik Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 2018

tertinggi di daerah ini mempunyai kekuasaan atas tanah yang berada di wilayah Kesultanan Palembang dan tanah tersebut diurus oleh petugas khusus yang disebut “*Jenang*.” Di wilayah Kesultanan Palembang pekerjaan “*Jenang*” mencakup kepengurusan keraton, masjid dan makam-makam raja serta bangsawan sakral lainnya.⁵⁴⁶

Oleh karena kecakapannya dalam mengurus asset-aset kesultanan maka sultan memberikan kedudukan untuk ikut serta memerintah sebagian wilayah kesultanan.⁵⁴⁷ Namun sumber penghasilan kesultanan yang lebih besar sesungguhnya berasal dari kegiatan-kegiatan perdagangan. Bahkan dapat dikatakan bahwa sektor perdagangan merupakan sektor terpenting pada masa Kesultanan Palembang Darussalam. Pedagang Kesultanan Palembang bukan hanya berlangsung dalam ruang lingkup domestik, melainkan juga menjangkau pasar ekspor. Sektor perdagangan menjadi penopang utama kemakmuran Kesultanan dan masyarakat.

Ramainya aktivitas perdagangan di Kesultanan Palembang tergambar jelas laporan Van Sevenhoven dan P De Roo de la faille mengenai pelabuhan di Palembang. Dikemukakan bahwa baik pada waktu siang maupun malam hari aneka ragam perahu berlalu lalang dengan muatan barang dagangan, dari pedagang eceran hingga pedagang besar China, Arab, dan Eropa. Seorang pegawai Inggris William Marsden menjelaskan bahwa terdapat berbagai produksi yang dihasilkan oleh masyarakat di wilayah Kesultanan Palembang. Termasuk damar, gambir, gading gajah, rotan dan beberapa produk hutan lainnya, akan tetapi komoditas lada dan timah merupakan produk terpenting. Perdagangan lada dan timah merupakan sumber pendapatan terpenting bagi Kesultanan Palembang.⁵⁴⁸

Tentu saja sultan tidak menjalankan dan mengatur sendiri aktivitas perdagangan tersebut melainkan menyerahkan pengurusnya kepada pejabat yang dipercayainya yang biasa

⁵⁴⁶ Alfian Ibrahim. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme Daerah Sumatera Selatan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah Nasional 1983/1984. Jakarta 1983 hlm 19

⁵⁴⁷ P. De Roo de la faille. *Dari Zaman Kesultanan Palembang* Penerbit Bhratara Jakarta. 1971 hlm 36

⁵⁴⁸ William Marsden. *The History of Sumatera Mencakup Peran pemerintah Hukum, Adat, dan Tata Kehidupan Penduduk lokal*. Penerbit Indoliterasi Grouf. Jogjakarta 2008. hlm 333

disebut dengan *Syahbandar*. Tugas yang diberikan oleh Sultan Palembang kepada *Syahbandar* meliputi dan mengurus ke luar masuk kapal-kapal yang ada di pelabuhan menjaga keamanan para pedagang dari gangguan para penjahat memajukan pelayaran dan perdagangan. Disamping itu, *Syahbandar* juga diberi wewenang untuk mengadili pedagang-pedagang yang melakukan pelanggaran di pelabuhan.⁵⁴⁹ Dengan kewenangan yang cukup besar itu yang didapatkan dari pihak kesultanan. *Syahbandar* sebaliknya mempunyai kewajiban untuk menanggung semua biaya perbekalan istana dan berbagai keperluan sultan lainnya.⁵⁵⁰

Perdagangan di Kesultanan Palembang, baik untuk pasar domestik mampu ekspor meliputi beragam barang. Sementara barang-barang dagangan yang dimasukkan ke wilayah Kesultanan Palembang diantaranya kain dari Eropa dan Jawa sutera, benang emas, panci dan barang pecah belah dari China dan juga obat-obatan dan teh. Di samping itu barang-barang yang diperdagangkan keluar meliputi produk-produk seperti damar, rotan, getah kayu oka, gading gajah, tanduk kerbau, sarang burung, dan berbagai produk lainnya. Pada tahun 1822 M harga gading gajah per pikul bisa mencapai 200 gulden, sedangkan damar wangi untuk kualitas terbaik dijual dipasaran Kesultanan Palembang dengan harga 50 gulden per pikul. Untuk harga jual rotan paling tinggi pada tahun 1822 M mencapai 40 Gulden per 100 ikat dan untuk bensoe dengan kualitas terbaik dijual dengan harga 100 Gulden per pikul.⁵⁵¹

Di samping itu ada juga barang lainnya yang diperdagangkan sebagai sumber pendapatan Kesultanan Palembang berupa hasil-hasil kerajinan. Eksport barang kerajinan dari Kesultanan Palembang ke Siam diperkirakan mencapai 500 hingga 1000 ringgit Spanyol pertahun.⁵⁵² Kalau diperhatikan pada tahun 1822 M misalnya produksi kerajinan

⁵⁴⁹ Supriyanto. *Pelayaran dan perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864* Penerbit Ombak Jogjakarta 2013. hlm 50

⁵⁵⁰ William Marsden. *The History of Sumatera Mencakup Peran Pemerintah Hukum Adat dan Tata Kehidupan Penduduk Lokal*. Penerbit Indoliterasi Grouf Jogjakarta. 2008. hlm 333

⁵⁵¹ Van Sevenhoven. *Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang*. Penerbit Bhratara Jakarta. 1971 hlm 69-70

⁵⁵² Farida R Wargadalem. *Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik 1804-1825* Penerbit Kepustakaan populer gramedia gedung Kompas gramedia Jakarta 2017 hlm 14-15

Kesultanan Palembang mencakup antara lain benang layar, tikar, taplak sampang, taplak sutera, taplak bersulam emas, kotak kuningan, kotak firi, periuk dan barang-barang pecah belah lainnya, harga taplak sutera mencapai 20 gulden per helai, bahan untuk taplak yang bersulam emas di jual di pasaran dengan harga 44 gulden perhelai.⁵⁵³ Oleh karenanya dari semua komoditas perdagangan yang dikirim keluar wilayah Kesultanan Palembang yang paling penting sumber pendapatan Kesultanan Palembang secara ekonomi adalah timah dan lada. Komoditas perdagangan kedua barang ini sangat menonjol dari segi volume dan nilai dibandingkan dengan barang-barang lain.

Dengan demikian menurut Andaya,⁵⁵⁴ alasan mendasar di balik mencuatnya Kesultanan Palembang sebagai salah satu kesultanan terkaya dan termakmur di nusantara bukanlah merica atau lada. Akan tetapi lebih karena eksploitasi dan perkembangan pertambangan timah di Kepulauan Bangka. Keberadaan komoditas di Bangka telah diketahui sejak akhir Abad XVII M dan walaupun tidak pernah dieksport dalam jumlah besar, tampaknya komoditas timah dipergunakan untuk membuat mata uang “*Picis*” (koin mata uang logam) dan amunisi. Meskipun begitu VOC baru mulai menyadari keberadaan timah di Bangka pada tahun 1717 M menyusul pelarian Sultan Anom kesana.⁵⁵⁵ Pada tahun 1722 M sejumlah faktor pendorong keterkaitan Belanda yang lebih besar terhadap timah, karena timah dihargai sebagai pemberat kapal yang menuju Eropa dan timah juga mempunyai pasar yang bagus di India, akan tetapi harapan-harapan mendesak dari VOC bahwa timah yang digunakan untuk membeli teh China yang sekarang amat diminati Eropa.

⁵⁵³ Van Sevenhoven. *Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang*. Penerbit Bhratara 1971 hlm 71-72

⁵⁵⁴ Lionardy Andya. *Hidup Bersaudara Sumatera Tengah Pada Abad XVII dan XVIII*. Penerbit Ombak Jogjakarta 2016. hlm 313

⁵⁵⁵ Tanggal ini diberikan dua kali dalam sumber-sumber VOC. VOC 1895 Palembang ke Batavia, 9 Maret 1717 M Vol 15. Daftar kedua 1961 Palembang ke Batavia 2 September 1721 M Vol 10. Sumber-sumber lain menyebutkan bahwa pertambangan mulai dikembangkan secara komersial oleh penduduk lokal pada 1722 M sebuah tanggal yang jamak ditentukan dalam tertentu, lihat *Van der Chijs Nederlandsch Indisch Plokoatboek* VII hlm 66. Untuk catatan lebih luas tentang Sejarah pertambangan timah di Bangka. Lihat heidhues Bangka. Tin and Mentok Pepper

Timah merupakan salah satu dari sedikit komoditas yang dapat dijual Belanda dengan hasil yang menguntungkan di China. Di China timah dapat digunakan segala macam produk, sebagai bahan dasar untuk memproduksi peralatan, baik untuk ekspor maupun untuk kebutuhan rumah tangga. Upacara keagamaan dan pembuatan kanister teh, jauh sebelum VOC mengetahui tentang simpanan timah Bangka. Kapal-kapal China langsung berlayar menuju pulau Bangka untuk memborong persediaan timah di sana. Dengan demikian dapat di pahami bahwa kapal-kapal Kesultanan Palembang menuju pulau Jawa juga mengangkut timah. Seolah-olah berfungsi sebagai pemberat belaka akan tetapi pada kenyataannya untuk di jual ke Batavia. Kemudian pada desember 1719 M Sultan Ratu mengirimkan 36.000 pon pasir timah dan 20.000 pon lempengan timah ke Batavia.

Sultan ratu mengatakan kepada Belanda bahwa dia berencana mendorong orang-orang Bangka untuk mengekstensifkan penambangan timah mereka.⁵⁵⁶ Walaupun perjanjian 1722 M menjanjikan VOC sebuah hak monopoli terhadap timah Bangka, baik Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo maupun Belanda tidak menyadari betapa rapuhnya kekuasaan Kesultanan Palembang terhadap pulau Bangka. Bahkan pada tahun 1722 M ketika kontrak dengan Kesultanan Palembang diperbaharui, perdagangan timah menjadi kurang penting dalam Perekonomian lokal. Baru pada tahun 1729 M perkembangan timah Bangka dikatakan menjadi sumber utama.

Pendapatan kekayaan dan kesejahteraan sultan dan masyarakat dengan jumlah komoditas 4000 sampai 5000 pikul timah dikirim setiap tahunnya ke Loji Belanda, Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo menyadari betul bahwa sumber pendapatannya berganti pada keberlanjutan perkembangan pertambangan timah. Akan tetapi Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo mengalami kendala karena kurangnya sumberdaya manusia untuk memperluas dan membuat pertambangan baru. Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo mengambil langkah awalnya orang China telah menjadi bagian

⁵⁵⁶ VOC. 1945. *Palembang ke Batavia, 29 Desember 1719 Vol 6*. Heidhous, Bangka TIN and Mentok Pepper hlm 3, 23 N dalam Andaya. *Hidup Bersaudara Sumatera Tenggara pada abad XVII-XIX* Penerbit Ombak Jogjakarta 2016 hlm 314

penting dan menyatu dengan Perekonomian Kesultanan Palembang selama beberapa generasi langsung diterima untuk mendapatkan pekerjaan baru itu tanpa konflik. Tentu saja komunitas China peranakan di Kesultanan Palembang sedikit banyak dianggap telah menjadi “Keluarga.”⁵⁵⁷

Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo memiliki sejumlah istri berdarah China dan masalah bisnisnya juga dikelola dan ditangani oleh pedagang China lokal, merekalah yang menyimpan dan menjaga buku neraca keuangan, mengawasi berbagai pengiriman merica bernegosiasi dengan Belanda dan berurusan dalam berbagai hal, diantaranya menarik peredaran mata uang *Picis* yang lama dan mencetak mata uang *Picis* yang baru.⁵⁵⁸ Para saudagar terkemuka dari golongan keturunan Sultan Palembang memang cukup berpengaruh untuk menentang pemilihan Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo terhadap Kapitan China, dan mereka memiliki calon sendiri sebagai pengganti. Kedatangan keluarga Mas Ayu ke kampung mereka di sekitar Mentok memperkuat kedudukan sanak kerabat Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo yang berasal dari keturunan. Tatkala Thomas Horsfield mengumpulkan tradisi lisan dua generasi berikutnya, diketahui bahwa pemimpin Mentok yang asli merupakan ayah salah satu istri Sultan Mahmud Badaruddin China keturunan dimana keluarganya telah menjadi muslim selama beberapa generasi.

Menurut Horsfield,⁵⁵⁹ dibawah kepemimpinannya Mentok dengan berbagai upaya berkelanjutan telah dibuat kebijakan untuk membersihkan hutan dan mengembangkan pertanian, dalam upaya mensejahterakan masyarakat melalui pertanian dan perkebunan lada. Dilihat dari konteks kesejahteraan masyarakat Mentok dan juga di Kesultanan Palembang mengindikasikan bahwa banyaknya masyarakat khususnya di Kesultanan Palembang yang berangkat

⁵⁵⁷ Barbara Watson Andaya. *Hidup Bersaudara Sumatera tenggara Pada Abad XVII dan XVIII* Penerbit Ombak Jogjakarta 2016. hlm 319

⁵⁵⁸ Nilai tukarnya sekarang 16 bundel kecil atau 5-*Picis* sampai 1 bundel besar. Satu bundel besar (Delapan ribu *Picis*) setara dengan 1 *Real*, sebagai contoh dari catatan kerajaan lihat VOC 2761 M Raja Palembang ke Batavia diterima. Pada 10 Februari 1750 M Vol 23. Raja Palembang ke Batavia diterima pada 10 Oktober 1750 M.

⁵⁵⁹ Horsfield. *Report on the Island of Bangka*. hlm 309 dalam Barbara Watson Andaya. *Hidup Bersaudara Sumatera Tenggara pada abad XVII-XIX* Penerbit Ombak Jogjakarta 2016 hlm. 320

menunaikan ibadah haji. Dalam sejarah haji Indonesia dan di Kesultanan Palembang pada khususnya cukup menunjukkan perhatian yang tinggi karena adanya hubungan Palembang dengan Makkah telah terbentuk semenjak lama sebelum adanya kesultanan. Orang-orang Palembang yang berangkat haji hampir setiap tahun ada, hal ini dapat diperhatikan dalam laporan pemerintah Belanda dalam *kolonial verslag*.⁵⁶⁰ Laporan pemerintahan Belanda tersebut menyajikan tabel jemaah haji Indonesia setiap tahun, mengingat jemaah haji Indonesia khususnya Palembang cukup besar.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa akrabnya Palembang dengan Makkah, disamping itu ada juga ulama-ulama dan pengarang kitab-kitab agama terkenal pada Abad XVII dan XVIII M berasal dari Palembang dan bermukim di Makkah. Dalam sejarah “politik haji” di Indonesia Dendells merupakan gubernur jenderal pertama yang memerintahkan jemaah haji harus memakai pas jalan alasan yang dikemukakan tentang pemakaian pas jalan tersebut demi terjaganya keamanan dan ketertiban.⁵⁶¹ Kemudian dikuatkan dengan pernyataan lebih tegas dikemukakan oleh Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles (1811-1816 M) beliau memandang umat Islam yang menunaikan ibadah haji ke Makkah sebagai salah satu bahaya politik. Raffles beranggapan para haji ini setelah pulang dianggap oleh masyarakat sebagai orang suci dan mempunyai kekuatan ghaib (*super natural power*), oleh karenanya mereka diawatirkan mempengaruhi masyarakat dan menghimpun kekuatan untuk menentang orang Barat.⁵⁶² Sikap Dendells dan Raffles diatas tersebut nampaknya berpengaruh

⁵⁶⁰ Kolonial Verslag, Mulai Melaporkan Jemaah haji Indonesia secara teratur mulai tahun 1853 dan untuk laporan Palembang dan daerah luar Jawa baru dilaporkan mulai tahun 1853 M.

⁵⁶¹ Lihat Snouck Hurgronje. *Makkah In The Letter Part Of The 19 th Century*. Leiden E. J. Brill 1913 hlm 289. Dalam Husni Rahim *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam Studi Tentang Prjabat Agama masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*. Penerbit PT Logos Wacana Ilmu Ciputat Jakarta 1986 hlm 179.

⁵⁶² lihat G.W.J. Drewes *Dictionari ForTreveller On The Mystic Part The Hague Martinus Nijhoff BKI* 81. 1977 hlm 219-229 lihat juga Karel A Steen Brink *Mencari Tuhan dengan kacamata Barat Yogyakarta Institut Agama Islam Negeri Sunan Klijaga Press* 1988 hlm 113-185-189. lihat pula Snouck Hurgronje. dalam Husni Rahim *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*. Penerbit PT Logos Wacana Ilmu Ciputat Jakarta. 1986 hlm 179

besar terhadap pengawasan dan mengatur pelaksanaan ibadah haji dari Indonesia termasuk juga di Kesultanan Palembang, tidak heran setelah masa itu muncul beberapa ketentuan yang baru kadang-kadang tampak aneh dan sulit diterima oleh akal sehat.

Kebijakan “politik haji” tersebut didasari oleh kekhawatiran Raffles dan Dendells *Pertama*. Kedudukan haji dalam masyarakat dihormati, karena dia berpeluang menjadi pemimpin, sebagai seorang pemimpin dia mampu menggerakkan orang khususnya untuk menentang para penjajah. *Kedua*, kenyataan sejarah menunjukkan adanya pemberontakan yang dipelopori oleh para haji contohnya kasus “perang jihat Palembang” Perang Jihad Cilegon” dan pemberontakan “Mutimi di India.” *Ketiga*, haji sipatnya kosmopolitan dimana para jemaah haji bertemu dengan jemaah haji dari seluruh dunia. Kalau pada awalnya ditunjukkan Raffles dan Dendells sikapnya yang keras dalam melaksanakan “Politik Haji” akan tetapi pada perkembangan selanjutnya terjadi pelunakan sikap. Hal ini dikarenakan pemahaman pemerintah kolonialis Belanda terhadap ibadah haji makin tinggi dan tingkat penetrasi kekuasaan Belanda semakin kuat.⁵⁶³

2. Aspek Kesejahteraan dan Gaya Hidup

Dimasa Pemerintahan Nabi Muhammad SAW, praktek dan status perekonomian muatan fundamentalnya semata-mata mengacu kepada al-Qur’an dan as-Sunnah Rasulullah SAW pada masa ini hukum tetap menjadi panglima artinya tetap eksis untuk bertransformasi, berevolusi, dan berkembang dalam menghadapi segala bentuk problematika dan tuntutan masyarakat. Gambaran yang lebih jauh dan mendalam dapat dilihat pada perjalanan hidup Rasulullah SAW yang telah memberikan teladan untuk menjadi pedagang yang berhasil, beliau selalu bersikap jujur dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga integritas dan kejujuran yang dimiliki telah mengantarkannya ke puncak kesuksesan dalam mengelola

⁵⁶³ Husni Rahim. *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam Studi Tentang Pejabat Agama masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*. Diterbitkan oleh PT logos Wacana ilmu Ciputat 1998 hlm 180.

perekonomian yang semula dari perekonomian rumah tangga sampai pada sistem perekonomian negara.⁵⁶⁴

Kedatangan Islam ke dunia Melayu merupakan detik terpenting dalam mentransformasi secara keseluruhan Pemikiran, Peradaban dan Perekonomian orang Melayu, khususnya Melayu Kesultanan Palembang. Walaupun Islam datang dilihat secara evolusi dari sudut pandang penyebarannya, akan tetapi dari aspek spiritualitas agama telah merevolusi masyarakat Melayu,⁵⁶⁵ dalam arti konsep ajaran Islam yang mengajarkan ketauhidan, mentransformasi pandangan dunia Melayu yang tadinya mempercayai dewa dan mengagung raja (jelmaan dari Tuhan “Dewa Praja”) telah di manusiakan menjadi seorang sultan yang bertugas sebagai *Khalifah* memimpin dan melindungi masyarakat Melayu dan berperan menegakkan pemerintahan Islam di dunia. Syed Muhammad Naguib al-Attas menjelaskan dalam bukunya “*Islam dan Sejarah Kebudayaan Melayu*” bahwa Islam berpengaruh amat besar, mendalam dan meluas di alam Melayu dan berjaya mencabut akar umbi pengaruh hindu dan budha. Kedatangan Islam menandakan awal zaman baru dan berakhirnya zaman lama di kepulauan ini. Ini berarti bahwa Islam telah mentransformasi terhadap tamaddun dunia Melayu bukan hanya dalam segi formal malah meresap ke dalam substansial kejiwa.⁵⁶⁶

Islam datang ke alam Melayu telah melahirkan beberapa kerajaan Melayu Islam yang kuat seperti kerajaan Samudera Pasai, kerajaan Aceh, Pattani, Malaka, Demak, termasuk juga Kesultanan Palembang hingga negara ini menjadi pusat perdagangan dan perekonomian disamping pusat pengembangan keilmuan.⁵⁶⁷ Ada beberapa undang-undang terdapat dalam peradaban Melayu menjadi panduan dan dapat digunakan masyarakat Melayu dalam menjalani kehidupan

⁵⁶⁴ M. Nazori Majid. *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Refleksi dengan Ekonomi Kekinian*. Pusat Studi Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Ilmu Kesyahihan Jogjakarta. 2003 hlm

⁵⁶⁵ Hamid Ismail. *Masyarakat dan Budaya Melayu*. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur Malaysia. 1998 hlm 59

⁵⁶⁶ Syed Muhammad Naguib al-Attas, *Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu* Penerbit Mizan Hazanah ilmu-ilmu Islam Bandung 1990 hlm 3

⁵⁶⁷ Syed Muhammad Naquib al-Attas . *Islam dalam Sejarah Kebudayaan Melayu*. Penerbit Mizan Hazanan Ilmuis-ilmu Islam Bandung 1990 hlm.4.

bernegara. Sistem undang-undang Melayu pernah ada dan menjadi pusat ketamadunan Melayu Malaka dan Majapahit. Di Malaka ada dua teks undang-undang berupa hukum kanun Malaka, undang-undang laut Malaka, dan undang-undang pebian Malaka. Sementara undang-undang Majapahit dikenal dengan undang-undang kuntamanawa dharma sastra.

Dengan masuknya Islam telah mempengaruhi undang-undang Melayu seperti undang-undang Malaka dan undang-undang laut Malaka dan menerapkan undang-undang Islam berpedoman kepada al-Qur'an dan As-Sunnah untuk di aplikasikan oleh Kesultanan Melayu. hal ini dapat dipahami bahwa kedatangan Islam mereformasi dan memberikan pengaruh besar terhadap Aqidah, Undang-undang, Perekonomian dan Pemerintahan Melayu. Dalam konteks perekonomian masyarakat Melayu dapat dibuktikan beberapa catatan yang diperoleh dari China, India, Persia, Yunani, dan Eropa yang menjelaskan tentang terwujudnya tradisi kemaritiman sangat hebat di alam Melayu, dimaksud adalah aktivitas utama kerajaan Melayu dalam bidang perdagangan dan perniagaan bertumpu dikawasan bandar atau bandar-bandar pelabuhan.⁵⁶⁸ termasuk di bandar pelabuhan Kesultanan Palembang.

Perdagangan dan perniagaan merupakan kegiatan utama masyarakat alam Melayu tradisional dimana majunya perekonomian dan perdagangan di alam Melayu bisa dilihat dari banyaknya pelabuhan-pelabuhan sebagian besar berjaya dan berkembang menjadi kerajaan pelabuhan dapat membentuk kerajaan baru berupa kerajaan kota, pelabuhan juga dapat membentuk kerajaan maritim bahkan sebuah kerajaan maritim yang besar dan memperluas kekuasaan dengan menguasai pelabuhan lain. Munculnya pedagang Melayu sendiri yang aktif melakukan perdagangan sampai ke India dan China. Dengan demikian dapat dipahami bahwa masuknya Islam di wilayah alam Melayu termasuk di Kesultanan Palembang berdampak kepada aktivitas perekonomian dan perdagangan. Penduduk Melayu Palembang lebih mengutamakan dalam menerapkan perekonomian yang berbasiskan Islam, karena Syari'at Islam

⁵⁶⁸ Muhd Koharuddin dan Muhd Balwi. *Islam dalam Sejarah Kebudayaan Melayu*.

yang dijadikan pedoman dalam melakukan aktivitas perekonomian dan perdagangan.

Masyarakat di Kesultanan Palembang dalam menjalankan aktivitas perekonomiannya lebih menerapkan Syar'iat Islam. hal ini didukung dan berdasarkan kepada Undang-undang Simbur Cahaya di mana dalam Undang-undang tersebut pada bab ke tiga berkaitan dengan aturan dusun dan berladang. Di dalam Undang-undang ini ada aturan tentang tata cara berladang, tata cara berternak, pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan pertanian, perternakan, sewa menyewa, perdagangan, jual beli, pegadaian hak milik barang yang tetap. Kemudian dalam bab IV menjelaskan tentang aturan kaum, yang memuat dan berisi aturan kaum dimana dalam pasal 17 menyatakan bahwa *Penghantaran zakat atau fitrah agar diberi dua orang mata pajak oleh pesirah.*⁵⁶⁹

Bersdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa seluruh isi naskah Undang-undang Simbur Cahaya dalam prakteknya telah menjangkau perilaku masyarakat baik yang bersifat individu maupun yang bersifat umum untuk seluruh masyarakat di Kesultanan Palembang waktu itu.

Ada dua hal yang sering digunakan sebagai acuan dalam menentukan sumber konsumsi sekaligus produksi bagi *Elit*.⁵⁷⁰ pribumi pada masyarakat tradisional yaitu status dan gaya hidup.⁵⁷¹ Pola konsumsi dan gaya hidup dua hal yang sulit dipisahkan dan keduanya saling keterkaitan dengan sumber pendapatan dan pengeluaran. Gaya hidup biasanya dipakai sebagai ukuran dalam menentukan sumber pengeluaran, sedangkan pola konsumsi akan berdampak kepada sumber pendapatan. Perbedaan pola konsumsi dan gaya hidup diantara para *elit* yang berkuasa akan berpengaruh pula terhadap

⁵⁶⁹ Muhammad Adil. *Dinamika Pembaharuan Hukum Islam di Palembang Mengenai isi Undang-undang Simbur Cahaya* Jurnal Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. tt hlm 60-65.

⁵⁷⁰ *Elit* menurut bahasa merupakan orang yang terbaik atau pilihan dalam suatu kelompok. Lihat A. K. Ahmad Muda. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Realiti Publisher. Jakarta 2006. Menurut Pareto yang dikutip Varna. *Elit* merupakan orang-orang yang berhasil menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. S. P Varna. *Teori Politik Modern*. Penerbit Rajawali Press Jakarta 1987.

⁵⁷¹ Darsiti Suratman: *Kehidupan Keraton Surakarta 130-1939*. Jogjakarta: Taman Siswa. 1989 hlm 105 dalam Agus Setianto. Penerbit Ombak Jogjakarta 2006 hlm 84

perolehan sumber pendapatan. Pola konsumsi para *elit* yang berkuasa sebagai tokoh bersumber pendapatannya yang jelas tidak lepas dari lingkup sistem sosialnya.

Dalam struktur sosial ekonomi dan politik kaum ningrat menduduki tempat yang tertinggi dalam urutan strata sosial, di lingkungan keraton lapisan atas aristokrasi dibentuk oleh golongan priyai yang terdiri dari keturunan sultan dengan gelar pangeran atau raden. Sebagai imbalan politik kaum ningrat, Kesultanan Palembang menciptakan jabatan bangsawan sendiri yang secara kolektifitas dikenal sebagai para Mantri. Dalam golongan ini yang dapat diangkat adalah orang dari semua lapisan penduduk sesuai dengan keinginan sultan. Di samping orang Palembang ada juga keturunan Arab dan China yang dilibatkan dalam golongan Mantri ini.⁵⁷² Nasib Mantri ini tergantung pada kebaikan sultan sebagai pengawalnya, sehingga sultan lebih memilih calon mantri dari golongan ini untuk memangku jabatan penting tersebut.

Dalam hirarki kedudukan sosial tempat pertama yang diduduki oleh para bangsawan yang berasal dari perkawinan priyai dengan wanita dari golongan mantri. Golongan mantri dengan gelar masagus sebenarnya merupakan kategori tersendiri, meskipun para masagus berasal dari lingkungan priyai, status mereka tetap berada di bawah raden, dan dalam pergaulan sehari-hari status mereka lebih mendekati para mantri. Di bawah masagus terdapat lapisan kiemas yang berasal dari perkawinan kedua pasangan dari golongan mantri. Pangkat bangsawan yang lebih rendah lagi adalah kiagus yang berasal dari perkawinan kiemas dengan wanita rakyat biasa.⁵⁷³

Di Kesultanan Palembang kekuasaan kaum ningrat didasarkan atas pemungutan pajak dengan bentuk sistem "*Tiban dan Tukon*" monopoli perdagangan timah dengan Bangka dan bea masuk atas perdagangan antar pulau, oleh Sultan Palembang dibagi diantara anggota masyarakat kesultanan dalam bentuk hak-hak istimewa. Atas dasar ini, dibangun

⁵⁷² M. H Court. 1821. *An Exposition of The Relation of The British Government With the Sultan and State of Palembang and The Designs of The Netherlands Government on That Country*. London dalam Jeroen Peeters *Kaum Tuo Kaum Mudo Perubahan Regelius di Palembang 1821-1942*. Penerbit INIS Jakarta 1997 hlm 9

⁵⁷³ Jeroen Peeters. *Kaum Tuo-Kaum Mudo. Perubahan-perubahan Religijs di Palembang*. 1821-1942 Penerbit INIS Jakarta 1997 hlm 9

sistem distribusi simbol-simbol sosial yang memungkinkan para bangsawan membedakan gaya hidup mereka dari rakyat biasa sampai ke masyarakat kecil. Menurut Van Sevenhoven.⁵⁷⁴ Dalam sketsanya tentang Palembang misalnya mencatat bahwa hanya sultan yang berhak mendiami gedung terbuat dari batu, sementara anggota ningrat yang lain hanya memiliki hak istimewa untuk mendiami rumah yang dibangun dengan menggunakan jenis kayu yang mahal seperti kayu tembesu dan kayu besi.

Contoh yang lain dalam gaya hidup masyarakat adalah bentuk dan warna perahu dayung, alat pengangkutan terpenting di Kesultanan Palembang, kalau sultan berhak memakai warna hitam dan warna putih, para bangsawan yang lain harus puas dengan dayung merah, sedangkan Pangeran menikmati hak istimewa, untuk menambahkan di atasnya gambar belah ketupat berwarna hitam. Dengan demikian dapat dipahami bahwa daftar hak istimewa para kaum ningrat belum berakhir. Kesadaran gaya hidup dan pangkat demikian juga diungkapkan dalam tanda kebesaran yang lain, khususnya warna payung, dan bahkan bahasa isyarat para pembawa tombaknya yang selalu mengiringi pembesar Kesultanan Palembang. Tombak dari prajurit Priyai misalnya, boleh dibawa tegak lurus. Akan tetapi prajurit Mantri harus membawa tombaknya diatas bahu, di atas lengan, atau dengan ujung kebawah sesuai dengan pangkat majikannya.⁵⁷⁵

Dalam ungkapan Agus Setianto dalam bukunya "Orang-orang besar Bengkulu" menjelaskan status sosial seseorang dalam masyarakat biasanya memberikan gambaran tentang gaya hidup. Dengan kata lain gaya hidup merupakan cerminan dari status sosialnya, di samping itu gaya hidup merupakan cerminan dari kekuasaan dan kekayaan. Secara definitif gaya hidup adalah suatu totalitas dari berbagai tata cara, adat kebiasaan, struktur kelakuan, kompleks, lambang-lambang, sikap hidup serta mentalitas kehidupannya sehari-hari. Dengan demikian dapat dipahami bahwa gaya hidup merupakan suatu

⁵⁷⁴ Van Sevenhoven. *Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang*. Penerbit Bhratara Jakarta 1971 hlm 45

⁵⁷⁵ Storm vans Grave Saude. 1895. *De Stad Palembang daam Tijdsehrift Van Het Bataviaasch Genootschap*. 5 448-70 dalam Jeroen Peteers *Kaum Tuo Kaum Mudo Perubahan Regelius di Palembang 1812-1825* Penerbit INIS Jakarta 1997 hlm 10

sistem yang sangat kompleks dengan berbagai pedoman dan persyaratan dalam pola kehidupan sosial yang bersifat subjektif, oleh karena sifatnya yang subjektif maka gaya hidup mempunyai fungsi sebagai petunjuk untuk membedakan tinggi rendahnya status sosial seseorang atau keluarga besar sosial tertentu.

Sartono Kartodirdjo⁵⁷⁶ dalam bukunya “*Perkembangan Peradaban Priyai*” mengemukakan gaya hidup memiliki sifat yang eksklusif karena dengan tegas menonjolkan perbedaan status. Perbedaan itu sering di lambangkan dengan adanya larangan-larangan bagi golongan lain, karena merupakan hak istimewa bagi golongan tertentu. Gaya hidup orang-orang besar penduduk pribumi Kesultanan Palembang pada umum dapat diketahui melalui pemakaian simbol-simbol seperti gelar, pakaian dan tanda-tanda kebesaran aktivitas dalam upacara-upacara, pesta-pesta, dan lain-lain. Pemakaian gelar bagi para kepala pribumi Kesultanan Palembang seperti priyai, masagus, kiagus, kiemas, yang merupakan bagian dari gaya hidup.⁵⁷⁷

Dalam konteks historis, Melayu di Kesultanan Palembang yang berdiam di Palembang beragama Islam. Islam merupakan agama resmi negara pada masa Kesultanan Palembang, dan masyarakat di Kesultanan Palembang tidak hanya berdomisili di Ibukota Kesultanan, akan tetapi ada juga yang berdomisili di daerah uluan, dan mayoritas mereka beragama Islam. Sebagai bagian dari sejarah Kesultanan Palembang, orang Palembang asli telah memiliki kesadaran klas akibat dari pengaruh budaya Jawa yang berasimilasi dan disesuaikan dengan budaya lokal Palembang. Kesadaran klas tersebut dengan jelas dapat dilihat dalam identitas penggunaan gelar di kalangan lingkungan kesultanan. Identitas penggunaan gelar masih tetap hidup dikalangan masyarakat Palembang. Identitas gelar tidak hanya berlaku sebagai pembeda antara klas bangsawan *Priyai* dengan kelas rakyat biasa akan tetapi dikalangan priyai itu sendiri.⁵⁷⁸

⁵⁷⁶ Sartono Dirdjo, dalam Agus Setianto. *Orang-orang Besar Bengkulu*. Penerbit Ombak Jogjakarta 2006 hlm 104

⁵⁷⁷ Jeroen Peteers. *Kaum Tuo Kum Mudo Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*. Penerbit INIS Jakarta 1997. hlm 9

⁵⁷⁸ Dedi Irwanto dan Santun. 2010. *Iliran dan Uluan Dikotomi dan Dinamika dalam Sejarah Kultural Palembang*. Penerbit Eja Publisher Jogjakarta. 2010 hlm 71

Golongan priyai merupakan keturunan Raja, Sultan, atau kaum ningrat, kedudukan tersebut dapat diperoleh melalui kelahiran, perkenan sultan atau raja. Golongan *Priyai* ini dapat dibedakan menjadi tiga golongan yaitu *Pertama*, pangeran. *Kedua*, Raden dan. *Ketiga*, massagus, pangeran dalam kelas sosial harus selalu diberikan oleh sultan berarti yang memerintah. Oleh karenanya tidak seorangpun yang dapat memperoleh gelar tersebut jikalau tidak memiliki jabatan. Di kesultanan anak laki-laki sultan atau pangeran itu sendiri biasanya dikaruniai gelar sendiri. Menurut Van Sevenhoven,⁵⁷⁹ gelar pangeran itu tidak pernah di wariskan oleh sultan sebab sultan dapat menahannya dan dapat diberikannya kepada siapa saja. Oleh karenanya gelar itu bisa diberikan maka daerah “Uluan” terdapat juga gelar pangeran yang diberikan kepada pembesar yang berjasa dengan sultan.

Dalam sektor pemerintahan, pemakaian gelar diberikan oleh sultan kepada santana menteri, pegawai tinggi yang disebut Pangeran, Perdana, Menteri, Penghulu, kedudukan kedua para menteri terdiri dari Tumenggung, Ngabehi, dan Ranga, Demang atau Dipati merupakan penasehat sultan. Akan tetapi pemberian gelar dipakai oleh menteri ini tidak harus dihubungkan dengan jabatan-jabatan tertentu. Disamping itu sultan menciptakan dan memberi gelar kepada orang atau dari keluarga atau anak masnya untuk menaikkan status sosial dan kedudukan serta gengsinya. Seperti Prabu Anom, Penembahan, Dipo, Ario, Purbo, Mangkubumi, dan sebagainya. Disamping itu untuk keluarga raja yang menjadi pemimpin di sebuah distrik tertentu di wilayah kesultanan di beri gelar *Jenang* atau *Raban*.⁵⁸⁰

Di Kesultanan Palembang terdapat juga penduduk pendatang terdiri dari orang Arab dan China serta orang asing lainnya. Komunitas orang Arab di tempatkan di daerah tertentu membentuk komunitasnya sesuai klannya.⁵⁸¹ Mayoritas orang

⁵⁷⁹ J.L Van Sevenhoven *Lukisan Tentang Ibu kota Palembang*. Penerbit Bhkratara Jakarta 1971 hlm 46.

⁵⁸⁰ Dedi Irwanto dan M. Santun *Iliran dan Uluan Dikotomi dan Dinamika dalam Sejarah Kultur Palembang*. Penerbit Eja Publisher Jogjakarta 2010, hlm 73

⁵⁸¹ Terdapat dua kampung Arab di kota Palembang, Seberang Ilir, Tepi Utara Sungai Musi, mulai dari 7 ulu sampai 16 ulu. Lingkungan fisik di kampung Arab dikuasai oleh saudagar Arab yang kaya dan membentuk

Arab di Kesultanan Palembang merupakan keturunan ba'alawi yang dianggap keturunan Nabi Muhammad SAW dari cucunya Husien. Oleh karenanya mereka terdiri dari golongan Sayyid, maka mereka memiliki martabat tersendiri di mata "warga asli." Selama Abad XIX M, setelah jatuhnya Kesultanan Palembang para sayyid mengadopsi Gaya hidup eksklusif yang membedakan mereka dengan lapisan sosial yang lain mulai dari bahasa, konsumsi, dan reproduksi. Sikap eksklusif para Sayyid tercermin dalam politik perkawinan yang menganut prinsip *Kafa'ah*, dalam sistem ini perkawinan kedua belah pihak harus memiliki derajat yang sama. Seorang Sayyid memilih untuk menikah dengan wanita sederajat, akan tetapi kalau tidak ada boleh memilih menikah dengan klan yang lebih "rendah." Pernikahan ini sah secara agama Islam mengingat sistem *Patreenial* yang berlaku. Namun untuk klan *Syarifah* tidak demikian, mereka tidak boleh menikah dengan laki-laki keturunan yang rendah derajatnya.

Komunitas penduduk orang China ditempatkan secara khusus, pada masa kesultanan umumnya mereka tinggal di rumah-rumah rakit, kemudian pada masa kolonial kebanyakan orang China berpindah ke daratan. Orang China cukup dominan dalam usaha dan bekerja sendiri, mereka tidak dapat digolongkan begitu saja dalam kelas buruh atau kuli kasar, karena sebagian besar diantara mereka berdomisili di Kesultanan Palembang sebagai pendatang bebas yang mampu dengan cepat menguasai sektor-sektor ekonomi, terutama di sektor perdagangan dan bahkan ada diantaranya muncul dan berkembang menjadi konglomerat mendominasi perdagangan Palembang. Berbeda dengan komunitas Arab dalam hal gaya hidup. Komunitas China mendominasi sektor ekonomi terutama sektor perdagangan dalam mempersiapkan pola konsumsi

semacam komplek keluarga yang berkelompok di sekitar kediaman, Pater Families "Kepala Keluarga Besar." Dalam sistem seperti ini setiap kepala keluarga besar mengawasi wilayahnya sendiri misalnya kampung 7 ulu kepala keluarga besar ada klan Barokah, kampung 10 ulu ada klan al-kaf, kampung 13 ulu ada klan al-Munawar, kampung 14 ulu ada klan al-Musawa, kampung 16 ulu ada klan as-Segaf dan kampung 15 ada ulu klan al-Jufri. Sementara daerah seberang ilir, kepala keluarga besarnya di kampung 8 ilir adalah klan al-Habsy dan klan al-Kaff. Namun yang disebut kampung Arab tersebut mayoritas penduduk yang terbesarnya tetap adalah warga kota asli selain warga kota lain, lihat dalam JL. Van Sevenhoven. *Lukisan tentang Ibukota Palembang*. Penerbit Djakarta Bhatara 1971 hlm 57-58

masyarakat kesultanan. Menurut Irwan Abdullah,⁵⁸² gerakan penduduk ke kota didasari oleh mata pencarian ruang konsumsi sebagai tempat tinggal yang lebih leluasa bagi ekspresi-ekspersi kaum menengah melekat pada ciri-ciri orang yang menempati lokasi perumahan tampak bahwa mereka memiliki kekuatan ekonomi yang cukup baik sehingga dapat mengkonsumsi rumah dengan harga yang mahal. Proses konsumsi seperti rumah merupakan instrumen yang cukup signifikan untuk menjelaskan gaya hidup. Tingkah laku konsumsi merupakan penanda identitas yang didasari oleh asumsi bahwa barang-barang konsumsi merupakan alat komunikasi. Dalam pandangan Irwan Abdullah cara-cara masyarakat menggunakan barang untuk membangun batas sosial merupakan aspek utama yang perlu diperhatikan pada abad berikutnya. hal ini senada dengan tumbuhnya kota sebagai bagian dari tatanan ekonomi internasional.⁵⁸³

Kota dalam tatanan ekonomi internasional lebih merupakan *Consumer Spose* yang diharapkan mampu memuaskan kebutuhan kelas menengah baru. Dua proses tersebut merupakan tanda dari perubahan sosial perkotaan yaitu proses konsumsi simbolis dan perubahan estetis. Proses konsumsi simbolis merupakan tanda penting dari pembentukan gaya hidup dimana nilai-nilai simbolis dari suatu produk dan praktek telah mendapat penekanan yang besar dibandingkan dengan nilai-nilai kegunaan dan fungsional. hal ini paling tidak dapat dijelaskan dengan tiga cara. *Pertama*, kelas sosial telah membedakan proses konsumsi dimana setiap kelas menunjukkan proses identifikasi yang berbeda. Secara umum memang memperlihatkan bahwa pilihan-pilihan dilakukan sesuai dengan kelas dimana integrasi kedalam satu tatanan umum tidak terbentuk sepenuhnya. Nilai simbolis dalam konsumsi tampak diinterpretasikan secara berbeda oleh kelompok yang berbeda.

Kedua, barang yang di konsumsi kemudian menjadi wakil dari kehadiran. hal ini merupakan hubungan dari aspek-aspek psikologis dimana konsumsi suatu produk berkaitan dengan

⁵⁸² Irwan Abdullah. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Penerbit Pustaka Pelajar offset Jogjakarta 2015. hlm 23

⁵⁸³ Irwan Abdullah. *Konstruksi dan Refproduksi Kebudayaan*. Penerbit Pustaka Pelajar offset Jogjakarta 2015. hlm 33

perencanaan atau rasa percaya diri yang menunjukkan bukan sekedar assesoris, akan tetapi barang itu merupakan isi dari kehadiran seseorang karena dengan cara itu ia berkomunikasi. *Ketiga*, berdasarkan proses konsumsi dapat dilihat bahwa konsumsi citra (*Image*) di satu pihak telah menjadi proses konsumsi yang penting di mana citra di pancarkan oleh suatu produk dan praktek (seperti makanan dan pakaian) merupakan alat ekspresi diri bagi kelompok. Bagi kelompok kelas yang melekat pada suatu produk merupakan instrumen modernitas yang mampu menegaskan keberadaan dan identitasnya. Proses identifikasi yang terwujud melalui proses konsumsi merupakan proses aktif dan menyebabkan intensifikasi kesadaran kelas (*The Self*) rumah di konsumsi karena “*Style*” dengan sifat unik yang membedakan dengan yang lain.

Proses konsumsi simbolis diatas menegaskan kecenderungan estisasi dalam kehidupan kelas menengah dimana nilai etis mulai kehilangan kekuatan dalam menggerakkan kehidupan. Indikasi ini dapat dilihat dalam tiga proses. *Pertama*, Hidup di perkotaan telah menjadi suatu proses seni yang bertumpu pada *The Work Of Art* yang menjelaskan nilai khusus. *Kedua*, kecenderungan di dalam estesiasi sesungguhnya telah menegaskan proses-proses individualisasi dalam dua tingkatan. Disatu pihak terjadi proses individualisasi dalam pengertian sistem nilai yang berbentuk melalui proses unsur seni dalam berbagai praktek kehidupan secara akumulatif menyebabkan terbentuknya nilai-nilai kelompok. Pergeseran nilai kelompok dengan ciri tertentu kemudian menyebabkan munculnya subkultur tertentu yang menyebabkan sub urban yang satu dengan sub urban yang lain. Di lain pihak dengan gaya “*Style*” seseorang telah memisahkan dirinya dari kelompok sendiri dimana setiap orang dalam kelompoknya berusaha untuk mencari nilai tambah (*Value Added*) dengan cara mengkonsumsi barangnya berbeda dengan yang lain. *Ketiga*, proses individualisasi tidak hanya menegaskan tentang nilai-nilai relatif yang eksis di dalam kehidupan bersama yang seharusnya tunduk pada suatu *Common Sense*, akan tetapi juga menunjukkan bahwa relativisme nilai yang menciptakan proses individualisasi sesungguhnya menegaskan munculnya

“kekuatan baru” dalam mendorong proses perubahan sosial dan budaya yang luas.⁵⁸⁴

Disamping itu proses perubahan terlihat dalam kenyataan bahwa setiap orang menjadi terbiasa menerima perbedaan yang nampak dari perubahan sikap dimana masyarakat menjadi lebih permisif terhadap berbagai penyimpangan. Proses individualisasi disini menjadi proses yang positif dimana proses tersebut telah memunculkan berbagai sikap yang *Open Minded* di dalam berbagai hal. Meskipun perlu juga diperhatikan apakah sikap ini dapat menjadi preseden di dalam meligitimasi praktek-praktek penyimpangan, yang menjauhkan individu dari nilai-nilai budaya pendukungnya.⁵⁸⁵

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam proses konsumsi dan perubahan orientasi kehidupan kota, referensi tradisional tampak melemah. hal ini terlihat terutama disebabkan oleh kebudayaan lebih terikat pada lokalitas kontrol sosial. Dalam setting sosial baru seperti kota-kota baru, simbol-simbol lebih merupakan suatu yang dikonstruksikan untuk kepentingan yang lain, yang kemudian menciptakan kultur tersendiri yang tidak terintegrasi ke dalam sistem kebudayaan di luarnya.

⁵⁸⁴ Irwan Abdullah. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Penerbit Pustaka Pelajar Offset Jogjakarta 2015 hlm 35

⁵⁸⁵ Irwan Abdullah. *Konstruksi dan Produksi Kebudayaan* Penerbit Pustaka Pelajar Offset Jogjakarta 2015 hlm 36



BAB V

CORAK MELAYU DALAM PEREKONOMIAN KESULTANAN PALEMBANG

A. Proses dalam Teori Asimilasi Budaya

Istilah asimilasi berasal dari bahasa Latin *Ossimilore* yang berarti “Menjadi Sama,”⁵⁸⁶ kemudian dalam bahasa Inggris adalah *Assimilation*, dalam bahasa Indonesia sinonim kata asimilasi adalah pembauran, asimilasi merupakan proses sosial yang terjadi pada tingkat lanjut.⁵⁸⁷ Asimilasi merupakan proses perubahan pola kebudayaan untuk menyesuaikan dengan mayoritas.⁵⁸⁸ Proses asimilasi tersebut ditandai dengan adanya upaya untuk mengurangi perbedaan yang terdapat di antara perorangan atau kelompok manusia. Bila individu melakukan asimilasi dalam suatu kelompok berarti budaya individu kelompok itu melebur atau terjadi pembeburan . Dalam proses peleburan biasanya terjadi pertukaran unsur-unsur budaya, pertukaran tersebut dapat terjadi bila suatu kelompok tertentu menyerap kebudayaan kelompok lainnya.⁵⁸⁹ Ketika istilah asimilasi dan akulturasi digunakan untuk menjelaskan suatu proses sosial yang ada di masyarakat maka sering mengalami tumpang tindih.⁵⁹⁰ Bahkan terkadang kedua tema ini mengacu dan digunakan untuk mengartikan tentang sesuatu yang sama.

⁵⁸⁶ D. Hendro puspita. *Sosiologi Semantik* Penerbit Kanisius Jogjakarta 1989. hlm 233

⁵⁸⁷ Paul. B. Horton Chester L. Hunt 1990. *Sosiologi* terj Aminudin Ram edisi keempat Penerbit Erlangga Jakarta 1990 hlm 265

⁵⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Penerbit Rajawali Persada Jakarta 1983 hlm 38

⁵⁸⁹ Poerwanti Hadi Pretiwi. *Konsep Dasar Asimilasi & Akulturasi dalam Pembelajaran Budaya*. Fakultas Industri Kreatif Prodi Desain Interior Telkom University <https://www.Staffnew.uny.ac.id/upload/pdf> diakses Bulan pebruari 2020.

⁵⁹⁰ Poerwanti Hadi Pratiwi menjelaskan Para ahli sosiologi sering menggunakan istilah Akulturasi (*Acculturation*) yang mana pengertiannya menjadi lebih sempit tetapi secara umum pengertiannya tampak konsisten. <https://www.Staffnew.uny.ac.id/upload/pdf> diakses Pebruari 2020.

Definisi asimilasi dan akulturasi yang digunakan pada beberapa buku teks mengacu pada apa yang dikemukakan Koentjoroningrat, dalam bukunya *Pengantar Ilmu Antropologi* beliau mengemukakan, asimilasi dapat di definisikan sebagai suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha mengurangi perbedaan yang terdapat antara orang, perorangan atau kelompok manusia dan juga meliputi usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama.⁵⁹¹

Dalam konteks kebudayaan bahwa konsep kebudayaan adalah merupakan hasil cipta, karsa dan rasa manusia. Oleh karenanya kebudayaan mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dengan perkembangan manusia itu sendiri perkembangan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan hidup manusia karena kebudayaan diciptakan oleh dan untuk manusia.⁵⁹² Definisi kebudayaan yang lebih lengkap dikemukakan oleh E.B Taylor (1871) yaitu kompleks keseluruhan dari pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan semua kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Bila disederhanakan maka kebudayaan adalah suatu yang dipelajari dan dialami bersama secara sosial oleh para anggota suatu masyarakat.⁵⁹³

Setiap daerah atau negara di manapun masyarakat berada dan bermukim yang terdiri dari beragam suku bangsa, ras, golongan, pasti akan mengalami yang namanya pembauran sehingga terjadi suatu perubahan. Bila pada masyarakat asli atau tempatan manapun pendatang yang mengalaminya itu semua akan menimbulkan fenomena golongan mayoritas dan minoritas yang akan mengalami persatuan budaya yang satu dengan yang lainnya. Dalam kajian sosiologi perpaduan kebudayaan tersebut disebut dengan asimilasi, dalam proses

⁵⁹¹ Poerwanti Hadi Pratiwi. *Konsep Dasar Asimilasi dan Akulturasi dalam Pembelajaran Budaya*. Fakultas Industri Kreatif Prodi Desain Interior Telkom University. <https://www.Staffnew.uny.ac.id/upload/pdf> diakses bulan Pebruari 2020.

⁵⁹² Koentjoroningrat dalam Setiadi Elly. M. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Penerbit Kencana Jakarta. 2011 [https://media.neliti.com/media/pdf/JOM-FISIF Vol 4 No 2-Oktober 17](https://media.neliti.com/media/pdf/JOM-FISIF-Vol-4-No-2-Oktober-17) diakses Pebruari 2020.

⁵⁹³ Paul B. Horton dan Chester L. Hunt. *Sosiologi Jilid dua*. Terj. Aminudin. Penerbit Erlangga Jakarta. 1984 hlm 265

asimilasi terjadi peleburan kebudayaan sehingga pihak-pihak atau warga-warga dari dua atau tiga kelompok sedang berasimilasi akan merasakan adanya kebudayaan tinggal yang dirasakan sebagai milik bersama.⁵⁹⁴

Dalam pengertian yang berbeda, khususnya berkaitan dengan interaksi antara kebudayaan, asimilasi diartikan sebagai proses yang timbul bila ada *Pertama*, kelompok manusia berbeda kebudayaan *Kedua*, individu sebagai anggota kelompok saling bergaul secara langsung dan intensif dalam waktu relatif lama. *Ketiga*, kebudayaan dari kelompok manusia tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri biasanya golongan yang dimaksud dalam suatu proses asimilasi adalah suatu golongan mayoritas dan beberapa golongan minoritas. Kemudian golongan minoritas merubah sifat khas dari unsur kebudayaannya dan menyesuaikan dengan kebudayaan golongan mayoritas sehingga lambat laun akan kehilangan kepribadian kebudayaannya, dan masuk ke dalam kebudayaan mayoritas.⁵⁹⁵ Dengan demikian dapat dipahami bahwa perubahan corak Melayu dari aspek ekonomi dan kecenderungan asimilasi dapat terjadi jika ada pembauran antara kelompok Islam Melayu dengan sistem ekonomi Kesultanan Palembang.

Dalam konteks asimilasi ekonomi Melayu cara yang terjadinya tidak muncul begitu saja melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar proses asimilasi berjalan dengan baik. Beberapa cara dapat terjadinya proses asimilasi diantaranya karena ada perbedaan kebudayaan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain.⁵⁹⁶ Sementara faktor penghambat dan pendorong asimilasi budaya menurut Soerjono Soekanto *Pertama*, kurangnya pengetahuan terhadap unsur kebudayaan yang dihadapi (dapat) bersumber dari pendatang ataupun penduduk asli. *Kedua*, sifat takut terhadap

⁵⁹⁴ Akmal Syafei Ritonga. *Asimilasi Budaya Melayu Terhadap Budaya Pendatang di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru*. Jom Fisif Vol 4 No. 2 Oktober 2017, <https://media.neliti.com/media/pdf> diakses pebruari 2020.

⁵⁹⁵ Poerwanti Hadi Pratiwi. *Konsep Dasar Asimilasi & Akulturasi Dalam Pembelajaran Budaya*. Fakultas Industri Kreatif Prodi Desain Interior Telkom University <https://www.Stafnew.uny.ac.id/uploud/pdf>. diakses bulan Februari 2020

⁵⁹⁶ Akmal Syafei Ritonga. *Asimilasi Budaya Melayu terhadap Budaya Pendatang di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru* Jom Fisip vol 4 no. 2 Oktober 2017 <https://media.neliti.com/media/pdf>. diakses Pebruari 2020

kebudayaan yang dihadapi *Ketiga*, perasaan ego dan superioritas yang ada pada individu dari suatu kebudayaan terhadap kelompok lain. Sementara faktor pendorong terjadinya proses asimilasi budaya antara lain *Pertama*, faktor toleransi, kelakuan saling menerima dan memberi dalam struktur himpunan masyarakat. *Kedua*, faktor kemanfaatan kepada kedua belah pihak *Ketiga*, faktor simpati pemahaman saling menghargai dan memperlakukan pihak lain secara baik *Keempat*, faktor perkawinan (*Amalgamasi*).⁵⁹⁷

Kemudian jenis-jenis asimilasi terjadi dalam kebudayaan suatu masyarakat *Pertama* asimilasi budaya yaitu proses menghadopsi nilai-nilai kepercayaan, dogma, ideologi, bahasa, dan sistem simbol dari suatu kelompok etnik atau beragam kelompok bagi terbentuknya sebuah kelangsungan nilai kepercayaan, dogma, ideologi, bahasa, maupun sistem simbol dari kelompok etnik baru termasuk perekonomian. *Kedua*, Asimilasi Struktural yaitu proses penetrasi kebudayaan dari suatu kelompok etnik lain dengan melakukan pembauran dalam kelompok sosial primer seperti keluarga, teman dekat, dan lain lain. *Ketiga*, Asimilasi perkawinan atau sering disebut asimilasi fisik yang terjadi karena perkawinan antar etnik atau antara ras untuk melahirkan Etnik atau Ras baru.⁵⁹⁸

Sebagaimana diketahui bahwa asimilasi merupakan suatu proses sosial yang terjadi pada berbagai golongan manusia dengan berbagai latar belakang kebudayaan yang berbeda setelah mereka bergaul secara intensif sehingga sifat khas dari unsur-unsur kebudayaan golongan-golongan itu masing-masing berubah menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. Menurut C. Clyde Kluckhahn dapat digunakan *Pertama*, peralatan dan perlengkapan hidup manusia *Kedua*, Mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi *Ketiga*, sistem kemasyarakatan *Keempat*, bahasa *Kelima*, kesenian *Keenam*, sistem pengetahuan *Ketujuh*, *Religi*.⁵⁹⁹

⁵⁹⁷ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Penerbit Rajawali Grafindo Persada Jakarta 1983.hlm 38

⁵⁹⁸ Burhanuddin dan kawan kawan. *Stereotype Etnik Asimilasi Integrasi Sosia.l* Penerbit Pustaka Grafika Kita Jakarta 1988 dalam Syamsul Bahri JOM FISIF Vol 4 No 2-Oktober 2017 <https://media.neliti.com/media/pdf> diakses Bulan Pebruari 2020

⁵⁹⁹ C. Clyde Kluckharm dalam Soerjono Soekanto 1988 *Sosiologi suatu Pengantar*, dicuplik Syamsul Bahri *Asimilasi Budaya Melayu Terhadap Budaya*

Dalam konteks mata pencarian dan termasuk juga sistem perekonomian sebagai bentuk proses asimilasi atau pembauran corak ekonomi Melayu dengan bentuk dan corak ekonomi Kesultanan Palembang. Dimana dapat dipahami bahwa perekonomian Kesultanan Palembang bercorak Melayu, dan corak Melayu ini muncul bukan hanya sampai pada akar rumput akan tetapi telah masuk sampai pada “*garis road*”, serta struktur dan lembaga-lembanga pemerintahan hal ini dapat dipahami dari hadirnya kebijakan kesultanan mewajibkan masyarakat untuk menanam-tanaman tertentu, masyarakat melakukan kerjasama saling tolong-menolong apabila terjadi kesulitan termasuk bidang ekonomi. Disisi yang lain corak dan nilai-nilai Melayu masuk pada aspek ini dengan sistem perekonomiannya berdasarkan pada pertanian, perkebunan, perikanan, mengumpulkan hasil hutan dan pertambangan yang dibangun berdasarkan corak Melayu.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa corak ekonomi Melayu identik dengan perekonomian yang dibangun berdasarkan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam memberikan corak Melayu untuk masuk dalam struktur dan kelembagaan perekonomian Kesultanan Palembang. Corak Melayu dalam perekonomian Kesultanan Palembang tercermin pada aktivitas ekonomi kekeluargaan, kebersamaan, musyawarah dan umumnya berdasarkan pada pertanian, perkebunan, perikanan, mengumpulkan hasil hutan dan tambang. Pada Abad XVII hingga awal Abad XIX M hasil pertanian perkebunan hasil hutan, perikanan dan tambang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan sebagian untuk ekspor. Komoditas primadona dari Palembang adalah lada dan timah disamping itu masih banyak produk pertanian lainnya.⁶⁰⁰ Dari sumber naskah kontrak-kontrak antara Sultan Palembang dengan VOC dapat diketahui bahwa lada merupakan komoditas paling penting sebagai sumber pendapatan Kesultanan yang diperoleh dari wilayah atau daerah uluan, sementara timah merupakan komoditas penting sebagai sumber pendapatan kesultanan yang diperoleh dari wilayah atau daerah taklukan yaitu pulau Bangka

Pendatang di kecamatan Senapelan Pekan baru. <https://media.neliti.com/media/pdf> diakses Bulan Pebruari 2020

⁶⁰⁰ ANRI Bundel Palembang No. 62.7 *Java Gouvernment Gazette* 4 Juli 1812

seperti dalam kontrak Palembang 10 September 1755 yang isinya merupakan kesepakatan masalah kebijakan perdagangan lada dan timah.⁶⁰¹

Dalam kontrak tersebut Sultan Palembang memperlihatkan kebijakannya yang kooperatif dalam menghadapi VOC. Sultan Palembang memperlihatkan cara-cara penggunaan taktik tersebut dalam rangka memenuhi politik monopoli perdagangan VOC di satu pihak dan pada pihak lain adalah cara untuk memperoleh keuntungan dengan negosiasi-negosiasi yang menjurus pada perbaikan harga komoditas yang di monopoli VOC. Taktik dan strategi Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wiromo sepertinya tidak menjurus pada perang fisik yang dapat membawa dampak kehancuran pada kedua belah pihak, akan tetapi justru kelihatan bahwa sultan cenderung berbaur dan masuk dalam orbit VOC dengan status resmi sebagai bawahan, namun dalam kenyataannya lebih cenderung memosisikan sebagai hubungan pertemanan dengan VOC.

Praktik hubungan pembauran antara Sultan Palembang dengan VOC ini menepis anggapan bahwa Selama ini Kesultanan Melayu khususnya Kesultanan Palembang selalu dipandang sebagai bawahan atau subordinal VOC yang lemah tidak berdaya dan selalu tunduk dalam sistem dagang VOC yang monopolistik dengan aturan-aturan yang dikeluarkan. Padahal secara resmi Sultan Palembang sebagai subordinat VOC yang harus ta'at dan patuh terhadap protektornya serta harus menjalankan aturan-aturan yang telah dibuat yang menyertai monopoli perdagangan. Meskipun secara resmi Sultan Palembang berstatus subordinat VOC akan tetapi pada prakteknya ada kesejajaran dalam perundingan-perundingan berkaitan dengan penentuan harga premi dan juga hal-hal hubungan dagang dengan bangsa lain. Keterlibatan sultan dalam perdagangan timah dengan kelompok dagang di luar VOC menurut VOC adalah *illegal*, akan tetapi menurut sultan itu bukan *illegal* atau selundupan. Dalam istilah lokal hal ini biasa disebut

⁶⁰¹ Endang Rohmiatun. *Perubahan Ekonomi Dan Perkembangan Peradaban Islam Di Palembang Abad XVII-XIX M. Telaah Atas Naskah-Naskah Kontrak Sultan Palembang*. Jurnal Lektur Keagamaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Vol. 13 No 2, 2015 diakses Maret 2019. hlm 369-392

dengan “*Bersembunyi berdagang untuk mencari keuntungan diam.*” Dalam kalkulasi ekonomi sultan maupun pedagang pribumi sadar akan dampak yang ditimbulkan jika perdagangan timah dan ada dipasarkan ke pasar bebas.⁶⁰²

Beberapa indikasi dapat membuktikan bahwa strategi perang timah yang ada antara sultan dan VOC tersebut ternyata berdampak positif bagi Sultan Palembang sendiri maupun bagi perkembangan ekonomi negeri Palembang. Keuntungan yang diperoleh dari bisnis timah dan lada tersebut telah membuat Sultan Palembang dapat membiayai proyek-proyek besar untuk memperkuat hegemoni kekuasaannya. Diantaranya adalah pembangunan sarana dan prasarana berupa Masjid yang besar dan megah yang diprakarsai oleh Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo dan pembangunan Istana yang megah. William Marsden yang pernah mengelilingi Sumatera dan singgah di Palembang membuat kesaksian bahwa negeri ini aman kondisinya, melimpah kekayaannya dan mempunyai mata uang sendiri yang terbuat dari timah yang dikenal dengan “*Pitis*”.⁶⁰³ Timah dan Lada merupakan sumber utama Kesultanan Palembang dan pada masa itu telah membawa negeri ini menjadi negeri yang kaya raya.

Disisi lain menurut P De Roo De La Faille menyatakan bahwa pendapatan yang diperoleh kesultanan untuk menjadikan kaya raya adalah dari *Tiban* dan *Tukon* yaitu suatu sistem ekonomi perdagangan “*Monopoli*” yang Primitif dan tidak berdasarkan atas suatu pengertian Melayu. Dalam sistem monopoli ini sultan ataupun pembesar tertinggi setempat membeli barang dengan harga yang sedikit lebih murah daripada harga pasar dan inilah yang disebut dengan “*Beli-beli Natal*”⁶⁰⁴ dan sistem inilah yang harus ditaati oleh Van Waerijok dalam

⁶⁰² Endang Rochmiatun. *Perubahan Ekonomi dan Perkembangan Peradaban Islam di Palembang Abad XVII-XIX Telaah Naskah-Baskah Kontrak Sultan Palembang*. Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Jurnal Lektur Keagamaan Vol. 13 No. 2. 2015 hlm 382 diakses Maret 2019

⁶⁰³ William Marsden. *The History Of Sumatera*, Kuala Lumpur Oxford University Press 1975 hlm 361 Dalam Endang Rahmiatun Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Jurnal Lektur Keagamaan vol 13. No2, 2015 hlm 383. diakses bulan Maret 2019

⁶⁰⁴ Francis Herninneri Gen Enz III hlm 77 dalam De Roo de La Faille *Dari Zaman Kesultanan Palembang* Penerbit Bhratara Jakarta 1971 hlm 48

tahun 1603 M dalam perdagangan ladanya di Banten.⁶⁰⁵ Sistem adat seperti ini berjumpa di Palembang berupa ide “*Tiban*” dari Jawa yang umumnya adalah seperti dibaca di dalam *Eindre Sumeder Javansche Grondreexhten* (ikhtisar akhir dari pada hak hak timah di Jawa) yang berhubungan dengan Banyumas,⁶⁰⁶ bahwa *Tiban* merupakan berbagai benda komoditas dengan harga yang ditetapkan oleh para *priyayi* kadang-kadang dua kali lipat pokoknya jauh lebih tinggi diberikan kepada kepala-kepala bawahannya pada gilirannya menjual pada rakyat kecil.

Kemudian dari daerah-daerah Melayu terkenal ada perdagangan “*Serah*” yaitu raja membeli komoditas untuk rakyat dari daerah uluan sungai yang terpencil tiga komoditas yang sangat dibutuhkan itu besi untuk bahan pembuatan kapak dan alat pertanian, kain kasar untuk pakaian dan garam sebagai kebutuhan pertama dan mengirimkan komoditas ini ke daerah hulu sungai di mana rakyat wajib membeli dengan harga yang tinggi dan di situ raja mendapat sewa timahnya dan keuntungan dari perdagangan. Reijnst Menghitung keuntungan yang diperoleh oleh raja dari cara ini sebanyak 21.578 real Spanyol dan ia menyatakan bahwa “*Tiban*” sebenarnya dengan pertukaran hasil-hasil dalam negeri dengan barang-barang asing dan “*Tukon*” berarti sama akan tetapi dalam bentuk uang. Akan tetapi karena perdagangan ini dikaitkan maka sukarlah untuk membeda-bedakannya. Reijnst membaca bahwa tidak dikenakan *Tiban* dan *Tukon* adalah daerah *Sindang* distrik-distrik pajak dan desa-desa *Sikap* yang seluruhnya disediakan untuk pengangkutan barang-barang sultan melalui air.⁶⁰⁷

Lada dan timah merupakan pendapatan terpenting yang diperoleh sultan Palembang dari hasil monopoli perdagangan.⁶⁰⁸

⁶⁰⁵ Heers Corpus Diplom VI hlm 29 dalam De Roo de La Faille *Dari Zaman Kesultanan Palembang* Penerbit Bhartara Jakarta. 1971 hlm 48

⁶⁰⁶ Eindresumeii Lamp K hlm 18 dalam De Roo de La Faille *Dari Zaman Kesultanan Palembang* Penerbit Bhartara Jakarta. 1971 hlm 48

⁶⁰⁷ P. De Roo De La Faille. *Dari Zaman Kesultanan Palembang*. Penerbit Bharatara Jakarta 1971 hlm 49

⁶⁰⁸ Pada waktu Bangka sejak putusan Rafless dari Palembang. Sultan tidak mungkin untuk memerintah secara baik (*Verlicht*) dalam tahun 1822 terbukti pada Van Sevenhoven “bahwa pendapatan negara” dibawah pemeritahan tidak sebesar yang diharapkan pada umumnya dan dilansir atas dasar pengetahuan yang kurang lengkap mengenai masalahnya dan

Pemasukan lada kepada kompeni hanya ditetapkan 20.000 pikul setahun dan penanamannya yang penting di daerah Rawas.⁶⁰⁹ Kemudian ada yang dijual sultan kepada kompeni sekarang 7 ringgit Spanyol harus dipenuhi oleh rakyat dengan harga satu ringgit Spanyol (F. 2. 20) demikian menurut De Sturler politik perdagangan timah Sultan Palembang dengan VOC telah membawa keuntungan yang luar biasa bagi kedua belah pihak. Selain dibawa ke Batavia VOC Juga telah menggunakan keuntungan timahnya dengan mengubah bangunan benteng yang terbuat dari kayu menjadi beton. Bagi Sultan Palembang kesejahteraan dan kekayaan yang diperoleh dari perdagangan telah di gambarkan dalam beberapa historiografi Melayu baik cerita Bangka kronik Siak dan Palembang.⁶¹⁰

Ada mengatakan saat itu istana, masjid dan bangunan-bangunan baru dibangun masjid di Palembang dikatakannya terbesar di nusantara menurut pengakuan residen Inggris M.H Court kemudian yang lain mengatakan bahwa Sultan Palembang, Sultan Mahmud Badaruddin adalah sultan terkaya di Timur, kekayaannya tak terhitung dan menurut perkiraan residen VOC Hemmij sekitar 60 juta real Spanyol.⁶¹¹ Di dalam kronik siak, Kesultanan Palembang seringkali dihubungkan dengan kesejahteraan, kemakmuran, sementara cerita Bangka menggambarkan masa itu sebagai masa keemasan di Bangka di mana penduduknya aman, tentram dan sejahtera. Kronik Palembang menggambarkan dengan kata-kata sebagai berikut “Ketika itulah Sultan Palembang mulai kaya dan sekalian orang kecil senang negeri kaya terlalu banyak pedagang dan perniagaan” William Marsden yang mengelilingi Sumatera mengatakan bahwa Palembang yang

pajak-pajak itu berapa juga kecilnya masih juga ada diatas kemampuan rakyat yang putus asa. T.N.I IV hlm 132

⁶⁰⁹ De Sturler Proeve enz 1843 hlm 134 dan 108 (noot) dengan penanaman yang ada hubungannya adalah “*Tiban*”disebut dalam piagam 1729/1803 diserahkan kepada Bupati No Bet Gen 26 hlm 118 dan TBG 32 hlm 588 dalam De Roo De La Faille. *Dari Zaman Kesultanan Palembang Penerbit Bhratara* Jakarta 1971 hlm 49.

⁶¹⁰ Thomas W. Horsfield. Report on the Island of Bangka JIAEA 2 Juni 1848 hlm 133 Mayor M.H. Court 1815 *Palembang en Bangka Proceeding en Palembang* dalam Bahasa Inggris Dalam Arsip Palembang No. 42 Mo Woelder, Het Sultanat Palembang 1811 Een Bijdrage Tat De Studied Makise Geshedschrijving Gravenhage Nijhoff 1976

⁶¹¹ Renout Vos. *Gentle Jonus And Merchant*. 1993 hlm 33

kaya raya itu memiliki mata uang tersendiri terbuat dari timah yaitu mata uang “Pitis.”⁶¹²

Politik perdagangan timah yang monopolistik antara sultan dengan VOC sebetulnya adalah semacam strategi Sultan Palembang yang berusaha untuk memproteksi dirinya, kekuasaannya dengan kekuatan militer VOC. VOC adalah patron sultan yang dapat memproteksi dirinya, kekuasaannya dari serangan yang datang dari keluarga istana. Ganjaran yang diterima VOC berupa monopoli pembelian timah dan lada ini telah disertai dengan penetapan harga yang sangat rendah dibanding dengan harga di pasar bebas diterima oleh sultan yang memiliki kepentingan sendiri. Kepentingan itu dalam rangka membeli proteksi VOC, politik VOC dari Batavia untuk menjaga keamanan dan intrik-intrik dan konflik dalam merongrong kekuasaannya. Dengan demikian penetapan harga yang rendah sebagai Ganjaran terhadap patronase yang diberikan VOC kepada Sultan Palembang berjalan dengan baik dan harmonis ini bukan berarti sudah tidak memiliki kekuatan-kekuatan untuk mencari keuntungan dibalik sistem monopoli.

B. Faktor Pendorong dalam Teori Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan terjemahan dari “*Leadership*” yang berasal dari *Leader* yang berarti pemimpin, ketua, kepala.⁶¹³ Menurut Goetsch dan Stanley kepemimpinan adalah kemampuan untuk menginspirasi orang guna menciptakan suatu komitmen total diinginkan dan sukarela terhadap pencapaian tujuan organisasi atau melebihi pencapaian tersebut.⁶¹⁴ Tharig mengatakan kepemimpinan merupakan proses menggerakkan manusia untuk mencapai tujuan dalam hal ini ada tujuan menggerakkan manusia ada kelompok orang adanya pemimpin yang menggerakkan dan memberi pengaruhnya kepada manusia.⁶¹⁵ Kimball Wiles Mengatakan bahwa *Leadership is a contribution to the establishment and*

⁶¹² William Marsden. *The History Of Sumatera*. Penerbit Oxford University Press Kuala Lumpur. Malaysia 1975 hlm 361

⁶¹³ Ach Mohyi. *Teori Dan Perilaku Organisasi*. Malang Universitas Muhammadiyah. Penerbit Malang Press 1999 hlm 175

⁶¹⁴ David L. Goetsch dan Stanley B. Davis. *Manajemen Mutu Total*. Alih Bahasa Benyamin Molan. Penerbit Prenhalindo 2002 hlm 169

⁶¹⁵ Tharig M. Asswaidan Faishal Umar Basyarahil. *Melahirkan Pemimpinan Masa Depan*. Penerbit Gema Insani Press Jakarta 2005 hlm 169

attainment of group purpose.⁶¹⁶ Dari berbagai pengertian di atas dapat dipahami bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dalam memimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk bekerjasama mencapai tujuan.

Dalam konteks budaya Melayu para pemimpin memiliki sifat-sifat utama. Masyarakat Melayu taat dan setia kepada sultan secara turun-temurun yang diikuti dan diajar oleh orang Melayu, ini membuktikan bahwa budaya masyarakat Melayu amat menghormati pemimpin. Ketaatan dan kesetiaan kepada Sultan telah menjadi bagian budaya orang Melayu. Nilai-nilai inilah yang membentuk masyarakat Melayu menjadi orang yang disiplin dalam Islam pemimpin adalah khalifah Allah SWT di bumi.⁶¹⁷ QS. An-Nisa 58-59.

Menurut Ibnu Taymiyah QS. An-Nisa 58 ini ditujukan kepada para pemimpin negara. Mereka diperintah untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak dan bertindak adil dalam memutuskan sengketa antara sesama anggota masyarakat. Tindakan tersebut diperlukan untuk mewujudkan hidupan bernegara yang adil dan makmur. Adapun pengertian amanat dalam surat an-Nisa 58 itu menurut Ibnu Taymiyah. Mempunyai dua arti *Pertama*, Amanah dalam arti kepentingan-kepentingan rakyat yang merupakan tanggung jawab kepada negara untuk mengelolanya. *Kedua* Amanat dalam arti kewenangan yang memerintah yang dimiliki kepala negara. Sementara QS. An-Nisa 59 menurut Ibnu Taimiyah ditujukan kepada rakyat. Rakyat diperintah supaya ta'at tidak saja kepada Allah SWT dan Rasullullah SAW akan tetapi kepada pemimpin mereka. Rakyat diperintahkan untuk melakukan segala perintahnya selama tidak diperintah untuk berbuat maksiat atau yang dilarang oleh agama kemudian kalau terjadi perbedaan pendapat antara mereka maka dalam mencari penyelesaian digunakan untuk kembali kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.⁶¹⁸

⁶¹⁶ Kimball Wiles. *Supervision For Better School*. New York Engle Wood Chiffs Printice Hall 1961 hlm 29. Repo Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung <https://ac.co.id> diakses Peberuari 2020

⁶¹⁷ Muhada bin Ojihi Aceh Rozali Rajab. *Nilai dalam Budaya Masyarakat Melayu*

⁶¹⁸ Husni Rahmi. *Sistem Otoritas Administrasi Islam Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*. Katalog dalam terbitan Penerbit Logos Wacana Ilmu Jakarta 1998 hlm 28

Konsep pemimpin berkewajiban menyampaikan amanat dan rakyat wajib taat kepada pemimpin di atas dikenal dengan konsep “Otoritas dan kepatuhan” dari Ibnu Taymiyah.⁶¹⁹ Menurut Imam Ghazali dalam kitabnya *al-Tibr al-Masbuk fi Nashihah al Muluk* mengatakan “Sultan adalah bayang-bayang Allah SWT diatas bumi-Nya” maka kita ketahui bahwa orang yang Allah SWT berikan peringkat sultan dan menjadikan bayangan-bayangan-Nya di atas bumi itu wajib dicintai oleh semua makhluk Allah SWT dan mereka harus ikut tunduk dan taat kepadanya serta tidak dibenarkan menantang dan tidak mengikuti perintahnya.⁶²⁰ Oleh karena itu kata imam al-Ghazali sebaiknya setiap orang yang beragama mencintai sultan dan taat kepada semua yang diperintahkannya. Allah SWT menganugerahkan Kesultanan dan kerajaan kepada mereka dan bahwasanya Allah SWT memberikan kerajaan kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya,⁶²¹ QS AliImran; 26.

Kedua ulama diatas (al-Ghazali dan Ibnu Taymiyah) telah mengemukakan berbagai alasan yang menjadi dasar pendapat mereka memberikan otoritas dan hak istimewa kepada sultan dalam melaksanakan kekuasaannya bahkan mereka berpendapat bahwa kekuasaan sultan merupakan mandat dari Allah SWT yang diberikan kepada hamba-hamba pilihan-Nya.⁶²² Menurut Tenas Effendi adat Melayu sangat mengutamakan pemimpinnya disanjung dengan berbagai sebutan dijadikan lambang budaya yang sarat dengan nilai-nilai dasar identitas Melayu yang Islami melalui ungkapan adat menyatakan bahwa pemimpin adalah orang yang dituakan oleh kaumnya, yang dikemukakan oleh bangsawan, di tinggikan satu tingkat di

⁶¹⁹ Ibnu Taymiyah *Al-Syayasah Al Syariyah Fi Shalah Al-Rai Waal Raiyiyah Cairo 1951 hlm 3 Syayah Syari'iyah Etika Politik Islam* Penerbit Risalah Gusti Surabaya 1995 hlm 3-10

⁶²⁰ Al-Ghazali. *al-Tibr Masbuh Fi Nashihah Al Muluk Kairo 1327 hlm 40-41* dalam Husni Rahim. *Sistem Otoritas Administrasi Islam. Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang* Penerbit Logos Wacana Ilmu Jakarta 1998 hlm 28-29

⁶²¹ Husni Rahim. *Sistem Otoritas Administrasi Islam Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonialisme di Palembang. Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang.* Penerbit Logos Wacana Ilmu Jakarta 1998 hlm 28

⁶²² Pendapat ini mencerminkan bahwa kekuasaan raja itu berasal dari tuhan dan kekuasaan raja adalah *Muqqadas*. Oleh karena itu rakyat harus taat dan patuh kepada raja. Konsep ini telah menyebabkan raja otoriter dan tidak demokratis. Pendapat ini mendapat tantangan dari ulama perubahan.

dahulukan selangkah disanjung, disayang dan dihormati. Selain itu pemimpin dalam Adat Melayu bagaikan kayu besar ditengah Padang dari jauh mula napak, dari dekat mula bersua ke atas ia berpucuk ditengah ia berbatang dan bawah berurat tunggang, rimbun daunnya tempat berteduh, kuat dahannya tempat bergantung, besar batangnya tempat bersandar dan kukuh akarnya tempat bersila. Kemudian pemimpin dalam konteks adat Melayu bagaikan tanjung rumpunan angin, bagaikan teluk timbunan kapar, bagaikan pucuk jelah pumpunan ikan, bagaikan kemuncak payung panji. Sementara pemimpin umat adalah menjunjung amanah laut dan darat sumpah dipegang janji diingat, mengabdikan untuk kepentingan umat, kepentingan sendiri tidaklah ingat.⁶²³

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kewajiban pemimpin menurut budaya Melayu dapat membawa kesejahteraan umat terutama berkaitan dengan ekonomi, yang kusut wajah diselesaikan, yang keruh dijernihkan yang melintang diluruskan yang berbonggol ditarahkan yang kasar diamlaskan yang salah wajib dibetulkan. Disamping itu pemimpin-pemimpin berkewajiban untuk memberikan contoh tauladan, menjaga kampung halaman, menjaga alam lingkungan berpijak pada keadilan berdiri di atas kebenaran, menjaga marwah diri, umat, kampung bangsa, adat, lembaga, serta hukum dan undang-undangnya. Begitu beratnya tugas dan kewajiban seorang pemimpin, dalam adat Melayu seorang pemimpin wajib mendasarkan semua keputusannya dan aktivitasnya kepada nilai-nilai Islam. Kalau seorang pemimpin mendasarkan diri pada ajaran agama akan menjadi seorang yang berkepribadian terpuji, handal, piawai, arif, bijaksana, adil dan jujur, amanah, cerdas, berani, tabah dan berbagai akhlaq terpuji lainnya.⁶²⁴

Oleh karenanya seorang pemimpin dalam budaya Melayu harus memiliki sifat utama *Pertama*, berpegang teguh pada agama Allah *Kedua*, amanah: Menunaikan sumpah, mengabdikan dan membela umat, *Ketiga*, jujur dan sangat anti kepada hianat,

⁶²³ Muhammad Takari Bin Jilin Syahrial. *Adat dalam Peradaban Melayu*. Program Study Etnomusikologi FIB Universitas Sumatera Utara dan Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia

⁶²⁴ Tenas Effendi. *Sifat-Sifat Utama Pemimpin Melayu Pekanbaru*. Lembaga Adat Melayu Riau 2013

Keempat, berakhlak mulia dalam pergaulan sosial, *Kelima*, memahami diri dan sistem sosial dibangun bersama, *Keenam*, arif, *Ketujuh*, bijaksana, *Kedelapan*, berilmu dan memahami pranata sosial, *Kesembilan*, berani, *Kesepuluh*, berhati tabah, *Kesebelas*, berlapang dada, *Keduabelas*, tulus dan ikhlas, *Ketigabelas*, berimbang rasa, *Keempatbelas*, rendah hati, *Kelimabelas*, Pemurah, *Keenambelas*, hemat, cermat, teguh dan rajin, *Ketujuhbelas*, tangkas dan tegas. Demikian Pemahaman mengenai sifat-sifat utama pemimpin dalam perspektif budaya Melayu.⁶²⁵ Dalam perspektif teori kepemimpinan menjelaskan bahwa seorang pemimpin menjadi bagian penting dalam menentukan kebijakan-kebijakan termasuk juga dalam bidang perekonomian. Teori kepemimpinan menjelaskan bahwa seorang pemimpin itu harus ditakuti, kalau itu masuk faktor pendorong mengapa pemimpin itu masih banyak orang yang tidak senang, kalau begitu artinya kepemimpinan itu ada yang tidak benar kalau harus melakukan corak. Artinya pemimpin itu tidak bisa mendoktrin akan tetapi seorang pemimpin harus mempunyai jiwa “*Humanistik*” terutama di Kesultanan Palembang.

C. Dampak dari Teori Asimilasi dan Kepemimpinan

Integrasi peradaban Islam dan peradaban Melayu menjadikan asimilasi dan akulturasi antara keduanya hingga melahirkan corak peradaban Melayu Islam baru yang memiliki karakteristik khusus dan berbeda dengan Peradaban Islam di wilayah lain. Eksistensi kekhususan itu dari sisi intelektual bukan hanya dipengaruhi pandangan dunia (*World View*) bangsa Melayu itu sendiri akan tetapi karena peradabanlah yang telah terbentuk bahkan sejak masa sebelum kedatangan Islam ke wilayah ini. Perkembangan dan dinamika dunia Melayu sendiri sejak zaman kedatangan Islam, zaman kesultanan dan kolonialisme telah membentuk corak dan karakteristik peradaban Melayu tersendiri bahkan salah satu faktor pemersatu terpenting diantara berbagai suku bangsa Melayu adalah Islam.⁶²⁶

⁶²⁵ Tennas Effendi. *Sipat-sipat Utama Pemimpin Melayu Pekan Baru* Lembaga Adat Melayu. Riau 20 13.

⁶²⁶ Mugiono. *Integrasi Pemikiran Islam Dan Peradaban Melayu Study Eksploratif Historis Terhadap Perkembangan Peradaban Melayu Islam di Nusantara*. Jurnal JIA Juni 2016 th 17 No. 1 ISSN 2443-1919

Menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas (1972) datangnya Islam menyebabkan kebangkitan nasional dan intelektual yang bercorak religius di Nusantara yang tidak pernah dialami sebelumnya kecuali itu Islam yang mendorong terjadinya perubahan besar dalam jiwa bangsa Melayu dan kebudayaannya. Corak ekonomi masyarakat Melayu di pedesaan menjalankan aktivitas pertanian, perkebunan dan menangkap ikan sementara masyarakat yang berada di kota kebanyakan bekerja dalam sektor dinas, perdagangan, industri, pengangkutan dan lain-lain. Pada dasarnya masyarakat Melayu telah melakukan bermacam cara untuk memenuhi kebutuhannya dengan menguasai berbagai teknologi mulai dari teknologi menghasilkan makanan, sektor pertanian, berburu dan berkembang ke sektor peternakan, menangkap ikan, berkembang menjadi usaha perikanan dan berbagai teknologi penangkapan, serta fasilitas untuk menguatkan proses pengangkutan hasil-hasil usaha tersebut.

Langkah-langkah penguatan ekonomi berbasis kesederhanaan dan sosialisme masyarakat Melayu belum ditunjang dengan kualitas untuk mengantisipasi berbagai dinamika sistem perekonomian. Disamping itu kesadaran masyarakat Melayu sebagai saudara serumpun makin berkurang puak-puak Melayu tercerai-berai akibat politik pecah belah yang dijalankan pemerintah kolonial, dan masyarakat Melayu termarginalkan akibat perkembangan kapitalisasi dan globalisasi, lebih-lebih rendahnya soliditas dan solidaritas diantara sesama rumpun Melayu membuat Melayu berjalan sendiri-sendiri dalam memenuhi kebutuhan.

Dari berbagai literatur dan diskusi dilakukan maka pembangunan ekonomi masyarakat Melayu kedepan tidak bisa diabaikan. Salah satu pondasi tawaran mengarah pada efisiensi berkeadilan dalam aktivitas ekonomi kerakyatan. Amin Suma, menguatkan dengan efisiensi berkeadilan sosial secara menyeluruh di mana kemakmuran rakyat diutamakan bukan kemakmuran orang-perorang, berkeadilan dan berkemakmuran dengan tawaran ekonomi berbasis kitab suci.⁶²⁷ Ekonomi

⁶²⁷ Amin Suma. tt 27-28 dalam Heri Junaidi. *Ekonomi Masyarakat Melayu dan Pengembangan Usaha Mikro*. Proceeding Intenational Seminar "Malay Islamic Civilization Tradition and Contribution to the Development of

berbasis kitab suci dalam arti sistem ekonomi kerakyatan yaitu ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, gotong-royong yang demokratis serta bermoral dengan keberpihakan pada sektor ekonomi rakyat. Keberpihakan dan perlindungan pada ekonomi rakyat merupakan strategi untuk memampukan dan memberdayakan pelaku-pelaku ekonomi rakyat sejak zaman kolonialisme selalu posisinya tidak berdaya. Ekonomi kerakyatan bukan ekonomi penyantunan kepada kelompok masyarakat yang kalah dalam persaingan, akan tetapi tatanan ekonomi di mana aset ekonomi dalam perekonomian secara keseluruhan di distribusikan kepada sebanyak banyaknya warga negara.⁶²⁸ Dalam simpulan Selo Sumardjan masyarakat Melayu merupakan masyarakat berkeimbangan antara kehidupan bermasyarakat (*Sosially Oriented*) dengan bersifat material (*Material Oriented*) dengan cenderung lebih menjunjung tinggi prinsip kebersamaan dan gotong-royong efisiensi daripada sikap individualis termasuk juga dalam perekonomian,⁶²⁹ dan pemimpin sangat berperan di dalam mendorong aktivitas tersebut.

Salah satu teori agen perubahan yang paling komprehensif adalah teori kepemimpinan. Menurut para ahli Weber James Macgregor Burn, Stogdill Terry dan dengan sudut pandang masing-masing. Essensi dari kepemimpinan seorang pemimpin adalah kemampuan untuk memberi contoh tauladan bagi yang dipimpinnya dengan demikian seorang pemimpin harus memiliki suatu kelebihan dibandingkan dengan yang dipimpinnya atas dasar itulah maka kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi seseorang atau kelompok agar bertindak sesuai dengan yang diharapkan dalam rangka mencapai tujuan. Kepemimpinan merupakan suatu proses

Islam at Southeast Asia".Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 2015 hlm 173

⁶²⁸ Haurman Herman J.S dan Eriyanto. *Kemitraan dalam Ekonomi Lokal Bunga Rampai Jakarta Yayasan Mitra Pembangunan Desa Kota*. Business Innvation Centre Of Indonesia. 2001 dalam Heri Junaidi. Proceeding Internasional Seminar "Malay Islamic Civilization: Trdition and Contribution to the Development of Islam at Southest Asia" Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 2015 hlm 173

⁶²⁹ Heri Junaidi. *Ekonomi Masyarakat Melayu dan Pengembangan Usaha Mikro*. Proceeding Seminar Internasional "Malay Islamic Civilization: Tradition and Contribution to the Development of Islam at Southeast Asia" Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2015 hlm 168

pengaruh sosial yang sengaja dijalankan oleh seseorang terhadap pihak lain untuk menjalankan hubungan dan berbagai aktivitas dalam kelompok yang dipimpinnya. Kepemimpinan berkaitan erat dengan kekuasaan, tanpa kekuasaan maka pemimpin tidak memiliki kekuatan yuridis formal atau kekuatan lain untuk mempengaruhi agar bertindak sesuai dengan yang diharapkan.⁶³⁰ Menurut teori kepemimpinan Weber (1949) menyatakan terdapat tiga tipe kepemimpinan.

Ketiga tipe kepemimpinan adalah *Pertama, Tradisional*, *Kedua, Rasional-legal* dan *Ketiga, Kharismatik*. tipe kepemimpinan *Tradisional* berpedoman pada kebiasaan-kebiasaan kuno, status dan hak-hak ditentukan oleh tradisi. Teori rasional-legal mendapatkan pemimpin yang diatur secara jelas dalam bentuk aturan-aturan tertulis dan perundang-undangan. Teori *Kharismatik* pemimpin adalah orang yang mampu memberikan efek besar dan luar biasa kepada pengikutnya. Tidak jarang dalam diri seorang pemimpin melekat dua tipe sekaligus contohnya pemimpin tradisional sekaligus memiliki sipat *Kharismatik*. Gabungan keduanya akan menghasilkan pemimpin yang akan mendapat dukungan penuh dari pengikutnya. Apabila dikaitkan dengan kepemimpinan di Kesultanan Palembang maka tidak dapat dilepaskan dari sosok sultan yang menjadi pemimpin tertinggi di kesultannya. Dalam konteks pemimpin Sultan mengatur dengan rapi birokrasi termasuk juga aparatur keamanannya.

Untuk memberlakukan kebijakan tersebut sultan mengadakan peraturan-peraturan bagi pedagang dan penduduk pendatang.⁶³¹ Sultan memegang kekuasaan tertinggi terhadap kesultanan yang dipimpinnya dan menentukan keputusan-keputusan hukum selalu berdasarkan kepada al-Qur'an dan aturan perundang-undangan serta

⁶³⁰ Farida R. Warga Dalam. *Konflik Kepemimpinan di Kesultanan Palembang 1812-1818*. Disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Indepemda Sumatera Selatan di Radio Republik Indonesia Sum-Sel Oktober 2012 diakses Bulan September 2019

⁶³¹ J.W. Van Royen "*De Palembangse Marga on haarGronden Weterrechten*", .G.L. Van den Berg Adriani's Boekhandel, Leiden,1927. dalam H.A Dahlan. *Risalah Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II Oleh team Perumus hasil-hasil diskusi Sejarah Perjuang Sultan Mahmud Badaruddin II*. Palembang 1981 hlm 13

piagam-piagam,⁶³² Sebagai seorang pemimpin tradisional yang berkuasa turun-temurun yang dijamin lembaga historis, penguasa tertinggi di pusat pemerintahan Kesultanan Palembang adalah sultan.⁶³³ Disamping itu di Kesultanan Palembang berlakuk-hukum-hukum adat yang bersumber pada undang-undang Simbur Cahaya, kemudian didukung pula dengan undang-undang “Sindang Merdika”⁶³⁴

Kekuasaan sultan tidak dibatasi oleh aturan-aturan hukum, sultan dibantu oleh putra mahkota yaitu pangeran ratu berperan sebagai calon raja yang berkuasa penuh apabila sultan berhalangan dan sekaligus sebagai penasihat.⁶³⁵ Di dalam konteks perekonomian, seorang sultan (Pemimpin) akan menjadi bagian penting dalam memacu kebijakan untuk penguatan perekonomian. Hal ini dapat dikemukakan bahwa sultan di masa berkuasanya berusaha mengontrol produksi dan distribusi. Kesultanan Palembang sebelum dihapuskan pada tahun 1824 M iklim sosial, politik dan ekonomi di Kesultanan Palembang dikuasai oleh sultan dan lingkungan keraton sebagai pusat kerajaan.

Perekonomian merupakan sebuah determinan penting dalam pembangunan sebuah negara. Pemimpin yang tidak lagi dinilai kompeten dalam memberikan kepemimpinan di bidang perekonomian identik dengan pemimpin yang tidak memiliki kemampuan untuk membawa bangsa menuju ketujuan akhir pembangunan negaranya yaitu menuju masyarakat makmur dan sejahtera terutama dalam perekonomian, pertahanan, politik budaya, ataupun aspek lainnya.⁶³⁶ Monopoli perekonomian dan perdagangan yang diterapkan sultan di wilayah Kesultanan Palembang salah satunya di aplikasikan dalam bentuk *Tiban* dan *Tukon* yang diberlakukan kepada para petani yang masuk wilayah “*kepungutan*” “*Sikap.*” *Sikap*

⁶³² Van Sevenhoven. *Lukisan Tentang Ibukota Palembang*. Penerbit Bhratara Jakarta 1971 hlm 25.

⁶³³ Farida R Wargadalam. *Konflik Kepemimpinan di Kesultanan Palembang 1812-1818*. disampaikan pada seminar nasional yang di selenggarakan oleh Indepemda Sum-Sel di RRI Sum-Sel 22 oktober 21012. diakses september 2019

⁶³⁴ Boedani Djavid.”*Tambo Kerajaan Sriwijaya*. Penerbit Terate Bandung 1961 hlm 26

⁶³⁵ Java Gouvernment Gazette 2 Mei 1812 No. 10 Sturler 1855: hlm 7

⁶³⁶ Menneke Budiman. *Politik Asimilasi di Indonesia dan Dimensi Ekonominya*. Universitas Indonesia. Diakses Februar i2020

merupakan dusun-dusun (Belida, Sungsang, Sukarami dan Musi Banyuasin) yang sebagian penduduknya ditugaskan membantu pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan keraton, disamping itu juga pihak keraton mempekerjakan orang *Miji* (orang yang disetorkan).⁶³⁷

Dalam konteks *Tiban* dan *Tukon* pihak Kesultanan Palembang memberlakukan monopoli bagi produk-produk yang telah ditentukan antara lain berupa baju Jawa, kain belanga putih, kapak, parang besi dan garam, diluar produk-produk di atas tidak diperkenankan untuk di monopoli. Sebagai kota dagang dan industri Kesultanan Palembang memperoleh hasil begitu besar dari perdagangan dengan pihak asing yang ramai memasuki wilayah perairan Sungai Musi, mereka datang dari berbagai daerah di Nusantara dan dunia Internasional. Melalui kelembagaan *Syahbandar* (pejabat yang menangani perdagangan dan Bea Cukai bertanggung jawab langsung kepada sultan) pihak keraton mendapat keuntungan yang sangat luar biasa dan bahkan ada istilah bahwa *Syahbandar* adalah “Kas sultan” suatu ungkapan yang menunjukkan betapa pentingnya peran *Syahbandar* di bidang perekonomian kesultanan Palembang.

Dengan demikian berbagai kontrak monopoli pihak asing khususnya Belanda terjadi pasang surut dalam pengertian di saat kolonialis memiliki kekuatan *Bergaining Power* yang tinggi agar isi kontrak ditaati oleh sultan, akan tetapi di saat kondisi kolonialis mengalami kemunduran khususnya di akhir Abad XVII dan awal Abad XIX M pihak kesultanan akan memperoleh keuntungan luar biasa besar. Keuntungan itu diperoleh dari perdagangan “*Illegal*” (dijual di pasar bebas dengan harga yang lebih kompetitif) istilah *Illegal* tentunya dilihat dari sudut pandang kaum imperialis.⁶³⁸ Di sinilah tampak kejelian, kelihaihan dan kepiawaian sultan sebagai pemimpin kharismatik bermain sedemikian rupa demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi Kesultanan yang dipimpinnya. Sebagai seorang pemimpin (sultan) selalu menghargai para sahabat,

⁶³⁷ Farida. R.Wargadalam. *Konflik Kepemimpinan di Kesultanan Palembang 1812-18* Disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Indeppemda Sumatera Selatan di RRI 22 Oktober 2012 diakses september 2019

⁶³⁸ ANRI Bundel Palembang No. 62.2 ANRI Bundel Palembang No. 15.7 Marsden 2008:333. dalam Farida Wargadalam 2012 hlm 6

handai totan kaum kerabatnya, hal ini dapat terlihat dari berbagai aktivitas dengan diadakannya musyawarah melibatkan pembesar istana, alim ulama dan pemuka-pemuka masyarakat bila dihadapkan pada masalah yang pelik dan memerlukan keputusan-keputusan tentang penyelesaiannya, tahu akan martabat dan kedudukannya sebagai seorang Sultan yang Agung dan berwibawa.⁶³⁹

Dalam kaitannya dengan perekonomian, Sultan Palembang sebagai seorang pemimpin harus mampu mendorong kebijakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat agar masyarakat sejahtera dan makmur dalam kehidupannya. Akan tetapi disisi lain menurut P. De roo de la faille mengatakan bahwa pendapatan kesultanan Palembang diperoleh dari *Tiban* dan *Tukon* yaitu suatu sistem ekonomi perdagangan monopoli yang Primitif dan tidak berdasarkan kepada pengertian Melayu. Dalam sistem monopoli ini sultan atau pembesar tertinggi setempat membeli barang yang sedikit lebih murah dari pada harga pasar dan inilah yang disebut dengan "*Beli-beli Natal*."⁶⁴⁰ Menurut Van Sevenhoven untuk menerapkan *tiban* dan *tukon* tersebut Sultan menugaskan *Raban* dan *Jenang* dalam pengertian sama. Namun nama pertama diberikan kepada seorang *priyayi* dan yang kedua kepada golongan yang bukan *Priyayi*. *Raban* dan *Jenang* adalah seorang yang diberi oleh sultan beberapa marga atau dusun agar kelembagaan tersebut dapat hidup dari padanya, ini terjadi baik sebagai keluarga dekat sultan maupun sebagai menteri atau atas dasar kemurahan secara khusus oleh sultan.

Raban dan *Jenang* bukan saja pemakai atau pengumpul dari hasil marga atau dusun akan tetapi penguasa semua urusan dan kejadian, di dalam marga atau dusun harus lebih dulu dilaporkan kepadanya. *Jenang* mencoba menyelesaikan urusan-urusan tersebut dan jika berhasil maka ia melaporkannya kepada *patih* atau kepada pemerintahan kerajaan (*Rijks Bestuurder*), jika perlu ditelusuri urusan-urusan itu sampai kepada sultan, semua perintah-perintah sultan

⁶³⁹ HA. Dahlan dkk. *Risalah Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin*. Tim Perumus Hasil-hasil Diskusi Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Baddarudin II Palembang 1981 hlm 10

⁶⁴⁰ P. De roo de la faille. *Dari Zaman Kesultanan Palembang*. Penerbit Bhratara Jakarta 1971 hlm 40

tuntutan-tuntutan dan sebagainya tidak disampaikan kepada kepala marga atau dusun akan tetapi kepada *Raban* atau *Jenang* yang menyuruh kepada marga atau dusun untuk melaksanakannya.⁶⁴¹ Dengan sistem ini merupakan sistem langsung antara kekuasaan pusat dan daerah yang menyebabkan ketergantungan daerah pada pusat, dan kekuasaan pusat sangat tertanam kuat di daerah, sultan mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk menguasai seluruh kekuatan politik, ekonomi yang ada di ibu kota. Sebagai konsekuensi dari sentralisasi kekuasaan ini maka berdampak pada aktivitas politik dan ekonomi yang merupakan model bagi sultan untuk mencapai tujuan-tujuan ekonominya berupa monopoli perdagangan oleh kesultanan.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pada masa Kesultanan Palembang Darussalam pola dan corak yang menonjol dalam sistem perdagangan adalah adanya sistem monopoli terpusat di tangan pihak Kesultanan. Dalam kaitan dengan wilayah Pedalaman contohnya hubungan perdagangan istana Kesultanan dengan kepala-kepala daerah rakyat di Pedalaman diwajibkan dalam bentuk *Tiban* dan *tukon*. Dalam pola ini Sultan mengirim barang-barang dari Palembang yang dibutuhkan di wilayah Pedalaman.⁶⁴² Tentu saja sultan tidak menjalankan dan mengatur sendiri kegiatan perdagangan tersebut melainkan menyerahkan pengurusannya kepada pejabat yang dipercayainya yang biasa disebut *Syah bandar*. Tugas yang diberikan sultan kepada *Syahbandar* meliputi mengurus Bea masuk keluar kapal-kapal di Pelabuhan, menjaga keamanan para pedagang dari gangguan para penjahat, memajukan pelayaran dan perdagangan.

Disamping itu juga *Syahbandar* diberi wewenang untuk melakukan dan mengadili pedagang-pedagang yang melakukan pelanggaran di pelabuhan- pelabuhan.⁶⁴³ Dengan wewenang yang besar itu didapatkan dari pihak Kesultanan *Syahbandar*

⁶⁴¹ Djohan Hanafiah. *Melayu-Jawa Citra Budaya dan Sejarah Palembang Kerjasama Pemerintah Tingkat II Kota Madya Palembang*. Penerbit Raja Grafindo Persada Jakarta 1995 hlm 200

⁶⁴² Husni Rahmi. *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam Study Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial Palembang*. Penerbit Logos Wacana Ilmu Ciputat Jakarta 1998 hlm 278-279

⁶⁴³ Supriyanto. *Pelayaran dan Perdagangan Pelabuhan di Palembang 1824-1864*. Penerbit Ombak Jogjakarta 2013 hlm 50

sebaliknya mempunyai kewajiban untuk menanggung semua biaya Perbekalan istana dan berbagai keperluan sultan lainnya.⁶⁴⁴ Dalam konteks perekonomian masyarakat Melayu, ekonomi masyarakat Melayu ditegakkan atas dasar semangat kebersamaan dan kerjasama ekonomi karena kesamaan-kesamaan kultural dalam arti luas. Sistem ekonomi Melayu bukan bersifat kapitalistik akan tetapi ekonomi yang lebih dekat kepada sistem ekonomi berbasis kerakyatan atau ekonomi kerakyatan yang sudah di rasionalkan dengan pengertian bahwa Sistem tersebut lebih berpihak kepada kelompok mayoritas ekonomi lemah menengah ke bawah.

Namun pada saat yang sama terbuka untuk membangun kerjasama berbasis teoritis ekonomi dunia Melayu lebih dekat dengan pemikiran *Hattanomics* atau pemikiran ekonomi Muhammad Hatta dengan memperluas cakupan operasional yang menjangkau transnasional dunia Melayu. Masyarakat dunia Melayu merupakan masyarakat pendukung kebudayaan (*Tamadun*) Melayu yang meliputi puak-puak Melayu yang tersebar di sebagai sebagian besar Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, Berunai Darussalam, Singapura, Filipina, dan Thailand.

Sebagian besar kondisi ekonominya (tentu dengan beberapa pengecualian) sangat menyedihkan dan pada umumnya mereka masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup secukupnya (*Ekonomi Subsistem*) terutama dalam sektor agraris, menangkap ikan, pekerja kasar dan hanya sebagian kecil masuk menjadi pelaku dunia usaha padat modal. Orang Melayu Palembang tidak mengenal pemisahan antara nilai sosial dan nilai ekonomi dan bagi orang Melayu Palembang kekayaan lebih bernilai sosial ketimbang nilai ekonomis.

Dalam arti orang Melayu, tidak terlalu mementingkan keuntungan maksimal, oleh karena itu pula orang Melayu kurang memiliki daya saing, kurang berani membuat perhitungan disamping tidak berminat mengalikan aset material menjadi investasi atau modal terpasang (*Fixed Capital*) contohnya bangunan gedung-gedung, komoditas, perkapalan dan lain-lain. Orang Melayu Palembang lebih baik menyimpan

⁶⁴⁴ William Marsden. *The History of Sumatera*. Penerbit Indoliterasi Bantul Jogjakarta. 2016 hlm 333

harta atau barang berharga di disimpan sendiri sehingga mudah dibawa jika harus melarikan diri akan tetapi kondisi ini nampaknya juga berkaitan dengan sistem politik yang kurang menjalin stabilitas keamanan.⁶⁴⁵

Berkaitan dengan nilai ekonomi Melayu Palembang, berbagai realitas historis telah membuktikan bahwa perkembangan Islam tidak terlepas dari aktivitas ekonomi sampai Abad XVII M keberadaan Islam di Kesultanan Palembang tidak mengubah struktural dan struktur perilaku ekonomi Kesultanan.

Namun demikian Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo sebagai salah seorang penguasa Kesultanan Palembang telah memperlihatkan bagaimana kebijakan perekonomian yang mempunyai dampak positif bagi perkembangan Peradaban Islam Melayu di Kesultanan Palembang,⁶⁴⁶ sehingga dapat memberikan corak kemelayuan di Kesultanan Palembang bukan hanya di akar rumput akan tetapi masuk pada sistem birokrasi dan struktur pemerintahan, disamping itu juga muncul corak Melayu dalam aktivitas ekonomi di Kesultanan Palembang. Indikator corak Melayu dalam perekonomian Kesultanan Palembang dapat dilihat dari tiga sisi *Pertama* dari sisi produksi *Kedua* distribusi *Ketiga* transaksi.⁶⁴⁷

Dalam konteks produksi di Kesultanan Palembang selama ini dipahami bahwa kesultanan selalu berbicara tentang monopoli, ingin kaya sendiri, dan ketika terjadi adanya budaya Melayu Islam maka corak yang muncul dalam konteks monopoli bertransformasi, hal ini dapat dilihat tatkala budaya Melayu muncul di Kesultanan Palembang ketika adanya asimilasi dan akulturasi budaya dalam konteks Kesultanan Palembang maka corak yang tadinya monopoli kemudian mulai berasimilasi menjadi berbaur dengan melakukan musyawarah, kerjasama

⁶⁴⁵ Mustika Zet. *Menggagas Zona Ekonomi Dunia Melayu Beberapa Catatan Berdasarkan Telaah Sejarah*. Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi Universitas Negeri Padang 2002 hlm 5 jurnal diakses september 2019

⁶⁴⁶ Endang Rohmiatun. *Perubahan Ekonomi dan Perkembangan Peradaban Islam di Palembang Abad XVII-XIX M Telaah atas Nakah-naskah Kontrak Sultan Palembang*. Jurnal Lektur Keagamaan, Vol 13 No 2, 2015

⁶⁴⁷ Hasil wawancara dengan DR. Heri Junaidi MA. selaku ahli Ekonomi Islam dan pemerhati ekonomi Melayu Palembang. Dosen Pasca Sarjana Program Doktor Universitas Islam Negeri Palembang. Bulan Pebruari 2020

ekonomi, gotong-royong membangun ekonomi kekeluargaan kemudian melakukan penilaian kebawah. Kongritnya dari aktivitas ini seperti kerajinan songket yang sebelumnya dilakukan oleh perempuan-perempuan yang memiliki darah kesultanan yang bersipat monopolistik kemudian di konstruksi karena ada semacam monopolistik kesultanan, bahwa pekerjaan yang namanya songket itu didominasi orang-orang pilihan sultan, ahirnya dengan hadirnya corak Melayu di kesultanan kemudian muncul nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan itu bisa mengajarkan di komonitas-komonitas masyarakat bawah untuk menjadi bagian dari komonitas kesultanan ini merupakan indikator dasar.⁶⁴⁸

Pengrajin songket awal hadirnya secara eksklusif hanya berada dilingkungan kesultanan, sekarang setelah datangnya budaya Melayu ternyata yang namanya usaha-usaha itu berkembang kepada komonitas masyarakat luas, hal ini dapat digunakan untuk komonitas masyarakat bawah. Maka kelompok pengrajin songket kesultanan mulai mengajarkan keterampilan ke kelompok masyarakat kebawah tentang pengrajin songket. Kemudian mulai berkembang songket itu sampai sekarang inilah contoh sederhana. Misalnya dari sisi industri kreatif selama ini yang namanya kreatifitas itu selalu *Top Down* jadi keinginan sultan kalau membuat rumah limas harus begini, itu corak dasarnya jadi pada saat kesultanan berkuasa identik dengan doktrin. Setelah terjadi transformasi maka muncul kreatifitas dikalangan kesultanan untuk membuat hal-hal baru maka muncullah misalnya rumah limas yang dibentuk dan menjadi maniatur rumah limas.⁶⁴⁹

Dengan demikian perekonomian Kesultanan Palembang itu pada dasarnya bercorak Melayu, dan ini dapat di ketahui melalui indikator awal bahwasanya sebelum datangnya Melayu Kesultanan itu memang ada, akan tetapi jangan lupa bahwa Melayu Kesultanan itu ada pada dua konteks dikotami antara

⁶⁴⁸ Hasil wawancara dengan DR. Heri Junaidi MA. Selakukahli Ekonomi Islam dan Pemerhati Ekonomi Melayu Palembang. Dosen Pasca Sarjana Program Doktor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang . Bulan Pebruari 2020

⁶⁴⁹ Hasil Wawancara dengan DR. Heri Junaidi MA. Selaku ahli Ekonomi Islam dan Pemerhati Ekonomi Melayu Palembang. Dosen Pasca Sarjana Program Doktor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 16 Januari 2020

komonitas Melayu dengan komonitas Jawa, dalam konteks ini tidak jelas mau mengikut kemana mau ke komonitas Melayu atau masuk ke Jawa. Ketika muncul terjadinya Asimilasi dan akulturasi dalam konteks ini tidak jelas mau mengikut kemana ini mau ke Melayu atau ke Jawa. Dampak dari itu semua kemudian ketika budaya Melayu muncul dalam relalita, nah corak yang muncul seperti orang Jawa yang nampak menurut akan tetapi berkarakter keras, kesultanan itu tegas tapi kemudian ia bersikap lemah-lembut dan itu menyatu bersama dengan corak Melayu dari sisi perekonomian.⁶⁵⁰

Kedua dari sisi distribusi, selama ini Kesultanan Palembang mendominasi perekonomian, hal ini dapat di perhatikan dari aktivitas distribusi komoditas-komoditas produksi hasil pertanian, perkebunan yang ada di masyarakat tersebut harus dijual kepada sultan, kemudian sultan menjualnya serta mendistribusikannya kepada VOC dan seterusnya. Ketika Melayu datang di Kesultanan Palembang bagaimana pola dan coraknya, disinilah muncul ada tidaknya lembaga atau koperasi yang mengelola distribusi komoditas tersebut. Misalnya kalau ada pola distribusinya seperti apa disini polanya lebih cenderung kepada kelembagaan kesultanan. Selama ini Kesultanan Palembang kalau diperhatikan dari data-data yang ada dari sisi kelembagaan, mereka selalu memonopoli perdanagan, perdagangan gelap, perdagangan bebas artinya selama ini kelembagaan lebih pada apiliasi politik makro bagaimana orang-orang VOC supaya jangan masuk dalam aktivitas perekonomian Kesultanan Palembang.⁶⁵¹

Dengan adanya corak Melayu tidak bisa begitu sultan tidak bisa sendirian dalam aktivitas distribusi tersebut masyarakat perlu dilibatkan. Maka kemudian masyarakat diajak untuk menjual komoditas-komoditas yang dihargai berupa produksi hasil pertanian, perkebunan, hasil industri kerejinaan dan lain-lain yang kemudian dibangunlah kelembagaan

⁶⁵⁰ Hasil wawancara dengan DR. Heri Junaidi MA. Selaku ahli Ekonmi Islam dan Pemerhati Ekonomi Melayu Palembang. Dosen Pasca Sarjana Program Doktor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 30 Januari 2020.

⁶⁵¹ Hasil Wawancara dengan DR Heri Junaidi MA Selaku ahli Ekonomi Islam dan Pemerhati Ekonomi Melayu Palembang. Dosen Pasca Sarjana Program Doktor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 29 Pebruari 2020.

Syahbandar. Artinya *Syahbandar* yang tadinya hadir secara eksklusif dengan Melayu. Kemudian corak Melayu muncul dengan adanya nilai-nilai musyawarah, kekeulargaan, kebersamaan maka kemudian *Syahbandar* itu menjadi lebih *Soft Skill* lebih bisa mengikuti kearah komonitas *Gress Rold* ini contohnya. Jadi ketika indikator corak yang ingin dibangun itu pada komponen pertama dari sisi produksi, distribusi dan transaksi itu hanya di produksi dan digunakan oleh komonitas bangsawan bahwa selama ini Kesultanan Palembang lebih cenderung keigoisme sultan. indikator sederhana ketika kain songket itu hanya diproduksi dan digunakan oleh komonitas bangsawan tidak boleh dipakai oleh komonitas yang lain.⁶⁵²

Oleh karena itulah perempuan-perempuan perajin itu diklaim dan direkrut oleh kesultanan kemudian dibuat di rumah-rumah kesultanan sehingga kelompok-kelompok bawah tidak tersentuh dan tidak kena. Dengan adanya corak Melayu dan berbagai seni, seni ukir bahkan kemudian kesultanan mulai membuka bahwa pengrajin songket itu tidak hanya buat kesultanan maka dari ti para pengrajin-pengrajin dari kelompok-kelompok perempuan sultan itu berkelaborasi dengan masyarakat bawah untuk mengajarkan generasi ke generasi berikutnya sampai sekarang kemudian songket itu tidak hanya sebagai kain songket simbul kemegahan sebuah kesultanan akan tetapi lebih kepada simbul budaya dalam aktivitas masyarakat Melayu, dari sisi perkawinan mereka memakai songket dengan berbagai konstruksinya lebih kepada mensimpelkan membangun sistematiknya saja.

Ketika melihat indikator corak Melayu dari aspek perekonomian di Kesultanan Palembang dari sisi produksi, distribusi dan transaksi pada saat itu tidak ada pasar gelap yang muncul adalah pendayagunaan *Syahbandar* benar-benar berorientasi pada penguatan-penguatan wilayah pengandang (penopang) kesultanan seperti daerah Belida, Musi Banyuasin Sungsang Sukarame, memasukkan komoditas pertanian dari daerah uluan dia menyatu tetapi tidak eksklusif lagi oleh komonitas *Syahbandar* dia tidak lagi menjadi orang raja kedua

⁶⁵² Hasil Wawancara dengan DR. Heri Junaidi MA. Selaku ahli Ekonomi Islam dan Pemerhati Ekonomi Melayu Palembang. Dosen Pasca Sarjana Program Doktor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 12 April 2020.

setelah sultan akan tetapi cenderung terpisah. Dengan adanya Melayu, kemudian mereka hadir di komonitas masyarakat bawah seperti kiagus, masagus, raden, ini pada dasarnya bukan kasta pada agama hindu, akan tetapi kiagus, masagus dan raden ini hanya sebatas nama saja ini dilihat dari sudut pandang secara budaya artinya komonitas strata paling bawah bisa hadir untuk mencoba keberuntungan melalui corak budaya yang telah dibangun bahwa antara *Syahbandar* antara komonikasi kesultanan dengan mereka itu bisa bersatu walaupun mereka sekedar buruh, jadi buruh itu tidak lagi sebagai sebuah budak, kenapa di Palembang itu disebut budak karena mereka merupakan alat sultan, saya punya asumsi tetapi tidak meneliti terlalu jauh sampai kesana.⁶⁵³

Akan tetapi setidaknya datangnya corak Melayu kemudian membuat terjadinya suatu kebersatuan antara komonitas kalangan bawah sehingga apabila terjadi perang para wilayah-wilayah pengandang (penopang) ikut andil dan ikut membantu mempertahankan wilayah kesultanan. Dari sisi distribusi dalam konteks yang selama ini menggunakan “*Barter*” Melayu sudah berkembang menggunakan alat transaksi berupa mata uang “*Pitis*” dan mata uang “*Dokotan*.” dalam konteks distribusi corak yang saya munculkan itu sesungguhnya berangkat dari kelembagaan, saya menilai selama ini hasil studi saya sebelumnya menjelaskan bahwa *Syahbandar* itu dianggap raja kedua di dalam kesultanan setelah Kesultanan Palembang Darussalam dan dikenal dengan “*Kas Sultan*” dan bahkan mereka bisa seenaknya berbuat. Ketika ada budaya Melayu dengan sebuah pola sederhana dalam konteks itu *Syahbandar* mengikuti pemikiran kalangan bawah yang mungkin memiliki suatu kreativitas.⁶⁵⁴

Konsep kerjaan kreativitas itu juga menjadi bagian penting di dalam konteks produksi, jadi *Syahbandar* tidak bisa lagi berperan seperti itu karena komonitas-komonitas Melayu semakin berkembang kearah yang lebih maju. transaksi

⁶⁵³ Hasil wawancara dengan DR. Heri Junaidi MA. Selaku ahli Ekonomi Islam dan Pemerhati Ekonomi Melayu Palembang, Dosen Pasca Sarjana Program Doktor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 29 Februari 2020.

⁶⁵⁴ Hasil Wawancasaa dengan DR.Heri Junaidi MA. Selaku ahli Ekonomi Islam dan Pemrhati Ekonomi Melayu Palembang, Dosen Pscasarjan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 14 Apri 2020.

misalnya menggunakan “*Pitis*” dan “*Dokotan*” yang menariknya pada masa Kesultanan Palembang dalam konteks transaksi itu tidak ada yang namanya transaksional (tawar-menarwar) yang bisa acak tetapi hanya tidak dipatok begini-begini kalupun mau begini kalau tidak mau terserah misalnya begitu. Sehingga komonitas kalangan masyarakat bawah itu tidak bisa mendapatkan hal-hal disaat dia membutuhkan harus mencari komoditas dengan banyak, kemudian dia menjual lagi maka kondisi demikian muncul “*Uang*” tambah “*Barter*”. Dengan adanya corak Melayu ternyata transformasi itu memunculkan dinamika atau dinamisasi transaksional tawar-menawar. Nah lorang basah yang berada di wilayah enem belas ilir itu sebenarnya proses dari asimilasi Melayu pada saat kesultanan. Berdasarkan data-data tersebut dapat dipahami bahwa masuk dan berkembangnya Islam di Kesultanan Palembang telah memberikan corak Melayu Islam itu untuk masuk ke Kesultanan Palembang Darussalam dan berdampak pada asimilasi kebudayaan termasuk juga bidang perekonomian.

Padahal Kesultanan Palembang yang kokoh itu mampu membangun peradaban Islam bercorak Melayu, nilai-nilai budaya Melayu masuk dan hadir di kesultanan sudah ada hanya saja tidak nampak dan kelihatan samar-samar bahkan tidak ingin ditunjukkan hal ini dapat dipahami bahwa Kesultanan Melayu Palembang itu dalam menjalankan aktivitas perekonomian dan perdagangan terkesan monopoli, monopolistik, perdagangan gelap dan perdagangan bebas apa memang benar aktivitas ekonomi kesultanan dilakukan seperti itu kenyataan sebenarnya orang Melayu tidak seperti itu karena ada nilai struktur politik dan politik ekonomi, dan kesultanan harus tunduk dan berhubungan dengan kolonialis Belanda, Inggris dan China.

Asimilasi antara berbagai sistem budaya Melayu dan Islam dalam konstruksi dan muatan kebudayaan Melayu kini membentuk sistem sosial budaya dan perekonomian masyarakat Melayu termasuk juga Melayu di Kesultanan Palembang. Masuknya budaya Melayu dan Palembang tidak hanya sampai pada tataran masyarakat bawah (*Kultural*) saja akan tetapi masuk pada tataran sistem politik dan ekonomi dan kelembagaan Kesultanan Palembang. Walaupun ada anggapan bahwa budaya Melayu Islam itu memang tidak bisa masuk

dalam tatanan struktur Kesultanan Palembang atau budaya Melayu Islam itu masuk di Kesultanan Palembang itu akan tetapi tidak nampak aktivitasnya di Kesultanan atau karena asimilasi yang menjadi pendorong untuk meningkatkan pembauran dalam berbagai sistem Melayu Islam belum terlihat sehingga yang muncul corak monopoli dan aktivitas ekonomi.⁶⁵⁵

Berbagai realitas historis telah membuktikan bahwa Kesultanan Palembang Darussalam itu dalam menjalankan aktivitas ekonominya merupakan ekonomi kebersamaan, gotong-royong, bermusyawarah, berbasis ekonomi kerakyatan sehingga terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat akibat dari lancarnya roda perekonomian.⁶⁵⁶ Dengan lancarnya roda perekonomian akan berdampak positif bagi perkembangan Peradaban Melayu Islam hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai bangunan sarana dan prasarana sebagai institusi keislaman seperti membangun masjid yang besar dan megah yang diprakarsai Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo, pembangunan istana yang megah, oleh Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo Ini sebagai simbol dan representasi atas hegemoninya. Namun perlu dicatat bahwa istana pada saat itu sebagai pusat intelektual Islam di Palembang.

Dapat dipastikan bahwa bangkitnya Palembang sebagai salah satu kubu Islam di dunia Melayu tidak bisa lepas dari munculnya Kesultanan Palembang pada awal Abad XVII M di mana sejak awal para Sultannya telah menunjukkan minat khusus pada bidang keagamaan dan mendorong tumbuhnya bidang pengetahuan dan ilmu ke iklim keilmuan dibawah patronase mereka. Munculnya apa yang bisa disebut sebagai "*Minat Khusus*" para sultan tampaknya terkait dengan kenyataan bahwa sejak awal berdirinya sudah banyak berinteraksi dengan para ulama Timur Tengah, menjelang pertengahan Abad XVII M beberapa diantaranya berhasil mencapai kedudukan menonjol di istana Kesultanan

⁶⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Heri Junaidi MA. Selaku ahli Ekonomi Islam dan Pemerhati ekonomi Melayu Palembang Dosen Pasca Sarjana Proram Doktor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 29Februari 2020

⁶⁵⁶ Bambang Budi Otomo. *Perkembangan Kota Palembang Dari Wanua Sriwijaya Menuju Palembang Modern.*

Palembang.⁶⁵⁷ Dalam konteks tradisi kekuasaan Islam Melayu, fenomena para Sultan Palembang menjadikan tokoh-tokoh agama sebagai patron keilmuan merupakan gejala umum yang terjadi munculnya ulama-ulama yang bertindak sebagai “*Patron Keilmuan*” penguasa termasuk di Kesultanan Palembang.

Sejak awal sultan yang berkuasa telah memberikan kontribusi atas terciptanya atmosfer keilmuan. Para Sultan Palembang proaktif melakukan usaha untuk menarik perhatian ulama Timur Tengah agar berkunjung dan tinggal di Kesultanan Palembang. Salah satu langkah yang dilakukan sultan menarik minat para imigran Arab agar datang ke Palembang melalui kerjasama ekonomi. Melalui hasil kerjasama ekonomi ini para imigran Arab terutama Hodramaut mulai berdatangan ke Palembang datang dengan jumlah semakin besar sejak Abad XVII M. Bahkan sebagian memilih untuk menjalin hubungan kekerabatan melalui pernikahan. Upaya para Sultan Palembang seperti ini tidak hanya dilakukan terhadap para ulama Arab akan tetapi terhadap etnis lain juga seperti etnis China, sehingga Kesultanan Palembang masa itu menjadi sangat kosmopolitan.⁶⁵⁸

Dalam konteks perdagangan timah dan lada yang digerakkan oleh Sultan di bawah monopoli VOC sepertinya tidak bisa diartikan bahwa Kesultanan Palembang itu lemah dalam bisnis dan dikendalikan oleh monopoli dengan balasan berupa proteksi padahal dalam prakteknya monopoli perdagangan timah dan lada mengalami proses negosiasi yang di inisiatifkan oleh sultan Palembang. Proses negosiasi ini diantaranya berkenaan dengan masalah peningkatan harga komoditas dan premi yang di peroleh, ternyata proses negosiasi yang dilakukan oleh Sultan memiliki kekuatan yang cukup kuat dan dapat dibuktikan dengan adanya beberapa isi kontrak-kontrak yang terlarang yang kemudian mendapat izin dengan membuka hubungan dagang dengan Kerajaan Siam dan Kamboja. Serta

⁶⁵⁷ Azyumardi Azra. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad Ke XVII Dan XVIII*. Jakarta Prenada Media Group 2004 hlm 304-305

⁶⁵⁸ Endang Rohmiatun. *Perubahan Ekonomi dan Perkembangan Peradaban di Palembang Abad XVII-XIX.M*. Telaah atas Naskah-naskah Kontrak Sultan Palembang Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Jurnal Lektur Keagamaan Vol.13 No 2, 2015 hlm 369-392 diakses September 2019.

tidak terganggunya kondisi keamanan bagi Sultan Palembang dan pedagang Melayu lainnya ketika perdagangan dengan orang lain di luar VOC seperti pedagang dari Macao, Portugal, Perancis, Inggris dan China.

Memang VOC secara resmi memiliki kuasa tertinggi di Palembang akan tetapi dalam prakteknya kedaulatan tetap berada di Kesultanan Palembang karena VOC tidak pernah diizinkan masuk ke wilayah Pedalaman. Sultan Palembang telah memanfaatkan kesempatan yang bertolak belakang dalam hal perdagangan timah. Oleh karenanya di satu Sisi sultan berbisnis resmi dengan Protektoratnya VOC, akan tetapi disisi yang lain Sultan melakukan bisnis tersembunyi di pasar gelap untuk menghasilkan keuntungan diam. Disamping itu sultan juga memanfaatkan kesempatan memperdagangkan produk-produk lain yang terlarang menurut pandangan VOC dari hasil aktivitas bisnis tersebut telah membawa kemakmuran bagi Sultan Palembang dan membawa kemajuan peradaban dengan membangun infrastruktur dan institusi-institusi keislaman. Melalui pemahaman bahwa sejarah adalah sejarah masyarakat maka dalam berbagai aspek sosial dan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan Islam dapat di ungkap dalam perkembangan peradaban Islam di Palembang Abad XVII - XIX M ternyata tidak dapat dipisahkan begitu saja dengan aktivitas ekonomi penguasa dan masyarakat.⁶⁵⁹ Termasuk dalam aktivitas jual beli.

Dalam konteks jual beli telah tertuang dalam Undang-undang Simbur Cahaya Bab ka-tiga Tentang aturan dusun dan berladang Ps 26 ayat 1 berbunyi: *"Jika orang berjual beli, bergadai sawah atau pinjam sawah atau lain-lainnya barang tetap tidak terangkut hendaklah berketerangan dimuka Pesirah."* ayat 2 berbunyi *"Jika orang bergadai sawah, kebon atau ladang tidak dengan perjanjian tidak boleh ditebus sebelum buahnya terpungut oleh orang yang memegang gadai itu."*⁶⁶⁰

⁶⁵⁹ Bambang Purwanto. *Merajut Jaringan di tengah Perubahan: Komunitas Ekonomi Muslim di Indonesia Pada masa Kolonial*. Versi pertama tulisan ini merupakan sebagian tulisan yang terdapat dalam buku tentang islam di Asia Tenggara yang akan diterbitkan Ichtiar Baru Van Hoeve. Staf Pengajar Jurusan Sejarah Fakultas Sejarah Universitas Gajah Mada Jogjakarta. Diakses september 2018.

⁶⁶⁰ Oendang-oendang Simboer Tjahaya. *Jaitoe oendang-oendag jang di toeroet di dalam hoeloean negeri Palembang*. Nieuwe redactei zooals vestgeteld

Kemudian kalau kita perhatikan dalam “Aturan kaum” Ps 17 berbunyi: *”Jika lebai penghulu hendak menghantar pitrah atau zakat di Palembang hendak Pasirah kasih perpat dua orang mata pajak.* Ps 18 berbunyi: *”Lebai Penghulu dan chatib lepas dari aturan pajak dan babatan dan dari segala pekerjaan marga dan dusun ialah kemit hantar dan berkuli.”* Kemudian dalam Bab Tiga Aturan dusun dan berladang Ps 9 berbunyi: *Jika orang dagang dan orang lain singgah di dusun atau di ladang dengan maksud akan bermalam hendak kemit dusun atau orang yang punya ladang periksa surat pasnya.”* Pasal 10 berbunyi: *”Orang pedusunan tidak boleh menjual atau membeli orang punya kerja sandang gawai namanya.”*⁶⁶¹

Dalam konteks Undang-undang Dasar 1945 sebelum amandemen mengatakan bahwa Pasal 33 ayat 1: *Berbunyi Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan* ayat 2: *Berbunyi Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.* Pasal 33 tersebut jelas memberikan legalitas terhadap penyusunan perekonomian bangsa Indonesia. Termasuk Sistem ekonomi yang disusun oleh Mubyarto sudah memiliki pondasi yang yuridis untuk dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi, sistem ekonomi dan pengembangan teori ekonomi alternatif di Indonesia.⁶⁶² Sistem ekonomi seperti ini pada dasarnya sudah diterapkan pada masa Kesultanan Palembang Darussalam. Dengan demikian berdasarkan paparan sebelumnya dapat dipahami dari hasil penelitian yang peneliti lakukan maka peneliti berkesimpulan dan menemukan hasil penelitiannya yaitu *Corak Peradaban Islam Melayu Memberikan Warna pada Perekonomian Kesultanan Palembang.*

op de Vergadering van afgevaardigde Volkshoofden, gehouden van 2 tot en met 6 September 1927 te Palembang. Perpustakaan Balai arkiologi Palembang.

⁶⁶¹. Oendang-oendang Simboer Tjahaya: *Jaitu oendang-oendang yang di toeroet di dalam haluan negeri Palembang.* Nieuwe redactei zooals vastgesteld op de Vergadering van afgevaardigde Volkshoofden, gehouden van 2 tot en met 6 September 1927 te Palembang. Perpustakaan Blai Arkiologi Palembang, tt.

⁶⁶² Hastangka. *Filsafat Ekonomi Pancasila Mubyarto* Jurnal Filsafat Vol 22 No 1 April 2012 hlm 42. [https:// jurnal.ugm.ac.id view](https://jurnal.ugm.ac.id/view). Diakses Bualan Januari 2020.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan menganalisis secara menyeluruh serta mendalam dalam bab-bab dan sub-sub bab sebelumnya dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat dalam buku ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

Pertama, sistem perekonomian Kesultanan Palembang pada umumnya berdasarkan pada pertanian, perkebunan, perikanan, mengumpulkan hasil hutan, dan pertambangan. Dalam kurun waktu Abad XVII-XIX M dimana komoditas tersebut berupa hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hasil hutan, pertambangan digunakan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri (*Subsistem*) dan sebagian digunakan untuk ekspor. Komoditas yang paling diminati dan merupakan komoditas primadona Kesultanan Palembang adalah komoditas lada dan hasil pertambangan timah Bangka. Akan tetapi tidak hanya komoditas tersebut yang menjadi andalan utama masih banyak produksi hasil pertanian lainnya yang dijadikan andalan sumber ekonomi dan perdagangan kesultanan. Sistem ekonomi dan perdagangan pada masa-masa awal dan sampai akhir kesultanan mempunyai pola dan corak yang sama dalam sistem perekonomian dan perdagangan, dimana sultan menerapkan kebijakan “sistem monopoli” perdangan terhadap masyarakat kesultanan. Hal ini diperkuat oleh beberapa pemikir-pemikir ekonomi Barat seperti Van Sevenhoven, P. De Roo de la faille. J.W.J Wellan dan didukung oleh Masyhuri, Farida R Wargadalam, Bambang Purwanto, Djohan Hanafiah, Endang Rohmiatun, dan beberapa historiografi Indonesia lainnya yang mendukung serta memperkuat pandangan bahwa Kesultanan Palembang dalam memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan kesultanan dengan menerapkan kebijakan

“monopoli.” Disamping itu Kesultanan Palembang mengambil kebijakan pembagian tugas secara jelas dan sistematis, kebijakan kesultanan tersebut diatur secara baik dan sistematis serta pelaksanaannya dibantu oleh aparaturnya keamanan, begitu pula peraturan-peraturan yang terkait dengan para pedagang dan kaum pendatang diberlakukan. Dalam konteks pranata dan kelembagaan perekonomian Kesultanan Palembang mempunyai pola dan corak yang sama dan tidak jauh berbeda dengan pranata dan kelembagaan tradisional yang ada di Jawa. Pranata dan kelembagaan perekonomian Kesultanan Palembang menerapkan pola dan corak kebijakan monopoli ekonomi dan perdagangan.

Dalam sistem ekonomi dan perdagangan sultan sebagai penguasa tunggal menguasai seluruh aktivitas perekonomian. Sultan menerapkan kebijakan ekonomi perdagangan sebagai sumber pendapatan, untuk itu sultan mengharuskan masyarakat menanam-tanaman tertentu untuk dijual kepada sultan tanaman tersebut berupa lada dengan harga yang telah ditentukan sebagai ganti pajak, tidak hanya komoditas tertentu saja yang diberlakukan monopoli akan tetapi sultan melakukan monopoli barang-barang import seperti garam, pakaian, kain dan lain-lain yang dibutuhkan masyarakat di wilayah Kesultanan. Tatkala masyarakat membutuhkan barang-barang import maka masyarakat yang memiliki hasil produksi tersebut untuk ditukar kepada sultan. Sebagai penguasa tunggal di pusat, sultan menerapkan harga jual komoditas barang import tersebut untuk ditukar dengan hasil produksi pertanian, perkebunan rakyat dengan melibatkan kelembagaan *Tiban* dan *Tukon*. *Tiban* merupakan transaksi pertukaran antara komoditas barang-barang import dengan komoditas lada. *Tukon* merupakan pembelian dengan uang hasil produksi lada dari rakyat oleh sultan. Akan tetapi hasil komoditas lada itu berbeda-beda hampir disetiap marga sesuai dengan ketetapan sultan berdasarkan kualitas yang dihasilkan.

Sultan dalam menjalankan monopoli ekonomi perdagangan dibantu oleh lembaga-lembaga dibawahnya *Raban* dan *jenang* dan bekerjasama dengan lembaga *Pasirah* dan *Proatin* yang masuk dalam Wilayah *Kepungutan* dan *Sikap*. Dari pemahaman data-data tersebut peneliti sesungguhnya berusaha untuk memotret, menganalisis serta mendukung pernyataan bahwa

Kesultanan Palembang dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dengan menggunakan pendekatan sistem monopoli aligarki, perdagangan bebas, perdagangan gelap, dengan melibatkan kelembagaan yang ada dalam struktur kelembagaan birokrasi kesultanan. Walaupun demikian pada saat yang sama Kesultanan merupakan bagaian yang telah menggunakan budaya atau sudah ada budaya Melayu akan tetapi tertutupi oleh doktrin bahwa sultan harus tunduk dan patuh terhadap kepentingan kolonial. Kalau memang betul bahwa kesultanan dalam konteks perekonomian dimana kelembagaan kesultanan memiliki suatu daya dorong ini terbukti bahwa sultan tidak hanya sekedar membangun monopolistik.

Kalau memang membangun demikian, tentunya tidak mungkin adanya seni-seni, pantun-pantun, yang menyebutkan semangat kemajuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran di kesultanan dan bahkan sultan meluangkan serta mengangkat kisah-kisah riwayat sultan. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa Kesultanan Palembang itu tidak seperti apa yang dibayangkan oleh kebanyakan orang Barat, Sultan memiliki karakter yang “*Humanis*” dan tentunya karena sultan adalah Melayu menggunakan spritualis, dan spritualisnya cukup tinggi maka dari itu peneliti menyarankan sebuah teori untuk menguatkannya adalah teori “*Spiritualis Melayu*”.

Kedua; mengadopsi dan asimilasi nilai-nilai moralitas Islam dalam sistem ekonomi dan politik termasuk siatem ekonomi politik Kesultanan Palembang merupakan syarat mutlak untuk membagun sistem ekonomi dan politik kesultanan yang kuat dan berkah. Sistem perekonomian masyarakat Kesultanan Palembang pada umumnya, sebagaimana telah dikemukakan diawal berdasarkan pada pola dan corak ekonomi pertanian, perkebunan, perikananana, hasil hutan, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri (*Subsistem*) dan sebahagian di eksport. Struktur politik dan ekonomi pada masa kaesultanan terutama pada masa Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo, Muhammad Bahauddin dan sampai masa ahir kesultanan mempunyai pola dan corak yang sama dalam sistem politik ekonomi dan perdagangan. Sultan menerapkan kebijakan tentang sistem politik ekonomi perdagangan dengan pola dan

corak” *Monopoli*” hal ini dikemukakan oleh Van Sevenhoven, P. De Roo de la faille J.W.J Wellan dan didukung oleh beberapa ahli histografi ekonomi seperti Masyhuri, Bambang Purwanto, Endang Rohmiatun, Farida R Wargadalam dan banyak lagi ahli sejarah ekonomi lainnya. Kaitannya dengan corak monopoli dalam konteks kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat Kesultanan Palembang melalui politik perdagangan dengan VOC membawa keuntungan yang luar biasa bagi kedua belah pihak. bagi VOC keuntungan tersebut dipergunakan untuk mengubah bangunan benteng yang terbuat dari kayu dan direnovasi menggunakan material beton. Sementara bagi Kesultanan Palembang dampak dari keuntungan perdagangan tersebut dipergunakan Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo untuk mensejahterakan masyarakat kondisi ini dapat digambarkan dalam beberapa histografi Melayu baik cerita Palembang cerita Bangka maupun kronik-kronik Siak. Pada masa itu muncul perkataan bahwa istana kesultanan, masjid-masjid dan bangunan-bangunan baru menjadi prioritas untuk di bangun. Menurut pengakuan Resident Inggeris M.H Court masjid di Palembang merupakan masjid terbesar di nusantara disamping itu beliau juga mengatakan Sultan Mahmud Badaruddin II merupakan sultan terkaya di timur kekayaan sultan tidak terhitung banyaknya bahkan menurut perkiraan Resident VOC Hemmij sekitar enam puluh juta real Spanyol.

Dilihat dari kronik-kronik Siak, Palembang seringkali dihubungkan dengan kesejahteraan masyarakatnya. Sementara dalam cerita Bangka menggambarkan masa ini mengalami masa keemasan yang dialami masyarakat Bangka. Kalau dilihat dari kronik-kronik Palembang menggambarkan dengan ungkapan kata-kata sebagai berikut “Ketika itulah raja dan masyarakat di Kesultanan Palembang mulai kaya dan seluruh masyarakat dan termasuk orang kecil senang, negeri kaya raya terlalu bangak pedagang dan perniagaan. Menurut William Marsden yang pernah mengelilingi Sumatera termasuk juga Kesultanan Palembang beliau mengatakan bahwa Kesultanan Palembang yang kaya raya itu memiliki mata uang sendiri dan uang itu terbuat dari “*Timah*” yang dikenal dengan nama “*Pitis*.” Komoditas lada dan timah merupakan sumber pendapatan utama Kesultanan Palembang dan pada masa itu telah membawa negeri ini menjadi makmur dan kaya raya. Beberapa

indikasi dapat membuktikan bahwa strategi Sultan Mahmud Badaruddin untuk terlibat di dalam monopoli perdagangan dengan VOC ternyata berdampak positif bagi Kesultanan Palembang sendiri maupun bagi perkembangan ekonomi masyarakat pada masa itu.

Ketiga, proses asimilasi sosial dapat membawa perubahan-perubahan mendasar terhadap corak Melayu dalam sistem perekonomian Kesultanan Palembang. Kecenderungan asimilasi dapat terjadi dengan adanya pembauran antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi Melayu dengan sistem ekonomi Kesultanan Palembang sehingga memunculkan corak ekonomi kesultanan melalui asimilasi sosial. Corak ekonomi Melayu Palembang tidak mengenal pemisahan antara nilai-nilai sosial dengan nilai ekonomi, dan nilai-nilai ekonomi bagi orang Melayu Palembang kekayaan yang dimiliki lebih bernilai sosial dari pada bernilai ekonomis dalam arti orang Melayu tidak mementingkan keuntungan maksimal. Oleh karenanya orang-orang Melayu kurang memiliki daya saing, kurang berani membuat perhitungan disamping tidak berminat mengalihkan aset material menjadi investasi padat modal terpasang (*Fixed Capital*). Orang Melayu Palembang lebih baik menyimpan harta atau barang berharga di simpan sendiri sehingga mudah dibawa jika harus melarikan diri. Akan tetapi kondisi ini nampaknya juga berkaitan dengan sistem politik yang kurang memjamin stabilitas keamanan.

Berkaitan dengan realitas historis telah membuktikan bahwa perkembangan Islam di Kesultanan Palembang tidak terlepas dari aktivitas perekonomian sampai Abad XVII M. Keberadaan Kesultanan Palembang tidak mengubah struktural dan struktur perekonomian kesultanan. Akan tetapi Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo sebagai salah seorang penguasa tunggal telah memperlihatkan bagaimana kebijakan perekonomian berdampak positif terhadap perkembangan peradaban Islam Melayu di kesultanan, sehingga dapat memberikan corak Melayu dalam aktivitas perekonomian Kesultanan Palembang. Berdasarkan data-data tersebut dapat dipahami bahwa masuk dan berkembangnya Islam di Kesultanan Palembang telah memberikan corak Melayu Islam untuk berasimilasi dan masuk ke Kesultanan Palembang Darussalam dan berdampak kepada asimilasi sosial Melayu

termasuk juga dibidang perekonomian. Masuknya Melayu Islam telah mampu membangun peradaban bercorak Melayu Islam di Kesultanan Palembang. Nilai-nilai Melayu di Kesultanan Palembang pada dasarnya sudah ada, hanya saja nilai-nilai itu tidak nampak dan kelihatannya samar-samar dan nilai itu masuk bukan saja pada tataran masyarakat akar rumput akan tetapi masuk kedalam sistem lembaga-lembaga pemerintahan, lembaga birokrasi, hal ini dapat diketahui dari kebijakan kesultanan terkait dengan pembangunan masjid agung. Pengaturan dan pemungutan dana zakat fitrah dan penyalurannya, tertuang dalam Bab 4 aturan kaum Ps 17 yang berbunyi "*Jika lebai penghulu hendak menghantar fitrah atau zakat di Palembang hendak pasirah kasih perpat dua orang mata pajak.*" Sistem jual beli yang ditegaskan dalam undang-undang simbur cahaya Ps 26 ayat 1 yang berbunyi "*Jika orang berjual beli bergadai sawah atau pinjam sawah atau lain-lainnya barang tetap tidak terangkut hendaklah berketerangan dimuka pasirah.*"

Kesultanan Palembang dalam menjalankan aktivitas perekonomiannya terkesan monopoli, monopolistik, perdagangan gelap, perdagangan bebas, satu sisi memang ada data pendukungnya akan tetapi di sisi yang lain kenyataan sebenarnya orang Melayu itu tidak seperti itu, walaupun terkesan monopoli, monopolistik karena ada nilai-nilai struktur, struktural politik, politik ekonomi dan Kesultanan Palembang harus tunduk tatkala berhubungan dengan kolonialis Belanda dan Inggeris. Disamping itu sistem monopoli sultan pada hakekatnya diterapkan juga oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 dan 2 Berbunyi: Ps 1 "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama bedasarkan asas kekeluargaan.* Ps 2 "*Cabang-cabang Produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.* Kemudian ada pandangan yang menyatakan bahwa Kesultanan Palembang itu tidak menerapkan sistem monopoli dalam perdagangan dan nilai kemelayuan tidak hilang disini karena ada doktrin teori yang dibangun oleh orang sebelumnya mencoba untuk membangun mainsert, bahwa memang Kesultanan Palembang itu monopoli, monopolistik sipatnya memaksa, padahal secara pemikiran akal sehat dalam prosesnya kepemimpinan Kesultanan Palembang itu berorientasi kepada

kepentingan masyarakatnya terbukti dengan banyak hal diantaranya bagi penenun songket perempuan ditempatkan ditempat tersendiri adanya dialog-dialog melalui pantun-pantun, paktanya sultan telah membangun inprastruktur berupa bangunan masjid Agung, keraton kota gawang, pemakaman sultan akan tetapi kenapa tidak mau diangkat oleh mereka teori-teori yang seperti ini, teori-teori ini tidak mau diangkat oleh mereka karena takut dan khawatir orang Melayu itu meningkat lebih maju dan menguasai dalam konteks perekonomian, karena ada dua komonitas Jawa dan Melayu. Jawa akan tersingkirkan hal ini muncul misalnya dialog ketika menyampaikan diskusi-diskusi, ceramah-ceramah selalu berorientasi Melayu mereka akan khawatir kalau tertinggal dalam semua sisi kehidupan.

Asimilasi Melayu dan Islam dalam konstruksi yang bermuatan budaya Melayu kini membentuk sistem sosial budaya dan perekonomian masyarakat Melayu termasuk Melayu di Kesultanan Palembang. Masuknya corak dan kultur Melayu di Kesultanan Palembang tidak saja pada tataran akar rumput akan tetapi corak Melayu itu masuk pada tataran politik, lembaga birokrasi dan sistem perekonomian. Kalaupun ada anggapan bahwa corak Melayu itu tidak bisa masuk dalam tataran struktur politik, ekonomi dan lembaga birokrasi kesultanan Palembang atau corak Melayu Islam itu masuk ke Kesultanan Palembang akan tetapi tidak nampak aktivitasnya atau karena asimilasi dalam berbagai pola dan corak Melayu belum terlihat sehingga yang muncul corak monopoli dalam aktivitas perekonomian dan perdagangan. Indikator corak Melayu dalam kajian perekonomian yang berhubungan dengan Kesultanan Palembang dapat dilihat dari tiga sektor. *Pertama*, produksi, *Kedua*, distribusi dan *Ketiga*, transaksi. Dari sektor produksi misalnya kesultanan selama ini dipahami selalu monopoli, bicara ingin kaya sendiri, ketika terjadi adanya budaya Melayu Islam corak yang muncul dalam konteks monopoli, artinya budaya muncul di kesultanan ketika adanya asimilasi dan akulturasi budaya corak yang tadinya monopoli kemudian mencoba untuk melakukan musyawarah, kekeluargaan, kerjasama ekonomi, dan melakukan penilaian kebawah. Kongritnya dari aktivitas tersebut misalnya kerajinan songket tadinya dilakukan oleh perempuan-perempuan yang

memiliki darah kesultanan. Dengan adanya sistem monopoli konstruksi itu ada semacam monopolistik bahwa pekerjaan penenun songket orang-orang pilihan sultan. Kemudian akhirnya timbul adanya kebersamaan, kerjasama, musyawarah bisa mengajarkan di komonitas-komonitas untuk menjadi bagian dari komonitas pengrajin kesultanan ini indikator dasarnya. Pengrajin songket awalnya eksklusif sekarang dengan hadirnya budaya Melayu ternyata usaha yang berkembang di komonitas masyarakat luas bisa digunakan untuk masyarakat kelas bawah, kemudian kelompok pegawai pengrajin songket kesultanan mulai mengajarkan keterampilan tenun songket ke kelompok masyarakat kelas bawah. Inilah yang menyebabkan songket mulai berkembang sampai sekarang.

Disektor industri kreatif selama ini kreatifitas itu selalu *Top Down* yang menjadi keinginan sultan yang identik dengan doktrin. Setelah adanya transformasi maka muncul kreatifitas dikalangan kesultanan untuk membuat hal-hal baru maka muncullah rumah limas yang dibentuk unit kecil menjadi maniatur rumah limas. Datangnya Melayu di kesultanan Palembang memang sudah ada baru Melayu tetapi jangan lupa bahwa kesultanan itu ada dalam dua konteks dikotomi antara komonitas ekonomi Melayu dengan ekonomi komonitas Jawa ketika terjadinya asimilasi dan akulturasi dalam konteks ini tidak jelas mau mengikuti kemana ke Melayu atau ke Jawa. Akibat dampak dari itu kemudian ketika budaya Melayu mau muncul dalam realita, corak yang muncul orang Jawa yang berkarakter menurut tapi keras kesultanan itu tegas tapi kemudian berkarakter lembut itu kemudian menyatu bersama dengan corak dari sisi perekonomian. Indikator corak dari sisi distribusi dapat dilihat bahwa selama ini Kesultanan Palembang mendistribusikan komoditas yang ada di masyarakat untuk dijual ke sultan, kemudian sultan menjual komoditas kepada VOC dan seterusnya. Disinilah muncul pola distribusi lebih kepada kelembagaan kesultanan bercorak monopoli artinya selama ini kelembagaan itu lebih berorientasi pada politik makro bagaimana orang-orang VOC jangan masuk. Dengan adanya corak Melayu sultan tidak bisa sendirian melaksanakan distribusi masyarakat perlu dilibatkan. Kemudian masyarakat diajak untuk menjual barang-barang yang dihargai berupa komoditas pertanian, perkebunan, kemudian dibangunlah

kelembagaan *Syahbandar*. Artinya *Syahbandar* yang tadinya eksklusif dengan Melayu, kemudian corak Melayu hadir dengan nilai-nilai filosofisnya berupa musyawarah, kerjasama, kekeluargaan maka *Syahbandar* lebih bersipat *Sopt Skill* lebih bisa mengikuti kearah komonitas *Gress Rood*. Indikator corak Melayu dari aspek transaksi dapat dilihat, bahwa masyarakat kesultanan dalam konteks transaksi tidak ada yang namanya transaksional tidak ada tawar-menawar yang bisa acak akan tetapi harga tidak dipatok artinya kalau mau ya begini kalau tidak mau terserah, sehingga kalangan masyarakat bawah tidak bisa mendapatkan komoditas, disaat butuh dia harus mencari dengan lebih banyak lagi dalam konsisi demikian muncul uang *Ples-barter*. Dengan adanya corak Melayu ternyata transaksi itu memunculkan dinamika atau dinamisasi transaksional tawar-menawar.

Dalam konteks ini lorong basah yang ada di pasar enambelas ilir sebenarnya lahir dari proses asimilasi Melayu pada masa kesultanan. Berbagai realitas historis telah membuktikan bahwa corak Melayu dalam perekonomian Kesultanan Palembang terlihat dalam sistem yang selama ini dibangun berdasarkan ekonomi kekeluargaan, kebersamaan, musyawarah berbasis ekonomi kerakyatan, sehingga terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan berdampak pada lancarnya roda perekonomian di Kesultanan Palembang. Dengan lancarnya roda perekonomian berdampak positif terhadap perkembangan peradaban ekonomi Melayu Kesultanan Palembang. Hal ini dapat dilihat dari inprastruktur bangunan dan prasaran keislaman seperti bangunan masjid agung yang megah oleh Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo. Dengan demikian yang menjadi menarik dari buku ini sesungguhnya memotret beberapa teori-teori yang menyatakan bahwa Kesultanan Palembang meningkatkan kesejahteraan dan menjadi maju dengan menerapkan monopoli aligarki, perdagangan bebas, perdagangan gelap, hal tersebut dikuatkan oleh beberapa pandangan para ahli histogriografi Van Sevenhonven, P. De Roo de la faille, J W J Wellan dan didukung oleh Djohan Hanfiah, Bambang Purwanto, Farida R Wargadalam, Masyhuri, Endang Rohmiatun. Dari beberapa teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli tersebut peneliti berkesimpulan untuk mendukung dan menguatkan teori-teori tersebut dengan

menyarankan teori baru yang dinamakan dengan teori “*Humanis Spiritualis Melayu.*” Karena Kesultanan Palembang merupakan bagian yang telah menggunakan budaya atau sudah ada budaya Melayu akan tetapi tertutup oleh doktrin kolonialis. Dalam konteks perekonomian dimana kelembagaan dan struktur kesultanan miliki suatu daya dorong ini terbukti bahwa sultan tidak hanya membangun monopolistik, kalau ia memang membangun sistem itu tidak mungkin ada seni-seni, pantun-pantun sultan mendukung karya seni tersebut bahkan memberikan peluang dan mengangkat kisah-kisah riwayat sultan, ini berarti tidak seperti apa yang orang Barat bayangkan mereka *Humanis* dan tentunya dia Melayu menggunakan *Spiritualis* yang tinggi maka dari itu saya menyarankan sebagaimana yang telah diungkapkan dengan menyarankan sebuah teori untuk menguatkannya adalah teori “*Humanis Spiritualis Melayu.*” []

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Azmi Khalid; *Ekonomi Melayu Kurun Ke-19: Sara Diri Komersial dalam Badriah Haji Salleh dan Tan Ijok Ee (Penyt) Alam Pensejarahannya dari Berbagai Prospek*. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur Malaysia 1996.
- Abdullah Irwan. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Penerbit Pustaka Pelajar Offset Jogjakarta. 2015
- *Konstruksi dan Rekonstruksi Kebudayaan*. Pustaka Pelajar, Jogjakarta 2015
- *Dibawah bayang-bayang Media, Kodifikasi Dipergensi dan Kooptasi Agama pada Era Internet*. Seminar Nasional Agama dan Budaya dan Media; Kontribusi Antropologi abad 21 Universitas Diponegoro. Semarang 2017
- Abdullah Makmun dkk. *Sejarah Daerah Sumatera Selatan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bagian Proyek inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Provinsi Sumatera Selatan. Palembang 1991
- *Palembang Sebagai Kota Dagang dan Industri*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sejarah dan Nilai Tradisional. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional 1984/1985 Jakarta 1984.
- *Sistem Ekonomi Tradisional Awal Daerah Sumatera Selatan*. Departemen Produk Direktorat Jendral Kebudayaan. Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Dokumentasi Kebudayaan Daerah. 1986/1987 Palembang 1986
- Abdullah. Taufik. *Beberapa Aspek Perkembangan Islam di Sumatera Selatan Masuk dan berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. Penerbit Universitas Indonesia Press Jakarta 1986
- *Islam dan Masyarakat Pantulan Sejarah Indonesia*. Penerbit LP3ES Jakarta 1987
- Abu Kosim dan Azwardi. *Analisis Skala Usaha dan Tingkat Keuntungan Industri Kerajinan Songket di Kota Palembang*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 6 No. 1 Juni 2008 ISSN 1829-5843.
- Adi Warman Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Penerbit Raja Grafindo Persada. Jakarta 2006 hlm 257.

- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Penerbit Kencana Pranata Media Group 2012.
- Afzahurrahman. *Muhammad Seorang Pedagang*. Penerbit Yayasan Swarna Bhumi Jakarta 1997.
- Ahmad Jalani Hakim. *Perdagangan dan Perkapalan Melayu di Selat Malaka Abad XV Hingga XVIII*. Kuala Lumpur Dewan Bahasa 2006 dalam Mustika Zet. Jakarta 2003
- Akib R.H.M. *Sejarah dan Kebudayaan Palembang buku Pertama tentang Rumah Adat Limas Palembang, Perencana Miniatur Indonesia "Indonesia Indah."* Deposit dan Bibliografi Perpustakaan Masjid Agung Palembang 1996.
- R.H.M. Akib. *Sejarah Perjuangan Sri Sultan Muhammad Badaruddin ke II cetakan pertama*. Hak pengarang dilindungi Undang-undang, Perpustakaan Balai arkiologi. Palembang, 1978
- Al-Attas Syeh Hasan. *The Myth of the Lazi Native A Study of the Malays Philipines and Javanese From 16 th to the 20 thCenturi and its Functions in the Idiology of Colonial Capitalism*. London Routledge. 1977
- Aldy Purnomo. *Rahmat Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia*. Penerbit Ziyad Visi Media. Surakarta 2016
- Alfian. T Ibrahim. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Sumatera Selatan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Sejarah Nasional 1983/1984. Jakarta 1983
- Aly Salman. *Sejarah Kesultanan Palembang dalam KHO Gajahnata Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan* Universitas Indonesia UI Press Jakarta 1986.
- Amani Samsul Munir. *Sejarah Perdaban Islam*. Diterbitkan oleh Amzah Jakarta 2016
- Al-Attas Syed Muhammad Naquib. *Islam dalam Sejarah Kebudayaan Melayu*. Penerbit Mizan Khazanah ilmu-ilmu Islam, Bandung 1990.
- Al Mudra Mahyudin. *Kajian Islam Di Kawasan Asia Tenggara Peta dan Prospek Pengembangannya*. Proceeding Internasional Seminar Universitan Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 2015
- Ali Salman 2015. *Internasional Seminar Malay Islamic Civilization: Tradition And Contribution To The*

- Development Of Islam At Southeast Asia*. Proceeding International Seminar Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 2015
- Al-Zarqa Sharb al-Qonun al-suri: *al-Uqud al-Musammah Damsyq Dar al-Kitab*. 1968 hlm 23 al-Mansuah al-Fiqhiyahj. Kwait 1987
- Amri Hoirul. *Kebijakan Moneter Pada Awal Pemerintahan Islam Dalam Pembangunan Perekonomian (Studi Analisis Pada Masa Rasul Dan Sahabat)*. Tesis U niversitas Islam Negeri Raden Fatah. Palembang 2013.
- Andaya Leonardy. *Sastra Melayu Lintas Daerah*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2008
- _____. 2001. *The Seareh For The Origins Of Malay*. Journal Of South East Asean Studies Oktober Malaysia 2001.
- _____. 2016. *To Live as Brother South East Sumatera in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*. Honolulu University of Hawaii Press. 1993. *Hidup Bersaudara Sumatera Tenggara Pada Abad XVII dan XVIII*. Penerbit Ombak Jogjakarta. 2016.
- Anthony Crothers Milner. *The Malay Raja a Study Of Malay Political Cultural In East Sumatera And The Malay Peninsula In The Early Nineteenth Century (Cornell Phd)* Thesis Cornell University 1977
- Antoni. *Upah dan Etos Kerja pada Kasus Songket Palembang dalam Perspektif Islam dan Melayu*. Disetasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2017.
- Antoni Muhammas Syafe'. *Apa dan Bagaimana Bank Islam* Penerbit Dana Bakti Wakaf. Jogjakarta. 1992
- Ari Kunto Suharismi . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Arief Johari. *Globalisasi dan Dampak Desain serta Relasinya terhadap Industri Kreatif* Magister Desain Institut Teknologi Bandung. 2006.
- Asnan Gusti. *Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera*. Penerbit Ombak Jogjakarta 2007.
- Atmosudirdjo Prajudi. *Sejarah Ekonomi Indonesia dari Segi Sosiologi Sampai Akhir Abad Ke XIX*. Penerbit Pradaya Paramita. Jakarta Pusat 1957.
- Azra Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad ke XVII dan ke XVIII Akar Pembaharuan*

- Islam Indonesia*. Penerbit Kencana Prenada Media Group. Jakarta 2013
- Bambang Budi Otomo. *Cheng Ho Diplomatik Kebudayaannya di Palembang*. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dinas Pendidikan Nasional. Dewan Keaenian Sumatera Selatan Pembina Iman Tauhit Islam, Palembang 2008.
- Bambang Purwanto. *From Dusun To Market Native Rubber Cultivation In Southern Sumatera 1890-1940 Phd Tesis In School Of Oriental An African Studies University Of London*. 1992
- Baharuddin. *Sejarah Kota Palembang*. Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kota Palembang. Deposit Balai Arkiologi Sumatera Selatan Palembang 2011.
- Beni Ahmad Sabani. *Filsafat ilmu*. Penerbit CV Pustaka Setia. Bandung 2009
- Beurah Tunggal dan Husen Saloman. *Mengembalikan Kegemilangan Tamadun Melayu-Islam Menerusi Penumpukan Budaya Niaga Berteraskan Akhlak*. Internasional Journal of The Malay World And Civilization. 29-2012-123-147
- Buchari. Didin Saefuddin. *Sejaran Politik Islam*. Penerbit Pustaka Intermedia Jakarta 2009.
- Budi Otomo Bambang dan Djohan Hanafiah. *Perkembangan Kota Palembang dari masa Sriwijaya Menuju Palembang Modern*. Pemerintah Daerah Kota Palembang Penguyuban Masyarakat Peduli Musi. Palembang 2005.
- Kota Palembang dari Wanua Sriwijaya Menuju Palembang Modern*. Pemerintah Daerah Kota Palembang Peguyuban Masyarakat Peduli Musi Palembang. 2005
- Burhanudin Jajat. *Islam dalam Arus Sejarah Indonesia* Penerbit Kencana Prenada Media Group Jakarta 2017
- Burger D.H. *Sejarah Ekonomi Sosiologi Indonesia*. Jakarta 1957
- Chodary Muhammad Sharif. *Prinsip-prinsip dasar Sistem Ekonomi Islam Fundamental of Islamic Economic Syistem*. Penerbit Kencana Prenada Group Jakarta 2011
- Callin W. A. *Basemah Concepts a Study of The Culture of People of South Sumatra*. Disertasi PhD Michigan 1979
- Chapra Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi Terjemah. The Economic Challenge*. Penerbit Gema Insani Press Penerbit Buku Andalan. Jakarta 2000.

- Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Penerbit Gema Insani Press Penerbit Buku Andalan. Jakarta 2000.
- Clifford Geertz. *Biographical Memories Proceeding Of The American Philosophical Society* 2010.
- The Javanese Kijaji The Changing Role of a Cultural Broker. Comparative Studies In Society And History Vol II (1959-1960) PP 228-249*. dalam Mustika Zet 2002
- Creswell W John. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih diantara lima Pendekatan*. Edisi ke tiga. Penerbit Pustaka Pelajar, Jogjakarta 2015
- Court M.H. *An Exposition of Religion of the British Governement with the Sultan and the State of Palembang and the Desigus of the Nederland Goverment Upon Thet Country*. Parbury and Allen Landhall Sreet London. 1821
- D. Hendropuspito. *Sosiologi Simantik*. Penerbit Konisius Jogjakarta 1989
- Dafri Yulriawan. *Melacak Jejak Artepak Seni Etnik Melayu Palembang*. Penerbit Gema Media, Jogjakarta 2011.
- Darfian M. Jaya Sudarana. *Buah Manis Besarkan Usaha Songket turun-temurun*. Artikel selasa 28 oktober 2014
- Dahlan H A. *Risalah Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badarudin II*. Tim Perumus hasil-hasil Diskusi Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II. Palembang 1981
- Danan Sunyoto. *Metode Penelitian Akutansi*. Penerbit PT Grafindo Adi Tama. Cetakan ke satu. Bandung 2013.
- Deliningtias Diah. A. *Mata Uang Koleksi Musium Bala Putra Dewa*. Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Bagian Proyek Pembinaan Permesiuman Sumatera Selatan Palembang 2001.
- Didarta Made. *Landasan Pendidikan Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*, edisi sebelas. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta 2007
- Djohan Hanafiah. *Melayu Jawa Citra Budaya Sejarah Palembang*, Diterbitkan atas Kerjasama Dengan Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Madya Palembang. Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 1995.
- *Masjid Agung Palembang Sejarah dan Masa depannya*. Cetakan kesatu Penerbit Haji Masagung. Jakarta 1988.

- *Palembang Zaman Bari Zaman Citra Palembang Tempo Doeloe*. Diterbitkan. Diterbitkan oleh Humas Pemerintah Kotamadya Daerah TK II Palembang. Penerbit PT Karya Unipress. Jakarta 1988
- *Perang Palembang Melawan V O C* Penertbit Karyasari Palembang 1996.
- *Sejarah Kota Palembang*. Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kota Palembang. 2004
- *Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan Suatu Tinjauan Sejarah*. Pemerintah Sumatera Selatan. Palembang 2009
- *Sejarah Kota Palembang Makam Gedig Ing Suro*. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang Devosid.
- *Kuto Gawang Pergolakan dan Permainan Politik dalam Kelahiran Kesultanan Palembang Darussalam*. Retno Purwati Personal Collection Palembang 1987
- Drewes dalam Sedyawati dan kawan kawan. *Sastra Melayu Lintas Daerah*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta 2008
- *Derection For Treveller on The Mystic Part The Hague Martinus Nijhoff BKI*. 81. 1977
- Ensklopedi Nasional Indonesia Vol 16* Cetakan ke tiga. Penerbit Delta Pamungkas Jakarta 1997
- Ensklopedi Islam*. Ickhtiar Baru Van Hoeve Jilid kedua Jakarta. 2001
- Erman Erwiza. *Menguak Sejarah Timah Bangka Belitung dari Pembentukan Kampung ke Perkara Gelap, dari Pembentukan Kampung ke Perkara Gelap*. Penerbit Ombak Jogjakarta. 2009.
- Faille De Roo de la P. *Dari Zaman Kesultanan Palembang*. Penerbit Bharata Jakarta 1971
- Gary Yulk. *Leader Shif in Organization Seventh Edition Universiti State*. Universiti Of New York 2018. Prentise Hall Upper Saddle River New Jersay.
- Gajahnata dan Sri Edi Suasono. *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. Penerbit Universitas Indonesia UI Press. Jakarta 1986.
- Graaf De H. J. *De Regering Van Sunan Mangkurat*. Tegal Wangi Vorst Van Mataram Terjemahan. Disintegrasi Mataram Dibawah Mangkurat I 1646-1677. Penerbit Pustaka Grafiti Pers. Jakarta 1987.

- H.A. Dahlan dan kawan kawan. *Risalah Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II Team Perumus Hasil-hasil Diskusi Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badarudin II*. Palembang, 1980
- Hamka. *Sejarah Umat Islam Pra Kenabian Hingga Islam di Nusantara*. Penerbit Gema Insani Press Depok Jakarta. 2016
- Hasbullah Moeflich. *Islam dan Transformasi Masyarakat Nusantara, Kajian Sosiologis Sejarah Indonesia*. Penerbit Prenada Media Group Depok Jakarta 2017.
- Hasimy Ed A. *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*. Penerbit PT al-Ma'arif Bandung. 1989
- Halimi A. J. *Sejarah dan Tamadun Bangsa Melayu*. Utusan Publication 2008
- Harry J. Banda. *The Structure of South East Asian History Some Preliminary Observations*. JSEAH. Vol 2 1968 dalam Sirozi. *Bunga Rampai Peradaban Melayu Islam*,. Badan Kajian dan Penertbitan ICMI Orwil Sum-Sel. Palembang 2012
- Hasyim. Muhammad Yusuf. *Kesultanan Melayu Malaka*. Kuala Lumpur. Malaysia 1990
- Heidhuss Mary F. Somers. *Timah Bangka dan Lada Mentok. Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pembangunan Pulau Bangka Abad ke XVII s/d Abad XX*. Penerbit Yayasan Nabil Jakarta. 2008
- Junaidi. Heri *Ekonomi Masyarakat Melayu Dan Pengembangan Usaha Mikro Proceeding International Seminar Malay Islamic Civilization Tradition And Contribution To The Development Of Islam At South Asia*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 2015.
- H. M. Nasir. *Islam dan Budaya Melayu Senergi yang Mengokohkan Ke Indonesian dalam Komarudin Hidayat Ahmad Gaus Af (ed) Menjadi Indonesia 13 Abad Exestensi Islam di Nusantara*. Yayasan Festifal Mizan Jakarta. 2015
- H. M. Vlekke Bernard. *A History of Indonesia*. Terj. Samsul berlian Nusantara Sejarah Indonesia, Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia. Jakarta 2016
- Hudaidah. *Perkembangan Tradisi Intelektual Kesultanan Palembang Darussalam (Studi Historis tentang Warisan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Melayu Abad XVIII dan*

- XIX M dan Pelestariannya*. Desertasi Universitas Islam Negeri Rden Fatah. Palembang 2017.
- Hurgronye Snouck. *Makka In The Letter Part Of The 19 th*. Centuri Leiden E.J Brill 1913.
- Husen Embi et al. *Adat Perkawinan di Malaka di dalam Abdul Latif Abu Bakar dan Hanfiah Husen Kepemimpinan Adat Perkawainan Melayu Melaka*. Penerbit Institut Seni Malaysia. Malaka 2004
- Husni Thamrin. *Enkulturasikan dalam Kebudayaan Melayu al-Fikra Jurnal Ilmiah Keislaman Vol 14 No 1 Januari-Juli 2015* <http://www.google.co.id> searchei
- Ibn Rusyd. *Bidayatul al-Mujtauhid wa Nihayah al-Mugtasid* J2 Bairut dar al al-fikri tt hlm 122: Ibn Qudamah *al-Mugni Bairut tt*. 1984 hlm 313 Muhammad Nurdin Hj Ngadimon. *Jual Beli Berdeposit Satu Penilaian Fiqh*. Jurnal Syari'ah 2 Juli 1994
- Ichtiar Baru Van Hoeve. *Ensiklopedi Islam Jilid II*. Penerbit PT Ikrar Mandiri Abadi Jakarta. 2001
- Idri. *Hadist Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi*. Penerbit Prenada Media Grouf cetakan kesatu. Jakarta 2015
- Idris M. *Pengaruh Komitmen Organisasi Sosial Motivasi Kerja dan Konvensasi Finansial terhadap kepuasan kerja serta dampaknya terhadap kinerja (Studi pada pengrajin songket di Propinsi Sumatera Selatan)*. Disertasi Universitas Pancasila 2013.
- Imron M. *Dasar-dasar Sosial Budaya Pendidikan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Ditjen PT P2 LPTK Jakarta.
- Isjoni. *Orang Melayu di Zaman Yang Berubah*. Pustaka Pelajar Jogjakarta 2007.
- Ismail Faisal. *The Golden of Islam Sejarah Kebudayaan Islam Priode Klasik Abad ke VII-XIII M*. Penerbit IRCised. Jogjakarta 2017
- Ismail Hamid. *Masyarakat dan Budaya Melayu*. Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka. Malaysia 1998
- Irwanto Dedi. *Venesia dari Timur Memaknai Produksi dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang dari Kolonial Pasca Kolonial*. Penertbit Ombak Jokjakarta 2011.

- Iliran dan Uluan Dikotomi dan Dinamika dalam Sejarah Kultural Palembang*. Penerbit Eja Publisher Jogjakarta 2010.
- Isjoni. *Melayu dalam Tantangan Globalisasi Reflekssi Sejarah dan Perubahannya Sistem Referensi Budaya*. dalam Sunandar. 2015
- Iskandar. *Kesusateraan klasik Melayu Sepanjang Abad*. Penerbit Lebra Jakarta. 1996
- Irwan Abdullah, *Tantangan Pembangunan Ekonomi dan Transpormasi Sosial Suatu Pendekatan Budaya*. Jurnal Humaniora Volume XIV 2012
- Konstruksi dan reproduksi Kebudayaan*. Penerbit Pustaka Pelajar Jogjakarta. 2015
- Dibawah bayang-bayang Media, Kodifikasi, Divergensi, dan Kooptasi Agama pada Era Internet*. Seminar Nasional Agama Budaya dan Media; Kontribusi Antropologi abad 21. Universitas Diponegoro. Semarang 2017.
- Jang Aisyah Mattatib. *Pemberontakan Pahang 1891-1895 Kota Baru*. Penerbit Pustaka Amani Press. Malaysia 1972
- J.M Gullick. *Malay Society In The Late Ninteeth Century Singapore*. Oxford University Press Singapore 1989
- J.R Feagim dan C.B Feagin *Racid And Ethnics Relation*. New Jersey Prentice Hall. Englewood Cliffs 1993
- John W. *Creswell Research Design Quaalitative And Quantitative Approach London Sage*. 1993 hlm 120 dalam <http://id/wikipedia.org.wiki> diakses Februari 2020
- Jumhari. *Sejarah Sosial Orang Melayu Keturunan Arab dan China di Palembang dari Masa Kesultanan Palembang hingga Reformasi*. Penerbit BPNST Padang Press. Padang 2010
- Junaidi. Heri. *Episiensi Berkeadilan Pada Kasus Songket Palembang*. Desertasi Jakarta Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2013
- Ekonomi Masyarakat Melayu dan Pengembangan Usaha Mikro*. Proceeding Internasional Seminar Malay Islamic civilization trdition and contribution to the development of Islam at souteast Asia Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 2015

- Jun Kim-Hyung. *Reformist Muslims in a Yogyakarta Village: the Islamic Transformation of Contemporary Sosio-Religious Life*” Disertasi doktoral Hyun-Jun Kim di The Australian Nasional University 1996. *Revolusi Perilaku Keagamaan di Pedesaan Yogyakarta*. Penerbit Suara Muhammadiyah Jogjakarta 2017
- JWJ. Wellan. *Zuid Sumatera Economisch Overziet h. Veenman j Zonen Holland 1932* hlm 163 dalam Hanafiah 1995
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1991.
- Karto Dirjo. Internasional Seminar “ *Malay Islamic Civilization Tradition And Contribution to the Development of Islam At Southeast Asia*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 1975
- Kayam Umar. “*Transpormasi Budaya*” Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada. Jogjakarta 1989
- Kersten Carol. *A History of Islam in Indonesia Mengislamkan Indonesia Sejarah Peradaban Islam Nusantara*. Penerbit Bentara Aksara Cahaya Tanggerang Selatan. 2018
- Khaldun Ibnu. *Mukaddimah Sebuah Karya Mega Fenomenal dari Cendikiawan Muslim Abad Pertengahan*. Penerbit Pustaka al-Kautsar Jakarta Timur 2001.
- Koentjoroningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Penerbit Pranata Cipta Jakarta 1990
- Lapian Adrian. B. *Orang Laut Bajak Laut Raja Laut Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad Ke XIX*. Penerbit Konitas Bambu Bekerja sama Dengan Ecole Francaise Dextrime Orient KITLV Jakarta 2009.
- Lauer Robert M. *Perspectives on Sosial Change, Persepektif Tentang Perubahan Sosial*. Terjemahan Alimandan. Penerbit Bina Aksara Jakarta. 1989
- Loeb Edwin M. *Sumatra Its History and People, Sumatera Sejarah dan Masyarakatnya*. Penerbit Ombak Jogjakarta. 2013
- Laur Van J.C. *Indonesia Trade and Society Essays in Asian Social and Economic History*. Terjemahan Perdagangan dan Masyarakat Indonesia Esai-esai tentang Sejarah Sosial dan Ekonomi Asia. Penerbit Ombak Jogjakarta 2018.

- Lombard Denny. *Nusa Jawa Silang Budaya kajian Sejarah Terpadu Bagian II Jaringan Asia*. Diterbitkan oleh Percetakan PT Gramedia Jakarta 1996
- Lubis. Ahmad Nurfadhi. *Ahistory of Islamic Law in Indonesia*. Institut Agama Islam Negeri Press Medan. 2000
- M.A. Manan. *Ekonomi Islam Teori dan Praktek, Islamic Economic Theory And Practice*. Penerbit Intermasa. Jakarta 1992
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Penerbit CV Pustaka Setia Bandung 2011.
- Mahmudin. *Transpormasi Sosial Aplikasi Dakwah Muhammadiyah Terhadap Budaya Lokal*. Disertasi Penerbit Alauddin University Press Makasar 2017.
- Mahyudin al-Mudra. *Redefinisi Melayu Upaya Menjembatani Perbedaan Konsep Kemelayuan Bangsa Serumpun*. Jogjakarta Balai Pengkajian dan Pengembangan Budaya Melayu 2008 hlm 6-14 di cuplik oleh Mugiono dalam *Integrasi Pemikiran Islam dan Peradaban Melayu. Studi Exploratif Historis Terhadap Perkembangan Peradaban Melayu Islam di Nusantra Fase Islam dan Fase Kolonialis* [http//www.neliti.com](http://www.neliti.com) diakses Februari 2018
- Majid Nazori M. *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Refleksi dengan Ekonomi Kekinian*. Pusat Studi Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Ilmu Kesyahihan. Jogjakarta 2003
- Manan MA. *Islamic Economic Theori and Practice Ekonomi Islam Teori dan Praktek*. Penerbit Intermasa Jakarta 1992
- Makmun Abdullah dan kawan kawan. *Palembang Sebagai Kota Dagang dan Industri, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumen Sejarah Nasional, 1984/ 1985*. Jakarta 1984
- *Sistem Ekonomi Tradisional Daerah Sumatera Selatan*. Departemen P dan K Dirjen Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah 1986/1987. Palembang 1986
- *Sejarah Daerah Sumatera Selatan Departemen P dan K*. Bagian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya. Provinsi Sumatera Selatan 1991/1992.

- Maran. Rafael Raga. *Pengantar Sosiologi Politik Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Penerbit Renika Cipta Jakarta 2001
- Marsden William, F.R.S. *Sejarah Sumatera The History Of Sumattra. Mencakup Peran Pemerintahan, Hukum, Adat Istiadat dan Tata Cara Kehidupan Penduduk Lokal. Di lengkapi Deskripssi Tentang Hasil Alam dan Hubungannya Dengan Kekuasaan Politik, Kuno, di Pulau Sumatera*. Penertbit Indoliterasi Bantul Jogjakarta. 2016.
- The History of Sumatera*. Oxfort University Press. Kuala Lumpur Malaysia 1975
- Mashuri. *Perdagangan Lada dan Perubahan Sosial Ekonomi di Palembang 1790-1825*. Thesis tidak diterbitkan pada Universitas Indonesia Jakarta. 1983
- Matthew B. Milles, *Innovation in Education* (Teacher Colege Press Columbia University), New York. 1973
- Meleong. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit Rosda Karya Bandung 1988.
- Menyurat Sultan Abdul Hamid dan *Ekonomi Kedah dalam International Journal of the Malay World and Civilization*. Malaysia 2011.
- M. B. Hendri Onto *Pengantar Ekonomi Mikro Islam* Penerbit Ekonesia Universitas Islam Indonesia. Jogjakarta 2003.
- M.M. Metwally. "A Behavioural Model of An Islamic Firm" dalam *Readings In Micro Economic An Islamic Perspective (Malaysia Longman)*. Malaysia 1992 hlm 131-132 dalam Idri. *Hadits Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi* Penerbit Prenadamedia Group. Jakarta 2015
- M.O Woelders. *Het Sultanadte Palembang 1811-1825* terjemahan HA Bastari Proefschrift Rijks University Leiden 1975.
- Mohammad Anwar Omardin. *Asal Usul Orang Melayu Menulis Semula Sejarahnya dalam Jurnal Melayu* 2011 .
- Muhammad Fauzi haji Yaacob. *Pemesatan dan Motivasi Tradisi Perdagangan dan Perusahaan Melayu Kelantan dalam Niksafiah Karun dan Wan Abdul Kadir Yusuf (Pnyt) Kelantan dalam Perspektif Sosio Budaya*. Suatu Kumpulan Essay Kuala Lumpur Jabatan Pengajian Melayu. Universitas Melayu Malaysia 1985
- Muhammad Koharudin, Muhammad Balwi. *Islam dalam Sejarah dan kebudayaan Melayu*. Malaysia Universitas Teknologi Malaysia (UTM) 2005.

- Muhammad Sharif Chaudhry. *Prinsip dasar Sistem Ekonomi Islam (Fundamental of Islam Economic System)*. Penerbit Prenada Media Group. Jakarta 2016
- Muhammad Sulaiman bin Mohd. Saud Klantan 1900-1940. *Satu Analisis Tentang Pentadbiran Britis, Reaksi dan Implikasi Terhadap Masyarakat Melayu*. Tesis Sarjana Muda Sarjana. Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) 1983
- . *Sistem Ekonomi Berbentuk Feudalistik*. 1983.
- Muhd. Kasturi Nor Bin Abd Azi. *Warisan Kesultanan Melayu Surat Menyurat Sultan Abdul Hamid dan Ekonomi Kedah dalam Seri Internasional Journal Of The Malay Word And Civilizational*. 2011.
- Muhd. Kasturi Nor bin Abd Aziz. 2011 hlm 46 lihat J.M Gullick *Malay Society In The Late Nineteeth Century*. Penerbit Oxford University Press Singapore 1989
- Muhd. Arof Ishak. *The Malay Civilization Kuala Lumpur Persatuan Sejarah Malaysia* 2007.
- Muhd. Kasturi Nor bin Abd Aziz. *Warisan Kesultanan Melayu. Surat Menyurat Sultan Abdul Hamid dan Ekonomi Kedah dalam Seri Internasional Journal of The Malay World and Civilization*. Malaysia 2011
- Mugiono. *Integrasi Pemikiran Islam dan Peradaban Melayu Study Exploratif Historis Terhadap Perkembangan Peradaban Melayu Islam di Nusantara*. Jurnal JIA . 2016
- Muhd. Arof Ishak. *The Malay Civilization Kuala Lumpur Persatuan Sejarah Malaysia* 2007
- Mukarrom Ahwan. *Kerajaan-kerajaan Islam Indonesia* Penerbit Jauhar Surabaya 2010
- Mukhtar. Aflatun 2015. *Kontribusi Nilai-nilai Melayu Islam Terhadap Peradaban Modern di Asia Tenggara*. Proceeding International Seminar 'Malay Islamic Civilization Tradition and Contribution to the Development of Islam at Southeast Asia Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 2015
- Mukmin Muhammad Jamil. *Malaka Pusat Penyebaran Islam di Nusantara* Penerbit Murni Interprise. Kuala Lumpur 1994
- Munadjad Imam. *Membangn Peradaban Ekonomi On Islamic Civilization Menyalakan Kembali Lantera Peradaban Islam yang Sempat Padam* Penerbit Unisula Press Republikata. Tangerang Banten 2010

- Mustofa Abu Bakar. *Peradaban Melayu Penguatan Ekonomi Masyarakat Melayu dalam Pencatutan Ekonomi Global*. <http://teukuuzer.wordpress.com> Januari in uncategorized.2013
- Mustofa Edwin Nasution. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Peberbit Free nada Media Group. Jakarta 2010
- Nabhani an Taqiyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Penerbit Risalah Gusti. Surabaya 2009
- Nakamura Mitsuo. *The Crescent Arises over the Bayan Tree A Study of the Muhammadiyah Movement Javanese Town c,1910s-2010* (Secand Enlonged Edition), Singapore Institut of Southeast Asean Studies (ISEAS) 2012. *Bulan Sabit Terbit di atas Pohon Beringin Study tentang Pegerakan Muhammadiyah di Kotagede sekitar 1910-2010*. Penerbit Suara Muhammadiyah Jogjakarta. 2017
- Nasikun. *Sistem Sosial Indonesia*. Penerbit Raja Grafindo Persada. Jakarta 1995
- Nawiyanto dan Endrayadi. *Kesultanan Palembang Darussalam Sejarah dan Warisan Budayanya*. Penerbit Tarutama. Jember 2016
- Nik Safiah Karim dan Wani Malini Ahmad dalam wikipedia.org my. 2006
- Ningrat Koncoro. *Pengantar Antropologi* cetakan kedua. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta 1965
- Norhasimah Mohd Yasin. *Islamization Malaynization a Study of The Role of Islamic Law In The Economic Development of Malaysia 1969-199*Kuala Lumpur. Malaysia 1996
- Nugroho Irwan Joko. *Majapahit Peradaban Maritim Ketika Nusantara Menjadi Pengendali Pelabuhan Dunia*. Penerbit Yayasan Suluh Nusantara Bhakti Jakarta 2011
- Nurahman dan kawan kawan. *Politik Formalisasi Syari'at Islam dan Fundamentalisasi Kasus Negara Aceh Darussalam*. Direktorat Perguruan Tinggi Islam Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depertemen Agama Republik Indonesia. Jakarta 2002
- Paul. B. Harton Cherter L. Hunt 1990 *Sosiologi* terj. Aminudin Ran edisi keempat Penerbit Erlangga. Jakarta 1990

- Peeters Jeroen. *Kaum Tuo Kaum Mudo Perubahan Religius di Palembang, Sociaal Religieuze verandering in Palembang, 1821-1942* Penerbit INIS. Jakarta 1997
- Pires Tome. *The Suma Oriental of Tome Pires An Account of The East From The Sea to China And The Book Of Francisco Rodrigues Edited By Armando Cortesao & Volume. Terjuma oriental Perjalanan dari Laut Merah ke Cina.* Penerbit Ombak. Jogjakarta. 2015.
- Poesponegoro Marwati Djoened. *Sejarah Nasional Indonesia Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Depan Republik Indonesia 1900-1942.* Penerbit Balai Pustaka. Jakarta 2010
- Pulungan Suyuthi. *Integrasi Pemikiran Islam dan Peradaban Melayu Study Exploratif Historis Terhadap Perkembangan Peradaban Melayu Islam di Nusantara.* Jurnal JIA.
- 2001. *Membangun Tamadun Melayu Malaka Kerjasama Bidang Agama dan Pendidikan.* Proceeding Pada Lokakarya Dunia Melayu Islam Palembang. 2002
- Purwanto Bambang. *From Dusun To Market; Native Rubber Cultivation In Southern Sumatra 1890-1940.* PhD Thesis in School of Oriental and African Studies, Universitas of London, 1992
- *Merajut Jaringan Di tengah Perubahan Komunitas Ekonomi Muslim Di Indonesia.* Jurnal di terbitkan ikhtiar Baru van Hoeve. Diakses Mei 2018.
- Merajut Kebhinekaan dan Kearifan Budaya Bagi Kemajuan dan Kesejahteraan Indonesia.* Pidato Ilmiah disampaikan pada rapat Universitas Gajah Mada Dies Natalis ke-63 Jogjakarta 2012.
- Qaradhawi Yusuf. *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami* Terjemahan Zainal Arifin. Penerbit Maktabah Wahbah Kairo Mesir. 1995.
- Raharjo. M. Dawam. *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa Cendekiawan Muslim.* Cetakan keempat Penerbit Mizan Bandung 1999.
- Rahim Husni. *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang.* Di terbitkan oleh PT Logos Wacana Ilmu. Ciputat Jakarta 1998

- Rasyd Hatamar. *Reposisi Peradaban Melayu Nusantara Pada Peta Peradaban Dunia Islam*. Bunga Rampai Peradaban Islam. ICMI Sum-Sel.2012
- Reid Anthony. *South East Asia in The Age of Commerce 1450-1680. Terjemahan Asia Tenggara dalam Niaga 1450-1680 Jaringan Perdagangan Global*. Z. Leirissa Penerbit Yayasan Obor Indonesia. Jakarta 2015
- Witnesses to Sumatra a Trevelers, Anthology. Sumatera Tempo Doeloe dari Marco polo sampai Tan Malaka*, Penerbit Kmonitas Bambu. Depok Jakarta 2014
- Resink G.J. *Bukan 250 Tahun Dijajah Indonesia History Between The Myths Essays Legal in Legal History and Historical Theory*. Penerbit Komonitas Bambu. Jakarta 1961
- Rianse Usman. *Peran Pemerintahan dan Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Lokal*. Makalah Seminar Nasional 2003
- Ricklefs. M.C. *A History of modelrn Indonesia*. Sejarah Indonesia Modern Terjemahan Darmono Hardjoono. Penerbit Gajah Mada University Press Jogjakarta 2007
- Rivai Vaithzal. *Islamic Economic Ekonomi Syari'ah Bukan Opsi tapi Solusi*. Penerbi Bumi Aksara Jakarta 2009
- Rivai Vithzal dan Didi Buchori. *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tapi Solusi*. Penerbit Bumi Aksara Jakarta 2009.
- R.H.M Akib. *Sejarah Perjuangan Sri Sultan Mahmud Badarudin II*. Balai Perpustakaan Balai Arkeologi Palembang. 1978
- Roelofsz Map Meilink. *Asia Trade on European Influence in Indonesian Archipelago Between 1500 and About 1630*. Terjemahan. Perdagangan Asia dan pengaruh Eropa di Nusantara Antara 1500 dan Sekitar 1630. Penerbit Ombak Jogjakarta 2016.
- Royen J. W. Van. *Depalebangsche Marga enhear Grand en Watterechten* GL Vander Bery Adrianis Boekhandel Lieden 1927.
- Roza Ellya. *Sejarah Tamadun Melayu*. Penerbit Aswaja Presendo Jogjakarta 2016.
- Saifullah. *Sejarah Kebudayaan Islam di Asia Tenggara*. Penerbit Pustaka Pelajar Jogjakarta. 2010

- Samsudin Nur Moenadi. *Jurnal Songket Palembang Atau Zamal Songket* <http://www.channelsatu.com> Selasa 18 Februari 2014.
- Scholten Elsbeth Locher. *Kesultana Sumatera dan Negara Kolonial Hubungan Jambi-Batavia 1830-1907 dan Bangkitnya Imperialisme Belanda*. Banana KITLV Jakarta 2008.
- Schrieke B. J. O. *Penguasa-penguasa Pribumi*. Penerbit Bharata Jakarta. 1974
- Seno dan Hassanadi. SS. *Perkembangan Pendidikan Islam di Kota Palembang 1925-1940*. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Balai Pelestarian Nilai Budaya. Padang 2014
- Sevenhoven. JL. Van. *Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang*. Penerbit Bharata Jakarta 1971.
- Shobur Abdul. *Dislokasi Identitas Melayu Islam Pada Era Global Di Palembang*. Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Raden Fatah Palembang 2015
- Setyasari Punaji. *Metode Pendidikan Pengembangan edisi keenam* Penerbit Pranada Media Group. Jakarta 2010
- Sirozi Muhammad dan kawan-kawan. *Bunga Rampai Peradaban Melayu Islam*. Diterbitkan oleh Badan Kajiandan Penerbitan ICMI Sumatera Selatan. Palembang 2012
- Pedoman Penulisan Disertasi* Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Palembang 2018
- Siti Heidi Karmela batik dan tenun cerminan Budaya melayu bagian dari ekonomi dan industri kreatif di kota jambi. *Jurnal ilmiah universitas batang hari jambi* Vol 15 No. 4 thn 2015
- Soemardjan Soeleman Suemadi. *Serangkai Bunga Sosiologi*. Edisi Pertama Yayasan Penerbit Fakultas Ekonomi Unuiversitas Indonesia Jakarta. 1964.
- Soekarno R. *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia tiga*. Penerbit Kanesus Jakarta 1973
- Soleh Buang. *Kearah Pengislaman Kaum Negara*. Dalam Fakulti Undang-undang Universitas Malaya. Makalah Undang-undang Menghormati Ahmad Ibrahim Kuala Lumpur DBP. Malaysia 1988

- Sudono Sukirno. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Penerbit Bina Grafika Jakarta 1981
- Sukardi Ismail. *Madrasah dan Pergolakan Politik di Keresidenan Palembang 1925-1942. Penomena Historis Lembaga Pendidikan Islam di Sumatera Selatan Pada Masa Kolonial Belanda*. Penerbit Tim Idea Press Jogjakarta 2014
- Sultan Abdul Hamid hlm 47. juga J.M Gullick *Malay Society In The Late Nineteenth Century*, Oxford University Press. Singapore 1980
- Sunandar. *Melayu dalam Tantangan Globalisasi Refleksi Sejarah dan Berubahnya Sistem Referensi Budaya*. Jurnal Khatulistiwa- Jurnal of Islamic Studis Sambas. 2015
- Supriyanto. *Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864*. Penerbit Ombak Jogjakarta 2013.
- Steenbrink Karel A. *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke 19*. Penerbit Universitas Indonesia Press. Jakarta 1984.
- Mencari Tuhan dengan Kacamata Barat*. Institut Agama Islam Negeri Jogjakarta 1988.
- Stroomberg J. *Division of Commerce of Department of Agriculture, Industry and Commerce Buiten Zorg Java Hindia belanda 1930*. Penerbit Ipada IRCiSoD, Jogjakarta 2018
- Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis*. Penerbit CV al-Fabeta. Bandung 2014.
- ~~Metode~~ *Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Penerbit al-Febeta Jakarta 2010.
- Sukanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cetakan ke lima Yayasan Penerbit Universitas Indonesia UI Press Jakarta 1977.
- Sunandar. *Melayu dalam Tantangan Globalisasi Refleksi Sejarah dan Berubahnya Sistem Referensi Budaya Dalam Jurnal Khatulistiwa Journal of Islamic Studies Vol 5 No 1 Maret 2015*.
- Supriyanto. *Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864* Penerbit Ombak Jakarta 2013.
- Surya Brata Sumadi. *Metodologi Penelitian Devisi Buku Perguruan Tinggi*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada Raja Wali Press Jakarta 2010.
- Stribbe. D.G. *Encyclopedei Van Nederlansche-Indie Derde Deel's Gravenhage*. Martinus Njihoff. Leiden 1917

- Syarofi. *Songket Palembang Nilai Filosofis Jejak Sejarah dan Tradisi Palembang* Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Palembang 2007
- Syed Hussien Alatas. *The Myth Of The Lazy Native a Study Of The Image Of The Malay Philipines And Javanese From The 16th 20th Century And Its Function In The Ideology Of Colonial Capitalism* (London Ronteedge 1997) Dalam Erwiza Irman. *Menguak Sejarah Timah Bngka-Belitung* Penerbit Ombak. Jogjakarta 2009
- Yatim Badri. *Sejarah Peradabab Islam Dirasah Islamiah II*. Penerbit Raja Grafindo Persada Jakarta 2010
- Takari Muhammad. *Adat dalam Peradaban Melayu*. Jurnal Program Studi Etnomusikologi FIB Universitas Sumatera Utara dan Majlis Adad Budaya Melayu Indonesia. Diakses Mei 2018.
- Tenas Effendy. *Pemakaian Ungkapan dalam Upacara Perkawinan orang Melayu* Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu. Jogjakarta 2004
- Tenas Effendi. Dalam Muhammad Takari *Adad dalam Peradaban Melayu* Jurnal.
- Thomson John B. Paul Recored. *Hermenueti and atahiman Sceince Essay on Language Action and Interpretaken*. University Press Cambredge 1981
- Udin Syaefuddin Sa'ud. *Innovasi Pendidikan cetakan ke tujuh*. Penerbit Alfabeta Bandung 2004.
- Undang-undang Simbur Cahaya yaitu Undang-undang yang di Turut di dalam Haluan Negeri Palembang*. Departemen P dan K Balai Arkiologi Palembang. Pusat penelitian Arkiologi Nasional. Palembang.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 18 tahun 2002 *Tentang sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*
- Uqbah Iqbal. *Sejarah Perkembangan Ekonomi Semenanjung Melayu dari Sifat Ekonomi Masyarakat Melayu Pra Kolonial*. Pusat Rangkaian Sejarah Politik Strategi Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan. UKM 4360 Bangi Selangor email uqbah@siswaykmedu.my diakses Januari 2020.
- Vaithzal Rivai. *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tapi Solusi*. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta 2009

- Van Sevenhoven. *Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang*. Bhratara Jakarta 1997
- Veith. P.J 1867. *Aardrijkskundige Woordenboek Van Nederlandsch Indi*. Amsterdam P.N Van Java Government gazette sabtu juli 1812.
- Wargadalam Farida R. *Perebutan Kekuasaan di Kesultanan Palembang*. Disertasi Universitas Indonesia Kepustakaan Populer Gramedia. Jakarta 2017
- Wargadalem Farida R. *Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik (1804 - 1825)*. Kepustakaan Populer Gramedia Bekerjasama Dengan Ecole Francaise d'Extreme Orient. Jakarta 2017
- W.E Maxell. *The Law And The Customs of The Malays With Reference of The Tenure of Land*. Journal of The Straits Branch of The Royal Asiatic Society No XIII Juli 1884 hlm 123 Cf M. B Hooker Reading In Malay Adats Laws Singapore tp 1970
- Wijoyo Kunto. *Dinamika Sejarah Umat Silam Indonesia*. Penerbit Mata Bangsa Jogjakarta 2017
- *Identitas Politik Umat Islam*. Penerbit IRCiSoD Jogjakarta. 2018
- Winstedt. *The Malays a Cultural History*. Kelly And Walsh Singapore 1947.
- Wolters O.W. *Early Indonesian Commerce A Study of The Origins of Sriwijaya* di Terbitkakan oleh Corwill University. Penerbit Komonitas Bambu Depok 2017
- *Kebangkitan dan Kejayaan Sriwijaya abag ke III-VII*. Penerbit Komonitas Bambu Depok 2017
- Yusuf Qadardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam. Daurul qiyam wal Akhlag fil Ighshadil Islami* Maktabah Wahbah Kairo Mesir. 1995 terj Zainal Arifin, Dahli Husein Penerbit Gema Insani Press. Jakarta 1997
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Penerbit Sinar Grafindo Jakarta 2009
- Zet Mustika. *Budaya Lokal Melayu dan Perubahan Peradaban Universal Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi*. P K SBE Fak. Ilmu-ilmu Sosial Universitas Padang 2012.
- *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950*. Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta 2003

Mengagas Zona Ekonomi Dunia Melayu Beberapa Catatan Berdasarkan Tilaah Sejarah Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Zulkifli P. *Ulama Sumatrra Selatan Pemikiran dan Peranannya dalam Lintasan Sejarah*, Penerbit Universitaas Sriwijaya. Palembang 1999

Jurnal

Alfred Otara, Innovation; *As\ Strategi for Survival of Education Organizations*, Jurnal Internasional volume 2 No 9: September 2012, diakses dari [www.aijcrnet.com/journals/vol2no9 September../20 pdf](http://www.aijcrnet.com/journals/vol2no9%20September..%20pdf). Rabu 27 April 2020.

Andaya Leonardy. *The Search Oer Origins of Melayu Jurnal of Southest Asian Studies* 32.(3) Oktober 2001. PPS315-330

Adil Muhammad. *Dinamika Pembaharuan Hukum Islam di Palembang Mengurai isi Undang-undang Simbur Cahaya*. Nurani Vol 14 No 2. Desember 2014.

De Jong, J.P.J.& D.N.den Harton. *Determinanten van Innovatief gedrag:een onderzoek onderkenniswekers inhet MKB (Dererminants of innovative behaveour: an investigation among knowlidge warker in SMEs), gedrak & Organisatie*,18 (5). 235-1259 2005. Diakses dari *ondernemerchap pantein. Nl/pdf-ez/h200820,pdf*. Rabu 22 April 2020Pukul 14.00

Efendi Thennas. *Jurnal dalam Jilin Syahrial Muhammad Takari, Program Studi Etno Musikologi FIB USU dan Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia*

Elly Roza. *Internalisasi Nilai Islam dan TamadunMelayu Terhadap Perilaku SosialOrang Melayu Riau*. Jurnal Toleransi;Media Komonikasi Umat Beragama, vol 6,No 1 Januari-Juni 2014

Farida R Wargadalam. *Perekonomian Kesultanan Palembang Abad XVII-XIXI 2012*

Herlina. *Islam dan Pengaruhnya dalam Peradaban Melayu*. Lecturer of librery of Faculty of Adab and Islamic Culture Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.di akses september 2019.

[https// sumut.kemenag.go.id](https://sumut.kemenag.go.id), diakses pda Rabu 27 Apri 2020 pukul 14 00

- [http// perencanaan/pdn.ac.id/kajian/ perencanaan pembangunan Nasional pdn](http://perencanaan/pdn.ac.id/kajian/perencanaan_pembangunan_Nasional_pdn) diakses Februari 2019.
- [https//www.gurupendidikan.co.id/2 pengertian industri menurutparaahli](https://www.gurupendidikan.co.id/2_pengertian_industri_menurutparaahli). Diakses 9 April 2019.
- [https//www.academina.edu/4776435/Idiologi dalam sistem ekonomi](https://www.academina.edu/4776435/Idiologi_dalam_sistem_ekonomi). diakses Mei 2019
- Perkuliahan Tatap Muka oleh Prof DR. Bambang Purwanto diakses Oktober 2018. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Darsono. *Kepemimpinan Transpormatif Nasional*. Jurnal STIE Dharma Putra-smg.co.id. Diakses November 2018.
- Rochmiatun Endang. *Perubahan Ekonomi Perdagangan Peraraban Islam di Palembang Abad ke XVII-XIX M Telaah atas naskah-naskah Kontrak Kesultanan Palembang*. Fakultas adab UIN Raden Fatah Palembang.
- Chandra Ryllian. *Islam dan Warisan Kesenian Kesultanan Palembang Darussalam*. Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang. 2018
- Deaklehlika Hasbullah. *Islam dalam Budaya Lokal, Potret Budaya Melayu*. UIN Syarif Kasim Riau Jurnal Melayu 77@gmail.com diakses 2019.
- Mugiono. *Intergrasi Pemikiran Islam dan Peradaban Melayu dan Ekspolartif Historis Terhadap Pembangunan Melayu di Nusantara*. Jurnal JIA 2016 tahun ke XVII.
- Mukhtar Aflatun. *Kontribusi Nilai-niali Melayu Islam Terhadap Peradaban Modern di Asia Tenggara. Proceeding Internasional Seminar Malay Islamic Civilization Tradition and Contribusion to the Developmen of Islam at South east Asia*. Academic Center UIN Raden Fatah Palembang. 2015
- Wargadalam. Farida R. *Konflik Kepemimpinan di Kesultanan Palembang (1812-1818)*. Disampaikan pada Seminar Nasional di RRI Sumsel 22 Oktober 2012.
- *Perekonomian Kesultanan Palembang Abad ke XVII hingga awal Abad ke XIX*. Dosen FKIP Universitas Sriwijaya. 2012.
- Pulungan Suyuthi. *Membangun Tamadun Melayu Islam Kerjasama di Bidang Agama dan Pendidikan Proceeding pada Lokakarya Dunia Melayu Islam Palembang*. 2011.

Purwanto Bambang. *Merajut Jaringan di Tengah Perubahan Kemonitanas Ekonomi Muslim di Indonesia Pada masa Kolonial*. Terdapat dalam buku tentang Islam di Asia Tenggara Ikhtiar Baru Van Hoeven.

----- *Merajut Kebhenekaan dan Kearifan Budaya bagi Kemajuan dan Kesejahteraan Indonesia*. Pidato disampaikan pada Rapat Universitas Gajah Mada dalam Rangka Peringatan Dies Natalis ke 63. Yogyakarta. 2012.

----- *Menelusuri akar Ketimpangan dan Kesempatan Baru. Catatan Tentang Sejarah Perkebunan Indonesia*. <http://sejarah.fib.ugm.ac.id> diakses 2019.

Saeri M. *Karakteristik dan Permasalahan Selat Malaka Jurnaal Transional vol 4 no 2*. Februari 2013.

Subroto K. *Negara Islam di Sumatera 840-1903 Lembaga Kajian Syamina Bekerja Mencegah Kezaliman*. Edisi November 2017.

Nijhoff M. *Undang-undang Malaka*. 1976.

Arsip Nasional

ANRI Bundel Palembang No 62. 7. *Java Government*.

ANRI Bundel Palembang No 62. 2 No 62. 7 *Java Goevernment Gazetta*

ANRI Bundel Palembang No. 62.2 Penulis 1918.182

ANRI Bundel Palembang No 47.6 No 62.2 *Veth 1869:654*

ANRI Bundel Palembang No 62.2 *Veth 1869: 654*

ANRI Bundel Palembang No 49 *Veth 162-163*

ANRI Bundel Palembang No 19.

ARNAS. *Laporan Tahunan 1836-1838. 13-2 Lasitluan catatan kaki*.

ARNAS. *Laporan Tahunan 1836-1838.13-2 Gersens 1860:444*

ARNAS. *Laporan Tahunan 1860:444-6 De Sturler1843:121. KITL II 590 B:37*

ARA. 2.10.01.3075. *Lajoran Krusman*.

ARA. 2.10.01.3075. *Laporan Krusman 13 De Strurler 1843: 123*

ARA 2. 10.01.3075

KITL. H. 2051 996:7

KITL V. H. 1051. 96

Sumber Internet

<http://www.neliti.com> diakses Februari 2018

http// www ar itb ac.id/wdp/ diakses pada bulan April 2018.
http/www.google.co.my diakses 29 Juni 2019.
http//wikipedia.org diakses Juli 2019
http//www.academia.edu Teori Transformasi Konflik diakses
November 2019.
http//jagokata.com Arti Kata Tradisi diaskes Januari 2020
http//www.seputarpengetahuan.co.id diakses Januari 2020
http//www.kompasiana.com diakses Januari 2020
http//id.m.wikipedia.org wikipedias diakses Januari 2020
http//kbbi.web.id sistem diakses Januari 2020
http//id.m.wikipedia.org wikis diakses Januari 2020
http//kbbi.web.id.nilai diakses Januari 2020
http//pendekarjawawordpress.com diakses Januari 2020
http//dm.wikipedia.org.wikip diakses Januari 2020
http//brainly.co.id diakses Januari 2020
http//www.pengertianmenurutparaahli.net diakses 10 Februari
2020
http//kbbi.web.id.inovasi diakses Februari 2020
http//teukuuzer.wordpress.com/2013/01.118 peradaban
melayu diakses Februari 2020
http//www.channelsatu.com.peluang inspirasi usaha diakses
Februari 2020
http//teukuzerwordpress.com/2013/01/18/peradabanmelayu-
penguatanekonomi-masyarakat-melayu dalam pengaturan
ekonomi global. diakses Februari 2020

CURRICULUM VITAE

Nama : Dr. Hoirul Amri ME.Sy
Tempat/tgl Lahir : Kuang Dalam 12 Mei 1966.
NIDN : 0212056605
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan/ Jabatan : Dosen/ Lektor.
Jabatan : Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah
Palembang
Instansi Asal : Fakultas Agama Islam UM Palembang
Alamat Kantor : Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 ulu
Palembang
Tlp : 0711513022
Fax : 1711513078.
Web : www.um-palembang.ac.id
Nomor HP : 0813 1605 4868
Email : hoirulamri1966@gmail.com
Alamat Rumah : Jln SH Wardoyo Lrg Nirmala RT 23 No.10
Kelurahan 7 Ulu Kec SU 1 Palembang,
Nama Ayah : H. Muhammad Hatta. Bin Aman.
Nama Ibu : Hj. Humsilah Bin Zaiwawi.
Nama Isteri : Ir. Rosmalina
Nama Anak : 1. Aisyah Dwi Septiani;
2. Aulia Rahmawati S.Pd
3. M. Din Rahmadi;
4. Atika Farras Dinna

Riwayat Pendidikan :

- SD Negeri Desa Kuang Dalam Tamat Tahun 1980
- MTs Negeri Saka Tiga Tamat Tahun 1983
- MAN Palembang II Tamat Tahun 1986
- Strata 1, Fakultas Syariah Jurusan Pidana dan Perdata Islam, Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tamat Tahun 1993
- Strata 2 PPS Master Hukum Islam Konsentrasi Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tamat Tahun 2014

- Strata 3 PPS Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2017

Riwayat Pekerjaan

- Tahun 1989-1996 Guru di Mts dan MA Darul Ulum I ulu Palembang
- Tahun 1993-1999 Guru Agama Islam SMP Bina Jaya Kertapati Palembang
- Tahun 1996-2007 Guru Agama Islam SMP/ SMA Darul Aitam 14 ulu Palembang
- Tahun 1997-2000 Kepala MTS Miftahul Jannah Kuang Dalam (OI)
- Tahun 1996-1999 Dosen Luar Biasa Fakultas Syariah IAIN Raden Patah Palembang.
- Tahun 2000-2017 Dosen Luar Biasa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdi Nusa Palembang
- Tahun 1996-1999 Dosen Luar Biasa Fakultas Agama Islam UM Palembang
- Tahun 2014- Sampai sekarang Dosen Tetap Yayasan UM Palembang
- Tahun 2000- Sampai sekarang Dosen Luar biasa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Palembang
- Tahun 2010- Sampai sekarang Dosen Luar biasa di Fakultas Pertanian UM Palembang

Karya Ilmiah.

1. Model Pengelolaan Fiskal Rasul SAW dalam Konteks Pengelolaan Fiskal Kota Palembang. Hibah Kemenristek Dikti 2017. ISSN 2548-7523. E. ISSN 2613-8956.
2. Kelemahan Sistem Ekonomi Kafitalisme Menurut Muhammad Sharif Chudhary dalam Karnyanya Fundamental of Islamic Economic Sistem. Jurnal Ekonomi Sharia. Vol. 2 Februari 2017: ISSN:2461-002X
3. Kontribusi Pemikiran Ekonomi Abu Hasan Al-Mawardi. Jurnal Economica Shria Volume 2 No.1 Edisi Agustus 2016. STEBIS IGM Prodi Ekonomi Syari'ah.
4. Kebijakan Moneter Awal Pemerintahan Islam dalam Pembangunan Perekonomian (Studi analisis pada masa Rasul SAW Sahabat) Hibah Penelitian Internal UM Palembang 2016.

5. Membangun Kesadaran Masyarakat Pinggiran Melalui BMT.
Jurnal Muqtashid Volume 1 No. 02 Edisi September 2016.
ISSN: 2407 3643